



PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero)

Driving Performance Amidst Challenges

Mendorong Kinerja di Tengah Tantangan





Driving Performance Amidst Challenges

Mendorong Kinerja di Tengah Tantangan

Di tengah situasi yang penuh tantangan dan ketidakpastian, sebagai akibat dari merebaknya pandemi Covid-19, BKI sebagai satu-satunya badan klasifikasi kapal di Indonesia, mampu mencatat hasil yang cukup memuaskan. Hal ini membuktikan komitmen BKI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dalam kondisi apapun. BKI menyadari besarnya tanggung jawab yang dipikul sebagai bagian dari ekosistem transportasi laut dan dengan demikian turut mendukung kegiatan perekonomian nasional. Sampai kapanpun, komitmen BKI untuk menjalankan tanggung jawabnya ini tak akan tergoyahkan di tengah tantangan.

In the midst of a challenging situation and uncertainty, as a result of the outbreak of the Covid-19 pandemic, BKI as the only ship classification body in Indonesia, was able to record satisfactory results. This prove the commitment of BKI in carrying out its duties and responsibilities optimally under any circumstances. BKI is aware of the huge responsibility borne as part of the marine transportation ecosystem and thus in supports of national economic activities. Until forever, BKI's commitment to carry out its responsibility will not be deterred in the midst of challenges.

KESINAMBUNGAN TEMA

Laporan Tahunan 2017 - 2020



MENUJU PERUSAHAAN UNGGUL HEADING TOWARDS EXCELLENCE

Perseroan siap untuk memperkuat posisi kepemimpinannya dalam industri jasa klasifikasi, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional. Perseroan yakin dengan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya, maka visinya untuk menjadi kelompok perusahaan penyedia jasa pemastian terintegrasi kelas dunia, dapat terwujud dengan meningkatkan kualitas layanannya dan keunggulan dalam perannya.

The Company is poised to strengthen its leadership in the classification services industry, not only at national level but also at international level. The Company is assured that it has the expertise and experience to materialized its vision to become a world class integrated assurance group by improving its services and to excel in its role.

MEMPERTAHANKAN KINERJA UNGGUL MAINTAINING EXCELLENT PERFORMANCE

Bagi Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), tahun 2018 kembali menjadi tahun dengan catatan kinerja yang menggembirakan. Kesuksesan ini tidak lepas dari strategi yang diterapkan oleh Perseroan dalam menyikapi dinamika dan tantangan dunia usaha. Ke depannya, BKI akan terus mencermati perkembangan yang terjadi dalam industri maritim agar dapat menyusun strategi yang sesuai dengan situasi dan kondisi terkini dan membuat Perseroan mampu mempertahankan kinerja unggul.

For the PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), the year 2018 has been a year with a record of encouraging performance. This success is inseparable from the strategies implemented by the Company in addressing the dynamics and the challenges of the business world. Going forward, BKI will continue to carefully observe the developments in maritime industry in order to develop strategies able to cope with the current situation and condition and to enable the Company in maintaining an excellent performance.

KONSOLIDASI LINI USAHA UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

CONSOLIDATING OUR LINES OF BUSINESS FOR BETTER PERFORMANCE

Di tengah perubahan dunia yang terjadi begitu cepat, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menyadari perlunya menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi berbagai tantangan yang lahir dari perubahan zaman. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh BKI dalam hal ini adalah konsolidasi lini usaha dengan tujuan meningkatkan kinerja usaha. Diharapkan, langkah strategis ini dapat memperkokoh posisi BKI di tengah persaingan dunia usaha dan terus memberi kontribusi nyata bagi Indonesia.

Against the backdrop of the world's rapid changes, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) acknowledged the need to develop the right strategy to cope with the challenges arising due to the changes. One of the strategic undertakings taken by BKI in this case is consolidating our lines of business with the aim of improving our business performance. This strategic step is expected to strengthen the position of BKI in the midst of business competition and continue to make a real contribution to Indonesia.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

- 4 Daftar Isi
Table of Contents

6 IKHTISAR DATA KEUANGAN FINANCIAL HIGHLIGHTS

- 8 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
10 Ikhtisar Kinerja Operasi
Operation Highlights

12 LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT

- 14 Laporan Dewan Komisaris
The Board of Commissioners' Report
20 Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners
28 Laporan Direksi
The Board of Directors' Report
36 Profil Direksi
Profile of the Board of Directors

40 PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE

- 43 Informasi umum
General Information
45 Riwayat Singkat Perseroan
The Company's Brief History
46 Penghargaan
Awards
48 Peristiwa penting
Significant Event
52 Jejak Langkah
Milestones
54 Jaringan Kantor PT Biro Klasifikasi Indonesia
Office Network of PT Biro Klasifikasi Indonesia
56 Peta Jaringan Kantor
PT Biro Klasifikasi Indonesia
Map of the Office Network of PT Biro Klasifikasi Indonesia
58 Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission and Corporate Culture

- 61 Simbol Perusahaan
Corporate Symbol
62 Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition
62 Kegiatan dan Bidang Usaha
Activities and Business Fields
72 Struktur Organisasi
Organizational Structure
74 Sumber Daya Manusia
Human Resources

80 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

- 82 Tinjauan Umum
General review
83 Tinjauan Kinerja Per Segmen
Performance Review Per Segment
86 Tinjauan Kinerja Keuangan
Financial Performance Overview
94 Prospek Usaha
Business Prospect
94 Kebijakan dan Pembagian Dividen
Dividend Policy and Distribution
95 Informasi Material
Material Information
97 Pemasaran
Marketing
99 Jaringan Kerja Sama
Cooperation Network
103 Teknologi Informasi
Information Technology

112 TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- 114 Dasar Hukum, Prinsip dan Tujuan Penerapan GCG
Legal Basis, Principles and Objectives of GCG Implementation
118 Tujuan Penerapan GCG
The Purpose of Implementing GCG
118 Penilaian terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance

- 122** Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)
- 124** Dewan Komisaris
Board of Commissioners
- 137** Direksi
Board of Directors
- 176** Komite Audit
Audit Committee
- 179** Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee
- 182** Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
- 183** Audit Internal
Internal Audit
- 188** Eksternal Audit
External Audit
- 193** Manajemen Risiko
Risk Management
- 198** Kode Etik
Code of Ethics

206 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- 208** Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility
- 208** Landasan Hukum
Legal Foundation
- 210** Sasaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
The Targets of the Partnership and Community Development Program
- 210** Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Implementation of the Partnership and Community Development Program
- 216** Kegiatan CSR BKI Sepanjang 2020
BKI CSR Activities Throughout 2020

218 LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL STATEMENT





IKHTISAR DATA KEUANGAN

FINANCIAL HIGHLIGHT





IKHTISAR KEUANGAN

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Hasil Usaha Operating Income

(dalam rupiah/in rupiah)

Tahun	2020	2019	2018	2017	2016	Year
Pendapatan	791.835.142.259	908.438.955.359	795.680.209.580	675.832.228.430	720.647.695.789	Revenues
Laba Bruto	320.749.552.836	358.142.383.521	562.700.479.591	443.632.187.357	490.264.164.874	Gross Profit
Laba Usaha	133.023.941.217	150.607.850.373	130.156.598.043	62.825.817.661	7.373.294.903	Operating Incomes
Laba Bersih	100.499.284.090	110.143.164.441	72.897.762.299	32.283.140.389	3.547.557.035	Net Incomes

Posisi Keuangan Financial Position

(dalam rupiah/in rupiah)

Tahun	2020	2019	2018	2017	2016	Year
Jumlah Aset	1.016.459.446.816	947.628.739.154	824.664.735.583	721.202.563.704	718.619.435.880	Total Assets
Jumlah Liabilitas	227.444.441.156	239.876.914.029	212.364.287.025	203.321.518.178	220.553.919.625	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	789.015.005.660	707.751.825.125	613.300.448.558	517.881.004.526	498.065.516.255	Total Equity

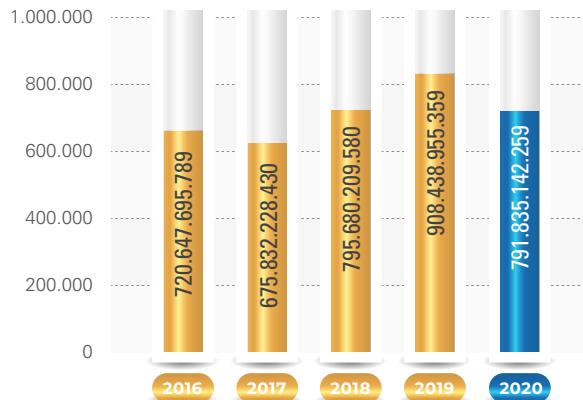
Rasio Keuangan Financial Ratio

(dalam persen/in percent)

Tahun	2020	2019	2018	2017	2016	Year
Likuiditas						Liquidity
Current Ratio (%)	761,16	503,17	436,92	505,79	453,00	Current Ratio (%)
Acid Test Ratio (%)	761,16	503,17	436,92	505,79	453,00	Acid Test Ratio (%)
Kas Rasio (%)	448,77	208,71	137,24	98,79	83,34	Cash Ratio (%)
Modal Usaha terhadap Rasio Aset (%)	58,80	50,26	46,05	42,93	52,68	Working Capital to Asset Ratio (%)
Solvabilitas						Solvency
Jumlah Utang terhadap Rasio	28,83	33,89	34,68	39,26	44,28	Total debt to Equity Ratio
Rasio Operasional (%)	81,57	81,18	83,64	90,70	98,98	Operating Ratio (%)
Rasio Laba Bersih (%)	12,69	12,12	9,16	4,78	0,49	Net Profit Margin Ratio (%)
Rasio Return on Investment (%)	14,54	17,65	8,84	4,48	0,49	Return on Investment Ratio (%)
Rasio Return on Equity (%)	14,64	18,43	11,91	6,23	0,71	Return on Equity Ratio (%)
Aktivitas						Activity
Jumlah Aset Turn Over (x)	0,78	0,96	0,96	0,94	1,03	Total Asset Turn Over (x)
Modal Usaha Turn Over (x)	1,32	1,91	2,09	2,18	1,90	Working Capital Turn Over (x)
Piutang Turn Over (x)	2,90	2,95	2,65	2,90	2,93	Receivable Turn Over (x)
Collection Period (hari/days)	126	124	138	126	125	Collection Period (hari/days)
Ekuitas terhadap Jumlah Rasio Aset (%)	67,74	63,06	65,40	67,33	68,81	Equity to Total Assets Ratio (%)

Pendapatan Revenues

(Dalam Rupiah | in Rupiah)



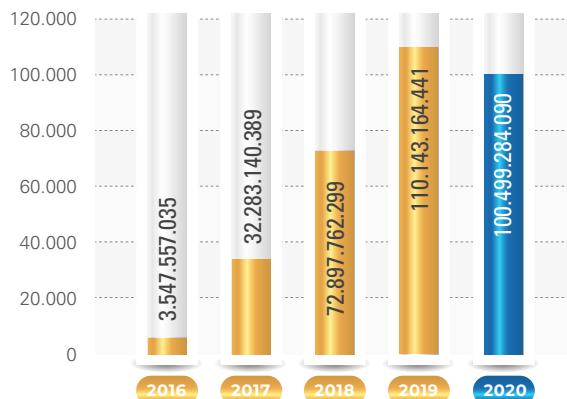
Laba Usaha Operating Incomes

(Dalam Rupiah | in Rupiah)



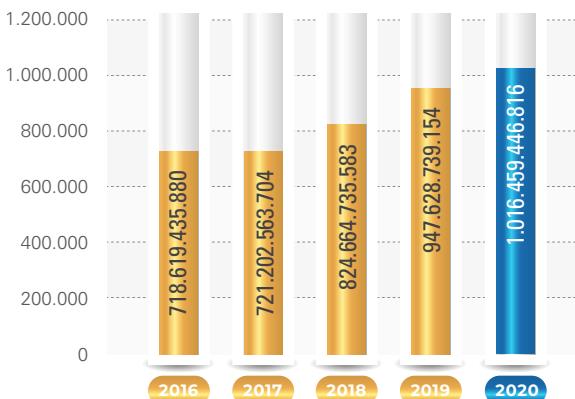
Laba Bersih Net Incomes

(Dalam Rupiah | in Rupiah)



Jumlah Aset Total Assets

(Dalam Rupiah | in Rupiah)



Jumlah Liabilitas Total Liabilities

(Dalam Rupiah | in Rupiah)



Jumlah Ekuitas Total Equity

(Dalam Rupiah | in Rupiah)



IKHTISAR KINERJA OPERASI

OPERATION HIGHLIGHTS

Kegiatan Survei

Survey Activities

(dalam kegiatan/in activity)

No.	Jenis Survei Type of Survey	Realisasi 2020 Realization 2020	Realisasi 2019 Realization 2019	Realisasi 2018 Realization 2018
1.	Survei Pembaharuan Renewal Survey	1.350	1.584	1.554
2.	Survei Tahunan Annual Survey	10.154	9.651	9.108
3.	Survei Antara Intermediate Survey	1.678	1.531	1.416
4.	Survei Pengedokan Docking Survey	5.070	5.264	4.933
5.	Survei Poros Baling-baling Tailshaft Survey	1.737	2.003	1.876
6.	Survei Boiler Boiler Survey	85	100	92
7.	Survei Otomasi Automation Survey	0	0	5
8.	Survei Perpanjangan Extension Survey	144	237	510
9.	Survei Khusus Special Survey	3.153	3.385	3.222
10.	Survei Bersambung Continuous Survey	234	229	242
11.	Survei Penerimaan Kelas BB BB Class Acceptance Survey	549	451	312
12.	Survei Penerimaan Kelas BL BL Class Acceptance Survey	502	564	250
13.	Survei Penerimaan Kelas Kembali Class Reacceptance Survey	949	1.184	1.149
TOTAL		25.605	26.183	24.869

Kegiatan Drawing Approval

Drawing Approval Activity

(dalam kegiatan/in activity)

No.	Kegiatan Drawing Approval Drawing Approval Activity	Realisasi 2020 Realization 2020	Realisasi 2019 Realization 2019	Realisasi 2018 Realization 2018
1.	Lambung & Material Hull & Material	20.429	18.690	14.511
2.	Mesin & Listrik Machinery & Electrical	13.418	12.072	11.382
3.	Statutoria Statutory	4.528	4.058	3.596
TOTAL		38.375	34.820	29.489

Aktivitas Approval, Audit dan Survei Statutory Approval Activity, Audit, and Statutory Survey

(dalam kegiatan/in activity)

No.	Aktivitas Activity	Realisasi 2020 Realization 2020	Realisasi 2019 Realization 2019	Realisasi 2018 Realization 2018
1.	ISM Code – Doc Pre Issued	4	15	14
2.	ISM Code – SMC Pre Issued	97	111	106
3.	ISM Code – Doc Initial Audit	11	14	9
4.	ISM Code – Doc Renewal Audit	14	20	22
5.	ISM Code – Doc Annual Audit	80	95	85
6.	ISM Code – Doc Additional	14	11	15
7.	ISM Code – Doc Appro/Rev	22	24	28
8.	ISM Code – SMC Initial	102	94	90
9.	ISM Code – SMC Renewal	128	164	157
10.	ISM Code – SMC Intermediate	159	166	173
11.	ISM Code – SMC Additional	33	52	55
JUMLAH/TOTAL		664	766	754
12.	ISPS – Pre/Issued	16	22	21
13.	ISPS – Initial	17	21	17
14.	ISPS – Renewal	9	21	25
15.	ISPS – Intermediate	17	14	15
16.	ISPS – Additional	3	7	17
17.	ISPS – Appro/SSP	50	77	29
JUMLAH/TOTAL		112	162	124
18.	MLC – Pre	0	0	26
19.	MLC – Initial	0	0	12
20.	MLC – Approval	0	0	42
21.	MLC - Intermediate	0	0	3
22.	MLC - ADD	0	0	11
JUMLAH/TOTAL		0	0	94
23.	Load Line	12.868	12.806	12.290
JUMLAH/TOTAL		12.868	12.806	12.290
TOTAL		13.644	13.734	13.262



LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT





LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

AGUNG KUSWANDONO
Komisaris Utama
President Commissioner



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) mampu melewati tahun buku 2020 yang penuh tantangan ini dengan baik.

Pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan segenap pemangku kepentingan atas dedikasi dan dukungan yang diberikan kepada Perseroan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Direksi yang bekerja keras dengan penuh komitmen.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, yakni melakukan fungsi pengawasan terhadap Direksi dalam pengurusan Perseroan. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dibantu organ pendukung, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite Nominasi, Remunerasi, dan Sumber Daya Manusia.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, tugas, tanggung jawab dan hak Dewan Komisaris adalah:

1. Melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan;
2. Memastikan dalam kondisi apapun Direksi memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengurus perusahaan sesuai maksud dan tujuan BKI, meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan, menerapkan GCG, melaksanakan RKAP dan Keputusan RUPS, serta bertanggung jawab kepada Pemegang Saham;
3. Memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka menjalankan tugasnya, serta menggunakan saran profesional yang mandiri dan atau membentuk komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Secara umum evaluasi atas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris didasarkan pada

Dear Shareholders and Stakeholders,

Thanks be to God Almighty because of His grace alone and guidance that PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) managed to end the challenging year of 2020 with an encouraging results.

On this occasion, we would like to thank all parties and all stakeholders for the dedication and support for the Company. We also thank the Board of Directors who has worked hard and with full commitment.

Implementation of the Duties of the Board of Commissioners

As the Board of Commissioners, we discharged our duties based on the Company's Articles of Association, namely to carry out the supervisory function on the Board of Directors regarding the management of the Company. In carrying out our duties, we, the Board of Commissioners, is assisted by supporting organs, namely the Secretary to the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Risk Management Committee, the Nomination, Remuneration and Human Resources Committee.

In accordance with the Company's Articles of Association, the duties, responsibilities and rights of the Board of Commissioners are:

1. Supervise and provide advice to the Board of Directors for the benefit of the Company;
2. Ensure that under any circumstances the Board of Directors has the ability to lead and manage the Company in accordance with the purpose and objectives of BKI, improve the efficiency and effectiveness of the Company, implement GCG, implement RKAP and GMS resolutions, and be accountable to the Shareholders;
3. Obtaining the necessary information in order to carry out our duties, as well as using independent professional advice and or forming a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

In general, the evaluation of the implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners is



capaian atas indikator kinerja utama (KPI) yang ditetapkan di awal tahun 2020. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris disampaikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dari penilaian KPI yang dilakukan, Dewan Komisaris telah melaksanakan 100% program kerja yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan berdasarkan keberhasilan Direksi merealisasikan KPI yang telah disepakati bersama antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Kementerian Negara BUMN selaku Pemegang Saham.

Dari penilaian yang dilakukan, realisasi KPI Direksi memperlihatkan hasil yang memuaskan. Total capaian KPI Direksi tahun 2020 mencapai 102,29% dari anggaran, meliputi indikator utama, yaitu *Economic and Social Value for Indonesia, Business Model Innovation, Technology Leadership, Energize Investment, dan Unleashed Talent*.

Dewan Komisaris menyadari dan memahami tantangan yang harus dihadapi Perseroan di masa pandemi Covid-19. Kami memberi apresiasi kepada Direksi telah mengambil langkah strategis yang diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada.

Berdasarkan Surat Wakil Menteri I Kementerian BUMN No. S-53/Wk1.MBU/04/2020 tanggal 28 April 2020 perihal perubahan RKAP 2020 BUMN, Perseroan melakukan revisi RKAP 2020 untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19. RKAP 2020 Revisi tersebut kemudian disahkan melalui Surat Kementerian Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: S-618/MBU/09/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Persetujuan Revisi

based on the achievement of the Key Performance Indicators (KPI) set at the beginning of 2020. The results of the evaluation of the performance of the Board of Commissioners are submitted to shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS). From the KPI assessment carried out, the Board of Commissioners has implemented 100% of the planned work program. Thus, it can be ensured that the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities properly.

Assessment of the Performance of the Board of Directors

Assessment of the performance of the Board of Directors is carried out based on the success of the Board of Directors in realizing the KPIs that have been mutually agreed upon between the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Ministry of State-Owned Enterprises as Shareholders.

From the assessment carried out, the realization of the Board of Directors' KPI shows satisfactory results. The total KPI achievements of the Board of Directors in 2020 reached 102.29% of the budget, covering the main indicators, namely Economic and Social Value for Indonesia, Business Model Innovation, Technology Leadership, Energize Investment, and Unleashed Talent.

The Board of Commissioners recognizes and understands the challenges that the Company must face during the Covid-19 pandemic. We appreciate the Board of Directors for taking the necessary strategic steps to overcome the existing challenges.

Based on the Letter of Deputy Minister I of the Ministry of BUMN No. S-53/Wk1.MBU/04/2020 dated April 28, 2020 regarding changes to the 2020 BUMN RKAP, the Company revised the 2020 RKAP to anticipate the impact of the Covid-19 pandemic. The Revised 2020 RKAP was then ratified through the Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: S-618/MBU/09/2020 dated September 1, 2020 concerning

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Secara keseluruhan Perseroan membukukan laba setelah pajak sebesar Rp100,49 Miliar melampaui anggaran RKAP tahun 2020 sebesar Rp56,86 Miliar atau tercapai 176,74%. Dari sisi kesehatan Perusahaan, total skor yang diperoleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tahun 2020 adalah 86,00, tergolong "Sehat" dengan kategori "AA". Pencapaian tingkat kesehatan Perseroan tahun 2020 masih di atas target RKAP yakni dengan skor "81,50".

Pandangan atas Rencana Bisnis ke Depan

Dewan Komisaris memandang situasi ekonomi tahun 2021 masih dipengaruhi oleh dampak pandemi. Namun Dewan Komisaris meyakini Direksi dan insan BKI mampu menghadapi tantangan ke depan. Penetapan portofolio bisnis Segmen Klas dan Segmen Komersil dengan meningkatkan fungsi *Strategic Business Unit* (SBU) dan BKI Academy menjadi langkah strategis untuk mencapai sasaran Perseroan di tahun 2021.

Dewan Komisaris meminta Direksi menyiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk menyongsong *holding company* Jasa Survei dan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis sebagai dampak dari *holding*.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020 tidak ada perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris hingga 31 Desember 2020 adalah:

1. Agung Kuswandono : Komisaris Utama
2. Dwi Budi Sutrisno : Komisaris
3. R. Harry Hikmat : Komisaris
4. M. Amperawan : Komisaris

Approval of the Revision of the 2020 Company Work Plan and Budget (RKAP) of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Overall, the Company recorded a profit after tax of Rp100.49 billion, exceeding the 2020 RKAP budget of Rp56.86 billion or by 176.74%. In terms of the Company's health, the total score obtained by PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) in 2020 was 86.00, classified as "Healthy" with the "AA" category. The achievement of the Company's health level in 2020 is still above the RKAP target with a score of "81.50".

Outlook on the Future Business Plan

The Board of Commissioners views that the economic situation in 2021 will still be affected by the impact of the pandemic. However, the Board of Commissioners believes that the Board of Directors and BKI personnel are capable of facing the challenges ahead. The determination of the Class Segment and Commercial Segment business portfolios by increasing the functions of the Strategic Business Unit (SBU) and BKI Academy is a strategic step to achieve the Company's targets in 2021.

The Board of Commissioners has requested the Board of Directors to prepare superior human resources to meet the Survey Services holding company and anticipate changes in the business environment as a result of the holding.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Throughout 2020 there was no change in the composition of the members of the Board of Commissioners. Thus, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2020 is:

1. Agung Kuswandono : President Commissioner
2. Dwi Budi Sutrisno : Commissioner
3. R. Harry Hikmat : Commissioner
4. M. Amperawan : Commissioner

Penutup

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat, demikian laporan pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020. Kami menyadari masih banyak hal yang harus menjadi perhatian demi pelaksanaan fungsi pengawasan yang lebih baik di masa depan. Hal tersebut tidak terlepas dari kompleksitas tantangan yang dihadapi Perusahaan terutama di masa pandemi.

Dewan Komisaris mengajak semua pihak dan Pemangku Kepentingan untuk bersama-sama menjadikan PT BKI sebagai perusahaan jasa survei kelas dunia. Semoga kerja sama yang telah terjalin sampai dengan saat ini dapat lebih ditingkatkan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris menjadi lebih baik lagi pada masa mendatang.

Closing Remarks

Dear Shareholders and Stakeholders, thus is the supervisory report of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2020. We realize that there are still many issues that need to be addressed to better the implementation of supervisory functions in the future. This is inseparable from the complexity of the challenges faced by the Company, especially during the pandemic.

The Board of Commissioners invites all parties and stakeholders to jointly develop PT BKI into a world-class survey service company. Hopefully the cooperation that has been established so far can be further improved so that the implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners will be even better in the future.

Jakarta, Juni 2021
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Atas nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioners



Agung Kuswandono
Komisaris Utama
President Commissioner



DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS



M. Amperawan
Komisaris/Commissioner

Dwi Budi Sutrisno
Komisaris/Commissioner

Raden Harry Hikmat
Komisaris/Commissioner

Agung Kuswandono
Komisaris Utama/President Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS

PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS



AGUNG KUSWANDONO

Komisaris Utama/President Commissioner

Agung Kuswandono, Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun, lahir di Banyuwangi, 29 Maret 1967 berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor pada tahun 1990 dan menempuh pendidikan *Master of Economic* di Colorado of University.

Agung Kuswandono, an Indonesian citizen, 53 years old, born in Banyuwangi, March 29, 1967, domiciled in Jakarta. He completed his education at the Faculty of Forestry, Bogor Agricultural University in 1990 and pursued his Master of Economic education at the Colorado of University.

Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama BKI berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No: SK-17/MBU/01/2019 setelah berkarier di Direktorat Bea dan Cukai sejak tahun 1992 hingga tahun 2011. Sejumlah posisi pernah diembannya di antaranya sebagai Pelaksana Dirjen Bea dan Cukai - Direktorat Pabean (1992), Kepala Seksi Tarif A.I Dirjen Bea dan Cukai - Direktorat Tarif dan Harga (Juli 1997), Kepala Seksi Klasifikasi I Dirjen Bea dan Cukai - Direktorat Teknis Kepabeanan (Maret 1998-Desember 2001), Pelaksana Dirjen Anggaran - Kantor Wilayah II Dirjen Anggaran Medan - Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Sibolga - Seksi Perbendaharaan (Januari 2002), Kepala Subdirektorat Kemudahan Ekspor II Dirjen Bea dan Cukai - Direktorat Kepabeanan Internasional - Sub Direktorat Kemudahan Ekspor II (Oktober 2003), Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional II Dirjen Bea dan Cukai - Direktorat Kepabeanan Internasional – Sub Direktorat Kerjasama Internasional II (November 2006), Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tipe A Khusus Soekarno Hatta - Dirjen Bea dan Cukai Bandung (Desember 2006), Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tipe A Khusus Soekarno Hatta - Dirjen Bea dan Cukai Banten (Januari 2007), Kepala Kantor Wilayah VII-Ditjen Bea dan Cukai Jakarta I (Juli 2007), Kepala Layanan Utama Tipe A Tanjung Priok Dirjen Bea dan Cukai (Juli 2007), Direktur Teknis Kepabeanan Dirjen Bea dan Cukai (Februari 2008), Direktur Fasilitas Kepabeanan Dirjen Bea dan Cukai (Maret 2010), Dirjen Bea dan Cukai (April 2011), Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Juni 2013), Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Mei 2015-2019), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Desember 2019-sekarang), Komisaris Utama merangkap Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (Januari 2019-sekarang).

He was appointed as a President Commissioner of BKI on basis of SOE Ministerial Decree No: SK-17/MBU/01/2019 after having served in the Directorate of Customs and Excise from 1992 to 2011. He has held a number of positions including Customs Officer Director General of Customs and Excise- Customs Directorate, Head of Section of Excise Tariff A1 Section-Tariff and Prices Directorate (July 1997), Head of Section of Classification I Directorate of Customs (March 1998-December 2001), Officer Directorate of Budget- Regional Office II Medan-State Treasury Office Sibolga-Section of Treasury (January 2002), Head of Subdirectorate of Export Facilities II-Directorate of International Customs (October 2003), Head of Subdirectorate International Cooperation II-Directorate of International Customs (November 2006), Head of Customs Services Soekarno-Hatta Type A1 Special-Directorate General of Customs and Excise Banten (January 2007), Head of Regional Office VII-Directorate General of Customs and Excise Jakarta I (July 2007), Head of Tanjung Priok Main Customs and Excise Service Office Type A Directorate General of Customs and Excise (July 2007), Technical Director of Customs Affairs of Directorater General of Customs and Excise (February 2008), and Director of Customs Facilities (March 2010) before having been trusted to become the Director General of Customs and Excise. In 2013, he was appointed as a Commissioner of Bank Tabungan Negara (Persero). In 2015, he was entrusted with the position of Deputy for the Coordination of Natural Resources and Services at the Ministry of Coordinating for Maritime Affairs, and again entrusted to hold the position of Secretary at the Ministry of Coordinating for Maritime Affairs (2019-present). He was also serves as Chief of Nomination, Remuneration dan Human Capital Committee BKI.





M. AMPERAWAN

Komisaris/Commissioner

M. Amperawan, Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun, lahir di Tanjung Karang 31 Mei 1966, berdomisili di Jakarta. Beliau diangkat sebagai Komisaris BKI berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No: SK-17/MBU/01/2019. M. Amperawan menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadipayana pada tahun 1992 dan menyelesaikan program pendidikan S2 Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada tahun 2003.

M. Amperawan, an Indonesian citizen, 54 years old, born in Tanjung Karang May 31, 1966, domiciled in Jakarta. He was appointed as the Chief Commissioner of BKI pursuant to the SOE Ministerial Decree No: SK-17/MBU/01/2019. M. Amperawan completed his undergraduate education at the Department of Management Faculty of Economics, Krisnadipayana University in 1992 and completed his Master of Public Administration and Policy education program Faculty of Social and Political Science at the University of Indonesia in 2003.

Beliau berkarier di Kementerian Sekretariat Negara dan pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Anggaran Pembangunan Biro Anggaran I Sekretariat Negara RI (2000-2005), Kepala Bagian Program dan Anggaran II Biro Perencanaan Sekretariat Negara RI (2005-2011), Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet RI (2011-2015), Plh. Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet RI (24 Juli 2018 – 22 September 2018), Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet (2015 – sekarang), Komisaris merangkap Ketua Komite Audit PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (2019-sekarang).

Beliau mendapat piagam penghargaan Satyalencana Karya Satya 10 tahun berdasarkan Keputusan Presiden Megawati Soekarno Puteri 13 Agustus 2004, piagam Satyalencana Karya Satya 20 Tahun Berdasarkan Keputusan Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono 11 Agustus 2014, dan Satyalencana Wira Karya berdasarkan Keputusan Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono 3 Oktober 2014.

Pada tahun 2004, beliau meraih peringkat pertama Diklat Kepemimpinan Tingkat III BPS 2004 dan peringkat 1 Diklat Perjenjangan Administrasi Umum, Setneg RI 1996.

He had a career in the Ministry of State Secretariat and served as a Head of Subsection Development Budget, Section of Budget I of the Secretariat of the State (2000-2005), a Head of the Program and Budget Section II Planning Bureau (2005 -2011), Head of Planning and Finance of Deputy for administration of the Secretariat of the Cabinet (2011-2015), Act. Deputy for Economic Affairs of the Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia (July 24, 2018 - September 22, 2018), Expert Staff for the Economy and People's Welfare of the Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia (2015 - present). Currently trusted as Commissioner and as Chief of the Audit Committee of PT Biro Klasifikasi Indonesia (2019 - present).

He was awarded Satyalencana Karya Satya X years Certificate of Merit on basis of President of Indonesia Megawati Soekarno Puteri decree in August 13, 2004, Saytalencana Karya Satya XX years on basis of President of Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono decree in August 11, 2014. He also received Satyalencana Wira Karya Certificate of Merit based on President of Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono decree in October 3, 2014.

M. Amperawan was ranked 1st in BPS Level III Leadership Training in 2004 and 1st in General Administration Education and Training, Secretary of the cabinet 1996.





RADEN HARRY HIKMAT

Komisaris/Commissioner

Raden Harry Hikmat adalah warga negara Indonesia, berusia 57 tahun, lahir di Denpasar, Bali, 9 Juli 1963, dan saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Statistika di Institut Pertanian Bogor (IPB), dan melanjutkan studi di Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, serta meraih gelar Doktor Sosiologi Antropologi di Universitas Padjadjaran. Berdasarkan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia nomor SK : SK-15/MBU/01/2018 tanggal 16 Januari 2018 beliau diangkat sebagai Komisaris.

Raden Harry Hikmat, Indonesian citizen, 57 years old, born in Denpasar, Bali, July 9, 1963, and currently domiciled in Jakarta. Graduated with a Bachelor's Degree in Statistics at the Bogor Agricultural Institute (IPB), and continued his studies in the Master Program in Social Welfare at the University of Indonesia, and earned a Doctor of Anthropology Sociology at Padjadjaran University. Based on the Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia No. SK: SK-15/MBU/01/2018 dated January 16, 2018 he was appointed as Commissioner.

Beliau pernah menjabat beberapa posisi di antaranya Kasubag Penyusunan Program Pembangunan Wilayah III pada Biro Perencanaan Setjen Depsos Jakarta (1999-2004), Kepala Sub Direktorat Bantuan Usaha Kelompok pada Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin Dirjen Banjamsos Depsos (2004-2006), Kepala Bagian Analisis Kebijakan Perencanaan Kesejahteraan Sosial pada Biro Perencanaan Setjen Depsos (2006-2009), Direktur Pelayanan Sosial Anak pada Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos (2009-2011), Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kemensos (2011-2012), Staf Ahli Bidang Dampak Sosial Kemensos (2012-2014), Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (2016). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (2020-sekarang) dan dipercaya menjadi Komisaris merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia BKI (2018-sekarang).

Beliau juga aktif sebagai dosen Permodelan Sosial dan Analisis Kebijakan Sosial Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Fisip Universitas Indonesia sejak tahun 2010-sekarang.

He once served in several positions including Head of Subdivision of Regional Development Program III of the Planning Bureau of the Secretariat General of the Department of Social Affairs (1999-2004), Head of Sub-Directorate of Group Business Assistance at the Directorate of Social Assistance of Dirjen Banjamsos Ministry of Social Affairs (2004-2006), Head of Section of Social Welfare Planning Policy Analysis at the Ministry of Social Affairs, Secretariat General Planning Bureau (2006-2009), Director of Child Social Services at the Director General of Social Services and Rehabilitation of the Ministry of Social Affairs (2009-2011), Head of Social Welfare Education and Research Agency (2011-2012), Expert Staff for Social Impact of the Ministry of Social Affairs (2012-2014), Director General of Social Protection and Security (2016), and is appointed as Commissioner of BKI (2018 - present). Currently he also serves as the Director General of Social Rehabilitation of the Ministry of Social Affairs (2020-present) and is trusted to be a Commissioner and concurrently Member of the Nomination, Remuneration and Human Resources Committee of BKI (2018-present).

He is also a lecturer Social Modeling and Social Policy Analysis in Social Welfare Department, Faculty of Social and Political science, University of Indonesia (2010-present).





DWI BUDI SUTRISNO

Komisaris/Commissioner

Dwi Budi Sutrisno adalah warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun, lahir di Blitar, 9 Oktober 1964, saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Teknik Permesinan Kapal di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tahun 1988, dan menyelesaikan pendidikan Magister di bidang *Transportation Planning and Policy* University of Newcastle Upon Tyne, Inggris (1995).

Dwi Budi Sutrisno, an Indonesian citizen, 56 years old, born in Blitar, October 9, 1964, currently domiciled in Jakarta. Graduated with a Bachelor's Degree in Engineering, Majoring Marine Engineering at the Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) in 1988, and completed his Master's Degree in Transportation Planning and Policy at the University of Newcastle upon Tyne, England (1995).

Sebelum mendapat mandat sebagai Komisaris BKI, beliau pernah bertugas di berbagai posisi, di antaranya *Engineer* PT Dok dan Perkapalan (Persero) Jakarta (1988 - 1990). Staf bagian Evaluasi dan Laporan Biro Perencanaan (1990-1996), Kasubag Evaluasi Transportasi Laut dan Biro Perencanaan Dephub (1996 - 1999), Kasubag Program Transportasi Darat dan Perkeretaapian Biro Perencanaan Dephub (1999 - 2006), Kabag Program Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan (2006 - 2014), Direktur Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (2014 - 2015), Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan (2015 - 2017), Sesditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (2017), dan Sekretaris Utama BMKG (2019 - sekarang). Berdasarkan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia nomor SK:SK-15/MBU/01/2018 tanggal 16 Januari 2018, beliau diangkat sebagai Komisaris BKI merangkap Ketua Komite Manajemen Risiko PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (2018 - sekarang).

Before appointed as Commissioner of BKI, he had served in various positions, including Engineer of PT Dok and Shipping (Persero) Jakarta (1988 - 1990), officer of the Evaluation and Report section of the Planning Bureau (1990 - 1996), Head of Sunsection Evaluation of Sea Transportation and Planning Bureau of the Ministry of Transportation (1996 - 1999), Head of Subsection Land Transportation and Railway Program of Planning Bureau (1999 - 2006), Head of The Planning Bureau of the Ministry of Transportation (2006 - 2014), Director of Railway Facilities Directorate General of the Ministry of Transportation (2014 - 2015), Head of Planning Bureau of the Ministry of Transportation (2015 - 2017), Secretary of the Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation (2017), and Chief Secretary of the Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency (2019 - present). Based on the Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia number SK: SK-15/MBU/01/2018 dated January 16, 2018, he was appointed as Commissioner of BKI and as Chief of the Risk Management Committee of PT BKI (2018 - present).





LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' REPORT



RUDIYANTO
Direktur Utama
President Director



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Sebelum menyampaikan pelaporan, perkenankan Direksi mengajak kita semua mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas Berkat dan Rahmat-Nya, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) masih mampu mencatat hasil positif dalam situasi yang penuh tantangan akibat pandemi Covid-19. Menjadi sebuah kehormatan bagi kami mewakili Direksi untuk menyampaikan laporan pengelolaan Perusahaan tahun buku 2020.

Tinjauan Makro Ekonomi

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini membuat pertumbuhan ekonomi terkontraksi. Bukan hanya Indonesia, tapi juga di semua belahan dunia. Meski demikian Indonesia masuk dalam kategori moderat dengan pertumbuhan ekonomi minus 2,1% pada tahun 2020. Angka itu jauh di bawah angka pertumbuhan Malaysia yang mengalami kontraksi minus 5,6%, Singapura minus 5,8% serta Thailand minus 5,8%.

Dengan defisit yang lebih rendah, Indonesia tetap mampu menjadi salah satu negara dengan daya tahan pertumbuhan ekonomi terbaik di antara kelompok negara G-20 dan ASEAN.

Nilai tukar rupiah sempat tertekan di kuartal pertama tahun 2020. Kurs rupiah mencapai sebesar Rp16.575 per dolar AS, kemudian cenderung menguat pada akhir tahun 2020 mencapai Rp14.600 per dolar AS.

Analisis atas kinerja Perseroan

Pandemi Covid-19 berdampak pada bisnis galangan kapal, di mana utilitas industri galangan kapal turun di bawah level 50%. Rendahnya utilitas tersebut disebabkan oleh tipisnya arus kas industri pelayaran, *fabricator, manufacturer*, serta *oil & gas*. Hal ini memengaruhi pendapatan Segmen Klas dan Segmen Komersil terutama pada Triwulan IV tahun 2020.

Direksi dan seluruh insan BKI terus bekerja keras untuk mencapai target RKAP dan memenuhi aspirasi pemegang saham. Direksi mencanangkan strategi memperluas pasar, memaksimalkan teknologi informasi, dan melakukan

Dear esteemed Shareholders and Stakeholders,

Before submitting this report, we, the Board of Directors, would like to invite you to praise God Almighty for His Blessings and Grace that PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) managed to post positive results despite the challenging situation we were in as result from the outbreak of the Covid-19 pandemic. It is an honor for us to represent the Board of Directors in submitting the Company's management report for the 2020 financial year.

Macroeconomic Overview

The Covid-19 pandemic, which is still ongoing today, has led to a contraction in economic growth. Not only here in Indonesia, but also in all parts of the world. Fortunately, Indonesia is in the moderate category with an economic growth of minus 2.1% in 2020, far below the growth rate of Malaysia which experienced a contraction of minus 5.6%, Singapore minus 5.8% and Thailand minus 5.8%.

Posting a lower deficit, Indonesia is still one of the countries with the best economic growth resilience among the G-20 and ASEAN group of countries.

The rupiah was under pressure in the first quarter of 2020, with exchange rate reached Rp16,575 per US dollar, then tended to strengthen at the end of 2020 to reach Rp14,600 per US dollar.

Analysis of the Company's performance

The Covid-19 pandemic had an impact on the shipbuilding business with the shipbuilding industry's utilities fell below the 50% level. The low utility is due to the thin cash flow of the shipping industry, fabricators, manufacturers, and oil & gas. This affected the revenues generated in the Class Segment and Commercial Segment, especially in the Fourth Quarter of 2020.

The Board of Directors and all BKI personnel continue to work hard to achieve the targets set in the RKAP and meet the aspirations of shareholders. The Board of Directors has launched a strategy to expand the market,



pembentahan internal untuk mendukung kinerja perusahaan. Hal ini sekaligus jawaban atas dinamika industri yang terjadi sepanjang tahun 2020.

Melalui Divisi Manajemen Risiko dan Kendali Usaha, sepanjang tahun 2020, Perseroan menerapkan program *Integrated Cash Management*, Program *E-Dropping*, dan melaksanakan program *monitoring* dan evaluasi. Program memberi hasil positif terutama terhadap efisiensi biaya sehingga target-target finansial yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Direksi juga telah menetapkan portofolio bisnis peningkatan *Strategic Business Unit* (SBU) dan BKI Academy. Dengan keputusan tersebut, SBU menjadi *Center of Excellent* dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki BKI. Perseroan juga membentuk TIC Institute bersama BUMN Holding Jasa Survei (Sucofindo dan Surveyor Indonesia) sebagai wadah peningkatan kapabilitas insan *Holding Jasa Survei*.

Di sisi *human capital*, Perseroan telah melakukan *People Transformation*. Hal ini dilakukan dengan menerapkan sistem manajemen talenta dimulai dari proses perekrutan *talent*, pengembangan karir *talent*, hingga retensi *talent* sebagai upaya membangun insan BKI yang produktif dan kompetitif.

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Pencapaian dan kinerja Perseroan yang positif merupakan bentuk komitmen Direksi dan segenap insan BKI untuk melewati masa penuh tantangan dalam satu tahun terakhir. Direksi memahami masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan. Hal itu menjadi catatan dan perhatian agar tahun depan kinerja Perseroan menjadi lebih baik lagi.

maximize information technology, and carry out internal improvements to support the company's performance. This is also the answer to the dynamics of the industry that occurred throughout 2020.

Throughout 2020, under the Risk Management and Business Control Division, the Company implemented Integrated Cash Management program, E-Dropping Program, and carried out a monitoring and evaluation program. The program gave the Company positive results, especially on cost efficiency so that the financial targets that had been set could be achieved.

The Board of Directors has also established a business portfolio to improve the Strategic Business Unit (SBU) and the BKI Academy. With this decision, SBU became the Center of Excellence by utilizing all the resources owned by BKI. The Company also formed the TIC Institute with the SOE Holding for Survey Services (Sucofindo and Surveyor Indonesia) as a forum for increasing the capabilities of the Survey Services Holding personnel.

On the human capital side, the Company has carried out People Transformation. This is done by implementing a talent management system starting from the talent recruitment process, talent career development, to talent retention as an effort to build productive and competitive BKI people.

Comparison between the results achieved with the target

Dear Shareholders and Stakeholders,

The positive achievements shown by the Company are an embodiment of commitment from the Board of Directors and all BKI personnel to get through the challenging period in the past year. The Board of Directors understands that there are still some things that need to be improved. It becomes a note and concern for the Company to better improve its performance in the coming years.

Pendapatan tahun 2020 terealisir sebesar Rp791.835 juta atau 105,49% dari Pendapatan Segmen Klas sebesar Rp456.505 juta atau mencapai 107,25% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp425.650 juta. Pendapatan Segmen Komersil sebesar Rp335.330 juta, tercapai 103,18% dari anggaran yakni sebesar Rp325.000 juta.

Beban usaha terealisir sebesar Rp645.874 juta atau 99,81% dari anggaran yaitu sebesar Rp647.130 juta. Beban Usaha terdiri dari beban Segmen Klas sebesar Rp318.353 juta atau sebesar 94,80% dari anggaran RKAP sebesar Rp335.816 juta dan beban Segmen Komersil sebesar Rp327.521 juta atau 105,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp311.314 juta.

Laba usaha terealisasi sebesar Rp145.961 juta atau mencapai 141,00% dari target yaitu sebesar Rp103.520 juta. Laba setelah pajak terealisir sebesar Rp100.499 juta atau 176,74% dari anggaran yaitu sebesar Rp56.862 juta.

Capaian positif kinerja keuangan PT BKI terlihat dari nilai EBITDA. Pada tahun 2020 realisasi EBITDA sebesar Rp160,500 juta melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp118,520 juta.

Tingkat kesehatan Perseroan

Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, total skor yang diperoleh PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk tahun 2020 adalah 86,00 atau masuk dalam kriteria Sehat dengan kategori AA. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang mencapai skor 93,50. Namun demikian pencapaian tingkat kesehatan Perseroan tahun 2020 masih di atas target RKAP yakni dengan skor 81,50.

Tata Kelola Perseroan

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perseroan selalu mengikuti mematuhi peraturan yang telah ditetapkan di antaranya Permeneg BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Revenue in 2020 was realized at Rp791,835 million or 105.49% of target. Class Segment revenue amounted to Rp456,505 million or reached 107.25% of the 2020 budget of Rp425,650 million. Commercial Segment revenue amounted to Rp335,330 million, reaching 103.18% of the budget, which was Rp325,000 million.

The operating expenses is realized at Rp645,874 million or 99.81% of the budget, which was Rp647,130 million. Operating Expenses consist of Class Segment expenses of Rp318,353 million or 94.80% of the RKAP budget of Rp335,816 million and Commercial Segment expenses of Rp327,521 million or 105.21% of the set budget of Rp311,314 million.

Operating profit is realized at Rp145,961 million or reached 141.00% of the target of Rp103,520 million. The profit after tax is realized at Rp100,499 million or 176.74% of the budget, which was Rp56,862 million.

The positive achievement of PT BKI's financial performance can be seen from the value of EBITDA. In 2020 the realization of EBITDA is Rp160,500 million, exceeded the set target of Rp118,520 million.

Company Health Level

Referring to the Ministerial Decree Number: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 regarding the Assessment of the Health Level of SOEs, the total score obtained by the PT Biro Klasifikasi Indonesia for 2020 was 86.00 or included in the Healthy criteria with the AA category. It is lower than that of 2019 which reached a score of 93.50. However, the achievement of the Company's health level in 2020 is still above the target set in the RKAP, namely 81.50.

Corporate Governance

As a State-Owned Enterprise, the Company always adheres to the applicable regulations, including the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No.PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation



(*Good Corporate Governance*) Pada BUMN yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/2014, serta Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Dalam mengelola perseroan, PT BKI selalu menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Keadilan & Tanggung Jawab) dan menerapkan Manajemen Risiko. Prinsip GCG telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Pedoman Penerapan GCG PT BKI. Manual GCG sudah direvisi mengacu perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terbaru. Untuk tahun 2020 ini penerapan GCG dilakukan *Self Assessment* untuk menentukan capaian nilai GCG.

Gambaran dan Analisis tentang Prospek Usaha

Direksi selalu melihat masa depan dengan positif dan optimistik. Program vaksinasi yang berjalan masif diharapkan dapat menurunkan angka Covid-19 dan memulihkan kondisi perekonomian, terutama di industri maritim. Sejumlah langkah dan strategi yang diterapkan pada tahun 2020 diharapkan mendongkrak kinerja Perseroan tahun 2021.

Portofolio baru SBU hasil kolaborasi antar-sektor kerja dan kompetensi diharapkan memberi dampak positif pada aspek finansial. Di sisi lain Perseroan akan terus melakukan efisiensi *direct cost* dengan *indirect cost*. Perseroan juga akan melanjutkan program *cross function* dan utilisasi sumber daya manusia sebagai bentuk efisiensi *human resources*.

Perubahan Komposisi Direksi

Pada tahun 2020 tidak ada perubahan komposisi Direksi. Susunan Direksi pada 31 Desember 2020 adalah:

Direktur Utama	:	Rudiyanto
Direktur Operasi	:	Mohamad Cholil
Direktur Pengembangan Sumber Daya	:	Saifuddin Wijaya
Direktur Keuangan & Administrasi	:	Bandung Pardede

of Good Corporate Governance in SOEs which has been amended by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/2014, as well as the Decree of the Minister of SOEs No. Kep-100/MBU/2002 concerning the Assessment of the Health Level of SOEs. In managing the company, PT BKI always applies the principles of Good Corporate Governance (Transparency, Independence, Accountability, Fairness & Responsibility) and Risk Management. GCG principles have been implemented by referring to PT BKI's GCG Implementation Guidelines. The GCG Manual has been revised referring to the latest amendments to the Company's Articles of Association. For 2020, the implementation of GCG is carried out by a Self Assessment to determine the achievement of GCG scores.

Overview and Analysis of Business Prospects

The Board of Directors always have a positive and optimistic view of the future. We do believe that the massive vaccination program may significantly reduce the daily cases of Covid-19 and helps restore the economic conditions, especially in the maritime industry. A number of initiatives and strategies implemented in 2020 are expected to boost the Company's performance in 2021.

The new portfolio of SBUs, as a result of collaboration between work sectors and competencies, is expected to have a positive impact on the financial aspect. On the other hand, the Company will continue to make direct cost efficiencies with indirect costs. The Company will also continue the cross function program and utilization of human resources as a form of human resource efficiency.

Changes in Board of Directors Composition

In 2020 there was no change in the composition of the Board of Directors. The composition of the Board of Directors as of December 31, 2020 is:

President Director	:	Rudiyanto
Operations Director	:	Mohamad Cholil
Director of Resource Development	:	Saifuddin Wijaya
Director of Finance & Administration	:	Bandung Pardede

Penutup

Akhir kata, izinkan Direksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama insan BKI yang sangat tangguh dalam menyikapi situasi penuh tantangan ini. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham maupun Pemangku Kepentingan lain, atas dukungannya bagi keberlangsungan operasi dan bisnis sehingga Perseroan tetap tumbuh dan berkembang.

Closing Remarks

Finally, the Board of Directors would like to extend our gratitude to all parties, especially the personnel at BKI who has been dealing with this challenging situation. The Board of Directors would also like to thank the Shareholders and other Stakeholders, for their support for the sustainability of operations and business so that the Company continues to grow and develop.

Jakarta, Juni 2021
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Atas nama Direksi
On behalf of the Board of Directors



Rudiyanto
Direktur Utama
President Director





DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS'



Mohamad Cholil
Direktur Operasi/
Director of Operations

Bandung Pardede
Direktur Keuangan & Administrasi/
Director of Finance & Administration

Rudiyanto
Direktur Utama/
President Director

Saifuddin Wijaya
Direktur Pengembangan Sumber Daya/
Director of Resource Development





PROFIL DIREKSI

PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS



RUDIYANTO

Direktur Utama/President Director

Rudiyanto merupakan seorang *business professional*, berusia 52 tahun, lahir di Bandung 24 Juni 1968 dan berdomisili di Jakarta.

Rudiyanto menjabat sebagai Direktur Utama BKI berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-304/MBU/12/2018 tanggal 19 Desember 2018. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Sarjana Teknik Perminyakan dari UPN Veteran, Yogyakarta, dan Fakultas Ilmu Politik UGM, sebelum menempuh program Magister Manajemen di IPMI Monash University.

Beliau kemudian melanjutkan pendidikan S2 di International Institute for Risk & safety Management (IIRSM, UK) dan menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Padjajaran pada Program Doktoral Kebijakan public & Administrasi Bisnis.

Sebelum mendapat amanat menjadi Direktur Utama BKI, Rudiyanto adalah *professional engineer* di Schlumberger SGS Redwood lalu berkarir di PT Sucofindo (Persero) hingga menduduki posisi sebagai *Commercial Director*.

Rudiyanto, a business professional, age 52, was born in Bandung on June 24, 1968 and domiciled in Jakarta.

He serves as the President Director of BKI based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-304/MBU/12/2018 dated December 19, 2018. He completed his Bachelor's degree (S1) in Petroleum Engineering from UPN Veteran, Yogyakarta, and the Faculty of Political Science UGM, before taking the Master of Management degree program at IPMI Monash University.

He then earned his master's degree at the International Institute for Risk & Safety Management (IIRSM, UK) and completed his doctoral education at Padjadjaran University in the Doctoral Program in Public Policy & Business Administration.

Before being appointed as President Director of BKI, Rudiyanto was a professional engineer at Schlumberger SGS Redwood and then had a career at PT Sucofindo (Persero) with his last position as Commercial Director.



SAIFUDDIN WIJAYA

Direktur Pengembangan Sumber Daya/
Director of Resource Development

Saifuddin Wijaya adalah warga Negara Indonesia berusia 57 tahun, lahir di Surabaya 18 April 1963, dan berdomisili di Jakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-255/MBU/11/2017 tanggal 24 November 2017, beliau ditetapkan sebagai Direktur Pengembangan Sumber Daya BKI. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bidang EDP - Satuan Perencanaan PT BKI (Persero) (1992 - 1998), Kepala Satuan Jaminan Mutu PT BKI (Persero) (2000 - 2005), Kepala Satuan Perencanaan PT BKI (Persero) (2005 - 2011), Kepala Satuan Penelitian & Pengembangan PT BKI (Persero) (2011 - 2013), dan Sekretaris Perusahaan PT BKI (Persero) (2013 - 2017). Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Perkapalan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, dan mendapatkan gelar *Master of Business Administration* di Indonesian Institute of Management.

Saifuddin Wijaya is an Indonesian citizen, 57 years old, born in Surabaya on April 18, 1963, and resides in Jakarta. Based on Decree of Minister of State-Owned Enterprise No. SK-255/MBU/11/2017 dated on November 24, 2017, he was appointed as Director of BKI Resource Development. Previously he served as Head of BKI EDP - Planning Unit (1992-1998), Head of BKI Quality Assurance Unit (2000-2005), Head of BKI Planning Unit (2005 - 2011), Head of BKI Research & Development Unit (2011 - 2013), and BKI Corporate Secretary (2013 - 2017). He completed his Bachelor's degree in Naval Architecture at Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, and earned a Master of Business Administration at the Indonesian Institute of Management.





MOHAMAD CHOLIL

Direktur Operasi/Director of Operations

Mohamad Cholil adalah warga negara Indonesia, berusia 61 tahun, lahir di Pacitan 2 Juli 1959 dan berdomisili di Jakarta. Beliau menempuh pendidikan D3 Teknik Mesin Universitas Sriwijaya, dan menyelesaikan S1 Teknik Mesin di Universitas Tridinanti. Beliau berkarier di BKI sejak tahun 1981 dan pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Administrasi Keuangan & Operasional Cabang Palembang PT BKI (Persero) (1987 - 1992), Kepala Cabang Dumai PT BKI (Persero) (1997 - 2001), Wakil Kepala Cabang Utama Klas Surabaya PT BKI (Persero) (2001 - 2002), Wakil Kepala Cabang Utama Komersil Surabaya PT BKI (Persero) (2002 - 2005), Kepala Cabang Madya Semarang PT BKI (Persero) (2005 - 2008), Kepala Cabang Singapore PT BKI (Persero) (2008 - 2011), Kepala Cabang Utama Klas Tanjung Priok PT BKI (Persero) (2011 - 2015) dan, Kepala Cabang Utama Klas Samarinda PT BKI (Persero) (2015 - 2017). Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: SK-255/ MBU/11/2017 tanggal 24 November 2017, beliau ditetapkan sebagai Direktur Operasi BKI.

Mohamad Cholil is an Indonesian citizen, 61 years old, born in Pacitan on July 2, 1959 and resides in Jakarta. He took a Diploma degree in Mechanical Engineering from Sriwijaya University, and received his bachelor degree in Mechanical Engineering from Tridinanti University. He has worked at BKI since 1981 and has served as BKI Head of Financial & Operational Section of Palembang Branch (1987 - 1992), Head of BKI Dumai Branch (1997 - 2001), Deputy Head of BKI Main Branch at Surabaya - Class (2001 - 2002), Deputy Head of BKI Surabaya Main Branch - Commercial (2002 - 2005), Head of BKI Semarang Middle Branch (2005 - 2008), Head of BKI Singapore Branch (2008 - 2011), Head of BKI Tanjung Priok Main Branch (2011 - 2015), and Head of BKI Samarinda Main Branch (2015 - 2017). Based on SOE Ministerial Decree No: SK-255/ MBU/11/2017 dated on November 24, 2017, he was appointed as BKI Director of Operations.

BANDUNG PARDEDE

Direktur Keuangan & Administrasi/Director of Finance & Administration

Bandung Pardede, adalah warga negara Indonesia berusia 53 tahun, lahir di Pematang Siantar, 18 Maret 1967, dan berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan jenjang S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1990, dan menyelesaikan jenjang S2 Manajemen Keuangan di STIE IBII tahun 2003. Beliau ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi BKI berdasarkan Keputusan Menteri BUMN SK-304/MBU/12/2018 tanggal 19 Desember 2018. Sebelumnya beliau pernah menjabat di berbagai posisi di antaranya Sekretaris Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) (2002 - 2007), Sekretaris Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2006 - 2011), Komisaris merangkap Ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha (KIRU) Perum Jamkrindo (2009 - 2013), Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2013 - 2014), Dewan Komisaris PT Taspen (Persero) (2014 - 2016), dan Dewan Komisaris PT Pegadaian (Persero) (2016 - 2018).

Bandung Pardede, Indonesian citizen, 53 years old, born in Pematang Siantar on March 18, 1967, and domiciled in Jakarta. He completed his Bachelor's Degree in Economics Management at the Indonesian Christian University in 1990, and completed his Master's Degree in Financial Management at STIE IBII in 2003. He was appointed as the Director of Finance and Administration of BKI based on the Decree of Minister of State-Owned Enterprise SK-304/MBU/12/2018 dated December 19, 2018. Previously he had held various positions including Secretary of the Board of Commissioners of PT Jasa Marga (Persero) (2002 - 2007), Secretary of the Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2006 - 2011), Commissioner and concurrently Chairman of the Business Risk and Investment Committee (KIRU) of Perum Jamkrindo (2009 - 2013), Commissioner of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2013 - 2014), and Commissioner of PT Taspen (Persero) (2014 - 2016), Commissioner of PT Pegadaian (Persero) (2016 - 2018).





PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE







Biro Klasifikasi Indonesia berdiri pada tahun 1964 dan menjadi satu-satunya badan klasifikasi nasional yang ditugaskan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengklaskan kapal niaga berbendera Indonesia. Sejak tahun 1977 BKI berstatus sebagai Perseroan Terbuka.

Biro Klasifikasi Indonesia is founded in 1964 and is the only national classification bureau assigned by the Government of the Republic of Indonesia to classify vessels that fly Indonesian flag. BKI is listed as a public company in 1977.

INFORMASI UMUM GENERAL INFORMATION

Nama perusahaan Name of the Company	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Alamat kantor pusat Head office	Jl. Yos Sudarso Kav. 38-40 Tanjung Priok Jakarta-14320, Indonesia
Telepon Telephone	+6221 4301017
Faksimili Facsimile	+6221 43936175
Call Center	+62804 117 1964
E-mail	ho@bki.co.id
Situs Elektronik Website	www.bki.co.id
Badan Hukum Legal Entity	Perseroan Terbatas
Bidang Usaha Line of Business	Jasa Klasifikasi dan Registrasi Kapal, dan Jasa Konsultansi dan Supervisi Ship Classification and Registration Services, Consulting and Supervision Services
Status Perusahaan Corporate Status	PT BKI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) State Owned Enterprise
Kepemilikan Saham Ownership	100% Saham BKI dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Solely owned by the Government of the Republic of Indonesia
Dasar Hukum Pemilikan Legal Basis of Ownership	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and Government Regulation Number 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises



Tanggal Pendirian Dated of Establishment	1 Juli 1964 July 1, 1964
Dasar Hukum Pendirian Legal Bases of Establishment	Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Perusahaan Negara (PN) Biro Klasifikasi Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1964. Pada tahun 1977, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 Pemerintah RI mengalihkan status badan hukum BKI dari PN menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia. The Government of the Republic of Indonesia established PN Biro Klasifikasi Indonesia based on the Government Regulation Number 28 of 1964. In 1977, through the Government Regulation Number 1 of 1977, the Government of Republic of Indonesia transferred the legal entity of BKI from PN to Perusahaan Perseroan (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia.
Akta Pendirian Notarial Deed	Notaris Imas Fatimah, S.H. dengan akte Nomor 57 tanggal 19 Oktober 1978, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: Y.A.5/345/1978 tanggal 7 November 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 58 Tahun 1979. Imas Fatimah, S.H. with the Deed No. 57 dated October 19, 1978, and was ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with the Decree Number: Y.A.5/345/1978 dated November 7, 1978 and is announced in the State Gazette Number: 58 of 1979.
Modal Dasar Authorized Capital	Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar rupiah), yang terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Rp600,000,000,000 (six hundred billion rupiah), divided into 600,000 (six hundred thousand) shares of Rp1,000,000 (one million rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Issued and Fully Paid Up Capital	Rp255.000.000.000 (dua ratus lima puluh lima miliar rupiah). Rp255,000,000,000 (two hundred fifty five billion rupiah).
Total Aset: Total Assets	Rp1.016.459.446.816 (Satu triliun enam belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah). Rp1,016,459,446,816 (One trillion sixteen billion four hundred fifty-nine million four hundred forty-six thousand eight hundred and sixteen rupiah).
Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura Subsidiary, Associated Company, Venture Company	BKI tidak memiliki ataupun memiliki saham pada entitas anak, perusahaan asosiasi, atau perusahaan ventura. BKI has no ownership or share in subsidiaries, associated companies, or venture companies.
Jumlah pegawai Number of Employee	Pegawai Tetap 662 orang Permanent Employees : 662 employees Pegawai Tidak Tetap 135 orang Non-Permanent Employees : 135 employees

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

THE COMPANY'S BRIEF HISTORY

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) didirikan pada tanggal 1 Juli 1964 dan merupakan satu-satunya badan klasifikasi nasional yang ditugaskan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengklasikan kapal niaga berbendera Indonesia. Penugasan ini kemudian dikukuhkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Laut No. Th. 1/17/2 tanggal 26 September 1964 tentang Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Kapal-Kapal berbendera Indonesia untuk memiliki sertifikat klasifikasi kapal yang dikeluarkan oleh BKI. Kegiatan Klasifikasi merupakan kegiatan penggolongan kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan salah satu penilaian atas laik laut kapal tersebut berlayar.

Pada tanggal 1 Agustus 1969 Pemerintah RI menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang.

Atas dasar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 ini pada tanggal 31 Januari 1977, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pengalihan bentuk perusahaan menjadi Perseroan ini juga menjadi titik awal menuju badan klasifikasi modern karena tujuan, tugas, dan lapangan usaha BKI tidak lagi hanya terbatas pada bidang klasifikasi kapal tetapi juga mencakup bidang non klasifikasi sebagaimana badan klasifikasi internasional yang lebih dahulu ada.

Dengan pengalihan bentuk perusahaan itu tujuan Perseroan menjadi semakin fokus dan spesifik, yaitu memajukan, meningkatkan, dan mengembangkan usaha-usaha yang bersangkutan paut dan berkaitan dengan perkapalan, pelayaran, dan teknik kelautan agar terjamin keselamatan jiwa dan benda di laut.

Memperhatikan potensi pasar yang sangat besar dan kemampuan SDM yang dimiliki, pada tahun 1982 BKI mulai merintis bidang komersil yang merupakan diversifikasi usaha dan merupakan *profit maker* bagi perusahaan.

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) was established on July 1, 1964 and is the only national classification body assigned by the government of the Republic of Indonesia to classify Indonesian flagged merchant vessels. This assignment was later confirmed in the Decree of the Minister of Sea Transportation No. Th. 1/17/2 dated September 26, 1964 concerning Regulation on the Implementation of Obligations of Indonesian-flagged Vessels to have ship classification certificates issued by BKI. Classification activities are vessel classification based on the hull, engine and electrical construction of the ship with the aim of providing one of the assessments of the seaworthy of the ship sailing.

On August 1, 1969 the Government of Indonesia issued the Law Number 9 of 1969 on the Establishment of the Government Regulation Number 1 of 1969 concerning the Forms of State Enterprises into a law.

On the basis of this Law Number 9 of 1969, on January 31, 1977, Government issued the Government Regulation Number 1 of 1977 on Reforming the Form of Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia to become a Limited Liability Company (Persero).

By reforming its form to become a limited liability company, the Company set its starting point to become a modern classification body, since its objectives, tasks, and lines of business are no longer limited as a vessel classification body, but is expanded to include non-class matter, similar to other existed international classification bodies.

With such reform, the objectives of Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) becomes increasingly focused and more specific, namely to promote, improve, and develop businesses that are related and related to maritime, shipping, and Ocean Engineering to ensure the safety of life and objects at sea.

Considering the enormous market potential and capability of the Company's HR, in 1982 BKI began pioneering the commercial field, a business diversification and profit center for the Company.



PENGHARGAAN

AWARDS



➤ **Sertifikat *Environmental Management System – ISO 14001:2015***
Penyelenggara: Royal Charter



➤ **Sertifikat *Occupational Health & Safety Management System – ISO 45001:2018***
Penyelenggara: Royal Charter



➤ **Sertifikat *Quality Management System – ISO 9001:2015***
Penyelenggara: Royal Charter



➤ **Sertifikat *Anti-Bribery Management System – ISO 37001:2016***
Penyelenggara: Royal Charter



Sertifikat penghargaan Kinerja Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan

Penyelenggara: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan



Sertifikat *The Best Financial Performance of Indonesia Best BUMN Award 2020*

Penyelenggara: Warta Ekonomi



Sertifikat Entitas Privat Peraih Kategori Gold Raksa Nugraha : *Indonesian Consumer Protection Award Tahun 2020*

Penyelenggara: BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional)

PERISTIWA PENTING

SIGNIFICANT EVENT



4 Maret 2020
March 4, 2020

InHouse-Training tentang *Designated Person Ashore*, dengan peserta dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

InHouse-Training on Designated Person Ashore, with participants from PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).



12 Maret 2020
March 12, 2020

Acara pembukaan Sertifikasi ISO 37001:2016 (diperoleh pada 6 Agustus 2020), momen bagi PT BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) untuk menguatkan komitmen anti korupsi, suap dan gratifikasi.

The opening ceremony of the ISO 37001:2016 Certification (obtained on August 6, 2020), a moment for PT BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) to strengthen its commitment to anti-corruption, anti-bribery and anti-gratification.



28 April 2020
April 28, 2020

Sebagai bentuk sinergi BUMN dalam meminimalisasi penyebaran Covid-19, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menerima 1000 masker kain dari PT Biro Klasifikasi Indonesia pada Rabu, 6 Mei 2020 di Kantor Pusat PT PELNI (Persero) di Jakarta.

As a form of BUMN synergy in minimizing the spread of Covid-19, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) received 1000 cloth masks from PT Biro Klasifikasi Indonesia on Wednesday, May 6, 2020 at PT PELNI (Persero) Head Office in Jakarta.



23 Juni 2020
June 23, 2020

Sebagai *Chairman Association of Asian Classification Society* (ACS), BKI menyelenggarakan *the 21st Virtual ACS TMG Meeting*. Bertindak sebagai Pemimpin rapat Bapak Fajar Nugraha, selaku ACS TMG *Chairman*. Turut hadir adalah seluruh perwakilan ACS *Secretary*, ACS *Technical Officer* dan ACS *TMG Members*.

As Chairman of the Association of Asian Classification Society (ACS), BKI held the 21st Virtual ACS TMG Meeting. Acting as Chairperson of the meeting, Mr. Fajar Nugraha, the Chairman of ACS TMG. Also present were all representatives of ACS Secretary, ACS Technical Officer and ACS TMG Members.



24 Juni 2020
Juni 24, 2020

Dalam rangka persiapan *Holding Jasa Survey*, maka Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Jasa Survey mengadakan Rapat Pembahasan *Master Plan Jasa Survey* bersama dengan Konsultan.

In preparation for the Survey Services Holding, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Survey Services BUMN held a Discussion Meeting on the Survey Services Master Plan together with the Consultant.



3 Agustus 2020
August 3, 2020

Pembukaan kegiatan *InHouse-Training Marine Surveyor* dengan peserta dari Dislaikmatal Mabes TNI AL.

Opening of the InHouse-Training Marine Surveyor activity with participants from the Indonesian Navy's Dislaikmatal Headquarters.



24 September 2020
September 24, 2020

TIC Institute resmi diluncurkan sebagai wujud kolaborasi antara 3 (tiga) BUMN yang bergerak di bidang TIC, yaitu PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT SUCOFINDO (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero) (24/09). TIC Institute dibentuk sebagai upaya untuk mengidentifikasi resources yang dapat digunakan bersama dan berbagi pengetahuan di antara ketiga BUMN tersebut di atas.

The TIC Institute was officially launched as a form of collaboration between 3 (three) SOEs engaged in the TIC sector, namely PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT SUCOFINDO (Persero), and PT Surveyor Indonesia (Persero) (24/09). The TIC Institute was formed as the effort to identify resources that can be used together and to share knowledge among the three SOEs mentioned above.



25 September 2020
September 25, 2020

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menandatangani MoU dengan Universitas Pertahanan Indonesia. Penandatanganan ini langsung dilakukan oleh Direktur Utama BKI Dr. Rudiyanto bersama dengan Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Octavian di Kampus Unhan Salemba.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) signed an MoU with the Indonesian Defense University. The signing was directly carried out by the President Director of BKI, Dr. Rudiyanto together with the Chancellor of the Defense University Vice Admiral TNI Dr. Amarulla Octavian at the Salemba Defense University Campus.



15 Oktober 2020
October 15, 2020

Oversight Ditjen HUBLA

Oversight of the Directorate General of Maritime Transportation



27 Oktober 2020
October 27, 2020

BKI bersama Kemenaker memberikan penghargaan Sertifikat SMK3 Tahun 2020.

BKI together with the Ministry of Manpower awarded the 2020 SMK3 Certificate.



27 November 2020
September 27, 2020

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dianugerahi penghargaan sebagai 'The Best Financial Performance' atas hasil kinerja keuangan korporasi yang luar biasa yang diberikan pada saat ajang Penghargaan *Indonesia Best BUMN Award 2020: The Guardian of Indonesia*.

During the 2020 Indonesia Best BUMN Award by The Guardian of Indonesia, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) received The Best Financial Performance award for its outstanding corporate financial performance.



16 Desember 2020
December 16, 2020

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan TNI Angkatan Laut (TNI AL) menandatangani perjanjian kesepakatan bersama untuk pengembangan sumber daya bidang kelaikan material dengan mengadakan pelatihan personel Dislaikmatal melalui BKI Academy.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and the Indonesian Navy (TNI AL) signed a mutual agreement for the development of resources in the field of material feasibility through training for Dislaikmatal personnel at the BKI Academy.



Dalam rangka mendukung "Kebijakan Kampus, Merdeka", Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan BUMN Klaster Jasa Survey menyelenggarakan Webinar KULIAH UMUM dengan tema "*Strategic Leadership* dan *Knowledge Management* dalam Membangun Tata Kelola Perusahaan pada Masa Pandemi Covid-19".

In order to support the "Campus Policy, Merdeka", the Faculty of Administrative Sciences, University of Indonesia in collaboration with the BUMN Survey Services Cluster held a GENERAL LECTURE Webinar with the theme of "Strategic Leadership and Knowledge Management in Building Corporate Governance during the Covid-19 Pandemic"



JEJAK LANGKAH

MILESTONES

Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan ini dilakukan setelah Pemerintah melakukan penelitian dan penilaian terhadap kegiatan operasional BKI termasuk mengenai prospek dan kemungkinan pengembangan bidang-bidang usahanya tanpa merugi di masa depan. Perseroan kemudian membuat anggaran dasar di hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H. dengan Akte No. 57 tanggal 19 Oktober 1978, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/345/1978 tanggal 7 November 1978, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tahun 1979.

The Government of Indonesia issued the Government Regulation Number 1 of 1977 on the Reforming of the Form of State Enterprise Biro Klasifikasi Indonesia to become a Limited Liability Company (Persero). The change from State Enterprise to Limited Liability Company is carried out following the Government's research and assessment on BKI's operational activities, as well as the prospects and future development as lucrative business. Later on, the Company made its Articles of Association with the Deed No. 57 dated October 19, 1978 made before Notary Imas Fatimah, S.H., which was ratified by the Decree of the Minister of Justice No. Y.A.5/345/1978 dated November 7, 1978, and announced in State Gazette No. 58 of 1979.

Melalui Akte Notaris Imas Fatimah Nomor 180 tanggal 30 November 1984 Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait tujuan dan lapangan usaha serta modal dasar perseroan. Perubahan ini dicatat dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 1479 Tahun 1985.

With the Deed No. 180 dated November 30, 1984 made before Notary Imas Fatimah, the Company amended the Articles of Association, on statement of the Company's goals and line of business as well as on the authorized capital. This amendment is recorded in the Republic of Indonesia State Gazette Number 1479 of 1985.

Melalui Akte Notaris Neneng Salmiah Nomor 11 tanggal 14 Maret 2003 Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait tujuan dan lapangan usaha serta penyesuaian dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Perubahan ini dicatat dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 11847 Tahun 2003.

Based on the Notarial Deed of Neneng Salmiah No. 11 dated March 14, 2003 the Company made amendments to the Articles of Association related to the business objectives and business line, as well as the adjustments to comply with the principles of Good Corporate Governance. This amendment is recorded in the Supplementary Number 11847 of the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003.

1964

1982

1998

1977-1978

1984

2003

BKI semula berbentuk Perusahaan Negara yang didirikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1964 dan mulai menjalankan kegiatan usaha sebagai badan klasifikasi tanggal 1 Januari 1965.

Originally, BKI was established as a State Enterprise under the Government Regulation No. 28 of 1964 and commenced its operation as a classification body on January 1, 1965.

BKI merintis bidang usaha *non-class matter* atau bidang non-klasifikasi yang meliputi jasa terkait konsultansi dan supervisi di bidang maritim dan industri serta bidang teknik lainnya. Bidang jasa non-klasifikasi ini diarahkan menjadi tumpuan utama kegiatan komersil dan sumber keuntungan perusahaan. Unit usaha ini kemudian disebut bidang usaha jasa komersil.

BKI started to expand its line of businesses by venturing into non-class matter business or non-classification business, which includes services related to consultancy and supervision in maritime and industry and other technical fields. The non-classification services are prepared to become the main commercial activities and sources of corporate income, hence its business unit will be named commercial service business sector.

Melalui Akte Notaris Neneng Salmiah Nomor 20 tanggal 12 Maret 1998 Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait jangka waktu berdirinya perseroan, tujuan dan lapangan usaha serta modal dasar perseroan. Perubahan ini dicatat dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 2504 Tahun 1999.

Based on the Notarial Deed of Neneng Salmiah No. 20 dated March 12, 1998, the Company made amendments to the Articles of Association related to the period of establishment of the Company, the purpose and line of businesses and the authorized capital of the Company. This amendment is recorded in the Republic of Indonesia State Gazette Number 2504 of 1999.



2008

PT BKI bersama Korean Register of Shipping (KR), Nippon Kaiji Kyokai (NK Class), Vietnam Register (VR), Indian Register of Shipping (IRS), dan China Classification Society (CCS) mendirikan asosiasi badan klasifikasi Asia (Asian Classification Society).



2015

PT BKI together with the Korean Register of Shipping (KR), Nippon Kaiji Kyokai (NK Class), Vietnam Register (VR), Indian Registrar of Shipping (IRS), and China Classification Society (CCS) established the Asian Classification Society.

Mendirikan BKI Academy/
Establishing BKI Academy
sejak tahun 2016, Perseroan mengambil langkah strategis yang sangat penting dengan mempersiapkan Pendirian BKI Academy. Lembaga pendidikan dan pelatihan ini berfungsi untuk mengembangkan karakter melalui pelatihan dasar dan mengembangkan sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengembangan usaha jasa komersil.

Since 2016, the Company has taken very important strategic steps by preparing the establishment of the BKI Academy. This education and training institution serves to develop character through basic training and developing human resources needed in the development of commercial service businesses.



2018

- PT BKI Membentuk TIC Institute
- PT BKI terpilih kembali sebagai ACS Chairman
- PT BKI Establishes TIC Institute
- PT BKI was re-elected as ACS Chairman

Melalui Akte Notaris Umaran Mansjur Nomor 5 tanggal 26 November 2008 Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait tujuan dan lapangan usaha serta modal dasar perseroan. Perubahan ini dicatat dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 10918 Tahun 2008.

Based on the Notarial Deed of Umaran Mansjur No. 5 dated November 26, 2008, the Company made amendments to the Articles of Association regarding the Company's objectives and business line and authorized capital. This amendments is recorded in the Supplement Number 10918 of the Indonesian State Gazette of 2008.



2010

PT BKI terpilih sebagai ACS Chairman

PT BKI elected as ACS Chairman



2016

BKI Academy Beroperasi

BKI Academy commenced its operation



2020

JARINGAN KANTOR PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

OFFICE NETWORK OF PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

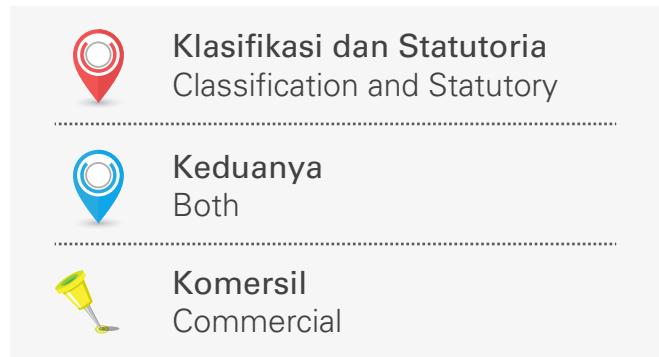
Jaringan Pelayanan Services Network	Klasifikasi dan Statutoria Classification and Statutory	Komersil Commercial
Belawan	Jl. Veteran No. 218 Belawan Medan - 20411 Phone: (62-61) 6941025 Fax: (62-61) 6941276 e-mail: bn@bki.co.id	Jl. Veteran No. 218 Belawan Medan - 20411 Phone: (62-61) 6941157, 6940370 Fax: (62-61) 6941276 e-mail: bnc@bki.co.id
Batam	Graha BKI, Jl. Yos Sudarso Kav. 5 Batam – 29421 Phone: (62-778) 433388, 429023, 429024, 451228 Fax: (62-778) 429020 e-mail : bm@bki.co.id	Graha BKI, Jl. Yos Sudarso Kav. 5 Batam – 29421 Phone: (62-778) 428284, 428438, 428250, 432324 Fax: (62-778) 429021 e-mail: bmc@bki.co.id
Pekanbaru	Jl. Arin Achmad No. 40, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru - 28282 Phone: (62-761) 8417295, 8417296 Fax: (62-761) 8417294 e-mail: pr@bki.co.id	Jl. Arin Achmad No. 40, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru - 28282 Phone: (62-761) 8417291, 8417292, 7662170 Fax: (62-778) 8417293, 7662180 e-mail: prc@bki.co.id
Jambi	Jl. Raden Bahrun No. E11 RT. 11 / RW. 04 Kel. Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Jambi Phone: (62-741) 671107 Fax: (62-741) 671108 e-mail: jb@bki.co.id	Jl. Raden Bahrun No. E11 RT. 11 / RW. 04 Kel. Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Jambi Phone: (62-741) 671107 Fax: (62-741) 671108 e-mail: jb@bki.co.id
Palembang	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 226, 5 Ilir Palembang - 30115 Phone: (62-711) 713172, 713680 Fax: (62-711) 713151 e-mail: pb@bki.co.id	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 226, 5 Ilir Palembang - 30115 Phone: (62-711) 713171, 713172, 713680 Fax: (62-711) 713173 e-mail: pbc@bki.co.id
Banten (Cilegon)	JL. Gerem Raya KM. 5 No. 1A Kel. Gerem, Kec. Grogol, Cilegon- Banten 42438 Phone: (62-254) 572673 Fax: (62-254) 572674 e-mail: cg@bki.co.id	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Komplek Istana Cilegon Blok D No. 22 Cilegon, Banten Phone: (62-254) 382347 Fax: (62-254) 382357 e-mail: cgc@bki.co.id
Tanjung Priok	Jl. Yos Sudarso 38-40 Tanjung Priok Jakarta Utara - 14320 Phone: (62-21) 43930990, 4301017, 4301703 Fax: (62-21) 4301702 e-mail: tp@bki.co.id	
Cirebon	Jl. Tuparev KM. 3 Cirebon - 45153 Phone: (62-231) 201816 Fax: (62-231) 205266 e-mail: cn@bki.co.id	Jl. Tuparev KM. 3 Cirebon - 45153 Phone: (62-231) 201816 Fax: (62-231) 205266 e-mail: cn@bki.co.id
Semarang	Jl. Pamularsih No. 12 Semarang - 50148 Phone: (62-24) 7610399 Fax: (62-24) 7610422 e-mail: sm@bki.co.id	Jl. Pamularsih No. 12 Semarang - 50148 Phone: (62-24) 7610744 Fax: (62-24) 76670354 e-mail: smc@bki.co.id
Surabaya	Jl. Kaliangket No. 14, Tanjung Perak Surabaya - 60165 Phone: (62-31) 3295448, 3295449, 3295450 Fax: (62-31) 3294520 e-mail: sb@bki.co.id	Jl. Kaliangket No. 14 Tanjung Perak Surabaya - 60165 Phone: (62-31) 3295448, 3295449, 3295450 Fax: (62-31) 3205451 e-mail: sbc@bki.co.id

Jaringan Pelayanan Services Network	Klasifikasi dan Statutoria Classification and Statutory	Komersil Commercial
Pontianak	Jl. Gusti Hamzah No. 211 Pontianak - 78116 Phone: (62-561) 739579 Fax: (62-561) 743107 e-mail: pk@bki.co.id	Jl. Gusti Hamzah No. 211 Pontianak - 78116 Phone: (62-561) 739579 Fax: (62-561) 743107 e-mail: pkc@bki.co.id
Banjarmasin	Jl. Skip Lama No. 19 Banjarmasin - 70117 Phone: (62-511) 3358311, 3350983 Fax: (62-511) 3350175 e-mail: bj@bki.co.id	Jl. Skip Lama No. 19 Banjarmasin 70117 Phone: (62-511) 3367361 Fax: (62-511) 3350175 e-mail: bjc@bki.co.id
Balikpapan	Kantor Pelayanan Operasional Klas Jl. M.T. Haryono No.8 Ring Road Balikpapan - 76111 Phone: (62-542) 876637 e-mail: sd@bki.co.id	Jl. M. T. Haryono No. 8 Ring Road Balikpapan - 76111 Phone: (62-542) 876637, 876641 Fax: (62-542) 876639 e-mail : bpc@bki.co.id
Samarinda	Jl. M.T. Haryono No. 199, Air Putih, Samarinda Kalimantan Timur - 75124 Phone: (62-541) 4121403, 4121404, 4121405, 4121406 Fax: (62-541) 4121407 e-mail: sd@bki.co.id	
Makassar	Jl. Sungai Cerekang No. 28 Makassar - 90115 Phone: (62-411) 3611993 Fax: (62-411) 36515460 e-mail: ms@bki.co.id	Jl. Sungai Cerekang No. 28 Makassar - 90115 Phone: (62-411) 3611993 Fax: (62-411) 36515460 e-mail: msc@bki.co.id
Bitung	Jl. Babe Palar No. 53, Madidir Unet Bitung - 95516 Phone : (62-438) 38720, 38721, 38722 Fax : (62-438) 21828 e-mail : bt@bki.co.id	Jl. Babe Palar No.53, Madidir Unet Bitung - 95516 Phone : (62-438) 34273 Fax : (62-438) 21828 e-mail : bt@bki.co.id
Sorong	Jl. Jend. Sudirman No. 140 Sorong - 98414 Phone: (62-951) 322600 Fax: (62-951) 323870 e-mail: sr@bki.co.id	Jl. Jend. Sudirman No. 140 Sorong - 98414 Phone: (62-951) 322600 Fax: (62-951) 323870 e-mail: sr@bki.co.id
Ambon	Jl. Laksdy Leo Wattimena, No. 34, Passo, Ambon – 97232 Phone: (62-911) 362805, 362806 Fax: (62-911) 361105 e-mail: ab@bki.co.id	Jl. Laksdy Leo Wattimena, No. 34, Passo, Ambon – 97232 Phone: (62-911) 362805, 362806 Fax: (62-911) 361105 e-mail: abc@bki.co.id
Singapura	7500A Beach Road #11-301, The Plaza Singapore - 199597 Phone: 65-68830651, 68830634, 68830643 Fax: 65-63393631 e-mail: sg@bki.co.id, class@bki.com.sg	Gedung Graha BKI Jl. Yos Sudarso 38-40 Tanjung Priok Jakarta Utara - 14320 Phone: (62-21) 43937409, 4300139, 4300932 Fax: e-mail: mno@bki.co.id
<i>Strategic Business Unit (SBU) Marine & Offshore</i>		
<i>Strategic Business Unit (SBU) Energy & Industry</i>		Gedung Graha BKI Jl. Yos Sudarso 38-40 Tanjung Priok Jakarta Utara – 14320 Phone: (62-21) 43938304, 43912806, 43912070 Fax: (62-21) 43900972 e-mail: eni@bki.co.id

PETA JARINGAN KANTOR PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

MAP OF THE OFFICE NETWORK OF PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA





VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

VISION, MISSION AND CORPORATE CULTURE

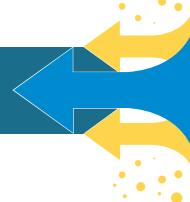
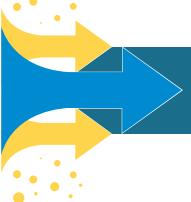


VISI 2020 - 2024
VISION 2020 - 2024



Menjadi *independent assurance* dan badan klasifikasi berkelas dunia.

To become a world-class classification society and independent assurance service provider.



MISI 2020 - 2024
MISSION 2020 - 2024

- Memberikan nilai tambah terbaik bagi pelanggan Jasa Klasifikasi dan Statutori melalui layanan, operasi dan *riset rules* yang berstandar internasional serta berbasis pada kualitas, keselamatan dan tanggung jawab sosial-lingkungan kelautan.
- Memaksimalkan sumber daya BKI dengan segenap potensinya agar dapat menjadi *market leader* dalam bisnis *Independent Marine Assurance*.

- Providing best added value for classification and statutory service customers through service, operation, rules with international standard research as well quality and safety and maritime environment social responsibility based (classification).
- Maximizing BKI resources along with all its potential in order to become market leader in Independent Marine Assurance business (non-classification).



BUDAYA PERUSAHAAN
CORPORATE CULTURE

AKHLAK

Dalam menjalankan aktivitas usaha, insan BKI menerapkan Nilai-Nilai Utama. Nilai-nilai itu tercermin dalam perilaku untuk mencapai visi dan misi Perusahaan.

In carrying out their business, BKI personnel are expected to always adhere to the Core Values. These values are reflected in their behavior to achieve the Company's vision and mission.

Nilai-Nilai Utama tersebut adalah **AKHLAK** (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif).

AMANAH

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

KOMPETEN

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

HARMONIS

Saling peduli dan menghargai perbedaan

LOYAL

Beredikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

ADAPTIF

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

KOLABORATIF

Membangun kerja sama yang sinergis

BKI's Core Values are **AKHLAK** (Trust, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive).

TRUST

We uphold the trust given

COMPETENT

We continue to learn and develop capabilities

HARMONIOUS

We care for each other and respect differences

LOYAL

We dedicate to prioritize Nation and State

ADAPTIVE

We continue to innovate and enthusiastic in driving or facing change

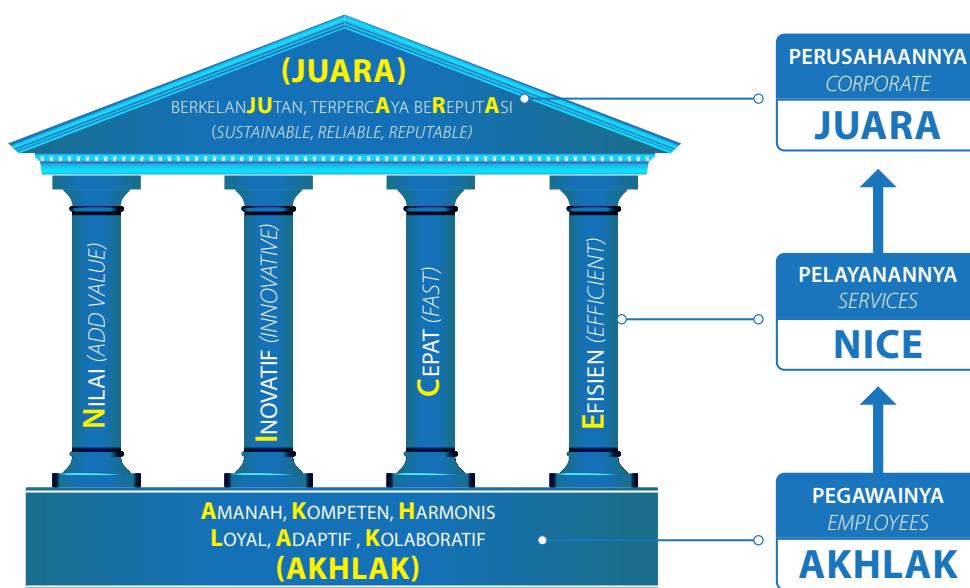
COLLABORATIVE

We build a synergy and cooperation



Jiwa BKI

Budaya Perusahaan BKI adalah Jiwa BKI (selanjutnya disebut TBS; *The BKI's Soul*) yang diterapkan pada seluruh jenjang organisasi. TBS digambarkan sebagai bangunan kokoh yang terdiri dari pondasi, tiang dan atap dengan penjelasan sebagai berikut:



Pondasi

Pondasi adalah keseluruhan tata nilai utama yang harus dimiliki oleh setiap insan BKI baik dari jajaran Komisaris, Direksi, dan karyawan yaitu **AKHLAK**: AMANAH, KOMPETEN, HARMONIS, LOYAL, ADAPTIF, KOLABORATIF.

Pilar

Pilar dimaknai sebagai karakteristik jasa yang dihasilkan oleh Insan BKI yaitu harus memiliki NILAI TAMBAH, INOVATIF, CEPAT, EFISIEN (**NICE**) yang didukung oleh sistem manajemen yang ada.

Atap

Atap dimaknai sebagai komitmen BKI untuk menjadi Perusahaan yang BERKELANJUTAN, TERPERCAYA, BERREPUTASI (JUARA).

The BKI's Soul

The Corporate Culture of BKI is the BKI's Soul (as known as TBS) that is applied to all levels of the organization. TBS is described as a sturdy building consisting of a foundation, pillars and a roof with the following explanation:

Foundation

The foundation of TBS Culture is built by AKHLAK as the core values shall be performed by BKI Commisioner, Directors and employee in their thinking and behavig **AKHLAK** consist of AMANAH, KOMPETEN, HARMONIS, LOYAL, ADAPTIF, KLABORATIF. (TRUSWORTHY, COMPETENT, HARMONY, LOYAL, ADAPTIVE, COLLABORATIVE).

Pillar

Pillars are defined as the characteristics of products and services delivered by BKI employer and employee, which must have **NICE** namely NILAI TAMBAH, INOVATIF, CEPAT, EFISIEN (ADDED VALUE, INNOVATIVE, FAST, EFFICIENT) supported by a reliable management system.

Roof

The roof is the end result of TBS Culture where in BKI as corporate will achieve JUARA (CHAMPION). JUARA means BKI will be BERKELANJUTAN, TERPERCAYA, BERREPUTASI (SUSTAINABLE, RELIABLE, REPUTABLE).

SIMBOL PERUSAHAAN

CORPORATE SYMBOL



Perseroan memilih jangkar sebagai simbol untuk mengasosiasikan lingkup dan kegiatannya di sektor kelautan. Jangkar adalah bagian dari kapal yang merupakan peralatan sangat penting transportasi utama di laut, sekaligus memberikan makna tentang kestabilan dan keselamatan kapal. Jangkar memiliki fungsi sebagai penambat kapal agar tidak berpindah tempat akibat hembusan angin, arus maupun gelombang. Pada bagian tengah terdapat simbol rantai dan palu yang melambangkan alat dan perkakas untuk membangun dan atau merenovasi kapal. Ini memberi gambaran tentang keberadaan Perseroan yang erat kaitannya dengan penilaian atas material komponen dan seluruh proses pembuatan kapal, serta penilaian atas proses renovasi yang harus sesuai dengan standar *rules & regulation* yang telah ditetapkan.

The Company uses anchor as a symbol associated with its scope of business and activities in the maritime sector. Anchor is a part of vessel, the main means of sea transportation, and it also represents the stability and safety of the vessel as the anchor has a function to moor the ship so that the ship will not drift away due to wind gusts, currents or ocean waves. Chain and hammer in the middle of the emblem represent tools and appliances to build and/or repair a vessel. It also describes in the Company's existence which is closely related to the assessment of materials and components as well as all building processes and repair processes of the vessel which must comply with standardized Rules & Regulation stipulated.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDER COMPOSITION

Perusahaan memiliki Modal Dasar sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar rupiah), yang terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Seluruh saham 100% milik pemerintah.

The Company has authorized capital of Rp600,000,000,000 (six hundred billion rupiah), divided into 600,000 (six hundred thousand) shares, valued at Rp1,000,000 (one million rupiah) each. All shares or 100% are owned by the government.

KEGIATAN DAN BIDANG USAHA

ACTIVITIES AND BUSINESS FIELDS

Kegiatan Usaha

Perseroan melakukan kegiatan usaha di bidang jasa klasifikasi dan registrasi kapal, jasa konsultasi dan supervisi serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing tinggi. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Business activities

The Company conducts business activities in the field of ship classification and registration services, consulting and supervision services and optimizes the utilization of the Company's resources to produce high-quality and highly competitive goods/services. This is in accordance with the purposes and objectives of the Company contained in the Company's Articles of Association.

Bidang Usaha

Perseroan memiliki Bidang Usaha Klasifikasi yakni Jasa Klasifikasi, Jasa Statutoria, dan Jasa Sertifikasi Material dan Komponen, serta Jasa Non-Klasifikasi.

Business fields

The Company has Classification Business Fields namely Classification Services, Statutory Services, and Material and Component Certification Services, as well as Non-Classification Services

Ruang Lingkup Jasa Klasifikasi

Dalam menjalankan kegiatan Bidang Klasifikasi, Perseroan mengemban amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 129 serta Peraturan Menteri Perhubungan PRI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kewajiban Klasifikasi bagi Kapal berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi.

Range of BKI Classification

In carrying out its activities of vessel classification, BKI is mandated by the Law Number 17 of 2008 concerning Shipping Article 129 and the Minister of Transportation Regulation PRI Number 61 of 2014 on the Obligation for the Classification of Indonesian-flagged Vessels by Classification Bodies.

I. Penerimaan Klas dan Mempertahankan Klas

- Pemeriksaan konstruksi, pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas dan registrasi kapal;

I. Admission to Class and Maintenance of Class

- Inspection of construction, supervision and testing as well as issuance of class certificates and ship registration;

- b. Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai;
- c. Keagenan dan atau perwakilan badan klasifikasi atau konsultan asing.

Kompetensi Bisnis Jasa Klasifikasi

- *Admission to Class for New Building*
- *Admission to Class for Existing Ship*
- *Admission to Class for New Building*
- *Material/Component Certification*
- *Statutory Certification*
- *Industrial Approval*
- *Company Social Responsibilities*
- *Welder Certification*

II. Jasa Statutoria

- a. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi di bidang statutoria berdasarkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun dari pemerintah negara lain;
- b. Melakukan survei dan sertifikasi atas nama Pemerintah Mongolia, Panama, Belize, dan Honduras, bekerja sama dengan IBS;
- c. Melakukan *drawing/plan approval* yang meliputi SOPEP/SMPEP, *damage control plan*, *sewage treatment plan*, *garbage management plan*, *cargo securing manual*, *fire control and safety plan*, *P&A manual* untuk *chemical tanker*, *operation manual*, *stability calculation/booklet*;
- d. Melakukan *compliance survey and certification* yang meliputi *Marpol Annex I s/d VI*, *Anti Fouling System (AFS)*, *Performance Standard for Protective Coating (PSPC)*, *Cargo Ship Safety Equipment Certification*, *Cargo Ship Safety Construction Certification*, *ISM Certificate (DOC & SMC)*, *ISPS Certificate (ISSC)*, *Loadline Certificate (ILLC & KM.3)*, *Cargo Gear Certification*, dan *CAS Certification*.

Pelaksanaan kegiatan survei dan sertifikasi statutoria dilakukan atas dasar penugasan dari pemerintah Negara Bendera terutama Pemerintah Republik Indonesia, dan hingga akhir tahun 2016 otorisasi statutoria yang diterima BKI dari Pemerintah RI adalah sebagai berikut:

- b. Inspection and testing of floating vessels and offshore construction facilities;
- c. Agency and or representation of foreign classification society or consultant.

Classification Service Business Competence

- Admission to Class for New Building
- Admission to Class for Existing Ship
- Admission to Class for New Building
- Material/Component Certification
- Statutory Certification
- Industrial Approval
- Company Social Responsibilities
- Welder Certification

II. Statutory Services

- a. Statutory inspection and certification with the authorization from the Government of Indonesia or governments of other countries;
- b. Survey and certification on behalf of the Government of Mongolia, Panama, Belize and Honduras in collaboration with IBS;
- c. Drawing/Plan approval including SOPEP/SMPEP, damage control plan, sewage treatment plan, garbage management plan, cargo securing manual, fire control & safety plan, P&A manual for chemical tanker, operation manual, stability calculation/booklet;
- d. Compliance survey & certification including Marpol Annex I s/d VI, Anti Fouling System (AFS), Performance Standard for Protective Coating (PSPC), Cargo Ship Safety Equipment Certification, Cargo Ship Safety Construction Certification, ISM Certificate (DOC & SMC), ISPS Certificate (ISSC), Loadline Certificate (ILLC & KM.3), Cargo Gear Certification, and CAS Certification.

The statutory certification and survey are carried out based on the assignments from the State Flag government, especially the Government of the Republic of Indonesia, and until the end of 2016 statutory authorizations received by BKI from the Indonesian Government were as follows:



Tabel Otorisasi Statutoria dari Pemerintah RI

Table of the Statutory Authorization from the Government of the Republic of Indonesia

No.	Uraian Description	Nomor Penunjukkan Number of Assignment	Lingkup Penunjukkan Scope of Assignment
1.	<i>Load Line</i>	No. DKP/46/43/12 Tgl.12.6.1976 (ILLC) No. PY.66/1/1-93 Tgl.28-8-1993 (PGMI)	Survei dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI Full Survey and Certificate by BKI
2.	<i>Safety Construction</i>	No. PY.68/1/3-95 Tgl. 6-4-1995	Survei dan Sertifikasi belum sepenuhnya oleh BKI Partial Survey and Certificate by BKI
3.	<i>Marpol</i>	No. PY.68/1/3-95 Tgl. 6-4-1995	Survei dan Sertifikasi belum sepenuhnya oleh BKI Partial Survey and Certificate by BKI
4.	<i>Fitness Chemical/Gas Carrier in Bulk</i>	No. PY.68/1/3-95 Tgl. 6-4-199	Survei dan Sertifikasi belum sepenuhnya oleh BKI Partial Survey and Certificate by BKI
5.	<i>ISM Code</i>	No. PY/1/7-96 Tgl. 12-7-1996	Survei dan Sertifikasi belum sepenuhnya oleh BKI Partial Survey and Certificate by BKI
6.	<i>ISPS Code</i>	No. KL.93/2/02-04 Tgl. 14-0502004 (Kpl) No. KL.93/2/11-04 Tgl. 23-06-2004 (PF) BKI sbg Recognized Security Org. (RSO) No. PY.67/1/7/05 Tgl. April 2010	Survei dan Sertifikasi belum sepenuhnya oleh BKI Partial Survey and Certificate by BKI
7.	<i>Marpol Annex VI</i>	No. PY.67/1/7/05 Tgl. April 2015	Survei dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI Full Survey and Certificate by BKI
8.	<i>Condition Assessment Scheme (CAS)</i>	No. UM.485/3/13/DII-05 Tgl. 27-06-2005	Survei dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI Full Survey and Certificate by BKI

III. Jasa Sertifikasi Material dan Komponen

- a. Pengujian dan sertifikasi material dan komponen;
- b. Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektor las, dan keahlian las lainnya;
- c. Sertifikasi Industri.

III. Material and Component Certification Services

- a. Testing and certification of material and components;
- b. Testing and quality certification of welders, welding inspector, other welding experts;
- c. Industrial Certification

Ruang Lingkup Jasa Non-Klasifikasi

Perseroan memiliki kompetensi profesional untuk melakukan 15 jenis layanan jasa pemastian independen layanan tersebut terbagi ke dalam tiga sektor yakni Kelautan, Industri, dan Energi.

Scope of BKI's Non Classification Services

The Company has the professional competence to carry out 15 types of independent assurance services, divided into three sectors: Marine, Industry, and Energy.

Tabel Jasa Non-Klasifikasi
Table of Non-Classification Services

Kompetensi Competence	Kelautan Marine	Industri Industry	Energi Energy
<i>Identification & Survey Mapping</i>	<i>Ship condition survey, etc Marine mapping</i>	<i>Lashing Survey, etc Basic map creation</i>	<i>Petroleum Survey, etc, Oil and Gas Resources Potency Study, etc</i>
<i>Inspection Test</i>	<i>Floating object inspection, etc WPS and welder test, etc</i>	<i>Crane, forklift, loader, truck, etc Wich load testing, etc</i>	<i>Storage tank inspection, etc WPS and welder test, etc Oil and Gas Resources Potency Study</i>
<i>Laboratory Analysis</i>	<i>Sea water analysis, etc</i>	<i>Mechanical testing laboratory, etc</i>	<i>Material Coal, Oil and Material Analysis</i>

Kompetensi Competence	Kelautan Marine	Industri Industry	Energi Energy
Assesment Verification and Evaluation	Port assesment, etc Ship's load-line increase evaluation, etc	Remaining Life Assesment, etc Price Verification, etc	Facilities audit, etc Coal Selling Verification,etc
Monitoring Consultancy	Project Monitoring, etc New building design, etc	Monitoring Corrosion, etc Safety, Health and Safety Consultant, etc	LNG Sales Monitoring, etc
Project Management	Planned Maintenance System, etc	Safety Consultant	Monitoring System for Oil & Gas Lifting, etc
Certification	Workshop certification, etc	Project Supervision and Management, etc Lifting gear inspection & Certification	Pipeline inspection & certification
Training Investigation Supervision	Marine inspector training, etc Insurance survey, etc New building supervision, etc	Welding Inspector, etc Failure Analysis, etc Project Supervision and Management, etc	Rigging and Signalman, etc Soil investigation, etc
Manpower Supply	Operation and Maintenance, etc	Failure Analysis, etc Project Supervision and Management, etc Industrial Inspector, etc	Project Management Team, etc

Portofolio SBU Gabungan Antara Sektor Kerja dan Kompetensi

Portfolio of Combined SBU Work Sector and Competence

Portofolio SBU Energi & Industri/Portfolio of SBU Energy & Industry

Refinery/ Industrial Instalation Fitness Inspection, Supervision & Certification
 Pressure Vessel Design & Analysis Inspection Inspection, Supervision & Certification
 Crane Design & Analysis, Inspection, Inspection, Supervision & Certification
 Pipe Line Design & Analysis Inspection, Inspection, Supervision & Certification
 Rotating Equipment (Pump, Compressor, etc) Inspection, Supervision & Certification
 Electrical Equipment Inspection, Supervision & Certification
 Storage Tank Design & Analysis Inspection, Supervision & Certification
 RIC Design & Analysis, Inspection, Supervision & Certification
 Pressure Safety Valve Design & Analysis, Inspection, Testing & Certification
 Metering System Inspection, Supervision & Certification
 - Safety Devices / Equipment / System / Instalation Inspection, Super vision & Certification
 Risk Based Inspection (RBI) Consultant & Audit
 Power Plan Installation, Inspection & Certification (SLO DJK)
 Installation of High Voltage Consumer Electricity Utilization, Inspection & Certification (SLO DJK)
 Installation of Medium Voltage Consumer Electricity Utilization, Inspection & Certification (SLO DJK)
 Rigging/Lifting Gear Design, Inspection, Testing & Certitication
 WellHead & Drilling Unit (BOP, Tubing Casing, X-Over, etc) Inspection, Testing & Certification
 Valve Inspection, Testing & Certification
 Cementing Unit Inspection, Testing & Certitication
 Boiler Design & Analysis, Inspection, Supervision & Certitication
 Management System HSE/ SMK3 Audit & Certification
 Heliport Design & Analysis, Inspection & Certification
 Rail Ways Facility and Infrastructure, Design & Analysis, Testing, Inspection, & Certification



Portofolio SBU Energi & Industri/Portfolio of SBU Energy & Industry

Rigging/Lining Gear Design, Inspection, Testing & Certification
Lightning Arrestor Design, Inspection, Testing & Certification
Fire & Flame Arrester System Inspection, Testing & Certification
Welder Qualification & Certification
Welding Procedure Specification Consultant, Qualification & Certification
Remaining Life Assessment (RLA) of Refinery & Structural Equipment
Corrosion Protection (Coating/Painting, CP, Etc) Design, Inspection, Testing & Analysis
HAZOP/HAZID Audit, Certification & Consultant
Oil & Gas Asset Integrity
Oil & Gas Equipment Feasibility Study
Oil & Gas Structural (Local & Global) Analysis
Oil & Gas FEED
Various Non Destructive Test/Examination (NDT/E)
Material Mechanical & Chemical Destructive Test (DT)
Underwater Survey
Wire Rope Test
Casing-Tubing Inspection, Testing & Certification
Box Crossover Thread Inspection, Testing & Certification
Working at Height/ Rope Access Techniq (RAT)
Oil & Gas VSD Transport Skid Design, Inspection, Testing & Certification
Oil & Gas Basket Inspection Design, Inspection, Testing & Certification
Oil & Gas Skid and Spreader Bar Inspection, Testing & Certification
Transport Tank Inspection Design, Inspection, Testing & Certification
Energy & Industrial Man Power Supply
VGM Certification
Convention for Safe Container (CSC)
Helideck
Survey Lifting Batu Bara (Minerba)
Various Industrial & Social Mapping & Survey
Survei Barang Modal Bukan Baru (KEMENDAG)
Information Technology System & Infrastructure
Civil & Industrial Infrastructure
Aerial Mapping

Portofolio SBU Marine & Offshore Migas/Portfolio of SBU Marine & Offshore Oil & Gas

Ship New Building
Ship Repair & Modification
Ship As Built Drawing and Re-Drawing
Intact and Damage Stability Calculation
Hydrodynamic Analysis
Ship Towing Analysis
Marine Machinery Analysis
Marine Structural Analysis



Portofolio SBU Marine & Offshore Migas/Portfolio of SBU Marine & Offshore Oil & Gas

FPSO/FLNG/FPU GAP Analysis

Cargo Securing Manual

Ballast Water Management Plan

Maritime Labor Convention Plan (MLC 2006)

Ship Planned Maintenance System

Mooring System

Anchoring System & Mooring Line

Ship Tank/Tank Calibration & Survey

Marine Warranty Survey

Ship Condition Survey

Ship On and Off Hire Survey

Ship Towing and Lashing Survey

Ship Draught Survey

Vessel Condition Survey (SIRE, Vetting & TMSA, OCIMF & OVID)

Container Condition Survey

Ship Asset Integrity Services

Port Facility & Infrastructure Integrity Services

QA/QC Service (Independent Assurance)

Bunker Survey Services

Technical Audit of Floating Facility

Navigation Aids Facilities

Floating Concrete/Breakwater Facilities

Ship Particulars

ISPS Code

ISM Code

SIMOM (Surat Izin Memasuki Operasi Migas)

Terminal untuk Khusus (Tersus)/Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)

Marine Transportation Statutory Consultant

CAS (Conditional Assessment Scheme) & CAP (Conditional Assessment Program) Consultant

Marine Hose & Rubber Fender

Vessel Reflaging Certificate

Fishing Vessel Certification (KKP)

Technical Procurement Advisory

Tenorm

Life Saving Appliances (Raft, Bouy, Boat, Jacket, etc)

Marine Cargo Gear

TKDN & BMTB Marine

Hidrografi

Oceanografi

Container Non CSC (Fleet Container, etc)

Convention for Safe Container (CSC)

Aqua Culture

Free Board Evaluation

WPS/PQR



Portofolio SBU Marine & Offshore Migas/Portfolio of SBU Marine & Offshore Oil & Gas

Welder Qualification

Offshore Refinery/ Industrial Instalation Fitness

Offshore Platform

Offshore Pressure Vessel

Offshore Crane and Lifting Devices

Offshore Pipeline

Offshore Rotating Equipment (Pump, Compressor, etc)

Offshore Electrical Equipment

Offshore Storage Tank

Offshore Rig System

Offshore Pressure Safety Valve

Offshore Metering System

Offshore Safety Devices/Equipment/System/Installation

Offshore Boiler

Subsea Fiber Optic Cable

Offshore Remaining Life Assessment (RLA) of Structural & Refinery Equipment

Offshore Corrosion Protection (Coating/Painting, CP, etc.)

Offshore HAZOP/HAZID Audit, Verification & Consultant

Offshore Top Side Facilities Independent Verification

Offshore Oil & Gas Asset Integrity

Offshore Oil & Gas Equipment Feasibility Study

Offshore Oil & Gas Structural (Local & Global) Analysis

Working at Height/Rope Access Technique (RAT)

Marine Risk Based Inspection (RBI)

Marine Front End Engineering Design (FEED)

Offshore Power Plant (SLO)

Information Technology System & Infrastructure

Various Non Destructive Test/Examination NDT/E

Material Mechanical & Chemical Destructive Test (DT)

Fuel Consumption Test

Noise & Vibration Test

Ship Machinery & Electrical Performance Test

Bollard Pull Test

Vessel Leakage Test

Ship Inclining Test

Portofolio BKI Academy/Portfolio of BKI Academy

A. Kemenaker Certification Sub Category

Ahli K3 Umum

Auditor SMK3

Ahli K3 Pesawat Angkat dan Angkut

Teknisi/Petugas Pemeriksa Pengujii PAA

Operator K3 Forklift Kelas I

Operator K3 Forklift Kelas II

Operator K3 Crane Kelas I

A. Ministry of Manpower Certification, Sub Category

General OHS Expert

SMK3 Auditor

OHS Hoists and Transport Instruments (PAA) Experts

PAA Examiner Auditor Staff/ Technician

OHS Forklift Operator Class I

OHS Forklift Operator Class II

OHS Crane Operator Class I



Portofolio BKI Academy/Portfolio of BKI Academy

Operator K3 Crane Kelas II	OHS Crane Operator Class II
Operator K3 Crane Kelas III	OHS Crane Operator Class III
Operator K3 Gondola, Conveyor, Mesin Pancang	OHS Gondola, Conveyor, Piling Machine Operator
Operator K3 Rigger	OHS Rigger Operators
Operator K3 Alat Berat	OHS Heavy Equipment Operator
Ahli K3 Pesawat Tenaga Produksi	OHS Power & Production Instrument (PTP) Expert
Teknisi/Petugas Pemeriksa Pengujii PTP	PTP Examiner Auditor Officer/ Technician
Operator Mesin Produksi, Perkakas, Tanur Kelas I	Production Machinery, Tools, Furnace Operator Class I
Operator Mesin Produksi, Perkakas, Tanur Kelas II	Production Machinery, Tools, Furnace Operator Class II
Operator Mesin Las, Juru Las Karbit	Welding Machine Operators, Carbide Welders
Juru Las Listrik dan Gas Kelas I	Electric and Gas Welder - Class I
Juru Las Listrik dan Gas Kelas II	Electric and Gas Welder -Class II
Juru Las Listrik dan Gas Kelas III	Electric and Gas Welder - Class III
Ahli K3 Elevator dan Escalator	OHS Elevator and Escalator Expert
Teknisi K3 Elevator & Eskalator	OHS Elevator & Escalator Technician
Operator K3 Elevator & Eskalator	OHS Elevator & Escalator Operators
Ahli K3 Listrik	Electrical OHS Expert
Teknisi K3 Listrik	Electrical OHS Technician
Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan	Expert on K3 Steam Boiler and Pressure Vessels (PUBT)
Teknisi/Petugas Pemeriksa Pengujii PUBT*)	PUBT Examiner Auditor Staff/ Technician *)
Operator Pesawat Uap Kelas I	Steam Boiler Operator Class I
Operator Pesawat Uap Kelas II	Steam Boiler Operator Class II
Ahli K3 Kimia	Chemical OHS Expert
Teknisi K3 Pestisida	Pesticide OHS Technician
Petugas K3 Kimia	Chemical OHS Officer
Petugas K3 Deteksi Gas	Gas Detection OHS Officer
Petugas K3 Asbes	Asbestos OHS Officer
Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja	Work Environment OHS Junior Expert
Ahli K3 Madya Lingkungan Kerja	Work Environment OHS Associate Expert
Ahli K3 Utama Lingkungan Kerja	Work Environment OHS Senior Expert
Petugas K3 Madya Ruang Terbatas (<i>Confined Space</i>)	OHS Associate Officer for Confined Space
Petugas K3 Utama Ruang Terbatas (<i>Confined Space</i>)	OHS Officer for Confined Space
Petugas K3 Penyelamat Ruang Terbatas (<i>Confined Space</i>)	OHS Officer for Confined Space Rescuer
Kebakaran Kelas A /Ahli K3 Kebakaran	Fire Class A /Fire OHS Expert
Kebakaran Kelas B	Fire Class B
Kebakaran Kelas C	Fire Class C
Kebakaran Kelas D	Fire Class D
HIPERKES untuk Dokter	HIPERKES for Doctors
HIPERKES untuk Paramedis	HIPERKES for Paramedics
P3K di Tempat Kerja	First Aid at Work
B. BNSP Certification Sub Category	B. BNSP Certification Sub Category
Ahli K3 Umum Muda	General OHS Junior Expert
Ahli K3 Umum Madya	General OHS Associate Expert
Ahli K3 Umum Utama	General OHS Senior Expert
Ahli Higiene Industri Muda	Industrial Hygiene Junior Expert
Ahli Higiene Industri Madya	Industrial Hygiene Associate Expert
Dokter Perusahaan	corporate physician
Paramedis K3 Muda	OHS Junior Paramedic
Teknisi- 1 K3 Bekerja di Ketinggian	OHS Working at Height Technician Lv. 1
Teknisi- 2 K3 Bekerja di Ketinggian	OHS Working at Height Technician Lv. 2
Entrant K3 Bekerja di Ruang Terbatas (<i>Confined Space</i>)	Entrant OHS Officer for Confined Space
Attendant K3 Bekerja di Ruang Terbatas (<i>Confined Space</i>)	OHS Attendant for Confined Space
Supervisor K3 Bekerja di Ruang Terbatas (<i>Confined Space</i>)	OHS Supervisor for Confined Space
HAZOPS	HAZOPS
Petugas K3 Laboratorium	OHS Laboratory Officer
Petugas P3K	First Aid Officer
Operator K3 Migas	OHS Oil and Gas Operators

Portofolio BKI Academy/Portfolio of BKI Academy

Pengawas K3 Migas
Pengawas Utama K3 Migas

C OSH Academy Certification Sub Category
Safety Manager
Safety Supervisor
Oil & Gas Safety Operation
Process Safety Management
Behavior Based Safety (BBS)

IV Energy Category
A Oil and Gas Sub Category
Welding Inspector
Inspektor Bejana Tekan
Inspektor Tangki Penimbun
Inspektor Pesawat Angkat Angkut
Inspektor Peralatan Putar (*Rotating Equipment*)
Inspektor Kelistrikan
Inspektor Pipa Penyalur
Inspektor RIG
Inspektor K3
Inspektor Handak (Bahan Peledak)
Inspektor Instalasi
Inspektor Katup Pengaman & Pemutus Segel
Inspektor Platform
Inspektor Sistem Alat Ukur Serah Terima (*Metering*)

B Mining and Coal Sub Category
Pengawas Operasional Pertama Pertambangan (POP)
Pengawas Operasional Madya Pertambangan (POM)
Petugas Pengambil Contoh Uji Batubara (Sampler)
Petugas Pengujii Contoh Uji Batubara (Analisis)
Petugas Verifikasi Teknis Batubara (Surveyor)

V Testing Inspection and Certification Category
A. General Industries
TIC Muda A (*Introduction*)
TIC Muda B (*Understanding*)
TIC Madya (*General*)
TIC Madya (*Specialis*)

VI. Construction Category
A . Kemenaker Certification Sub Category
Ahli K3 Muda Konstruksi
Ahli K3 Madya Konstruksi
Ahli K3 Utama Konstruksi
Teknisi Scafolding
Supervisor Scafolding

B BNSP Certification Sub Category
Juru Ukur
Quantity Surveyor Level Muda
Quantity Surveyor Level Madya
Quantity Surveyor Level Utama

IX Human Resources Category
A Kemenaker Certification Sub Category
Kader Norma Ketenagakerjaan Level Muda
Kader Norma Ketenagakerjaan Level Madya

OHS Oil and Gas Supervisor
OHS Oil and Gas Senior Supervisor

C OSH Academy Certification Sub Category
Safety Manager
Safety Supervisor
Oil & Gas Safety Operation
Process Safety Management
Behavior Based Safety (BBS)

IV Energy Category
A Oil and Gas Sub Category
Welding Inspector
Pressure Vessel Inspector
Hoarding Tank Inspector
Inspector of Hoists and Transport Instruments
Rotating Equipment Inspector
Electrical Inspector
Pipeline Inspector
RIG inspector
OHS Inspector
Explosives Inspector
Installation Inspector
Safety Valve Inspector & Seal Breaker
Platform Inspector
Metering System Inspector

B Mining and Coal Sub Category
First Mining Operations Supervisor (POP)
Associate Mining Operations Supervisor (POM)
Coal Sampling Officer (Sampler)
Coal Sample Testing Officer (Analyst)
Coal Technical Verification Officer (Surveyor)

V Testing Inspection and Certification Category
A. General Industries
TIC Junior A (*Introduction*)
TIC Junior B (*Understanding*)
TIC Associate (*General*)
TIC Associate (*Specialist*)

VI. Construction Category
A. Ministry of Manpower Certification Sub Category
Construction OHS Junior Expert
Construction OHS Associate Expert
Construction OHS Senior Expert
Scaffolding Technician
Scaffolding Supervisor

B BNSP Certification Sub Category
Surveyor
Quantity Surveyor Junior Level
Quantity Surveyor Associate Level
Quantity Surveyor Senior Level

IX Human Resources Category
A Ministry of Manpower Certification Sub Category
Junior Level Employment Norms Cadre
Associate Level Employment Norms Cadre

Portofolio BKI Academy/Portfolio of BKI Academy

Kader Norma Ketenagakerjaan Level Utama	Senior Level Employment Norms Cadre
B BNSP Certification Sub Category	B BNSP Certification Sub Category
<i>Training of Trainer (TOT)</i>	Training of Trainers (TOT)
<i>Training Need Analysis</i>	Training Need Analysis
Staff Administrasi Sumber Daya Manusia	Human Resources Administration Staff
Staff Kompensasi dan Benefit	Compensation and Benefits Staff
Staff Manajemen Talenta	Talent Management Staff
Staff Penggajian	Payroll Staff
Staff Perencanaan Sumber Daya Manusia	Human Resource Planning Staff
Staff Rekutmen dan Seleksi	Recruitment and Selection Staff
Staff Remunerasi	Remuneration Staff
Supervisor Manajemen Kinerja dan Karier	Performance and Career Management Supervisor
Supervisor Manajemen Talenta	Talent Management Supervisor
Supervisor Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Human Resources Training and Development Supervisor
Supervisor Pengadaan	Procurement Supervisor
<i>Human Resources Manager</i>	Human Resources Manager
Manajer Human Capital	Human Capital Manager
Manajer Administrasi dan Personalia	Administration and Personnel Manager
Manajer Pengembangan Sumber Daya Manusia	Human Resource Development Manager

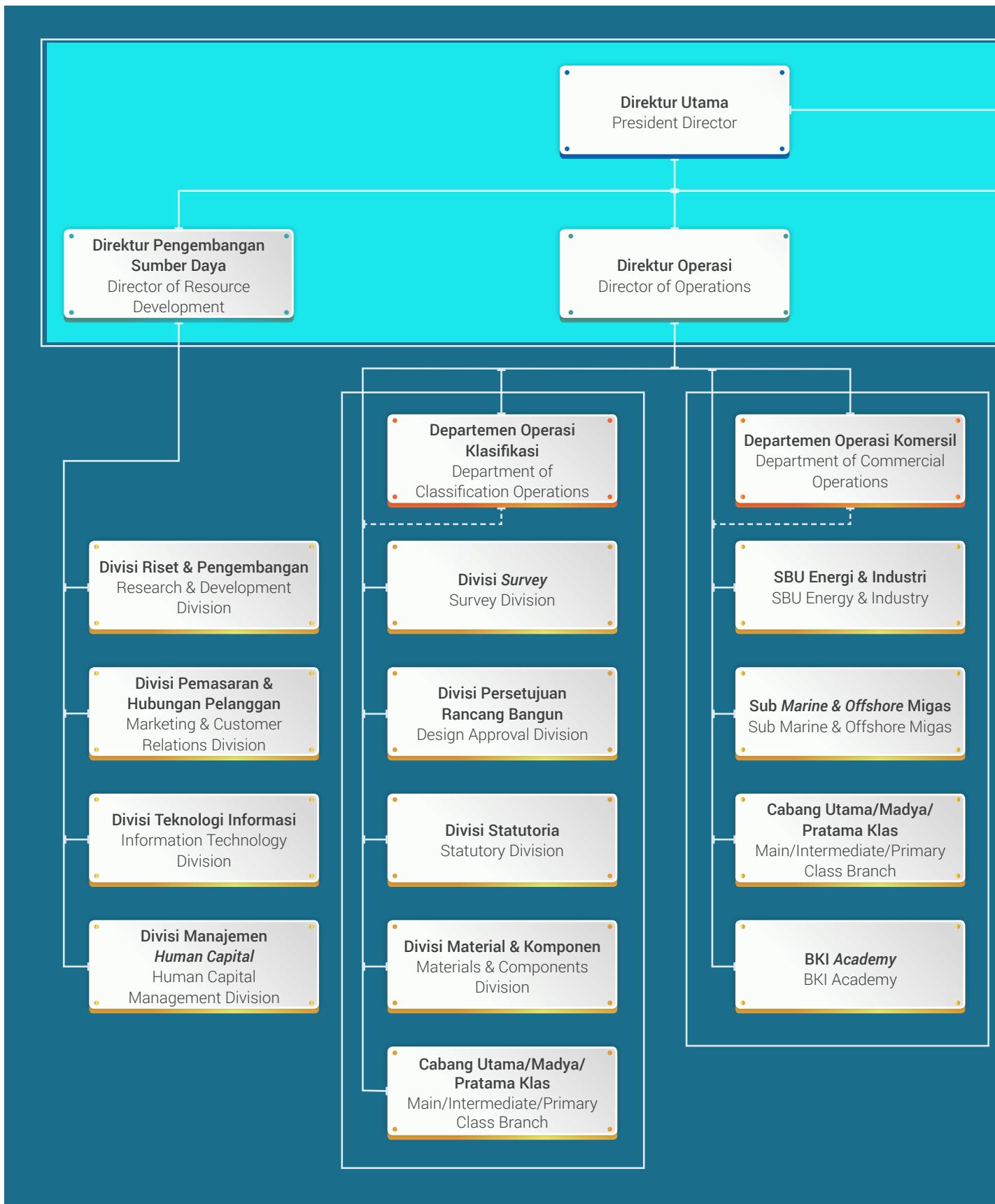
Portofolio MICE/MICE Portfolio

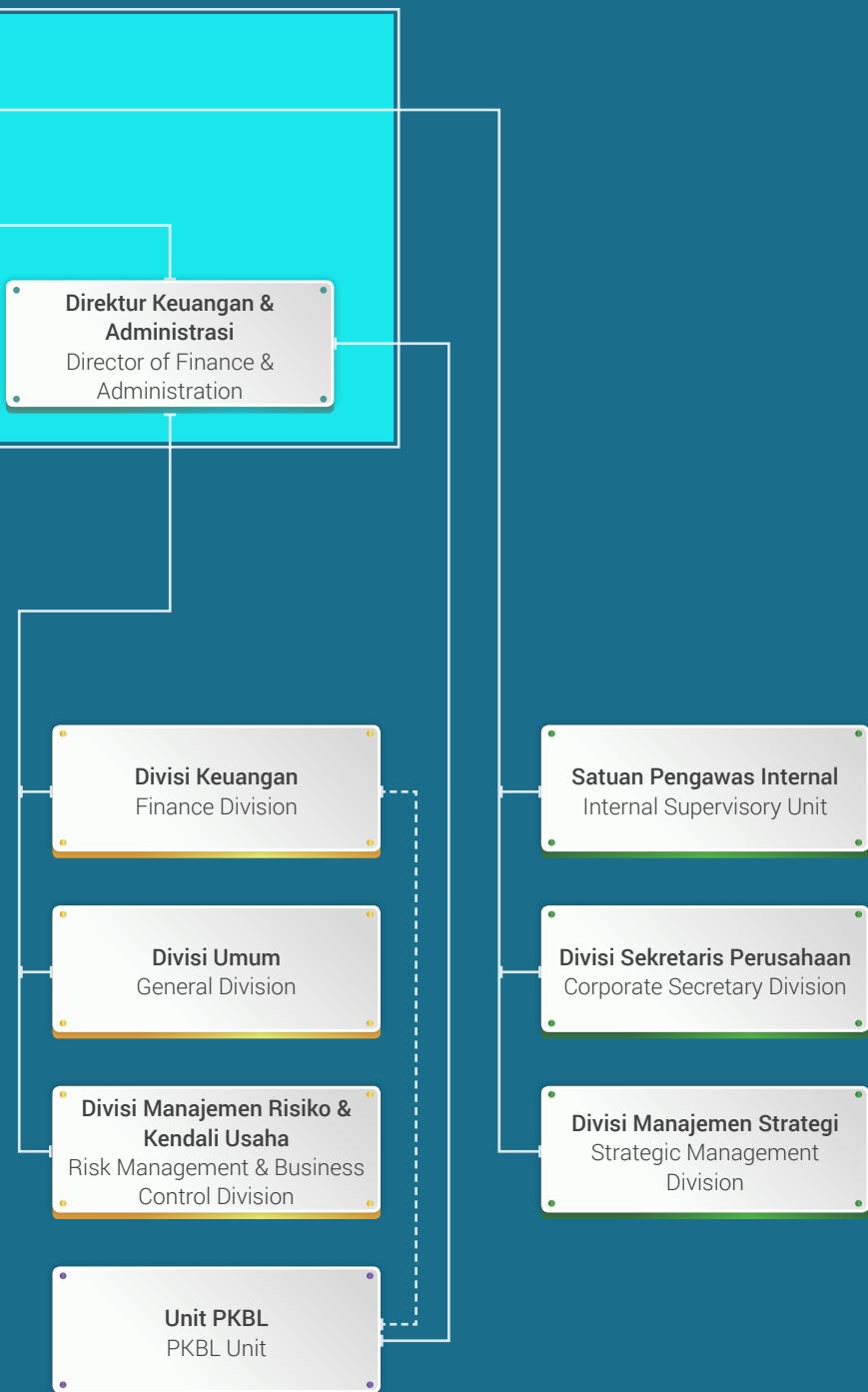
Penyelenggaran dan Penyediaan Ruang <i>Meeting</i>	Organizing and Provision of Meeting Rooms
Penyelenggaraan <i>Character Building</i> dan <i>Outbond</i>	Implementation of Character Building and Outbound
Penyelenggaraan Penghargaan dan Pemberian <i>Reward</i>	Organizing Awards and Rewards Provision
Seminar, Webinar & <i>Workshop</i>	Seminars, Webinars & Workshops
Penyelenggaraan Kegiatan Pameran dan Promosi	Organizing Exhibition and Promotion Activities



STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE





SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

Sumber daya manusia adalah aset sangat berharga bagi BKI yang bergerak di bidang layanan klasifikasi dan statutoria. Sumber daya manusia yang berkualitas membentuk persepsi positif konsumen terhadap perseroan.

Pengembangan sumber daya manusia dimulai sejak perekrutan pegawai hingga memberikan pelatihan dan *upskill* untuk menjaga sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dirancang secara berkelanjutan. Perseroan juga mengembangkan Budaya Perusahaan dan memastikan karyawan memiliki visi yang sama dengan visi Perseroan tentang layanan klasifikasi, Statutoria kelas dunia, serta sebagai penyedia layanan *independent assurance*.

Human resources are the most important asset for BKI, which is engaged in classification and statutory services, since quality human resources will form a positive perception of consumers towards the company.

The development of human resources in BKI began from the recruitment of employees to training and upskill programs, with the aim of simultaneously maintaining and improving the quality of human resources, which are designed in a sustainable manner. The Company also develops the Corporate Culture and ensures employees have the same vision as the Company's vision of classification, Statutory, and assurance services in the shipping industry.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (tidak termasuk Direksi)

Composition of Employee by Education Background (Excluding Board of Directors)

No.	Keterangan Description	S3	S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	Jumlah Total
I	Pegawai Tetap/Permanent Employee								
1.	Operasional/Operational	5	26	318	24	31	0	0	404
2.	Supporting/Supporting	0	19	137	26	74	2	0	258
	Sub Total I	5	45	455	50	105	2	0	662
II	Kontrak Kerja/Job Contract								
1.	Operasional/Operational	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Supporting/Supporting	0	0	25	3	20	0	0	48
	Sub Total II	0	0	25	3	20	0	0	48
III	Kontrak Proyek/Job Contract								
1.	Operasional/Operational	0	1	38	11	10	0	0	60
2.	Supporting/Supporting	0	0	12	10	5	0	0	27
	Sub Total III	0	1	50	21	15	0	0	87
	Total I+II+III								
1.	Operasional/Operational	5	27	356	35	41	0	0	464
2.	Supporting/Supporting	0	19	174	39	99	2	0	333
	TOTAL	5	46	530	74	140	2	0	797

**Komposisi pegawai berdasarkan usia
(tidak termasuk Direksi)**

**Composition of Employee by Age
(excluding Board of Directors)**

No.	Keterangan Description	Usia Age																Jumlah Total	
		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-50		51-55		55-60			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
I	Pegawai Tetap/ P e r m a n e n t Employee	0	2	26	11	125	16	110	28	119	22	89	12	53	8	37	4	559	103
II	Kontrak Kerja/Job Contract	5	1	8	12	7	3	3	2	2	1	1	0	1	0	2	0	29	19
III	Kontrak Proyek/ Job Contract	1	1	20	7	33	6	10	2	3	1	1	0	1	0	1	0	70	17
Total		6	4	54	30	165	25	123	32	124	24	91	12	55	8	40	4	658	139

**Komposisi pegawai berdasarkan
jabatan (tidak termasuk Direksi)**

**Permanent Employee Composition by
Position (Excluding Board of Directors)**

No.	Pangkat Minimum Minimum Grade	Jabatan Struktural Structural Position	Jumlah Total	Jabatan Fungsional Functional Position	Jumlah Total
1.	Pembina IV/C Junior Administrator IVC	Kepala Departemen/Head of Departement	2	Surveyor Utama Senior/ Senior Main Surveyor	0
		Kepala Divisi/Satuan/Sekper Head of Division/Unit/Corsec	13	Inspektor Utama Senior/ Senior Inspectore	0
		Kepala SBU/Head of SBU	2	Pemeriksa I senior/ Senior Researcher I	2
		Kepala Cabang Utama Klas/ Head of Main Branch Classification	6	Pengkaji I Senior/ Senior Reviewer I	1
		Kepala Cabang Utama Komersil/ Head of Main Branch Commercial	1	Ahli Sistem Analis I/ System Analys Expert I	0
				Peneliti I Senior/ Senior Researcher I	0
				Pemeriksa I/Examiner I	0
				Pengkaji I/Reviewer I	1
				Akuntan I/Accountant I	0
				Analis I/Analys I	0
				Engineer I/Engineer I	0
2.	Pembina IV/A Administrator IV/A	Senior Manager Klas/Senior Classification Manager	12	Surveyor Senior I/ Senior Surveyor I	7
		Senior Manager Komersil/Senior Commercial Manager	9	Inspector Senior I/ Senior Inspector I	4
		Ka.Cab.Madya Klas/Head of Middle Branch	4	Pengkaji II/Reviewer I	5
		Ka. Cab. Madya Komersil/Head of Middle Commercial	4	Akuntan II/Accountant II	3

No.	Pangkat Minimum Minimum Grade	Jabatan Struktural Structural Position	Jumlah Total	Jabatan Fungsional Functional Position	Jumlah Total
		Senior Manager Pusat/ Senior Manager Head Office	31	Pemeriksa II/Reviewer II	2
		Ka. PMU BKI Akademi/ Head of PMU BKI's Academy	1	Peneliti II/Researcher II	1
		Ka. PMU Telematika/ Head of PMU Telematics	1	Analis II/Analys II	1
				Engineer II/Engineer II	0
				Ahli Sistem Analis II/ System Analys Expert	1
3.	Utama III/D	Kepala Cabang Klas/ Head of Branch Classification	8	Surveyor Senior II/ Senior Surveyor II	16
		Kepala Cabang Komersil / Head of Branch Commercial	6	Inspector Senior II/ Senior Inspector II	2
		Ka. Pengurus Dana Pensiun/ Head of Pension Fund	1	Pemeriksa III/ Examiner III	1
				Pengkaji III Teknik/ Technical Reviewer III	5
				Akuntan III/Accountant III	0
				Peneliti III/Researcher III	1
				Engineer III/Engineer III	0
				Analis III/Analys III	0
				Ahli Sistem Analis III/ System Analys Expert III	0
4.	Utama III/B	Manager Kantor Pusat/ Manager of Head Office	18	Surveyor/Surveyor	144
		Ka. Unit PKB Head of PKBL Unit L/	1	Inspector/Inspector	26
		Manager Klas/Manager of Class	9	Engineer IV/Engineer IV	2
		Manager Komersil/ Manager of Commercial	7	Pemeriksa IV/Examiner IV	4
		Ka. Perwakilan/ Head of Representative	0	Pengkaji IV/Reviewer IV	19
				Akuntan IV/Accountant IV	1
				Peneliti IV/Researcher IV	5
				Analis IV/Analys IV	0
				Ahli Sistem Analis IV/ System Analys Expert IV	4
				Kasir Kantor Pusat/ Cashier at Head Office	1
				Koordinator Sekretaris Staf F/ Secretary Coordinator Staff F	16
5.	Madya II/D			Asisten Surveyor I/ Surveyor Assistant I	0
				Asisten Inspector I/ Inspector Assistant I	64
				Asisten Engineer/Engineer Assistant	0
				Asisten Pengkaji/Reviewer Assistant	17

No.	Pangkat Minimum Minimum Grade	Jabatan Struktural Structural Position	Jumlah Total	Jabatan Fungsional Functional Position	Jumlah Total
		Asisten Peneliti/ Resesarcher Assistant	0		
		Asisten Akuntan I/ Accountant Assistant I	3		
		Asisten Pemeriksa/ Examiner Assistant	2		
		Asisten Ahli Sistem Analis/ Assistant System Analys Expert	4		
		Kasir Cabang Utama/Camat/DKS Casher at Main Branch/Mid Branch/ DKS	1		
		Staf E/Staff E	8		
6.	Madya II/C	Asisten Surveyor II/ Surveyor Assistant II	0		
		Asisten Inspector II/ Inspector Assistant II	29		
		Asisten Akuntan II/ Accountant Assistant II	0		
		Staf D/Paramedis Senior/ Staff D/Senior Paramedic	19		
7.	Madya II/B	Operator Pengujian/Testing Operator	14		
		Asisten Akuntan III/ Accountant Assistant III	0		
		Staf C/Staff C	51		
8.	Madya I/D	Staf B/Staff B	29		
9.	Muda I/ B	Staf A/Staff A	10		
	Total	136	526		



**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020
PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**

**STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
ABOUT THE RESPONSIBILITIES OF THE 2020 ANNUAL REPORT OF
PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Biro Klasifikasi Indonesia tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2020 annual report of PT Biro Klasifikasi Indonesia have been presented in their entirety and that we assume full responsibility for the accuracy of the contents of this Annual Report. This statement is duly made in all integrity.

Dewan Komisaris

The Board of Commissioners



Agung Kuswandono

Komisaris Utama
President Commissioner



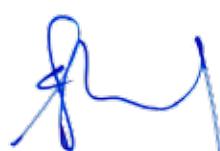
M. Amperawan

Komisaris
Commissioner



Dwi Budi Sutrisno

Komisaris
Commissioner



Raden Harry Hikmat

Komisaris
Commissioner

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020
PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**

**STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS
ABOUT THE RESPONSIBILITIES OF THE 2020 ANNUAL REPORT OF
PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Biro Klasifikasi Indonesia tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2020 annual report of PT Biro Klasifikasi Indonesia have been presented in their entirety and that we assume full responsibility for the accuracy of the contents of this Annual Report. This statement is duly made in all integrity.

Direktur

The Board of Directors



Rudiyanto

Direktur Utama
President Director



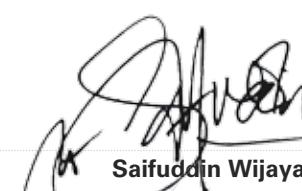
Bandung Pardede

Direktur Keuangan dan
Administrasi
Director of Finance and
Administration



Mohamad Cholil

Direktur Operasi
Director of Operation



Saifuddin Wijaya

Direktur Pengembangan Sumber Daya
Director of HR Development





ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS



bJ



Tahun 2020 merupakan tahun penuh tantangan. Pandemi Covid-19 mengguncang pertumbuhan perekonomian nasional hingga minus. Meski demikian PT Biro Klasifikasi Indonesia tetap mampu mencatat laba bersih sebesar Rp100,49 miliar dan laba komprehensif sebesar Rp92,27 miliar, melebihi target RKAP.

The year 2020 is a year full of challenges as the Covid-19 pandemic shook national economy and slipped into minus growth. However, PT Biro Klasifikasi Indonesia was still able to record a net profit of Rp100.49 billion and a comprehensive profit of Rp92.27 billion, exceeding the RKAP target.

TINJAUAN UMUM **GENERAL REVIEW**

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak akhir triwulan pertama tahun 2020 membuat pertumbuhan ekonomi terkontraksi. Bukan hanya Indonesia, tapi juga di semua belahan dunia. Meski demikian Indonesia masuk dalam kategori moderat dengan pertumbuhan ekonomi minus 2,2% hingga minus 1,7% pada akhir tahun 2020. Skenario pemulihan ekonomi yang diharapkan terlihat di triwulan III ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan dan tertahan pada triwulan IV.

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik dibanding dengan negara tetangga Malaysia yang mengalami kontraksi minus 5,6%. Singapura minus 5,8%, serta Thailand minus 5,8%. Indonesia menjadi salah satu negara dengan daya tahan pertumbuhan ekonomi terbaik di antara kelompok negara G-20 dan ASEAN.

Pandemi juga membuat investasi swasta mengalami kontraksi minus 4,3 hingga minus 4,0% meski kinerja ekspor mulai terlihat membaik, mendekati 0% setelah sempat menyentuh minus 10,8%. Hampir semua sektor industri terdampak tak terkecuali industri galangan kapal yang utilitasnya turun hingga di bawah angka 50%. Hal ini diakibatkan oleh tipisnya arus kas industri pelayaran.

The Covid-19 pandemic that has lasted since the end of the first quarter of 2020 has made economic growth contract. Not only in Indonesia, but also in all parts of the world. However, Indonesia is in the moderate category, with an economic growth of minus 2.2% to minus 1.7% at the end of 2020. The economic recovery scenario that was expected to be seen in the third quarter did not work as expected and was delayed in the fourth quarter.

Indonesia's economic growth rate is still better than the neighboring Malaysia, which experienced a contraction of minus 5.6%. Or Singapore with minus 5.8%, and Thailand minus 5.8%. Indonesia is regarded as one of the countries with the best resilience for economic growth among the G-20 and ASEAN group of countries.

The pandemic also caused private investment to contract from minus 4.3% to minus 4.0% even though export performance began to grow better, approaching 0% after briefly touching minus 10.8%. Almost all industrial sectors are affected, including the shipbuilding industry, whose utility has fallen below 50%. This is due to the thin cash flow of the shipping industry.

TINJAUAN KINERJA PER SEGMENT

PERFORMANCE REVIEW PER SEGMENT

PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menyelenggarakan dua layanan utama yakni Jasa Klasifikasi dan Non-Klasifikasi atau yang disebut Jasa Komersil. Jasa Klasifikasi meliputi pelaksanaan survei, persetujuan gambar, penerbitan sertifikasi, serta kegiatan yang berkaitan dengan survei dan sertifikasi statutoria. Jasa ini dibagi dalam dua klas yaitu Klas Tunggal (*Single Class*) dan Klas Ganda (*Dual Class*). Klas Ganda merupakan kerja sama PT BKI dengan badan klasifikasi *partner (mutual representative)*. Layanan jasa klasifikasi dan statutoria ini dilakukan melalui kantor cabang jasa klasifikasi di kota-kota pelabuhan utama Indonesia.

Jasa Non-Klasifikasi atau Komersil terbagi dalam kelompok jasa *Marine, Offshore, Industry, dan Energy*. Layanan Jasa Komersil secara khusus dilayani melalui tiga *Strategic Business Unit (SBU)* dan Kantor Cabang Komersil BKI. Upaya pengembangan operasional Perusahaan dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah penggunaan dan jenis layanan yang ditawarkan yakni melalui intensifikasi dan diversifikasi layanan yang sejalan dengan kompetensi inti Perusahaan.

Segmen Klasifikasi

Sepanjang tahun 2020, Perseroan fokus pada pemasaran dan bekerja sama dengan sesama perusahaan BUMN dan perusahaan swasta. Di Segmen Klasifikasi setidaknya tercatat 29 kegiatan pemasaran. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen Direksi untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020 pendapatan Segmen Klas mencapai Rp456.505 juta atau tercapai 107,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp425.650 juta. Jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019, pendapatan Segmen Klas mengalami penurunan sebesar 7,28%.

Beberapa produksi, baik di Klas Tunggal dan Klas Ganda, tetap mengalami pertumbuhan positif. Produksi Statutoria di Kelas Tunggal tercapai 146,65% dari anggaran, sementara di Klas Ganda produksi Statutoria mencapai 1.318,56%. Produksi Mempertahankan Klas Ganda Dalam Negeri tercapai 179,58% dari anggaran.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) provides two main services, namely Classification Services and Non-Classification Services or Commercial Services. Classification services include surveys, drawing approvals, certification services, and activities related to statutory surveys and certifications. This service is divided into two classes namely Single Classification and Dual Class. The Dual Class is provided in collaboration with other classification body (mutual representative). These classification and statutory services are carried out through the Classification Service Branch Offices in Indonesia's major port cities

Non-Classification Services or Commercial Services are divided into Marine, Offshore, Industry and Energy services groups. Specifically, Commercial Services are served through three Strategic Business Units (SBU) and BKI Commercial Branch offices. The development of the Company's operations is carried out by increasing the usage and types of services offered, namely through the intensification and diversification of services in line with the Company's core competencies.

Classification Segment

Throughout 2020, the Company focused on marketing and entered into collaboration with other state-owned companies and also with private companies. In the Classification Segment, at least there were 29 marketing activities were conducted. This is an evidence of commitment from the Board of Directors to meet the set targets.

In 2020, the revenues from Class Segment reached Rp456,505 million or 107.25% of the set budget of Rp425,650 million. When compared to 2019 revenue, Class Segment revenue decreased by 7.28%.

A number of productions, both in Single Class and Double Class, continued to show a positive growth. Statutoria's production in Single Class reached 146.65% of the budget, while in Double Class Statutoria's production reached 1,318.56%. Production of Domestic Dual Class achieved 179.58% of the budget.



Secara umum pada tahun 2020, Segmen Klas menyumbang 57,65% dari pendapatan Perseroan yang mencapai Rp791.835 juta.

In general, in 2020, the Class Segment contributed 57.65% of the Company's revenue which reached Rp791,835 million.

Realisasi produksi Segmen Klasifikasi 2020

Realization of the production of Classification Segments in 2020

(dalam jutaan rupiah/in million rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2020 (Audited) Realization of 2020 (Audited)	RKAP 2020	Realisasi 2019 (Audited) Realization of 2019 (Audited)	Pencapaian (%) Achievement (%)	Pertumbuhan (%) Growth (%)
	1	2	3	4=1:2	5=1:3
Klas Tunggal-Dalam Negeri Single Class - Domestic	418.683	412.208	458.350	101,57	91,35
Klas Tunggal Luar Negeri Single Class – Overseas	17.420	3.678	18.510	473,63	94,11
Klas Ganda - Dalam Negeri Dual Class - Domestic	21.480	8.530	13.700	251,82	156,79
Klas Ganda- Luar Negeri Dual Class - Overseas	1.785	-	1.747	-	102,18
Klas Asing – di Indonesia Foreign Class – in Indonesia	154	-	20	-	770,00
Share Partner	(3.017)	-	-	-	-
Jumlah Total	456.505	425.650	492.327	107,25	92,72

Segmen Komersil

Secara umum penerimaan Segmen Komersil mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait dengan pandemi Covid-19. Meski demikian ada beberapa bidang Segmen Komersil yang melebihi pendapatan tahun 2019. Jasa Pengujian mencapai 103,8% dibandingkan tahun 2019. Pendapatan Jasa Survei tercapai 131,47% dibanding tahun sebelumnya. Jasa Pemetaan dan Jasa Assesment juga lebih tinggi dibanding tahun 2019 yakni sebesar 104,47% dan 108,49%.

Commercial Segments

In general, Commercial Segment revenue decreased compared to the previous year due to the Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy related to the Covid-19 pandemic. However, there are several areas of the Commercial Segment that exceed revenues in 2019. Testing Service Revenues reached 103.8% compared to 2019. Survey Service Revenues was 131.47% compared to the previous year. Mapping Service and Assessment Service Revenues are also higher than in 2019 at 104.47% and 108.49%, respectively.

Realisasi Produksi Segmen Komersil Tahun 2020

Realization of Commercial Segment Production in 2020

(dalam jutaan rupiah/in million rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2020 (Audited) Realization of 2020 (Audited)	RKAP	Realisasi 2019 (Audited) Realization of 2019 (Audited)	Pencapaian (%) Achievement (%)	Pertumbuhan (%) Growth (%)
	1	2	3	4=1:2	5=1:3
Jasa Pengujian Testing Service	80.388	49.191	77.278		103,86
Jasa Inspeksi Inspection Service	162.321	39.852	211.178		76,93
Jasa Pemetaan Mapping Service	10.582	20.503	9.754		108,49
Jasa Survei Survey Service	22.633	10.813	17.215		131,47
Jasa Assessment Assessment Service	6.297	10.443	6.010		104,78
Jasa Audit Audit Service	3.165	6.799	5.902		53,63
Jasa Pengujian Labor Labor Testing Service	4.586	2.171	5.019		91,37
Jasa Monitoring Monitoring Testing Service	302	917	650		46,46
Jasa Supervisi Supervisory Service	3.827	19.855	7.156		53,48
Jasa Sertifikasi Certification Service	35.874	118.201	57.089		62,84
Jasa Konsultasi Consultancy Service	364	19.834	6.615		5,50
Jasa Training Training Service	5.703	10.934	10.231		55,74
Jasa Labor Supply Labor Supply Service	1.855	1.950	7.744		23,95
Sektor Maritim Maritime Sector	84.606	80.118	123.631	105,60	68,43
Sektor Industri Industrial Sector	162.451	104.286	211.178	155,78	76,93
Sektor Infrastruktur Infrastructure sector	90.840	127.058	87.032	71,49	104,38
Share Partner	(2.567)		(5.730)		44,80
Jumlah Total	335.330	325.000	416.111	103,18	80,59

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

FINANCIAL PERFORMANCE OVERVIEW

Pembahasan kinerja keuangan dalam disusun berdasarkan Laporan Keuangan yang disajikan sesuai prinsip-prinsip akuntansi keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia. Laporan Keuangan meliputi dua tahun buku terakhir, yakni Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebagai pembanding. Bahasan kinerja keuangan disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan atas Laporan Keuangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PKF, Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan RSM, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun terakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Aset

Aset atau aktiva adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan yang diperoleh dari transaksi atau peristiwa di masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat atau keuntungan, baik finansial maupun non-finansial, di masa mendatang. Jumlah aset yang besar serta produktif merupakan modal dasar bagi berbagai upaya pengembangan usaha. Aset terbagi atas Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar.

Per 31 Desember 2020, total Aset Perseroan sebesar Rp1.016.459 juta atau tercapai 115,18% dari anggaran sebesar Rp882.516 juta. Jika dibandingkan dengan akhir Desember 2019 sebesar Rp947.628 juta, total aset naik sebesar 7,26%. Hal ini terjadi karena kenaikan kemampuan Perseroan dalam meningkatkan sumber daya ekonomi.

In this Annual Report, the discussion of PT BKI's financial performance is based on the Financial Statements which are presented in accordance with generally accepted financial accounting principles (PSAK) in Indonesia. The Financial Statements include the last two financial years, namely the Financial Year ending on December 31, 2020 and December 31, 2019 as a comparison. The discussion of financial performance is conveyed by taking into consideration the explanation in the notes to the Financial Statements, as an inseparable part of this Annual Report.

The financial statements for the year ending December 31, 2020 have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) PKF, Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan RSM, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners with fair opinion in all material respects, the financial position of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) date December 31, 2020, and its financial performance and cash flow for the last year on that date in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Asset

Assets are all resources owned by the Company that are obtained from transactions or events in the past and are expected to provide benefits or profits in the future, both financial and non-financial. The large and productive amount of assets is the Company's basic capital in developing its business. Assets consist of Current Assets and Non-Current Assets.

As of December 31, 2020, the Company recorded a total assets of Rp1.016.459 million or reached 115,18% of its budget. Compared to 2018, which amounted to Rp882.516 million. When compared to the end of December 2019 of Rp947,628 million, total assets increased by 7.26%. This is due to the increase in the Company's ability to increase economic resources.

Uraian	2020	2020 (revisi/ revised)	2019	Description
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan setara kas	405.649	252.847	246.546	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	273.081	277.645	308.069	Accounts receivable
Pendapatan akan diterima	4.981	-	17.887	Accrued revenue

Uraian	2020	2020 (revisi/ revised)	2019	Description
Uang muka	254	500	3.565	Advance payment
Pajak dibayar di muka	1.025	5.000	6.102	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka	2.049	3.500	11.136	Prepaid expenses
Aset lancar lainnya	987	1.000	1.092	Other current assets
Jumlah aset lancar	688.026	540.492	594.397	Total current assets
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset tetap	279.978	297.000	289.789	Fixed assets
Aset pajak tangguhan	47.436	45.000	45.373	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	1.018	24	18.070	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar	328.434	342.024	353.232	Total non-current assets
JUMLAH ASET	1.016.459	882.516	947.629	TOTAL ASSETS

Aset Lancar

Per 31 Desember 2020, Aset Lancar sebesar Rp688.026 juta atau tercapai sebesar 127,30% dari anggaran. Aset Lancar mengalami pertumbuhan sebesar 15,75% dari tahun 2019 yang mencapai Rp594.397 juta. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan Kas dan Setara dengan Kas sebesar Rp405.649 juta lebih besar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp246.547 juta.

Aset Tidak Lancar

Nilai Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp24.798 juta dari Rp353.232 juta pada 31 Desember 2019 menjadi Rp328.434 juta. Hal ini lebih disebabkan oleh penurunan Aset Tidak Lancar Lainnya dari Rp18.070 juta menjadi Rp1.018 juta.

Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban Perseroan yang timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu, atau nilai dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang.

Per 31 Desember 2020 jumlah liabilitas Perseroan Sebesar Rp227.444 juta turun dibandingkan pada periode yang sama tahun 2019 yakni sebesar Rp239.877 juta. Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp90.391 juta dan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp137.052 juta. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah Liabilitas tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,18%.

Current Assets

As of December 31, 2020, Current Assets amounted to Rp688,026 million or 127.30% of the budget. Current Assets grew by 15.75% from 2019 which reached Rp594,397 million. This increase was driven by an increase in Cash and Cash Equivalents of Rp405,649 million, which was higher than in 2019 of Rp246,547 million. Current Assets.

Non-current Assets

Total Non-Current Assets as of December 31, 2020 decreased by Rp24,798 million, from Rp353,232 million on December 31, 2019 to Rp328,434 million. This was mainly due to a decrease in Other Non-Current Assets from Rp18,070 million to Rp1,018 million.

Liabilities

Liability is the Company's obligations arising from past transactions or events, or debts owned by the company, both short-term and long-term debt.

As of December 31, 2020, the Company's total liabilities were recorded at Rp227,444 million, a decrease compared to the same period in 2019 which was Rp239,877 million. Current Liabilities amounted to Rp90,391 million and Long-Term Liabilities amounted to Rp137,052 million. When compared to 2019, total Liabilities in 2020 decreased by 5.18%.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp90.391 juta mengalami penurunan sebesar Rp27.739 juta atau turun sebesar 23,48% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini lebih diakibatkan oleh turunnya utang pajak dari Rp50.956 juta pada tahun 2019 menjadi Rp29.125 juta pada tahun 2020.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp137.053 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp15.307 juta atau sebesar 12,57% dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Tabel Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas jangka pendek	2020 (audited)	RKAP (Revisi/revised)	2019 (audited)	Current liabilities
Utang usaha	10.422	10.713	18.720	Accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	39.849	20.000	35.784	Accrued expenses
Utang pajak	29.125	25.000	50.956	Taxes payable
Utang bruto	10.995	7.500	12.653	Gross payable
Liabilitas jangka pendek lainnya	-	86	17	Other current liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek	90.391	63.299	118.130	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Liabilitas imbalan pasca kerja	137.053	66.739	121.746	Post-employment benefits obligations
Jumlah liabilitas jangka panjang	137.052.996.094	66.739.000.000	121.746.489.201	Total liabilities non-current liabilities
Jumlah liabilitas	227.444	130.038	239.877	Total liabilities
Ekuitas				Equity
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Modal dasar 600.000 saham				Equity Attributable to the Owner of Parent Entity Share Capital - par Value Rp1,000,000 per Share Authorized Capital 600,000 Shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 255.000 saham	255.000	255.000	255.000	and Paid Up Capital - 255,000 Shares
Saldo laba				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	425.985	424.859	326.857	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	100.499	56.860	110.143	Unappropriated
Komponen ekuitas lainnya				Others components of equity
Selisih Penjabaran Mata Uang Asing	2.759	2.759	2.759	Difference in Foreign Currency Translation
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Pasca Kerja	4.771	13.000	12.992	Actuarial Gain/(Loss) of Employee Benefits
Jumlah ekuitas	789.015	752.478	707.752	Total equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.016.459	882.516	947.629	Total Liabilities and Equity

Current Liabilities

Current Liabilities as of December 31, 2020 amounted to Rp90,391 million, decreased by Rp27,739 million or 23.48% compared to the previous year. This was more due to a decrease in tax payables from Rp50,956 million in 2019 to Rp29,125 million in 2020.

Long-term Liabilities

Long-Term Liabilities as of December 31, 2020 amounted to Rp137,053 million or an increase of Rp15,307 million or 12.57% compared to the previous year in the same period.

Tabel Liabilitas dan Ekuitas



Ekuitas

Realisasi nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp789.015 juta naik sebesar Rp81.264 juta dibanding tahun 2019 sebesar Rp707.752 juta. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya jumlah Ekuitas mengalami kenaikan sebesar 11,48%. Pada tahun 2020 Perseroan mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp100.499 juta.

Equity

Realization of Equity as of December 31, 2020 was Rp789,015 million, an increase of Rp81,264 million compared to 2019 of Rp707,752 million. When compared to the same period the previous year, total Equity increased by 11.48%. In 2020 the Company recorded a profit for the year of Rp100,499 million.

Pendapatan

Total pendapatan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp791.835 juta atau tercapai 105,49% dari anggaran tahun 2020. Total pendapatan ini terdiri dari pendapatan Klas sebesar Rp456.505 juta atau tercapai 107,25% dari anggaran yakni sebesar Rp425.650 juta dan pendapatan Komersil sebesar Rp335.330 juta, tercapai 103,18% dari anggaran sebesar Rp325.000 juta.

Jika dibanding tahun sebelumnya, total pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 12,84%. Hal ini diakibatkan oleh situasi perekonomian yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Meski demikian jumlah total pendapatan melebihi dari anggaran RKAP tahun 2020.

Revenues

Total revenues in 2020 was recorded at Rp791,835 million or 105.49% of the 2020's budget. It consists of Class Revenues of Rp456,505 million or 107.25% of the budget, which was Rp425,650 million, and Commercial Revenues amounting to Rp335,330 million, or 103.18% of the budget of Rp325,000 million.

When compared to the previous year, total revenues in 2020 decreased by 12.84%. This is due to the economic situation that is experiencing contraction due to the Covid-19 pandemic. However, the total revenue exceeds the 2020 RKAP budget.

Laporan Rugi Laba

Income Statement

Uraian Description	Realisasi 2020 (audited) Realization in 2020 (audited)	RKAP 2020 (revisi/revised)	Realisasi 2019 (Audited) Realization in 2019 (audited)	Pencapaian Target (%) Achievement of Target (%)	Pertumbuhan (%) Growth (%)
	1	2	3	4=2:3	5=2:4
Pendapatan Bersih/ Net Revenues	791.835.142.259	750.650.000.000	908.438.955.359	105,49	87,16
Beban Usaha/ Operating Expenses	645.874.018.753	647.130.000.000	737.470.431.600	99,81	87,58
Laba Usaha/Operating Incomes	145.961.123.506	103.520.000.000	170.968.523.759	141,00	85,37
Pendapatan (Beban) Lain/ Other (Income) Expenses	(12.937.182.289)	(22.289.000.000)	(20.360.673.386)	58,04	63,54
Laba sebelum pajak / Profit Before Tax	133.023.941.217	81.231.000.000	150.607.850.373	163,76	88,32
Pajak Penghasilan / Income Tax	(32.524.657.127)	(24.369.000.000)	(40.464.685.932)	133,47	80,38
Laba Setelah Pajak/ Profit After Tax	100.499.284.090	56.862.000.000	110.143.164.441	176,74	91,24
(Beban) Pendapatan Komprehensif/ Comprehensive Revenues	(8.221.103.555)	-	(7.402.010.874)	-	111,06
Laba Komprehensif/ Comprehensive Incomes	92.278.180.535	56.862.000.000	102.741.153.567	162,28	89,82





Beban Usaha

Beban Usaha Perseroan terdiri dari Beban Jasa, Beban Pemasaran dan Humas serta Beban Administrasi dan Umum. Beban jasa secara total terealisasi sebesar Rp471.086 juta atau 0,19% di atas anggarannya sebesar Rp470.206 juta. Beban Pemasaran & Humas secara total terealisasi sebesar Rp5.515 juta atau 20,82% di atas anggarannya sebesar Rp4.565 juta. Beban Administrasi dan Umum secara total terealisasi sebesar Rp169.273 juta atau 1,79% di bawah anggarannya sebesar Rp172.359 juta.

Secara keseluruhan Beban Jasa, Beban Pemasaran & Humas, dan Beban Administrasi umum terealisasi sebesar Rp645.874 juta atau 0,19% di bawah anggarannya sebesar Rp647.130 juta.

Laba Usaha

Perseroan membukukan Laba Usaha sebesar Rp145.961 juta atau mencapai 141% dari anggaran sebesar Rp103.520 juta. Jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp170.969 juta, Laba Usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar 14,63%. Penurunan ini diakibatkan oleh kontraksi ekonomi nasional karena pandemi Covid-19.

Laba Sebelum Pajak

Realisasi Laba Sebelum Pajak mencapai Rp133.023 juta, turun 11,68% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp150.608 juta. Namun jika dibandingkan dengan anggarannya Rp81.231 juta, Laba Sebelum Pajak tercapai 163,76%.

Laba Bersih

Realisasi Laba Bersih sebesar Rp100.499 juta di atas dari anggaran sebesar Rp56.862 juta atau tercapai 176,74%. Dibanding tahun sebelumnya realisasi Laba Bersih turun 8,76%.

Laba Komprehensif Periode Berjalan

Laba komprehensif di tahun 2020 tercapai sebesar Rp92.278 juta, tercapai 162,28% dari anggaran sebesar

Operating Expenses

The Company's Operating Expenses consist of Service Expenses, Marketing and Public Relations Expenses and Administration and General Expenses. Total Service expenses was Rp471,086 million or 0.19% above the budget of Rp470,206 million. Total Marketing & Public Relations expenses were Rp5,515 million or 20.82% above the budget of Rp4,565 million. General and Administrative Expenses realized Rp169,273 million or 1.79% below the budget of Rp172,359 million.

In overall, the realization of Service Expenses, Marketing & Public Relations Expenses, and General Administration Expenses were Rp645,874 million or 0.19% below the budget of Rp647,130 million.

Operating Income

The Company recorded an Operating Profit of Rp145,961 million or 141% of the budget of Rp103,520 million. When compared to 2019 which reached Rp170,969 million, the Company's Operating Profit decreased by 14.63%. This decline was caused by the contraction of the national economy due to the Covid-19 pandemic.

Profit Before Tax

Realization of Profit Before Tax reached Rp133,023 million, decreased by 11.68% compared to the previous year which reached Rp150,608 million. However, when compared to the budget of Rp81,231 million, Profit Before Tax reached 163.76%.

Net Income

Realization of Net Income reached Rp100,499 million above the budget of Rp56,862 million or 176.74% achieved. Compared to the previous year, the realization of Net Profit decreased by 8.76%.

Comprehensive Income for the Current Year

Comprehensive Income in 2020 reached Rp92,278 million, or 162.28% of the budget of Rp56,862 million,

Rp56.862 juta. Laba Komprehensif tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10,18% dibanding tahun 2019 yang mencapai Rp102.741 juta.

Arus Kas

Arus kas dan Setara Kas Perseroan pada akhir tahun sebesar Rp405.648 juta mengalami kenaikan sebesar Rp159.103 juta dibanding tahun 2019 sebesar Rp246.545 juta. Kas yang diperoleh dari kegiatan operasional sebesar Rp174.493 juta naik sebesar Rp63.233 juta dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp111.260 juta. Kas yang digunakan untuk investasi mencapai Rp4.375 juta dan Kas yang digunakan untuk pendanaan Rp11.015 juta.

Laporan Arus Kas

Uraian/Description	Audited 2020	Audited 2019
Arus Kas Bersih dari Operasi/Net Cash Flow from Operations	174.493.243.004	111.260.433.468
Arus Kas untuk Investasi/Cash Flow for Investment	(4.375.199.777)	(12.109.671.663)
Arus Kas untuk Pendanaan/Cash Flow for Funding	(11.015.000.000)	(7.289.777.000)
Kenaikan Kas & Setara Kas/Increase in Cash & Cash Equivalents	159.103.043.227	91.860.984.805
Saldo Awal Kas & Setara Kas/Cash & Cash Equivalents Beginning Balance	246.545.816.799	154.684.831.994
Saldo Akhir Kas & Setara Kas/Cash & Cash Equivalents End Balance	405.648.860.026	246.545.816.799

Likuiditas dan Solvabilitas

Rasio likuiditas dan rasio Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nilai rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek, yang diukur melalui rasio kas dan rasio lancar.

Secara umum likuiditas Perseroan cukup baik dengan *Current Ratio* 761,16%. Hal ini menunjukkan kondisi finansial perusahaan cukup aman dengan hutang - hutang jangka pendek Perusahaan dijamin lebih dari 7 (tujuh) kali oleh aset lancar perusahaan.

Cash Ratio mencapai 448,77% dengan saldo Kas dan setara kas mencapai Rp405.649 juta. Hal ini menunjukkan kondisi likuiditas Perusahaan naik jika dibandingkan akhir

and is decreased by 10.18% compared to 2019 which reached Rp102,741 million.

Cash Flow

The Company's cash flow and cash equivalents at the end of the year amounted to Rp405,648 million, an increase of Rp159,103 million compared to 2019 which was Rp246,545 million. Cash obtained from operating activities amounted to Rp174,493 million, an increase of Rp63,233 million compared to the previous year of Rp111,260 million. Cash used for investment reached Rp4,375 million and cash used for funding was Rp11,015 million.

Cash Flow Statement

Liquidity and Solvency

The liquidity ratio and solvency ratio show the Company's ability to pay debts, both short term and long term. The value of the liquidity ratio shows the Company's ability to meet short-term liabilities, which is measured by the cash ratio and current ratio.

In general, the Company's liquidity is quite good with a Current Ratio of 761.16%. This shows that the Company's financial condition is quite safe with the Company's short-term payables are guaranteed more than 7 (seven) times by the company's current assets.

Cash Ratio reached 448.77% with cash and cash equivalents balance reaching Rp405,649 million. This shows that the Company's liquidity conditions have

tahun lalu. Naiknya likuiditas antara lain disebabkan oleh tertundanya pengadaan investasi perusahaan, serta diterapkan *cost cutting*/efisiensi terhadap biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan produksi.

increased compared to the end of last year. The increase in liquidity was caused, among other things, by delays in the procurement of the Company's investments, as well as the implementation of cost cutting/efficiency on expenses not directly related to production activities.

Kolektabilitas Piutang

Tingkat kolektabilitas Piutang digunakan untuk mengukur periode waktu yang diperlukan Perseroan untuk menagih piutang menjadi kas sejak selesainya pekerjaan/jasa dilakukan. Tingkat kolektabilitas piutang Perseroan tahun 2020 rata-rata mencapai 126 hari, atau Sembilan hari lebih cepat dari target anggaran yakni 135 hari. Kolektabilitas Segmen Klas 92 hari dan kolektabilitas Segmen Komersil 171 hari. Penyebab utama lambatnya pencairan piutang adalah Pandemi Covid-19 yang berdampak pada banyaknya debitur yang tidak dapat mengoperasikan kapal karena tidak ada muatan dan dampak pembekuan SIUPAL pada beberapa Perusahaan Pelayaran.

Receivable Collectability

The collectability of Receivables is used to measure the period of time required by the Company to collect receivables upon the completion of the work/services performed. The Company's average collectability in 2020 reached 126 days, or nine days faster than the budget target of 135 days. The collectability of the Class Segment is 92 days and the collectability of the Commercial Segment is 171 days. The main cause of the slow disbursement of receivables is the Covid-19 Pandemic which has an impact on many debtors who cannot operate the ship because there is no cargo and the impact of freezing SIUPAL on several shipping companies.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Selama kurun waktu periode pelaporan, Perseroan tidak melakukan ikatan material atas investasi barang modal. Dengan demikian, Laporan ini tidak memberikan informasi terkait nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, dan sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut.

Material Commitments for Capital Goods Investment

During the reporting period, BKI did not make any material commitments on capital goods investment. Accordingly, this report does not provide information regarding the name of the party to whom the commitment was made, the purpose of the commitment, as well as the source of funds expected to fulfill these commitment.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi

Tidak ada perubahan informasi dan fakta material yang terjadi sejak tanggal laporan akuntan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan.

Material Information and Facts

There is no change in information and material facts occurred after the date of the accountant's report to the date of issuance of the financial statements.

Perbandingan antara Target dengan Pencapaian Pendapatan

Pada tahun buku 2020 Perseroan mencatatkan Pendapatan sebesar Rp791.835 juta atau 105,49% dari anggaran RKAP tahun 2020. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Klas

Comparison Between Targets and Revenue Achievement

In the 2020 financial year, the Company recorded revenue of Rp791,835 million or 105.49% of the 2020 RKAP budget. This income consisted of Class Income of

sebesar Rp456.505 juta, mencapai 107,25% dari anggaran RKAP sebesar Rp425.650 juta, dan Pendapatan Komersil Rp335.330 juta atau mencapai 103,18% dari anggaran RKAP sebesar Rp325.000 juta.

Rp456,505 million, reaching 107.25% of the RKAP budget of Rp425,650 million, and Commercial Revenue of Rp335,330 million or 103.18% of the RKAP budget of Rp325,000 million.

Struktur Permodalan

Realisasi nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp789.015 juta naik sebesar Rp81.264 juta dibanding tahun 2019 sebesar Rp707.752 juta. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya jumlah Ekuitas mengalami kenaikan sebesar 11,48%.

Per 31 Desember 2020 jumlah liabilitas Perseroan Sebesar Rp227.444 juta turun dibandingkan pada periode yang sama tahun 2019 yakni sebesar Rp239.877 juta. Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp90.391 juta dan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp137.052 juta. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah Liabilitas tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,18%.

Capital Structure

The realization of the Equity as of December 31, 2020 was Rp789,015 million, an increase of Rp81,264 million compared to 2019 of Rp707,752 million. When compared to the same period the previous year, total Equity increased by 11.48%.

As of December 31, 2020, the Company's total liabilities were Rp227,444 million, a decrease compared to the same period in 2019, which was Rp239,877 million. Current Liabilities amounted to Rp90,391 million and Long-Term Liabilities amounted to Rp137,052 million. When compared to 2019, total Liabilities in 2020 decreased by 5.18%.

Tingkat Kesehatan Perseroan

Tingkat kesehatan Perseroan diukur dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia No. KEP100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002. Pada tahun 2019 tingkat kesehatan Perusahaan adalah "**Sehat AA**" dengan skor 86,00. Meski mengalami penurunan dibanding tahun 2019, pencapaian tingkat kesehatan Perseroan tahun 2020 masih di atas target RKAP yakni dengan skor "81,50".

Indikator Tingkat Kesehatan Perseroan

Uraian Description	Skor Score	
	2020	2019
I Aspek Keuangan/Financial Aspect	60,00	64,50
II Aspek Operasional/Operational Aspect	15,00	15,00
III Aspek Administrasi/Administration Aspect	11,00	14,00
Jumlah Skor/Total Score	86,00	93,50
Kondisi Perusahaan/Condition of the Company	Sehat "AA" / Sound "AA"	Sehat "AA" / Sound "AA"

Company Health Level

The Company's health level is measured by referring to the provisions as stated in the Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. KEP100/MBU/2002 dated June 4, 2002. In 2019 the Company's health level was "**Healthy AA**" with a score of 86.00. Although it has decreased compared to 2019, the achievement of the Company's health level in 2020 is still above the RKAP target, namely with a score of "81.50".

Company Health Level Indicator

PROSPEK USAHA **BUSINESS PROSPECT**

Dampak pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun 2021 dan masih memengaruhi kinerja Perseroan. Direksi membuat beberapa langkah antisipasi dengan melakukan penyesuaian prognosis bisnis dan revisi RKAP.

Meski dalam situasi yang masih tidak menentu Perseroan tetap optimistis dalam melihat prospek usaha. Perseroan telah melakukan terobosan-terobosan untuk memperluas pasar terutama Segmen Komersil. Perluasan pasar ini didasarkan pada hasil penelitian dan pengembangan kompetensi Perseroan di antaranya menawarkan *remote survey*, *remote sensor*, dan melakukan digitalisasi proses bisnis. Upaya lain adalah mengembangkan jaringan kerja sama baik dengan sesama BUMN maupun dengan perusahaan swasta dan asing.

Segmen Klas diprediksi tidak akan banyak mengalami kontraksi namun Perseroan akan tetap melakukan efisiensi terhadap *direct cost* dan *indirect cost*. Perusahaan juga akan melakukan program *cross function* dan utilisasi sumber daya manusia sebagai bentuk efisiensi *human resources*.

Melalui lembaga Pengembangan dan Penelitian, Perseroan selalu berusaha mencari model bisnis baru yang lebih menguntungkan dan memberikan nilai tambah. Diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan skala usaha dan kemandirian dalam mengembangkan kegiatan operasional.

The impact of the Covid-19 pandemic is estimated to continue until 2021 and will still affect the Company's performance. However, the Board of Directors has anticipated this by adjusting the business prognosis and revising the RKAP.

Even though the situation is still uncertain, the Company remains optimistic in viewing business prospects. The Company has made breakthroughs to expand the market, especially the Commercial Segment. This market expansion is based on the results of research and development of the Company's competencies, including offering remote surveys, remote sensors, and digitizing business processes. Another effort is to develop a network of cooperation both with fellow SOEs as well as with private and foreign companies.

The Class segment is predicted not to experience much contraction, but the Company will continue to make efficiency in direct costs and indirect costs. The company will also carry out cross function programs and utilization of human resources as a form of human resource efficiency.

Through the Institute for Development and Research, the Company always tries to find new business models that are more profitable and provide added value. It is hoped that this will increase business scale and independence in developing operational activities. Business Prospect

KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN **DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION**

Dividen atas bagian laba Tahun Buku 2019 yang ditetapkan dalam RUPS tanggal 30 Juni 2020, telah disetorkan pada tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp11.015.000.000 dari Laba Bersih Tahun Buku 2019 sesuai Risalah RUPS Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2019.

Dividends from the profit made in the Fiscal Year 2019 which was determined at the GMS on June 30, 2020, and was deposited on July 21, 2020 in the amount of Rp11.015.000.000 of the Net Profit for Fiscal Year 2019 in accordance with the minutes of the GMS Regarding the Approval of Annual Reports and Ratification of Reports Finance of 2019.

INFORMASI MATERIAL

MATERIAL INFORMATION

Investasi dan Sumber Pendanaan

Realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp4,908 juta di bawah anggarannya sebesar Rp18.374 juta atau sebesar 73,29%. Hal ini disebabkan sarana produksi yang pengadaannya melalui impor tertunda realisasinya karena dampak pandemi Covid-19 belum berakhir. Hal ini berpengaruh terhadap proyek/pekerjaan yang ikut tertunda.

Dalam melaksanakan investasi tahun 2020, manajemen Perusahaan menggunakan pembiayaan yang bersumber dari dana internal yang berasal dari cadangan atas pembagian laba perusahaan tahun buku 2019 dan biaya penyusutan tahun 2019. Investasi diarahkan pada upaya untuk meningkatkan produktivitas Perusahaan.

Investment and Funding Source

The realization of investment in 2020 was Rp4,908 million, below the budget of Rp18,374 million or 73.29%. This is because the realization of production facilities, which are procured through imports, has been delayed due to the impact of the Covid-19 pandemic. This affects the project/work that is also delayed.

In carrying out the investment in 2020, the Company's management uses financing from internal funds, namely from reserves of the distribution of Company profits for the 2019 financial year and 2019 depreciation costs. Investment is directed at efforts to increase the Company's productivity.

Privatisasi

BKI sedang dalam proses *holding* jasa survei dengan Sucofindo dan Surveyor Indonesia di mana telah ditetapkan konsultan *strategic management*.

Privatization

BKI is in the process of joining a survey service holding with Sucofindo and Surveyor Indonesia, and a strategic management consultant has been appointed.

Ekspansi

Pada 2020 Perseroan tidak melakukan ekspansi.

Expansion

In 2020, the Company conducted no expansion.

Divestasi

Pada 2020 Perseroan tidak melakukan divestasi.

Divestment

In 2020, the Company conducted no divestment.

Penggabungan Usaha

Pada 2020 Perseroan tidak melakukan penggabungan usaha.

Business Merger

In 2020, the Company conducted no merger with any other company.

Akuisisi

Pada 2020 Perseroan tidak melakukan Akuisisi.

Acquisition

In 2020 the Company did not make any Acquisition.

Restrukturisasi Hutang

Pada 2020 Perseroan tidak melakukan restrukturisasi hutang.

Debt Restructuring

In 2020, the Company did not conduct any debt restructurisation.



Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

Pada 2020 Perseroan tidak melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi yang dapat memberikan dampak material terhadap kinerja keuangan.

Transactions with Affiliated Parties

In 2020 the Company did not conduct any transaction with affiliated parties which could have a material impact on financial performance.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada 2020 Perseroan tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Transactions Containing Conflicts of Interest

In 2020 the Company did not conduct any transaction that contained conflicts of interest.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Pada 2020 tidak ada perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap status, kinerja dan laporan keuangan Perseroan.

Amendments to the Laws and Regulations

In 2020, there were no changes to the laws and regulations which had a significant effect on the status, performance and financial statements of the Company.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada 2020 tidak terjadi perubahan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja maupun laporan keuangan Perseroan.

Changes in Accounting Policies

In 2020 there were no changes in accounting policies that had a significant impact on the Company's performance or financial statements.

PEMASARAN MARKETING

Pemasaran menjadi salah satu bagian penting dari strategi pengembangan bisnis Perseroan. Pemasaran yang baik pada akhirnya akan memunculkan *brand loyalty*. Sepanjang tahun 2020 Perseroan telah melakukan serangkaian kegiatan pemasaran: jasa klasifikasi, statutoria, dan komersil.

Segmen Klasifikasi

1. Melakukan penawaran ke Direktorat Hubungan Laut untuk pekerjaan Kapal Bottom Glass (113 Kapal Register dan 10 kapal (penerimaan klas dan non register).
2. Melakukan penawaran ke PT Pertamina Transkontinental (14 Kapal bangunan baru sudah diberikan kepada cabang Surabaya, 116 Kapal Register dan 21 Kapal TOCA. Perhitungan tarif sudah selesai dihitung).
3. Melakukan penawaran ke PT PELNI (104 Kapal, Draft Kontrak sudah dikirimkan ke PT PELNI dan DOC).
4. Melakukan Pembahasan kerjasama antara PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) perihal Pembahasan prospek kerjasama antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan PT Jasa Indonesia terkait *bundling Block Fee*.

Statutoria

Selama tahun 2020 perusahaan telah melakukan *Approval*, Audit dan Survei Statutoria yaitu:

1. Melakukan optimalisasi survei statutoria yang sudah dilimpahkan oleh Pemerintah Indonesia ke BKI dan mengupayakan mendapatkan tambahan penugasan survei statutoria dari Pemerintah Indonesia ke BKI. Perseroan telah mendapatkan penugasan Statutoria dari Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 249 tahun 2018 dan Perjanjian Kerjasama (PKS) Nomor HK.201/2/16/DJPL-20. BKI juga telah melakukan pembahasan bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait tambahan penugasan survei statutoria untuk kapal penyeberangan.
2. Melaksanakan kewajiban pelaksanaan *oversight* terkait penugasan statutoria dari negara bendera Indonesia secara berkala (6 bulanan) pada Maret dan Oktober 2020.

Marketing is an important part of the Company's business development strategy. A good marketing strategy will eventually lead to a brand loyalty. Throughout 2020, the Company has carried out series of marketing activities for classification, statutory, and commercial services.

Classification Segment

1. Submit proposal to the Directorate of Sea Transportation for Glass Bottom Boat work (113 Registered Ships and 10 ships acceptance of class and non-registration).
2. Submit proposal to PT Pertamina Transkontinental (14 newly built vessels have been given to the Surabaya branch, 116 Registered Vessels and 21 TOCA Vessels. The calculation of the fare has been completed).
3. Submit proposal to PT PELNI (104 Vessels, Contract Draft has been sent to PT PELNI and DOC).
4. Discussing the cooperation between PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) regarding the discussion of the prospect of cooperation between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and PT Jasa Indonesia related to Block Fee bundling.

Statutory

During 2020 the Company has conducted Approval, Audit and Statutory Survey, namely:

1. Optimizing the statutory survey as delegated by the Government of Indonesia to BKI and seeking additional statutory survey assignments from the Government of Indonesia to BKI. The Company has received a statutory assignment from the Government of Indonesia based on the Decree of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number KP 249 of 2018 and the Cooperation Agreement (PKS) Number HK.201/2/16/DJPL-20. BKI has also held discussions with the Directorate General of Land Transportation regarding additional statutory survey assignments for ferry boats.
2. Carry out oversight obligations related to statutory assignments from the Indonesian flag state periodically (6 months) in March and October 2020.



3. Melakukan upaya untuk mendapatkan penugasan survei statutoria dari negara lain di kawasan regional. BKI telah mendapatkan penunjukan statutoria dari Mongolia dan Timor Leste.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah/*Flag State* dalam meningkatkan peran badan klasifikasi dalam hal keselamatan kapal/Statutoria serta berkolaborasi dengan pemerintah dalam melakukan sosialisasi Keselamatan Kapal bagi para pemilik kapal.
3. Strive to obtain statutory survey assignments from other countries in the region. BKI has received statutory appointments from Mongolia and Timor Leste.
4. Improve coordination with the Government/*Flag State* in increasing the role of classification bodies in terms of ship safety/Statutory as well as collaborating with the government in disseminating Ship Safety for ship owners.

Segmen Komersil

1. Melakukan pertemuan dengan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka peraihan pekerjaan asesmen dan penerimaan klas SPM.
2. Melakukan *Pre-Kick of Meeting* dan *Kick of Meeting* ke PT Pertamina RU VI Balongan pekerjaan pemeriksaan NDT, Pengawasan *Welder Test* dan *QC Welding* dalam rangka *Pit Stop* Tahun 2020.
3. Pengembangan layanan di bidang Kereta Api. MOU dengan PT KAI sedang dalam proses penandatanganan dan sebagai realisasi awal, BKI dipercaya untuk melakukan rekayasa *design* dan dilanjutkan dengan pembuatan *prototype* dan pengujian terhadap perubahan tangki kereta lokomotif dan kereta genset dimana direncanakan adanya perubahan bahan bakar dari *High Speed Diesel* (HSD) menjadi Biodiesel.
4. Proses penunjukan untuk pemeriksaan, pengujian & sertifikasi kelaikan peti kemas (*Convention for Safe Container*), setelah diterbitkannya PM 53 Tahun 2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Kemenhub).

Commercial Segment

1. Hold a meeting with the Minister of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in the context of obtaining the assessment work and acceptance of the SPM class.
2. Conducting Pre-Kick of Meeting and Kick-off Meeting to PT Pertamina RU VI Balongan for NDT inspection work, Welder Test Supervision and QC Welding in the context of the 2020 Pit Stop.
3. Development of services in Railways Service sector. MOU with PT KAI is in the process of signing and as an initial realization, BKI is trusted to carry out design engineering and proceed with making prototypes and testing changes to the locomotive tank train and generator train where it is planned to change the fuel from High Speed Diesel (HSD) to Biodiesel.
4. Appointment process for inspection, testing & certification of container worthiness (*Convention for Safe Container*), after the issuance of PM 53 of 2018 concerning Container Eligibility and Gross Weight of Verified Containers (Ministry of Transportation).

JARINGAN KERJA SAMA

COOPERATION NETWORK

Dalam upaya mengembangkan bisnis, Perseroan menjalin kerja sama dengan sesama BUMN, mitra usaha lain serta kerja sama luar negeri.

Sinergi dengan Sesama BUMN

1. BKI bekerja sama dengan BUMN pengguna jasa BKI di antaranya PT ASDP, PT PELNI, PT PUSRI, PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, PT Pelindo IV dengan ruang lingkup pendidikan dan pelatihan, jasa konsultansi, asistensi supervisi, sertifikasi dan jasa lain yang relevan.
2. Perjanjian kerjasama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan PT Krakatau Posco (Persero) tentang Pemeriksaan dan Sertifikasi Pelat Baja di PT Krakatau Posco sesuai Nomor: B.0489/HK.503/CLG/KI-20 Tanggal 01 Maret 2020.
3. Perjanjian kerjasama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan PT Krakatau Steel (Persero) tentang Jasa Pemeriksaan dan Sertifikasi Pelat Baja BKI, sesuai Nomor : 123-2D/AM II/LOG-KS/III/2020 Tanggal 01 Maret 2020.

Perseroan juga menjalin sinergi dengan PT Sucofindo dan PT Pertamina terkait bidang inspeksi dan sertifikasi migas. Manfaat sinergi dalam pekerjaan proses sertifikasi adalah peningkatan kinerja operasi, efisiensi biaya, optimalisasi aset, dan sumber daya. Perseroan telah mempresentasikan profil perusahaan, jasa produk dan titik layanan.

PT BKI memiliki 107 pekerja dengan kualifikasi Migas, untuk delapan jenis bidang peralatan dan instalasi. Perseroan juga memiliki 542 unit peralatan inspeksi terkait pekerjaan sertifikasi. Perseroan akan memenuhi kebutuhan sumberdaya sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Lingkup pekerjaan Jasa Inspeksi dan Sertifikasi/Resertifikasi Peralatan Operasi Produksi PT Pertamina adalah melakukan proses Sertifikasi dan Resertifikasi Peralatan Operasi Produksi Pertamina melalui tahapan Inspeksi, Assessment, Re-engineering dan pengurusan Sertifikasi di Kementerian ESDM.

In running its business, the Company builds synergy with fellow SOEs and collaborates with other business partners and foreign cooperation.

Synergy with other SOEs

1. BKI cooperates with SOEs that use BKI services including PT ASDP, PT PELNI, PT PUSRI, PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, PT Pelindo IV with the scope of education and training, consulting services, supervision assistance, certification and other relevant services.
2. Cooperation agreement between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and PT Krakatau Posco (Persero) regarding Inspection and Certification of Steel Plates at PT Krakatau Posco according to Number: B.0489/HK.503/CLG/KI-20 dated March 1, 2020.
3. Cooperation agreement between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and PT Krakatau Steel (Persero) regarding Inspection and Certification Services for BKI Steel Plates, according to Number: 123-2D/AM II/LOG-KS/III/2020 dated March 1, 2020.

The Company also establishes a synergy with PT Sucofindo and PT Pertamina related to oil and gas inspection and certification. The benefits of synergy in the work of the certification process are increased operating performance, cost efficiency, asset and resource optimization. The Company has presented company profiles, product services and service points.

PT BKI is supported by 107 workers with oil and gas qualifications, for eight types of equipment and installation fields. The Company also has 542 units of inspection equipment related to certification work. The Company will meet the resource needs in accordance with the scope of work to be carried out.

The scope of work of PT Pertamina's Production Operation Equipment Inspection and Certification/Recertification Services is to carry out the Pertamina Production Operation Equipment Certification and Recertification process through the stages of Inspection, Assessment, Re-engineering and Certification management at the Ministry of Energy and Mineral Resources.



Kerja Sama dengan Mitra Usaha Lain

1. Kesepakatan Bersama antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang Bantuan Penanganan Permasalahan di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara No. B.00955/HK.503/KI-20.
2. Nota Kesepahaman antara PT Dinamika Utama Jaya dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tentang Kerjasama di Bidang Klasifikasi Kapal dan Bidang Penunjang Lainnya No. B.01082/HK.503/KI-20.
3. Surat Perjanjian antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan PT Baruna Dirga Dharma tentang *block fee* kapal-kapal milik PT BDD No. B.00827/HK.503/KI-20.
4. Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Gedung Graha BKI antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember No. B.00978/HK.503/KI-20.
5. Nota Kesepahaman antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) BKI Academy dengan PT Rekayasa Teknologi Global tentang Penyelenggaraan Pendidikan/Pelatihan No. 041/HK.503/KI-20.
6. Nota Kesepahaman antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Institut Teknologi Bandung No. B.02531/HK.503/KI-20.
7. Nota Kesepakatan Bersama antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Universitas Indonesia tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Bidang Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Pendayagunaan Kemampuan Perekayasaan Industri.
8. Nota Kesepahaman antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Sekolah Tinggi Ilmu Maritim Ami No. B.02537/HK.503/KI-20.
9. Nota Kesepahaman antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Sekolah Tinggi Ilmu Penerbangan No. B.02539/HK.503/KI-20.
10. BKI bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan telah menjadi Peserta BPJS Kesehatan dan telah menerima Sertifikat atas keikutsertaan dalam Program Jaminan Kesehatan-BPJS Kesehatan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan No. Entitas : 01161139.
11. Perjanjian kerjasama antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Pelaksanaan Survei dan Sertifikasi

Cooperation with Other Business Partners

1. Mutual Agreement between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and the North Jakarta District Attorney regarding Assistance in Handling Problems related to Civil Law and State Administration No. B.00955/HK.503/KI-20.
2. Memorandum of Understanding between PT Dinamika Utama Jaya and PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) regarding Cooperation in the Ship Classification and Other Supporting Fields. B.01082/HK.503/KI-20.
3. Letter of Agreement between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and PT Baruna Dirga Dharma regarding block fees for ships owned by PT BDD No. B.00827/HK.503/KI-20.
4. Space Lease Agreement for the Graha BKI Building between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and the Sepuluh Nopember Institute of Technology. B.00978/HK.503/KI-20.
5. Memorandum of Understanding between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), BKI Academy and PT Rekayasa Teknologi Global on the Implementation of Education/Training No. 041/HK.503/KI-20.
6. Memorandum of Understanding between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and the Bandung Institute of Technology No. B.02531/HK.503/KI-20.
7. Memorandum of Understanding between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and the University of Indonesia regarding Education, Research and Community Service in the Field of Human Resources Training, Development of Science and Technology and Utilization of Industrial Engineering Capabilities.
8. Memorandum of Understanding between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and Ami Maritime Science College No. B.02537/HK.503/KI-20.
9. Memorandum of Understanding between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and the College of Aviation Sciences No. B.02539/HK.503/KI-20.
10. BKI cooperates with BPJS Health and has become a BPJS Health Participant and has received a Certificate for participation in the Health Insurance Program - BPJS Health which is signed by the President Director of BPJS Health with No. Entity : 01161139.
11. Cooperation agreement between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and the Directorate General of Sea Transportation concerning the Implementation



- Statutoria Kapal Berbendera Indonesia No. B.04190/HK.503/KI-20.
12. Perjanjian Kerjasama antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) BKI Academy dengan PT Agensi Pelaut Nusantara tentang Penyelenggaraan Pendidikan/Pelatihan Profesi Bersertifikasi di PT Agensi Pelaut Nusantara No. B.02804/HK.503/KI-20.
 13. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tentang Integrasi Data Perpajakan No. B.07933/HK.503/KI-20.
 14. Nota Kesepahaman antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan PT Pertamina Drilling Services Indonesia.
 15. Perjanjian Kerjasama antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI Academy) dengan Fakultas Kemanan Nasional Universitas Pertahanan Indonesia No. B.09559/HK.503/KI-20.
 16. Perjanjian antar PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan PT Tanker Total Pasifik untuk KM. Madonna Sun No. B.09607/HK.503/KI-20.
 17. Perjanjian antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan PT Salam Pacific Indonesia Lines tentang *Block Fee* KM. Renata No.B.10369a/HK.503/KI-20.
 18. Amandemen Nota Kesepahaman antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Tentang Peningkatan Kapasitas Nasional untuk Menunjang Kegiatan Operasi Perkapalan Dalam Menunjang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi No. B.10624a/HK.503/KI-20.
 20. Perjanjian antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan PT Temas Shipping untuk *Block Fee* KM. Spring Mas Ex Kota Ganteng No.B.1142a/HK.503/KI-20.98
 21. Perjanjian antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan PT Temas Shipping untuk *Block Fee* KM. Spring Mas Ex Kota Gembira No.B.1143a/HK.503/KI-20.
 22. Nota Kesepahaman antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Universitas Telkom Tentang Tridarma Perguruan Tinggi No. B.12569/HK.503/KI-20.
 23. Perjanjian Kerjasama antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Universitas Telkom Tentang Pelaksanaan Jasa Penyelenggaraan Pelatihan B.12570/HK.503/KI-20.
 24. Piagam Kesepakatan Bersama antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Tentara Nasional Tentang of the Survey and Statutory Certification of Indonesian-flagged Vessels No. B.04190/HK.503/KI-20.
 12. Cooperation Agreement between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), BKI Academy and PT Agensi Pelaut Nusantara regarding the Implementation of Certified Professional Education/Training at PT Agensi Pelaut Nusantara No. B.02804/HK.503/KI-20.
 13. Memorandum of Understanding between the Directorate General of Taxes, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) regarding Tax Data Integration. B.07933/HK.503/KI-20.
 14. Memorandum of Understanding between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and PT Pertamina Drilling Services Indonesia.
 15. Cooperation Agreement between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI Academy) and the Faculty of National Security, Indonesian Defense University No. B.09559/HK.503/KI-20.
 16. The agreement between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and PT Tanker Total Pasifik for KM. Madonna Sun No. B.09607/HK.503/KI-20.
 17. Agreement between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and PT Salam Pacific Indonesia Lines regarding Block Fee KM. Renata No.B.10369a/HK.503/KI-20.
 18. Amendment to the Memorandum of Understanding between the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) and PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) on National Capacity Building to Support Shipping Operations to Support Upstream Oil and Gas Business Activities. B.10624a/HK.503/KI-20.
 20. Agreement between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and PT Temas Shipping for Block Fee KM. Spring Mas Ex Ganteng City No.B.1142a/HK.503/KI-20.98
 21. Agreement between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and PT Temas Shipping for Block Fee of KM Spring Mas Ex Kota Gembira No.B.1143a/HK.503/KI-20.
 22. Memorandum of Understanding between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and Telkom University concerning the Tridharma of Higher Education No. B.12569/HK.503/KI-20.
 23. Cooperation Agreement between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and Telkom University regarding the Implementation of Training Services for B.12570/HK.503/KI-20.
 24. Charter of Collective Agreement between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and the National Army

Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya di Bidang Kelaikan Materiel TNI Angkatan Laut Indonesia No.B.012762/HK.503/KI-20 dan No.B.012763/Hk.503/KI-20.

concerning the Improvement and Development of Resources in the Field of Material Feasibility of the Indonesian Navy No.B.012762/HK.503/KI-20 and No.B.012763/ Hk.503/KI-20.

Kerja sama luar negeri

Selain membangun sinergi dengan sesama BUMN dan kerja sama dengan mitra usaha lain, Perseroan menjalin kerja sama luar negeri. Kerja sama luar negeri terdiri dari kerja sama Bidang Klasifikasi dan Bidang Komersil. Hingga saat ini kerja sama luar negeri yang masih berjalan adalah:

Perjanjian kerjasama Bidang Klasifikasi

Overseas Cooperation

In addition to building synergies with fellow SOEs and collaborating with other business partners, the Company also establishes overseas cooperation. Overseas cooperation consists of cooperation in Classification and Commercial Midwives. Until now, the ongoing foreign cooperations are:

Classification cooperation agreement

No.	Nama Badan Klasifikasi Name of the Classification Agency	Negara Country of Origin	Kerja sama Collaboration
1.	American Bureau of Shipping	Amerika Serikat/USA	Dual Class
2.	Bureau Veritas	Prancis/France	Dual Class
3.	China Classification Society	China	Mutual Representation
4.	DnV-GL	Norwegia- Jerman/Norway-Germany	Dual Class
5.	Indian Register of Shipping	India	Mutual Representation
6.	Korean Register of Shipping	Korea Selatan/ South Korea	Mutual Representation
7.	Korean Classification Society	Korea Utara/North Korea	Mutual Representation
8.	Lloyd's Register of Shipping	Inggris/England	Dual Class
9.	Nippon Kaiji Kyokai	Jepang/Japan	Mutual Representation
10.	Rinave Portugeusa	Portugal	Mutual Representation
11.	Ships Classification Malaysia	Malaysia	Mutual Representation
12.	Vietnam Register	Vietnam	Mutual Representation
13.	Polski Rejestr Statko'w	Polandia/Poland	Mutual Representation
14.	Registro Italiano Navale	Italia/Italy	Dual Clas
15.	Isthmus Bureau of Shipping	Panama	Mutual Representation
16.	International Register of Shipping	Amerika Serikat/USA	Dual Classss
17.	Hellenic Register of Shipping	Yunani/Greece	Mutual Representation

Perjanjian kerjasama Bidang Komersil

Commercial Cooperation Agreement

No.	Institusi Institution	Negara Country of Origin	Kerja sama Collaboration
1.	Det Norske Veritas	Norwegia/Norway	Offshore
2.	TUV Rheinland	Jerman/Germany	Industrial Inspection
3.	Korean Register of Shipping	Korea Selatan/South Korea	Industrial Inspection
4.	TUV Nord	Jerman/Germany	Industrial Inspection

TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY

Pandemi Covid-19 membuat interaksi antar-personil menjadi sangat terbatas. Untuk tetap menjaga kegiatan operasional perusahaan perlu dilakukan pembiasaan baru (*New Normal*). Teknologi informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional di era *new normal*. Divisi TI terus melakukan inovasi untuk mendukung transformasi digitalisasi proses bisnis sehingga kegiatan operasional di era *new normal* tetap berjalan dengan baik.

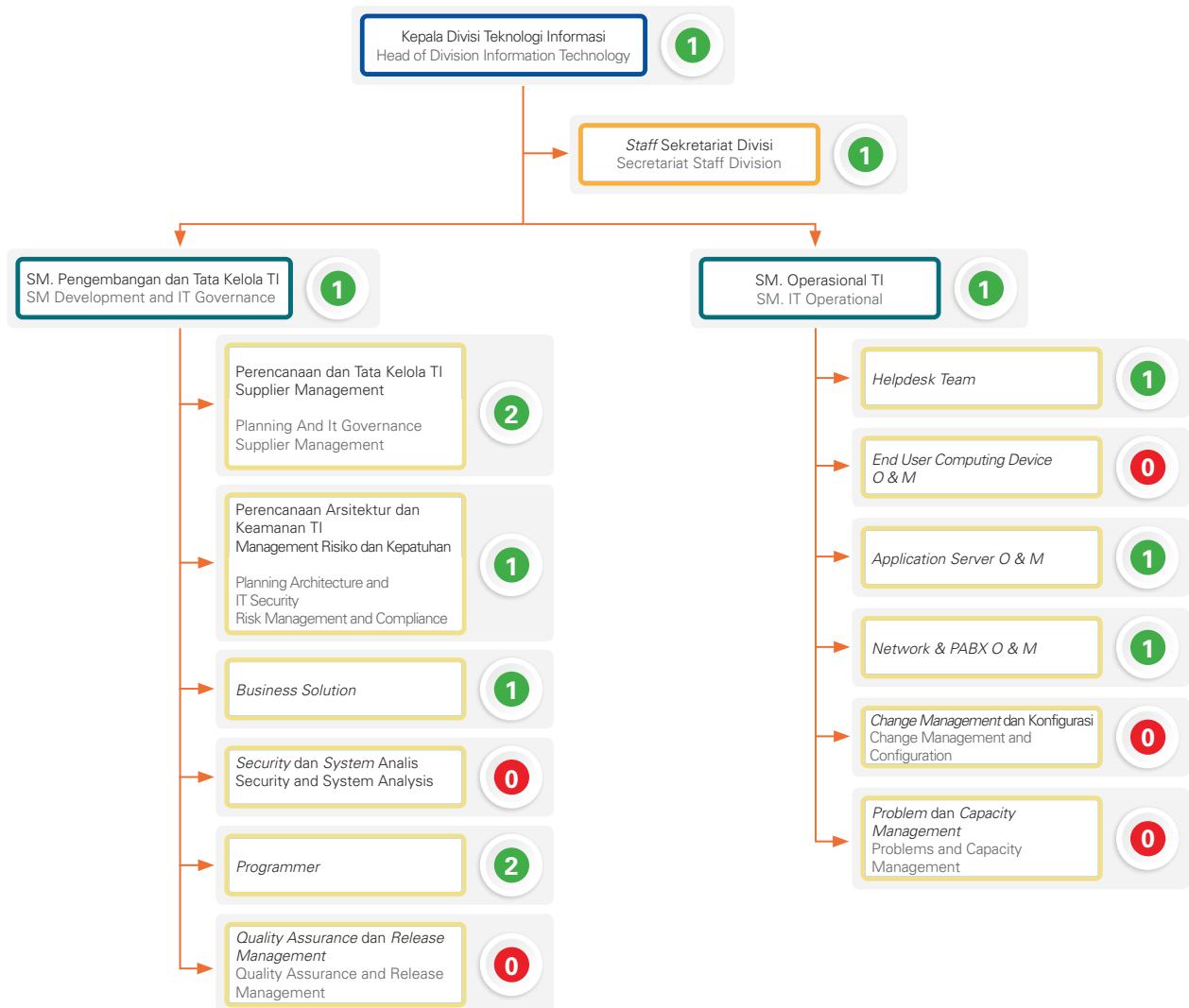
Pengelolaan Teknologi Informasi

Divisi Teknologi Informasi memiliki dua bagian yaitu Pengembangan & Tata Kelola TI dan Operasional TI. Pembagian dua bidang dari Divisi Teknologi Informasi bisa dilihat pada susunan organisasi Divisi Teknologi Informasi sebagai berikut:

The Covid-19 pandemic has restricted the interaction between personnel. In order to maintain the Company's operational activities, it is necessary to carry out a new habituation (*New Normal*). Information technology has a very important role in supporting operational activities in the new normal era. The IT Division continues to innovate to support the digital transformation of business processes so that operational activities in the new normal era continue to run well.

Information Technology Management

The Information Technology Division has two sections, namely IT Development & Governance and IT Operations. The division of the two areas of the Information Technology Division can be seen in the organizational structure of the Information Technology Division as follows:



Tata Kelola Teknologi Informasi

Sebagai divisi *business support*, pengelolaan Divisi Teknologi Informasi PT BKI dilakukan dengan perencanaan terstruktur dan mencakup seluruh proses bisnis yang berdasarkan pada RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan), *IT Governance* PT BKI, dan *best practice* lain di antaranya ITIL dan COBIT. Secara garis besar pelaksanaan Tata Kelola TI PT BKI sebagai berikut:

1. Penetapan peran TI perusahaan
2. Rencana strategi TI
3. Kerangka kerja proses & organisasi TI
4. Tata kelola investasi TI
5. Pengelolaan sumber daya TI
6. Pengelolaan risiko TI
7. Pengelolaan proyek
8. Pengelolaan layanan TI
9. Pengelolaan keamanan TI
10. Pengelolaan aset TI
11. Pengelolaan layanan pihak ketiga
12. Pengelolaan operasional TI
13. Pengelolaan mutu
14. Pengelolaan data *monitor* dan evaluasi kinerja TI
15. *Monitor* evaluasi pengendalian internal
16. Tata kelola pengaturan perundangan

Information Technology Governance

As a business support division, the management of the Information Technology Division of PT BKI is carried out through a structured planning and includes all business processes based on the RJPP (Company Long Term Plan), PT BKI IT Governance, and other best practices in ITIL and COBIT. Broadly speaking, the implementation of PT BKI's IT Governance is as follows:

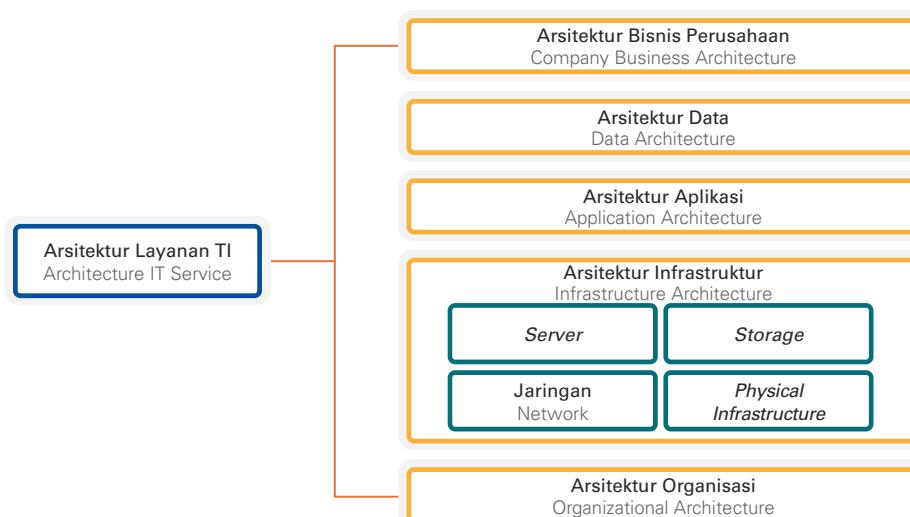
1. Assigning IT role
2. IT strategic plan
3. IT process & organization framework
4. IT investment governance
5. IT resource management
6. IT risk management
7. Project management
8. IT service management
9. IT security management
10. IT asset management
11. Management of third party services
12. IT operational management
13. Quality management
14. Management of IT performance monitoring and evaluation
15. Monitor evaluation of internal control
16. Governance of regulatory arrangements

Arsitektur Teknologi Informasi

Arsitektur TI menggambarkan bangunan teknologi informasi baik aplikasi maupun infrastruktur yang akan dibangun oleh PT BKI sebagai arah pengembangan aplikasi di lingkungan Perseroan sesuai dengan *IT Master Plan*, sebagai berikut:

Information Technology Architecture

The IT architecture describes the information technology building, both applications and infrastructure that will be built by PT BKI as a direction for application development within the Company in accordance with the IT Master Plan, as follows:



Realisasi Program Kerja Divisi Teknologi Informasi Tahun 2020

1. Realisasi program kerja bagian Pengembangan & Tata Kelola TI:
 - a. Aplikasi HRIS (*Human Resources Information System*), aplikasi yang digunakan untuk mengakomodir keperluan *management human capital*.
 - b. *Dashboard evakin* (evaluasi kinerja), aplikasi untuk *monitoring* performa perusahaan baik keuangan maupun keuangan.
 - c. BKI Time, aplikasi absensi *online* berbasis Android untuk memfasilitasi karyawan karyawati BKI dalam merekam kehadiran baik KDK (kerja dari kantor) dan KDR (kerja dari rumah) secara *realtime* yang didukung dengan bantuan data GPS.
 - d. SIKOM (Sistem Informasi Komersil), aplikasi berbasis *web* yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan komersil dari awal proyek diadakan sampai proyek selesai dan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam kegiatan proyek tersebut.
 - e. Portal SPI, aplikasi berbasis *web* digunakan untuk *monitoring* pelaksanaan audit SPI.
 - f. Aplikasi reservasi ruang rapat, aplikasi berbasis *web* yang digunakan untuk peminjaman ruang rapat dilingkungan kantor pusat BKI dan Graha BKI.
 - g. Aplikasi agenda produksi, aplikasi berbasis *web* yang digunakan untuk mendapatkan nomor surat secara otomatis, membuat draft surat dan *approval* surat.
 - h. *E-Certificate Klas*, aplikasi ini berfungsi untuk percepatan dan *monitoring* sertifikat-sertifikat klas secara *realtime*.
 - i. Migrasi COPS ke OGS, aplikasi basis *web* untuk kegiatan survei. Fungsi-fungsi yang ada di COPS dipindah ke OGS.
 - j. Aplikasi pendukung *cashless* (PBOP), aplikasi basis *web* yang digunakan untuk *monitoring* pengajuan biaya operasional produksi.
 - k. Penambahan fitur aplikasi OGS:
 - *Ship Management*
 - Menambahkan *List Qualification Statutory Survey*
 - *Monitoring Survey*
 - Kategori Pemeriksaan Dokumen Statutoria
 - Delegate Admin Gambar PRB
 - Penambahan *register vessel number*
 - l. Realisasi kegiatan tata kelola TI 2020.

Realization of Information Technology Division Work Program in 2020

1. Realization of the work program of the IT Development & Governance section:
 - a. HRIS (Human Resources Information System) application, an application used to accommodate human capital management needs.
 - b. Evakin (performance evaluation) dashboard, an application for monitoring company performance, both financial and financial.
 - c. BKI Time, an Android-based online attendance application to facilitate BKI employees in recording the attendance of both KDK (work from office) and KDR (work from home) in real time supported by GPS data.
 - d. SIKOM (Commercial Information System), a web-based application that is used to document commercial activities from the beginning of the project to completion and the components needed in the project activities.
 - e. SPI Portal, a web-based application used for monitoring the implementation of the SPI audit.
 - f. Meeting room reservation application, a web-based application that is used to borrow meeting rooms within the BKI head office and Graha BKI.
 - g. Production agenda application, a web-based application that is used to automatically obtain letter numbers, create letter drafts and letter approval.
 - h. Class E-Certificate, this application functions to accelerate and monitor class certificates in real time.
 - i. COPS migration to OGS, a web-based application for survey activities. The functions in COPS were moved to OGS.
 - j. Cashless support application (PBOP), a web-based application used for monitoring the submission of production operational costs.
 - k. Added features of the OGS app:
 - Ship Management
 - Added List Qualification Statutory Survey
 - Monitoring Survey
 - Statutory Document Inspection Category
 - Delegate DRR Image Admin
 - Addition of vessel number register
 - l. Realization of IT governance activities 2020.



2. Realisasi program kerja bagian Operasional TI:
 - a. Pemindahan infrastruktur *data center* ke Graha BKI
 - b. *Maintenance Perangkat Data Center*
 - c. Peningkatan *storage* dan *backup*
2. Realization of work program for IT Operations:
 - a. Transfer of data center infrastructure to Graha BKI
 - b. Maintenance of Data Center Devices
 - c. Improved storage and backup

Penelitian dan Pengembangan

Perseroan selalu melakukan penelitian dan pengembangan dalam upaya mendukung dan mengembangkan bisnis. Pada tahun 2020 Perseroan melakukan beberapa penelitian dan pengembangan.

Kegiatan Penelitian :

- Penelitian *load response (mapping spatial 0,25)*
- Analisa kecelakaan kapal akibat kebakaran (*fire accident*)
- *Re-Modeling damage stability*
- Analisa *2nd generation intact stability calculation*
- Analisa Tnet tebal pelat pontoon
- *Small Vessel non metallic material*
- Kriteria keselamatan operasional kapal Ferry Ro-Ro
- Kajian teknis pengurangan ketebalan pelat pada Tongkang (Pontoon)/Barge Klas BKI
- Analisa pengurangan ketebalan pelat *bottom* kapal tongkang yang berlayar di perairan domestik
- Analisa pengurangan ketebalan pelat sisi kapal tongkang yang berlayar di perairan domestik
- Analisa *review database* kecelakaan kapal kelas BKI
- Perhitungan *weighting priority* dari *Causative Factors*
- Review kriteria *intact stability* dan *damage stability* untuk kapal yang beroperasi di perairan Indonesia
- Analisa *2nd Generation Intact Stability Calculation*
- Penerapan kriteria *2nd Generation Intact Stability* pada kondisi Perairan Indonesia
- Pembatasan tinggi gelombang pada operasional kapal ferry "Analisa Kecelakaan dengan MOP Model "
- Kajian pengembangan aturan klasifikasi/sertifikasi untuk kapal dengan material *non metal*
- Analisa kekuatan pada material *Fibre Existing*
- Pemanfaatan material HDPE untuk *aqua culture* di Indonesia
- GAP Analisis perhitungan *scantling* kapal kayu (*Rules BKI 1996 vs ISO 12215*)
- Kajian penerapan maritim *cyber security* di Indonesia, tantangan dan peluang untuk bisnis klasifikasi

Research and Development

The Company always conducts research and development in an effort to support and to develop the business. In 2020 the Company conducted several research and development activities.

Research Activities:

- Research on load response (mapping spatial 0.25)
- Analysis of ship accidents due to fire
- Re-Modeling damage stability
- Analysis of 2nd generation intact stability calculation
- Tnet analysis of pontoon plate thickness
- Small Vessel non metallic material
- Ro-Ro Ferry operational safety criteria
- Technical study of plate thickness reduction on Barge (Pontoon)/Barge Class BKI
- Analysis of the reduction of the bottom plate thickness of barges sailing in domestic waters
- Analysis of side plate thickness reduction of barges sailing in domestic waters
- Analysis of the BKI class ship accident database review
- Calculation of weighting priority from Causative Factors
- Review of intact stability and damage stability criteria for ships operating in Indonesian waters
- Analyze 2nd Generation Intact Stability Calculation
- Application of the 2nd Generation Intact Stability criteria in Indonesian waters
- Limitation of wave height on ferry operations "Accident Analysis with MOP Model"
- Study on the development of classification/certification rules for ships with non-metallic materials
- Analysis of the strength of the existing Fiber material
- Utilization of HDPE material for aqua culture in Indonesia
- GAP Analysis of the calculation of the scantling of wooden ships (BKI Rules 1996 vs ISO 12215)
- Study of maritime cyber security implementation in Indonesia, challenges and opportunities for classification business

- Instalasi insfrastruktur AISITS
- Kajian pemanfaatan *platform* sebagai pendukung *aquaculture* lepas pantai
- Kajian peningkatan peraturan kapal kayu
- Kajian pengembangan peraturan *cyber security* untuk kapal-kapal klas BKI/kapal berbendera Indonesia
- Kajian dan *paper* penerapan *autonomous* pada *full scale* ship baik dengan metode *field test* maupun *simulation test* skala penuh
- Penelitian penentuan umur kapal FRP *Existing* terkait *existing* terkait kebutuhan penerimaan klasifikasi kapal FRP bangunan lama
- AISITS infrastructure installation
- Study on the use of platforms to support offshore aquaculture
- Study on improving wooden ship regulations
- Study on the development of cyber security regulations for BKI class ships/Indonesian-flagged ships
- Studies and papers on the application of autonomous on a full scale ship, using both the field test method and the full scale simulation test method
- Research on determining the age of existing FRP ships related to the need for acceptance of old building FRP ship classifications

Pengembangan Peraturan & Aplikasi

- Kegiatan Pengembangan Peraturan Teknik dan Aplikasi Klasifikasi (*Working Group*) yang belum selesai atau masih berlangsung : *Guidance for ventilation system on board seagoing ships* (Pt.1 Vol.A).
- Akreditasi LSPro 17065
- *Guidelines for floating Production Installation* (Pt.5 Vol.3) NE 2020
- *Guidelines for floating offshore liquified gas terminal* (Pt.5 Vol2) NE 2020
- Peraturan kapal domestik (Pt.8 Vol.I) RCN No.2
- *Translasi Rules Classsification & Surveys* (Pt.1, Vol.I)
- *Translasi Rules for Hull* (Pt.1, Vol.II)
- *Translasi Rules for Machinery* (Pt.1, Vol.III)
- *Translasi Rules for Welding* (Pt.1, Vol.VI)
- *Konsolidasi Rules Classsification & Surveys* (Pt.1, Vol.I)
- *Konsolidasi Rules for Hull* (Pt.1, Vol.II)
- *Konsolidasi Rules for Machinery Installations* (Pt.1, Vol.III)
- *Konsolidasi Rules for Electrical Installation* (Pt.1, Vol.IV)
- *Konsolidasi Rules for Materials* (Pt. 1, Vol.V)
- *Konsolidasi Rules for Wleding* (Pt.1, Vol. VI)
- *Konsolidasi Rules for High Speed Craft* (Pt.3, Vol. III)
- *Konsolidasi Rules for fiberglass Reinforced Plastic Ships* (Pt.3, Vol.V)
- *Konsolidasi Rules for Small Vessel up to 24 m* (Pt.3, Vol.VII)
- *Konsolidasi Rules for Classification & Surveys* (Pt.5, Vol.I)

Regulatory & Application Development

- Development of Engineering Regulations and Application for Classification (Working Group) that have not been completed or are still ongoing: Guidance for ventilation system on board seagoing ships (Pt.1 Vol.A).
- LSPro 17065 Accreditation
- Guidelines for floating Production Installation (Pt.5 Vol.3) NE 2020
- Guidelines for floating offshore liquified gas terminal (Pt.5 Vol2) NE 2020
- Domestic ship regulations (Pt.8 Vol.I) RCN No.2
- Translation of Rules Classification & Surveys (Pt.1, Vol.I)
- Translation of Rules for Hull (Pt.1, Vol.II)
- Translation of Rules for Machinery (Pt.1, Vol.III)
- Translation of Rules for Welding (Pt.1, Vol.VI)
- Consolidation of Rules Classification & Surveys (Pt.1, Vol.I)
- Consolidated Rules for Hull (Pt.1, Vol.II)
- Consolidated Rules for Machinery Installations (Pt.1, Vol.III)
- Consolidation of Rules for Electrical Installation (Pt.1, Vol.IV)
- Consolidated Rules for Materials (Pt. 1, Vol.V)
- Consolidated Rules for Welding (Pt.1, Vol. VI)
- Consolidated Rules for High Speed Craft (Pt.3, Vol. III)
- Consolidated Rules for fiberglass Reinforced Plastic Ships (Pt.3, Vol.V)
- Consolidated Rules for Small Vessel up to 24 m (Pt.3, Vol.VII)
- Consolidated Rules for Classification & Surveys (Pt.5, Vol.I)

- **Konsolidasi Guidance for Code and Convention Interpretation (Pt.1, Vol.I)**
- **Amandemen Rules for Classification & Surveys (Pt.1, Vol.I) RCN**
- **Amandemen Rules for Hull (Pt.1, Vol.II) RCN**
- **Amandemen Rules for Machinery Installations (Pt.1, Vol.III) RCN and Regulation**
- **For The Construction and Testing Towing Gears (Pt.1, Vol.E) RCN**
- **Amandemen Rules for Materials (Pt.1 Vol.V) dan Rules for Welding (Pt.1 Vol.VI) RCN**
- **Amandemen Rules for Approval of Manufacturers and Services Suppliers (Pt.1 Vol.XI) dan Guidance for The Approval and Type Approval of Materials & Equipment for Marine Use (Pt.1 Vol.W) RCN14**
- **Amandemen Guidance for Code and Convention Interpretation (Pt.1 Vol.Y) RCN**
- **Amandemen PRO B (E, PRO A 06E, PRO B 05E, WI B 05E, PRO B 33E, PRO B 05E)**
- Consolidated Guidance for Code and Convention Interpretation (Pt.1, Vol.I)
- Amendments to the Rules for Classification & Surveys (Pt.1, Vol.I) RCN
- Amendments to the Rules for Hull (Pt.1, Vol.II) RCN
- Amendments to the Rules for Machinery Installations (Pt.1, Vol.III) RCN and Regulation
- For The Construction and Testing Towing Gears (Pt.1, Vol.E) RCN
- Amendments to the Rules for Materials (Pt.1 Vol.V) and Rules for Welding (Pt.1 Vol.VI) RCN
- Amendments to the Rules for Approval of Manufacturers and Services Suppliers (Pt.1 Vol.XI) and Guidance for The Approval and Type Approval of Materials & Equipment for Marine Use (Pt.1 Vol.W) RCN14
- Amendments to the Guidance for Code and Convention Interpretation (Pt.1 Vol.Y) RCN
- Amendments to PRO B (E, PRO A 06E, PRO B 05E, WI B 05E, PRO B 33E, PRO B 05E)

Kegiatan pengembangan peraturan teknik dan aplikasi klasifikasi (*Working Group*) yang telah selesai :

- *Offshore technology rules for classification & survey (Pt.5 Vol.1)*
- *Guidance for Certification of FRP Fishing Vessel Less than 12 12 m (Pt. 3 Vol.B)*
- *Naval Ship Technology (Pt.9) :*
 - *Guidelines Hull Structures and Ship Equipment*
 - *Guidelines for Propulsion Plants*
 - *Guidelines for Rules for Automations*
 - *Guidelines for Special Material for Naval Ships*
 - *Guidelines for Ship Operation Installations and Auxiliary System*
- *Rules for machinery installations (Pt. 1 Vol.III)*
- *Rules for materials (Pt.1 Vol.V) RCN No.1*
- *Rules for welding (Pt.1 Vol.VI), RCN No.1*
- *Guidance for code and convention interpretation (Pt.4 Vol.Y)*
- *Rules for small vessel up to 24 m (Pt.3 Vol.VII)*
- *Guidance for Class Notation (Pt.0 Vol.B) GCN 1*
- *Monitoring IACS resolution*
- Prosedur PPAK (Pro B-01 & B-25)
- *Guidelines for floating concrete*
- Prosedur PPI
- *Rules for Patrol Boat*
- *Rules for Crew Boat*
- *Rules for classification & survey (Pt.1 Vol.I) RCN No.1*

Completed technical regulations development and classification application (*Working Group*) activities:

- Offshore technology rules for classification & survey (Pt.5 Vol.1)
- Guidance for Certification of FRP Fishing Vessel Less than 12 12 m (Pt. 3 Vol.B)
- Naval Ship Technology (Pt.9) :
 - Guidelines for Hull Structures and Ship Equipment
 - Guidelines for Propulsion Plants
 - Guidelines for Rules for Automations
 - Guidelines for Special Materials for Naval Ships
 - Guidelines for Ship Operation Installations and Auxiliary Systems
- Rules for machinery installations (Pt. 1 Vol.III)
- Rules for materials (Pt.1 Vol.V) RCN No.1
- Rules for welding (Pt.1 Vol.VI), RCN No.1
- Guidance for code and convention interpretation (Pt.4 Vol.Y)
- Rules for small vessels up to 24 m (Pt.3 Vol.VII)
- Guidance for Class Notation (Pt.0 Vol.B) GCN 1
- Monitoring IACS resolution
- PPAK procedures (Pro B-01 & B-25)
- Guidelines for floating concrete
- PPI Procedures
- Rules for Patrol Boat
- Rules for Crew Boat
- Rules for classification & survey (Pt.1 Vol.I) RCN No.1

- *Rules for hull (Pt. 1 Vol.II) RCN No.1*
- *Rules for approval of Manufactures & services suppliers (Pt.1 Vol.XI) dan Guidance for the approval and type approval of materials & equipment for marine use (Pt.1 Vol.W)*
- Harmonisasi *rules for mobile offshore units (Pt.5 Vol. VI) & Rules for mobile offshore drilling units and special purpose units (Pt.5 Vol.X)15*
- Harmonisasi *guidelines for certification of lifting appliances (Pt.7 Vol.I) dan regulations for the construction & survey of lifting appliance (Pt.6 Vol.IV)*
- Peraturan kapal domestik (Pt.8 Vol.I)
- Prosedur Pengujian *Fibre Content* dan *Microstructure*
- Pedoman Konstruksi dan fasilitas pelabuhan
- *Guidelines for Maintenance of Safety Equipment*
- *Guidelines for Autonomous surface vessel*
- *Rules electrical installation (Pt. Vol. IV), RCN No.1*
- *Rules for ship carrying liquefied gases in bulk (Pt.1, Vol. IX), RCN No.1*
- *Rules for Classification & Surveys (Pt.1 Vol. II), RCN No.2*
- *Guidance for code and convention interpretation (Pt.1 Vol.Y), RCN No.2*
- *Rules for bulk carrier and oil tanker (Pt.1 Vol XVII), RCN No.1*
- *IACS Monitoring team 2020-2021 Equipment*

Kegiatan pengembangan aplikasi (*Working Group*) yang belum selesai atau masih berlangsung:

- *Rules management system (RMS) v3.0*
- *E-reporting*
- Dewaruci *machinery v3.0*
- BKI *iSee*
- Dewaruci *structure modul HSC/small vessel v2.0*
- UT *report software*

Kegiatan pengembangan aplikasi (*Working Group*) yang telah selesai :

- *Zee for class (ver.1)*

Pengembangan Usaha

Untuk meningkatkan pelayanannya pada pelanggan dan untuk mencapai tujuan perusahaan, Perseroan konsisten mengembangkan usaha Segmen Klas dan Segmen Komersil.

- Pengembangan sistem registrasi dan kelayakan teknis kapal ikan di lingkungan KKP, termasuk inisiasi *updating*

- Rules for hull (Pt. 1 Vol.II) RCN No.1
- Rules for approval of Manufactures & services suppliers (Pt.1 Vol.XI) and Guidance for the approval and type approval of materials & equipment for marine use (Pt.1 Vol.W)
- Harmonization of rules for mobile offshore units (Pt.5 Vol.VI) & Rules for mobile offshore drilling units and special purpose units (Pt.5 Vol.X)15
- Harmonization of guidelines for certification of lifting appliances (Pt.7 Vol.I) and regulations for the construction & survey of lifting appliances (Pt.6 Vol.IV)
- Domestic ship regulations (Pt.8 Vol.I)
- Fiber Content and Microstructure Test Procedures
- Construction Guidelines and port facilities
- Guidelines for Maintenance of Safety Equipment
- Guidelines for Autonomous surface vessels
- Rules electrical installation (Pt. Vol. IV), RCN No.1
- Rules for ship carrying liquefied gases in bulk (Pt.1, Vol. IX), RCN No.1
- Rules for Classification & Surveys (Pt.1 Vol. II), RCN No.2
- Guidance for code and convention interpretation (Pt.1 Vol.Y), RCN No.2
- Rules for bulk carrier and oil tanker (Pt.1 Vol XVII), RCN No.1
- IACS Monitoring team 2020-2021 Equipment

The ongoing activities of application development (*Working Group*):

- Rules management system (RMS) v3.0
- E-reporting
- Dewaruci machinery v3.0
- BKI *iSee*
- Dewaruci structure module HSC/small vessel v2.0
- UT report software

Completed activities on application development (*Working Group*):

- Zee for class (ver.1)

Business development

To improve its services to customers and to achieve its goals, the Company consistently develops its Class Segment and Commercial Segment businesses.

- Development of a registration system and technical feasibility of fishing vessels in the KKP environment,

regulasi/peraturan terkait. PT BKI sudah terlibat dalam Tim Teknis dalam rangka transfer *knowledge* dan pembahasan teknis implementasi registrasi & kelayakan teknis tersebut. Beberapa implementasi dari MoU telah menghasilkan kerja sama Klasifikasi dua kapal patrol dan *assessment* untuk 1 kapal patrol dan 2 kapal penampung ikan.

- Pengembangan di bidang infrastruktur pelabuhan dan struktur beton lepas pantai. Saat ini dalam proses pembuatan *guidelines for offshore structure* dan *guidelines* pedoman konstruksi pelabuhan.
 - Pengembangan layanan di bidang Kereta Api. MoU dengan PT KAI sedang dalam proses penandatanganan. Sebagai realisasi awal, PT BKI dipercaya untuk melakukan rekayasa *design* dan dilanjutkan dengan pembuatan *prototype* sekaligus pengujian terhadap perubahan tangki kereta lokomotif dan kereta genset terkait rencana perubahan bahan bakar dari *High Speed Diesel* (HSD) menjadi *Biodiesel*.
 - Berkontribusi aktif terhadap revisi PM 53 tahun 2018 yang mencabut penunjukan pelayanan jasa pemeriksaan dan sertifikasi peti kemas kepada PT BKI.
 - Pembuatan SNI produk-produk wajib klas, sebagai salah satu *barrier non-fiscal* terhadap serbuan produk-produk asing. Saat ini SNI *Life Jacket* masih dalam proses penetapan oleh Komite Teknik dan sedang dalam proses pengakuan BKI sebagai Lembaga Sertifikasi Produk dan Komite Akreditasi Nasional (KAN). BKI berencana untuk melakukan penambahan lingkup akreditasi pada SNI Kapal Perikanan, Kapal ukuran 3 GT berbahan *fiberglass rainforeed plastic* (FRP).
 - Inisiasi pengawasan dan sertifikasi kapal-kapal Direktorat Jenderal Bea & Cukai, serta *Plan Maintenance System* (PMS) dan *Monitoring Fuel Consumption*.
 - PMU Telematika menjajaki kerja sama dengan Bank BNI untuk proses pembiayaan dan pembayaran BKI-VMS Telematic.17
 - Melakukan perjanjian kerja sama pengadaan barang dan jasa serta penjualan *Vessel Monitoring System* (VMS Telematic) antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) – PMU Telematika dengan PT Sisfo Riung Samudera .
 - PMU Telematika bekerja sama dengan PT Qtasnim dalam rangka pengembangan bisnis dan pemasaran
- including the initiation of updating related regulations/regulations. PT BKI has been involved in the Technical Team in order to transfer knowledge and discuss technical implementation of the registration & technical feasibility. Several implementations of the MoU have resulted in the classification of two patrol boats and an assessment for 1 patrol boat and 2 fishing vessels.
- Development of port infrastructure and offshore concrete structures. Currently in the process of making guidelines for offshore structures and port construction guidelines.
 - Development of services in the Railways sector. The MoU with PT KAI is in the process of being signed. As an initial realization, PT BKI was trusted to carry out design engineering and continued with the manufacture of prototypes as well as testing of changes to the locomotive train tank and generator train related to the plan to change fuel from High Speed Diesel (HSD) to Biodiesel.
 - Actively contributing to the revision of PM 53 of 2018 which revoked the appointment of container inspection and certification services to PT BKI.
 - Making SNI for class mandatory products, as one of the non-fiscal barriers against the invasion of foreign products. Currently, the SNI Life Jacket is still in the process of being determined by the Technical Committee and is in the process of being recognized by BKI as a Product Certification Agency and National Accreditation Committee (KAN). BKI plans to increase the scope of accreditation for SNI for Fishing Vessels, 3 GT vessels made of fiberglass rainforeed plastic (FRP).
 - Initiation of supervision and certification of ships of the Directorate General of Customs & Excise, as well as Plan Maintenance System (PMS) and Monitoring Fuel Consumption.
 - PMU Telematics explores cooperation with Bank BNI for the financing and payment process for BKI-VMS Telematic.17.
 - Entered into a cooperation agreement for the procurement of goods and services as well as the sale of the Vessel Monitoring System (VMS Telematic) between PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) – PMU Telematics and PT Sisfo Riung Samudera.
 - PMU Telematics cooperates with PT Qtasnim in order to develop business and marketing SIMRS Application

Aplikasi SIMRS (Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit). Aplikasi tersebut bernama SIMRS QHopes.

- Membuat Kajian bisnis pengembangan usaha di bidang TI (Teknologi Informasi) *monitoring* kapal sebagai Penyedia Jasa layanan sistem *monitoring* kapal (BKI-VMS *Telematic*).
- BKI Academy melakukan pengembangan *training-training* baru di bidang Marine, K3, Energi, *Testing Inspection and Certification, Construction, Sistem Manajemen dan Human Resources*.
- Melakukan kajian bisnis pengembangan usaha di bidang audit energi. Saat ini sedang proses pembuatan rencana pengembangannya.
- Pengembangan bisnis dibidang verifikasi/assessment TKDN.
- Pengembangan sistem CRM (*Customer Relationship Management*).
- Penambahan bidang penunjukan BKI sebagai Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) Tenaga Listrik dan Ditjen Ketenagalistrikan dalam bidang Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU).
- Pengembangan *Market Place* Kemaritiman BKI sebagai *one stop integrated maritime platform*.
- Pengembangan layanan statutoria *Maritime Cyber Security* beserta layanan turunan/pendukungnya.
- Pengembangan layanan konsultansi, survei, supervisi, inspeksi dan *assessment* pelabuhan dan fasilitas pelabuhan. Termasuk di dalamnya konstruksi pantai dan pelindung pantai.
- Pemutakhiran aplikasi Armada, penambahan fitur "*Self sign-up*" oleh pelanggan dan pemberian fitur "*Progress to Register*" agar lebih komunikatif dengan pelanggan.
- Mengajukan proposal permohonan untuk ditunjuk sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi terkait Peraturan Menteri Perindustrian No. 19 Tahun 2020, tentang Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang dan Bahan Bagi Perusahaan Industri Galangan Kapal untuk Pembangunan Kapal.
- Pengembangan layanan *remote survey* sebagai solusi digital pada penyelenggaraan survei, inspeksi dan audit tanpa diperlukan kehadiran langsung personil BKI di lapangan.

(Home Information and Management System Sick).
The application is called SIMRS QHopes.

- Make a business development study in the field of IT (Information Technology) ship monitoring as a service provider for ship monitoring system services (BKI-VMS Telematic).
- BKI Academy develops new trainings in the fields of Marine, K3, Energy, Testing Inspection and Certification, Construction, Management Systems and Human Resources).
- Conducting business development studies in the field of energy audit. Currently in the process of making a development plan.
- Business development in the field of TKDN verification/assessment.
- Development of a CRM (Customer Relationship Management) system.
- Added fields for appointing BKI as the Electrical Power Engineering Inspection Agency (LIT) and the Directorate General of Electricity in the fields of Gas Power Plants (PLTG) and Gas & Steam Power Plants (PLTGU).
- Development of the BKI Maritime Market Place as a one stop integrated maritime platform.
- Development of Maritime Cyber Security statutory services and their derivative/supporting services.
- Development of consulting services, surveys, supervision, inspection and assessment of ports and port facilities. This includes beach construction and coast guard.
- Updating the Fleet application, adding the "Self sign-up" feature by customers and improving the "Progress to Register" feature to be more communicative with customers.
- Submit an application proposal to be appointed as the Verification Implementing Agency related to the Regulation of the Minister of Industry No. 19 of 2020, concerning the Utilization of a Special Scheme for the Provision of Goods and Materials for Shipbuilding Industry Companies for Shipbuilding.
- Development of remote survey services as a digital solution for conducting surveys, inspections and audits without the prospect of requiring the direct presence of BKI personnel in the field.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE





Perseroan berupaya meningkatkan tata kelola perusahaan melalui penerapan nilai-nilai baru (*new values*) dan budaya baru (*new culture*) PT Biro Klasifikasi Indonesia. Tata kelola selalu berkaitan dengan *business perspective*, terlebih PT BKI ditunjuk sebagai *lead holding* BUMN jasa survei, dengan PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero) sebagai entitas anak.

The Company's efforts to improve corporate governance are carried out by adopting the new values and new culture of PT Biro Klasifikasi Indonesia. Governance is always related to the business perspective, especially since PT BKI was appointed as the lead holding for the survey service BUMN, with PT Sucofindo (Persero) and PT Surveyor Indonesia (Persero) as subsidiaries.

PT Biro Klasifikasi Indonesia memiliki komitmen kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan semua proses bisnis berjalan baik dan akuntabel. Tata kelola perusahaan yang baik juga menjadi sarana bagi perusahaan dalam mengembangkan aset dan pertanggungjawaban kepada para *stakeholder*.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) is strongly committed to implementing the principles of Good Corporate Governance to ensure that all of the Company's business processes can run well and are accountable. Good corporate governance is also a means for the Company to develop its assets and accountability to stakeholders.

DASAR HUKUM, PRINSIP DAN TUJUAN PENERAPAN GCG

LEGAL BASIS, PRINCIPLES AND OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) didasarkan pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tata kelola perusahaan menjadi landasan Perseroan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan.

The principles of good corporate governance (GCG) are based on the prevailing laws and regulations. The implementation of corporate governance is the foundation for the Company to realize the Company's vision, mission and goals.

Dasar Hukum Penerapan GCG

Pelaksanaan GCG diatur dalam beberapa perangkat hukum yakni perundang-undangan, Keputusan Menteri, serta peraturan internal Perseroan berdasarkan keputusan Direksi.

Legal Basis for GCG Implementation

The implementation of GCG is regulated under several legal instruments, namely law, Ministerial Decrees, and the Company's internal regulations based on the decree of the Board of Directors.

Undang-Undang/Law

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

The Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 1999 regarding the State organizer who shall be clean and free from corruption, collusion, and nepotism.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

The Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 regarding the Amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 regarding the Eradication of Corruption Crime.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

The Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises (BUMN).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

The Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permeneg BUMN)/ Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises (Permeneg BUMN)

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/ MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara. Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2006 concerning Audit Committee for State- Owned Enterprises.

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan Perubahannya No. PER-09/ MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and Amendment No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK. 16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN.

Decree of the Secretary of the Ministry of SOE No. SK. 16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning indicators/parameters for evaluation and evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOE.

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.

Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-15/MBU/2012 dated September 25, 2012 regarding the amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2008 dated September 3, 2008 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services for BUMN.

Peraturan Internal Perseroan/Company Internal Regulations

Keputusan Direksi PT BKI (Persero) No. 235/PL.104/KI-08 tanggal 28 November 2008 tentang Penyempurnaan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa, Jo Surat Keputusan Direksi No. DU.199/PL.104/KI-11 tanggal 20 September 2011 tentang Penyempurnaan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa PT BKI (Persero).

Decree of the Board of Directors of PT BKI (Persero) No. 235/ PL.104/KI-08 dated November 28, 2008 concerning Improvement of Procedures for Procurement of Goods and Services, Juncto Decree of the Board of Directors No. DU.199/PL.104/KI-11 dated September 20, 2011 concerning Improvement of Procedures for Procurement of Goods and Services of PT BKI (Persero).

Anggaran Dasar Perusahaan, Akta Notaris Umaran Mansjur, S.H., No. 32 tanggal 21 April 2009 sebagai Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah.

The Company's Articles of Association, Notary Deed of Umaran Mansjur, S.H., No. 32 dated April 21, 2009 as the Company's Articles of Association were last amended.

Panduan atau *Board Manual Good Corporate Governance* (GCG) yang disahkan Dewan Komisaris dan Direksi pada 05 Februari 2014. Guide or Board Manual of Good Corporate Governance (GCG) which was approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors on February 5, 2014.

Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* (WBS) yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 060c/ LT.101/ KI-14 tanggal 05 Februari 2014.

Guidelines for Whistleblowing System (WBS) Reporting ratified through the Board of Directors Decree No. 060c/LT.101/KI-14 dated February 5, 2014.



Peraturan Internal Perseroan/Company Internal Regulations

Code of Conduct, atau panduan kode etik dan pedoman perilaku yang disahkan Direksi pada November 2015.

Code of Conduct, or guide to the code of ethics and code of conduct as approved by the Board of Directors in November 2015.

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 135/KP.008/KI-15 tanggal 23 Agustus 2015.

The Guidelines on Conflict of Interest as ratified by Board of Directors Decree No. 135/KP.008/KI-15 dated August 23, 2015.

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 135/KP.008/KI-15 tanggal 23 Agustus 2015.

The Guidelines on Conflict of Interest that have been ratified by the Board of Directors Decree No. 135/KP.008/KI-15 dated August 23, 2015.

Prinsip-Prinsip GCG

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang berlaku secara umum.

GCG Principles

In conducting its business, the Company applies the generally accepted governance principles.

Keterbukaan/Transparency

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. Perseroan mewujudkan transparansi dengan mempelopori pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi tersebut dan dilakukan dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan disarankan oleh praktik GCG.

Kepercayaan *shareholder* sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan berupaya menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Penyampaian informasi kepada *stakeholders* secara terbuka, benar, kredibel, dan tepat waktu akan memudahkan untuk menilai kinerja dan risiko yang dihadapi Perseroan.

Openness in decision making, and openness in disclosing material and relevant information about the Company. The Company realizes transparency through disclosure of financial and non-financial information to various parties of interest. Disclosure is not limited to such information and is carried out without violating the applicable laws and regulations, and is recommended by GCG practices.

The trust of the shareholders is highly dependent on the quality of the information submitted by the Company. Therefore, the Company strives to provide clear, accurate, timely and comparable information with the same indicators. Submission of information to stakeholders in an open, correct, credible, and timely manner will make it easier to assess the performance and risks faced by the Company.

Akuntabilitas/Accountability

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi problem yang timbul dari konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan Perseroan, maupun kepentingan Perseroan dengan *stakeholder*. BKI menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau organ Perseroan agar menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya.

Accountability is the clarity of the functions, implementation and accountability of the Company's organs so that the management of the company can be carried out effectively. Accountability is essential as a solution to overcome problems that arise from the logical consequences of differences between individual interests and the interests of the Company, as well as the interests of the Company and stakeholders. BKI implements accountability by encouraging all individuals and/or organs of the Company to be aware of their rights and obligations, duties and responsibilities and authorities.

Pertanggungjawaban/ Responsibility	<p>Pertanggungjawaban adalah kesesuaian dalam pengelolaan Perseroan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.</p> <p>Prinsip tanggung jawab menekankan pada sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban Perseroan kepada <i>Shareholders</i>. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam GCG, yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan Perseroan baik langsung atau tidak langsung. Prinsip tanggung jawab juga berkaitan dengan kewajiban Perseroan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku.</p> <p>Responsibility is conformity in the management of the Company to the prevailing laws and regulations and sound corporate principles.</p> <p>The principle of responsibility emphasizes a clear system to regulate the mechanism of the Company's accountability to the Shareholders. This is to realize the objectives to be achieved in GCG, namely to accommodate the interests of parties related to the Company, either directly or indirectly. The principle of responsibility also relates to the Company's obligation to comply with all applicable laws and regulations.</p>
Kemandirian/ Independence	<p>Kemandirian merupakan wujud pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.</p> <p>Perseroan menekankan prinsip kemandirian dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing organ Perseroan. BKI meyakini kemandirian merupakan sebuah keharusan agar mampu membuat keputusan yang terbaik bagi Perseroan.</p> <p>Independence is an embodiment of professional company management without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the laws and regulations and sound corporate principles.</p> <p>The Company emphasizes the principle of independence by always respecting the rights and obligations, duties and responsibilities as well as the authority of each organ of the Company. BKI believes that independence is a must to be able to make the best decisions for the Company.</p>
Kewajaran/ Fairness	<p>Prinsip kewajaran merupakan bentuk keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak <i>stakeholder</i> yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Dengan prinsip kewajaran, Perseroan menjamin setiap <i>stakeholder</i> dan pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik bisnis yang sehat.</p> <p>The principle of fairness is a form of justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and applicable laws and regulations.</p> <p>With the principle of fairness, the Company guarantees that every stakeholder and interested party gets fair treatment in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and healthy business practices.</p>

TUJUAN PENERAPAN GCG

THE PURPOSE OF IMPLEMENTING GCG

Pengelolaan Perseroan dengan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik bertujuan untuk:

1. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, efektif dan memberdayakan fungsi organ Perseroan serta meningkatkan kemandirian korporasi.
2. Mendorong agar setiap pengambilan dan pelaksanaan keputusan selalu dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.
3. Mendorong kesadaran adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun kelestarian lingkungan di mana perusahaan beroperasi .
4. Mengoptimalkan nilai Perseroan agar memiliki daya saing yang kuat di level nasional maupun internasional.
5. Meningkatkan kontribusi BKI dalam perekonomian nasional.
6. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

The purpose of managing the Company with the principles of good governance are:

1. To encourage a professional, efficient and effective management of the Company and to empower corporate functions and enhance its independence.
2. To ensure that every decision is made and implemented based on high moral values and compliance with laws and regulations.
3. To promote awareness of corporate social responsibility towards stakeholders, as well as environmental sustainability in which the company operates.
4. To optimize the value of the Company so that it can build a strong competitiveness at national or international level.
5. To increase the contribution of BKI in the national economy.
6. To improve a conducive climate for the development of national investment.

PENILAIAN TERHADAP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memberikan manfaat besar bagi kinerja Perseroan keseluruhan. Tata kelola perusahaan yang baik juga menjadi sarana dalam mengembangkan aset dan akuntabilitas kepada para *stakeholder*.

Assessment terhadap pelaksanaan GCG mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* di Badan Usaha Milik Negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/2014, serta Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

The implementation of good corporate governance provides great benefits for the Company's overall performance. Good corporate governance is also a means of developing assets and accountability to stakeholders.

Assessment of the implementation of GCG refers to the Regulation of the Minister of SOE No.PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises which has been amended by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/2014, as well as the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. Kep-100/MBU/2002 concerning the Assessment of the Health Level of SOEs.

Perseroan juga berupaya meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik melalui penerapan nilai-nilai baru (*new values*) dan budaya baru (*new culture*) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

The Company also seeks to improve good corporate governance through the application of new values and a new culture of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).



Assessment tersebut dilakukan dengan menggunakan alat ukur/ kriteria/parameter yang disusun berdasarkan SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atau Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, dengan aspek yang diukur meliputi Dewan Komisaris dan Direksi.

The assessment was carried out using measurement tools/criteria/parameters which were compiled based on SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation or Implementation of Good Corporate Governance at State Owned Enterprises which include the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Aspek Pengujian

Sesuai dengan ketentuan SK-16/S.MBU/2012, pada tahun 2020 Perseroan melakukan *self-assessment* GCG dengan pencapaian skor 86,81 dengan kualifikasi **SANGAT BAIK**. Pencapaian ini lebih baik dibanding tahun 2019 yang mencapai skor 85,55.

Aspects of Assessment

In accordance with the provisions of SK-16/S.MBU/2012, in 2020 the Company conducted a GCG self-assessment with a score of 86.81 and was in **VERY GOOD** qualification. This achievement is better than in 2019 which reached a score of 85.55.

Hasil assessment pelaksanaan GCG

GCG implementation assessment results

No	Aspek / Aspect	Bobot / Weight	Skor / Score	Capaian / Achievement
1.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan/ Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7.00	84,29%	5,88
2.	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal / Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	96,33%	8,57
3.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas/ Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	86,26%	30,19
4.	Direksi/Board of Directors	35,00	86,91 %	30,22
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi/ Information Disclosure and Transparency	9.00	85,11%	7,57
6.	Aspek Lainnya/Other Aspects	5.00	87,60%	4,38
	Skor Keseluruhan/Overall Score Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG/ Quality Classification of GCG Implementation	100,00	86,81	86,81
				SANGAT BAIK/EXCELLENT

Rekomendasi Hasil Assessment

Untuk mewujudkan perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*), pada tahun mendatang perlu dilakukan perbaikan secara nyata pada *Area of Improvement* (AOI) hasil *assessment* GCG tahun 2020.

Recommendations from Assessment Results

For continuous improvement, in the coming years the Company needs to make real improvements in the Area of Improvement (AOI) based on the results of the 2020 GCG assessment.



Penilaian terhadap implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) merupakan salah satu perangkat penilaian kinerja dan pengelolaan keseluruhan aspek organisasi berdasarkan Surat Kementerian Negara BUMN No.S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN.

Penilaian implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) bertujuan membantu Perseroan dalam menilai upaya perbaikan, menganalisis sistem manajemen kinerja secara keseluruhan dan mengidentifikasi kekuatan serta peluang-peluang perbaikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh.

Penilaian KPKU Tahun 2020 dilakukan secara *self assessment* dan masih dalam proses penilaian. Perseroan masih menggunakan KPKU tahun 2019. Sesuai dengan hasil *assessment* yang dilakukan oleh *assesor* independen Forum *Excellence* BUMN pada tahun 2019 skor KPKU mencapai 539,50.

Penilaian Implementasi PKPU

Assessment of Implementation of Superior Performance Assessment Criteria (KPKU)

Superior Performance Evaluation Criteria (KPKU) is a tool for evaluating the management performance all aspects of the organization. It is based on the State Ministry of Public Affairs Letter No.S-153/S.MBU/2012 dated July 19, 2012 concerning Performance Reporting Based on the SOE Superior Performance Evaluation Criteria (KPKU) Approach.

The Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) to assist the Company in evaluating improvement efforts, analyzing the overall performance management system and identifying strengths, as well as opportunities for improvement to improve overall company performance.

The 2020 KPKU assessment is carried out by self-assessment and is still in the assessment process. The Company is still using the KPKU in 2019. According to the results of an assessment conducted by an independent assessor of the SOE Excellence Forum in 2019, the KPKU score reached 539.50.

Assessment of PKPU Implementation

Kategori/Category	Skor Maksimal / Maximum Score	Percentase/ Percentage	Skor/ Score
Kategori 1: Kepemimpinan/Category 1: Leadership			
1.1. Kepemimpinan Senior/Senior Leadership	70	60	42,00
1.2. Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan/Governance and Social Responsibility	50	55	27,50
Kategori 2 : Perencanaan Strategi/Category 2: Strategic Planning			
2.1. Pengembangan Strategi/Development of Strategy	45	60	27,00
2.2. Implementasi Strategi/Implementation of Strategy	40	55	22,00
Kategori 3 : Fokus Pelanggan/Category 3: Customer Focus			
3.1. Suara Pelanggan/Customer Voice	40	55	22,00
3.2. Keterikatan Pelanggan/Customer Engagement	45	55	24,75
Kategori 4 : Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan/Category 4: Measurement, Analysis and Knowledge Management			
4.1. Pengukuran, Analisis dan Peningkatan Kinerja Perusahaan/ Measurement, Analysis and Improvement of Company Performance	45	55	24,75
4.2. Informasi dan Pengelolaan Pengetahuan/Information and Knowledge Management	45	55	24.75

Kategori/Category	Skor Maksimal / Maximum Score	Percentase/ Percentage	Skor/ Score
Kategori 5 : Fokus Tenaga Kerja/Category 5: Workforce Focus			
5.1. Lingkungan Tenaga Kerja/Workforce Environment	40	55	22.00
5.2. Keterikatan (<i>Engagement</i>) Tenaga Kerja/Workforce Engagement	45	55	24,75
Kategori 6 : Fokus Operasi/Category 6: Operational Focus			
6.1. Proses Kerja/Work process	45	55	24,75
6.2. Efektivitas Operasional/Operational Effectiveness	40	55	24,75
Kategori 7 : Dimensi Hasil/Category 7: Dimensions of Results			
7.1. Hasil/Kinerja Produk dan Proses/Products and Processes Results/ Performance	120	50	60.00
7.2. Hasil/Kinerja Fokus Pelanggan/Customer Focus Results/Performance	80	55	44.00
7.3. Hasil/Kinerja Fokus Tenaga Kerja/Workforce Focus Results/ Performance	80	55	44.00
7.4. Hasil/Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola/Leadership and Governance Results/Performance	80	55	44.00
7.5. Hasil/Kinerja Finansial dan Pasar/Financial and Market Results/ Performance	90	60	49.50
Jumlah/Total	1.000		554,25

Struktur Organ Tata Kelola Perseroan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), struktur tata kelola Perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ Perusahaan.

Structure of Corporate Governance Organ

Based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT), the corporate governance structure consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and Board of Directors as the Company's organs

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

RUPS merupakan organ Perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam struktur tata kelola perseroan. RUPS berwenang mengambil seluruh keputusan untuk menyetujui Laporan Tahunan, mengevaluasi kinerja Perusahaan, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris atau Direksi. RUPS juga menjadi forum bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kepentingan usaha. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi usaha, RUPS memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat dalam mengambil keputusan.

The GMS is the organ of the Company that has the highest power in the corporate governance structure. The GMS has the authority to make decisions in approving the Annual Report, evaluating the Company's performance, appointing and dismissing members of the Board of Commissioners or the Board of Directors. The GMS is also a forum for Shareholders to exercise their rights to make important decisions related to business interests. As the holder of the highest business power, the GMS has legal and binding power in making decisions.

Pemegang Saham

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perusahaan. PT BKI Pertamina (Persero), adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang sahamnya 100% dimiliki Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN.

Shareholders

Shareholders are individuals or legal entities that legally own the Company's shares. PT BKI Pertamina (Persero), is a state-owned enterprise (BUMN) whose shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs.

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Sesuai Anggaran Dasar PT BKI, pemegang saham memiliki hak dan tanggung jawab atas Perseroan. Pemenuhan hak dan tanggung jawab pemegang saham dijamin oleh perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan bisnis Perseroan.

Rights and Responsibilities of Shareholders

In accordance with PT BKI's Articles of Association, shareholders have rights and responsibilities over the Company. The fulfillment of the rights and responsibilities of shareholders is guaranteed by applicable laws, while taking into account the sustainability of the Company's business.

Penyelenggaraan RUPS

Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan satu kali dalam setahun. Penyelenggaraan RUPS berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dengan penyesuaian kondisi PT BKI dan mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan. RUPS dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

GMS Implementation

The Company holds an Annual GMS once a year. The holding of the GMS is based on the Financial Services Authority Regulation No. 32/ POJK.04/2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company by adjusting the conditions of PT BKI and referring to the Company's Articles of Association. The GMS was attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Penyelenggaraan RUPS 2020

Implementation of the 2020 GMS

28 Januari 2020/ January 28, 2020	Pengesahan RKAP Tahun 2020/Approval of the 2020 RKAP
30 Juni 2020/ June 30, 2020	RUPS pertanggungjawaban Laporan Manajemen Tahun Buku 2019/GMS of accountability of Management Report for Fiscal Year 2019
	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019/Determination of the Use of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2019
	Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020/Determination of Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration for 2020
	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020/Appointment of the Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2020

Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS

Attendance of the Board of Commissioners at the GMS

Nama/Name	Jabatan/Position	Kehadiran/Attendance
Agung Kuswandono	Komisaris Utama/President Commissioner	Hadir/Present
Dwi Budi Sutrisno	Komisaris/Commissioner	Hadir/Present
R. Harry Hikmat	Komisaris/Commissioner	Hadir/Present
M. Amperawan	Komisaris/Commissioner	Hadir/Present

Kehadiran Direksi dalam RUPS

Attendance of the Board of Directors at the GM

Nama/Name	Jabatan/Position	Kehadiran/Attendance
Rudianto	Direktur Utama/President Director	Hadir/Present
Mohamad Cholil	Direktur Operasi/Director of Operations	Hadir/Present
Saifuddin Wijaya	Direktur Pengembangan Sumber Daya/Director of Resource Development	Hadir/Present
Bandung Pardede	Direktur Keuangan dan Administrasi/Director of Finance and Administration	Hadir/Present

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam struktur tata kelola Perseroan, Dewan Komisaris adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan atas jalannya perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi. Anggota Dewan Komisaris bertindak secara kolegial sebagai Dewan dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang disahkan oleh RUPS. Dewan Komisaris juga berperan dalam mengawasi penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.

Within the corporate governance structure, the Board of Commissioners is the organ that carries out the supervisory function over the running of the Company as carried out by the Board of Directors. Members of the Board of Commissioners should act collegially as an assembly and should not act alone. The duties, authorities and obligations of the Board of Commissioners are regulated in the Company's Articles of Association which are approved by the GMS. The Board of Commissioners also plays a role in overseeing the implementation of GCG within the Company.

Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Biro Klasifikasi Indonesia No. SK-17/MBU/01/2019, tanggal 15 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Anggota Dewan Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia, maka komposisi Dewan Komisaris PT BKI pada akhir tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Nama/Name	Jabatan/Position
1.	Agung Kuswadono	Komisaris Utama/President Commissioner
2.	Dwi Budi Sutrisno	Komisaris/Commissioner
3.	R. Harry Hikmat	Komisaris/Commissioner
4.	M. Amperawan	Komisaris/Commissioner

Dalam Melaksanakan tugas-tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor : SK.04/ DEKOM.BKI/XI/2019 tanggal 01 Desember 2019, Dewan Komisaris mengangkat Syaiful Yulni sebagai sekretaris Dewan Komisaris menggantikan Sukamdani Eko Basuki. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- Masa jabatannya berakhir;
- Mengundurkan diri;
- Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
- Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS; dan
- Meninggal dunia dalam masa jabatannya.

In discharging its duties, the Board of Commissioners is assisted by 1 (one) Secretary to the Board of Commissioners. Based on the Decision of the Board of Commissioners Number: SK.04/DEKOM.BKI/XI/2019 dated December 1, 2019, the Board of Commissioners appointed Mr. Syaiful Yulni as Secretary of the Board of Commissioners, to replace Mr. Sukamdani Eko Basuki. The position of a member of the Board of Commissioners ends when:

- Term of office ends;
- Resign;
- No longer meet the requirements of the applicable laws;
- Dismissed based on the GMS Resolution; and
- Pass away during tenure.

Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, tugas pokok Dewan Komisaris adalah:

- Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi;
- Mengikuti perkembangan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap setiap masalah penting Perseroan;
- Melaporkan kepada RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
- Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan dari Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
- Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dengan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS
- Sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, Dewan Komisaris dapat menggunakan saran profesional yang mandiri dan atau membentuk komite-komite bila diperlukan.

Description of the responsibilities of the Board of Commissioners

Based on the Company's Articles of Association, the main duties of the Board of Commissioners are:

- Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the RJPP and RKAP proposed by the Board of Directors;
- Following the development of the Company, providing opinions and suggestions to the GMS on any important issues of the Company;
- Report to the GMS if there are signs of a decline in the Company's performance;
- Researching and reviewing periodic reports and annual reports from the Board of Directors and signing the annual report;
- Carry out other obligations in the context of supervisory duties without conflicting with the legislation, the Articles of Association, and/or the resolutions of the GMS
- In accordance with established procedures, the Board of Commissioners may use independent professional advice and/or form committees if necessary.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris bertugas sesuai dengan latar belakang profesi, pengetahuan, pengalaman dan kapasitas anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah membagi tugas sebagai berikut:

Division of Duties of the Board of Commissioners

In carrying out their duties and responsibilities, members of the Board of Commissioners work in accordance with the professional background, knowledge, experience and capacity of members of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners has divided the duties as follows:

Nama/Name	Uraian Tugas/Job Description
Agung Kuswandono Komisaris Utama/President Commissioner	Mengkoordinasi tugas-tugas Dewan Komisaris Coordinating the duties of the Board of Commissioners
Dwi Budi Sutrisno Komisaris/Commissioner	Menangani bidang Operasi Handling the Operational
R. Harry Hikmat Komisaris/Commissioner	Menangani bidang pengembangan Sumber Daya dan Hukum Addressing the Resource and Legal Development Issues
M. Amperawan Komisaris/Commissioner	Menangani bidang Keuangan dan Penerapan GCG Handling the Finance Affairs and GCG Implementation



Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali, terbagi dalam 11 (sebelas) kali adalah rapat internal dewan Komisaris dan 11 (sebelas) kali rapat gabungan dengan mengundang Direksi (Rapat Gabungan).

Board of Commissioners Meeting

In accordance with its duties and responsibilities, throughout 2020 the Board of Commissioners held 22 (twenty two) meetings, consisting of 11 (eleven) internal meetings of the Board of Commissioners and 11 (eleven) joint meetings inviting the Board of Directors (Joint Meetings).

Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal

Attendance of the Board of Commissioners in Internal Meetings

Nama/Name	Jabatan/Position	Kehadiran/Attendance
Agung Kuswandono	Komisaris Utama/President Commissioner	12 kali/times
Dwi Budi Sutrisno	Komisaris/Commissioner	12 kali/times
R. Harry Hikmat	Komisaris/Commissioner	12 kali/times
M. Amperawan	Komisaris/Commissioner	12 kali/times

Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan

Attendance of the Board of Commissioners at the Joint Meeting

Nama/Name	Jabatan/Position	Kehadiran/Attendance
Agung Kuswandono	Komisaris Utama/President Commissioner	12 kali/times
Dwi Budi Sutrisno	Komisaris/Commissioner	12 kali/times
R. Harry Hikmat	Komisaris/Commissioner	12 kali/times
M. Amperawan	Komisaris/Commissioner	12 kali/times

Realisasi KPI Dewan Komisaris

Realization of KPI for the Board of Commissioners

No.	Aspek dan Parameter/Aspects and Parameters	Bobot/Weight	Target/Target	Realisasi/Realization	Nilai/Value
I.	Asepek pengawasan dan Pemberian Nasihat/Aspects of supervision and advisory				
1.	Memberikan persetujuan/tanggapan kepada Pemegang Saham terhadap/Provide approval/response to Shareholders on				
a.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL/Company Work Plan and Budget (RKAP) and PKBL Work and Budget Plan (RKA)	5	1	1	5,00
b.	Laporan Tahunan/Annual Report	3	1	1	3,00
c.	Analisis Kinerja Triwulan/Quarterly Performance Analysis	2	4	4	2,00
2.	Memberikan persetujuan atau pendapat atas usulan Direksi yang merupakan wewenang Dewan Komisaris/Give approval or opinion on the proposal of the Board of Directors which is the authority of the Board of Commissioners	10	100	100	10,00
3.	Rapat Dewan Komisaris/Board of Commissioners Meeting				



No.	Aspek dan Parameter/Aspects and Parameters	Bobot/Weight	Target/Target	Realisasi/Realization	Nilai/Value
a.	Jumlah Rapat/Number of Meetings	2	12	12	2,00
b.	Kehadiran Rapat/Meeting Attendance	2	100	100	2,00
c.	Penyelesaian Risalah Rapat/Completion of Minutes of Meeting	1	12	12	1,00
4.	Monitoring tindak lanjut hasil temuan SPI dan Audit serta Assessment GCG/ Follow-up monitoring of SPI and Audit findings as well as GCG Assessment	10	3	2	10,00
5.	Evaluasi pelaksanaan Eksternal Auditor/Evaluation on Implementation of External Auditor	10	1	1	10,00
6.	Monitoring dan evaluasi kantor cabang melalui vidcon/kunjungan Monitoring and evaluation of branch offices through vidcon/visit	5	6	10	5,50
Sub Total I		50			50,50
II.	Aspek Pelaporan/Reporting Aspect				
1.	Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris/Board of Commissioners Work Plan and Budget	15	1	1	15,00
2.	Laporan Pengawasan Tahunan/Annual Supervision Report	15	1	1	15,00
Sub Total II		30			30
III.	Aspek Dinamis/Lain-lain/Dynamic Aspects/Miscellaneous				
1.	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, Workshop dll./Competency development through seminars, workshops, etc.	10	2	4	11,00
2.	Tindak lanjut atas Hasil Assessment GCG/Follow up on GCG Assessment Results	10	100	100	10,00
Sub Total III		20			21,00
Total I+II+III		100			101,50

Realisasi Anggaran Dewan Komisaris

Realisasi anggaran Dewan Komisaris PT BKI (Persero) tahun 2020 sebesar Rp1.116.884.500 atau tercapai 91,92% dari anggaran sebesar Rp1.215.000.000.

Realization of the Board of Commissioners' Budget

The realization of the budget of the Board of Commissioners of PT BKI (Persero) in 2020 was Rp1,116,884,500 or 91.92% of the budget of Rp1,215,000,000.

(dalam rupiah / in rupiah)

No.	Uraian/Description	Anggaran 2020 non Honorarium/ Budget 2020 non-Honorarium	Realisasi/ Realization	%
1.	Perjalanan Dinas/Official Travel	200.000.000	141.884.500	70,94%
2.	Seminar/Diklat Studi Banding Dalam Negeri/ Domestic Comparative Study Seminar/Training	25.000.000.	15.000.000	60,00%
3.	Belanja Tenaga Ahli/Konsultan/Expenses for Experts/ Consultants	10.000.000	0	0%
4.	Honorarium Komite/Honorarium for Committee	960.000.000	960.000.000	100%
5.	Lain-lain/Others	20.000.000	-	0,00%
Total		1.215.000.000	1.116.884.500	91,92%

Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi adalah imbalan yang diberikan kepada Komisaris atas peran yang diberikan untuk pengurusan dan pengawasan perseroan. Melalui RUPS tanggal 30 Juni 2020 dan sesuai surat Plt. Asisten Deputi Bidang Industri Semen, Survei, dan Industri Lainnya No.S-10/Wk.1.MBU.F/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihal Penetapan Penghasilan Gaji Direksi dan Dewan Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Tahun 2020, remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan

(dalam jutaan rupiah/in million rupiah)				
Nama/Name	Jabatan/Position	Honorarium	Tunjangan Transport/ Transport Allowance	
Agung Kuswandono	Komisaris Utama/President Commissioner	49.500	9.900	
Dwi Budi Sutrisno	Komisaris/Commissioner	44.550	8.910	
R. Harry Hikmat	Komisaris/Commissioner	44.550	8.910	
M. Amperawan	Komisaris/Commissioner	44.550	8.910	

Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris 2020

Pada tahun 2020 tidak ada pendidikan atau pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2020

Pada tahun Dewan Komisaris telah bertugas mengawasi dan memberikan masukan kepada Direksi demi kepentingan Perseroan, Pemegang Saham serta pihak yang berkepentingan pada umumnya. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan agar Direksi dalam kondisi apapun mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris secara teratur memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi agar selalu sesuai dengan tujuan perusahaan, arahan Pemegang Saham

Board of Commissioners Remuneration

Remuneration is a reward given to the Commissioners for their role in the management and supervision of the Company. On the GMS on June 30, 2020 and according to the letter of Act. Assistant Deputy for Cement Industry, Surveys, and Other Industries No.S-10/Wk.1.MBU.F/08/2020 dated August 4, 2020 regarding Determination of Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) in 2020, the remuneration of the Board of Commissioners is determined as follows:

Attendance of the Board of Commissioners at the Joint Meeting

(dalam jutaan rupiah/in million rupiah)

Board of Commissioners Education and Training in 2020

There is no education or training attended by members of the Board of Commissioners in 2020.

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in 2020

In the Board of Commissioners has discharged their duties of supervision and advisory to the Board of Directors for the benefit of the Company, Shareholders and other Stakeholders in general. The Board of Commissioners is responsible for ensuring that the Board of Directors, under any circumstances, are able to carry out their duties. The Board of Commissioners regularly monitors the effectiveness of the implementation of policies and decision-making processes carried out by the Board of Directors so that they are always in line with the Company's

dan anggaran Dasar Perusahaan, dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan pendapat, arahan dan saran atas sistem pengendalian internal perusahaan.
2. Menghadiri undangan Pembahasan RUPS RKAP 2020 PT BKI (Persero) di Kementerian BUMN.
3. Menghadiri rapat Pembahasan *Progress Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2019* PT BKI (Persero) dengan KAP RSM Indonesia.
4. Menghadiri rapat Kerja Nasional PT BKI (Persero) atas Evaluasi Kinerja 2019, Arah Kebijakan RKAP 2020 dan Penandatanganan Kontrak Manajemen.
5. Menghadiri rapat Pembahasan Struktur PT BKI (Persero) dan Rencana *Holding*.
6. Menghadiri rapat Pembahasan *Masterplan Cluster Survey* bersama konsultan dengan Wamen BUMN I di Kementerian BUMN.
7. Menghadiri rapat Pembahasan Percepatan Progres Pembentukan BUMN Jasa Survei dengan PT Surveyor Indonesia (Persero).
8. Melakukan *review* atas Program Kerja Satuan Pengawasan Internal (SPI) Tahun 2020.
9. Melakukan pendampingan Audit Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2019 oleh KAP RSM Indonesia.
10. Melakukan *review* atas Draft Awal Konsolidasi Jasa Survei unaudited 2019.
11. Melakukan pendampingan dan me-*review* hasil Audit Keuangan tahun 2019 oleh RSM Indonesia.
12. Melakukan *review* atas Laporan Kinerja PT BKI (Persero) Januari 2020
13. Melakukan pembahasan hasil Audit SPI tahun 2019 dan me-*review* terbatas pengendalian internal.
14. Melakukan *review* atas Laporan Kinerja PT BKI (Persero) Februari 2020.
15. Menghadiri rapat dengan Deputi SDM TI Kementerian BUMN tentang sosialisasi konsep manajemen talenta dan suksesi Direksi BUMN.
16. Menghadiri rapat *Monitoring* dan Pembahasan kinerja keuangan perusahaan bulan April dengan Wamen BUMN I.

objectives, the direction of the Shareholders and the Company's Articles of Association.

1. Supervise the policies and performance of the Board of Directors including supervision of the implementation of the Annual Work Plan and Budget based on the Articles of Association, GMS Resolutions and applicable laws and regulations and provide opinions, directions and suggestions on the Company's internal control system.
2. Attending the invitation to the 2020 GMS for the Discussion on the RKAP of PT BKI (Persero) at the Ministry of SOEs.
3. Attending the discussion on the progress of the 2019 Financial Statement audit of PT BKI (Persero) with KAP RSM Indonesia.
4. Attending the National Working Meeting of PT BKI (Persero) for the 2019 Performance Evaluation, the 2020 RKAP Policy Direction and the Signing of the Management Contract.
5. Attending the Discussion on the Structure of PT BKI (Persero) and the Holding Plan.
6. Attending the discussion on Masterplan Cluster Survey with consultants and the Deputy Minister of SOE I at the Ministry of SOE.
7. Attending a discussion on the Acceleration of Progress for the Establishment of a Survey Service BUMN with PT Surveyor Indonesia (Persero).
8. Reviewing the 2020 Internal Audit Unit (SPI) Work Program.
9. Assisting in the Financial Audit of the 2019 Financial Statements by KAP RSM Indonesia.
10. Reviewing the Initial Draft of Unaudited Consolidation of Survey Services 2019.
11. Assisting and reviewing the results of the 2019 Financial Audit by RSM Indonesia.
12. Reviewing the Performance Report of PT BKI (Persero) January 2020.
13. Discussing the results of the 2019 SPI Audit and reviewing limited internal controls.
14. Reviewing the Performance Report of PT BKI (Persero) February 2020.
15. Attending meeting with the Deputy for IT HR of the Ministry of SOEs on the socialization of the concept of talent management and the succession of SOE's Board of Directors.
16. Attending meeting on Monitoring and Discussing the Company's financial performance in April with the Deputy Minister of SOE I.

17. Menghadiri rapat pembahasan dokumen pengadaan bersama jasa audit KAP 2020 dengan Ketua Pengadaan Bersama BUMN Jasa Survei.
18. Menghadiri rapat tindak lanjut arahan Wamen I terkait penyusunan RJPP Tahun 2020-2024 dan paparan konsultan BCG tentang *master plan* jasa survei tahun 2020-2024 dengan Kementerian BUMN.
19. Menghadiri rapat pembahasan *master plan* jasa survei tahun 2020-2024 dengan konsultan BCG dalam rangka menentukan fokus bisnis dengan Kementerian BUMN.
20. Menghadiri rapat pembahasan *monitoring* kinerja keuangan BUMN *cluster* survei bulan Mei 2020 dengan Kementerian BUMN.
21. Menghadiri undangan pembahasan final dokumen pengadaan bersama jasa audit KAP 2020 dengan ketua pengadaan bersama BUMN Jasa Survei.
22. Menghadiri rapat *monitoring* dan pembahasan kinerja keuangan perusahaan bulan Mei 2020 dengan Wamen I.
23. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Audited PT BKI (Persero).
24. Menghadiri rapat perihal pembahasan RJPP PT BKI (Persero) tahun 2020-2024.
25. Menghadiri rapat dengan Wamen BUMN I perihal Kick Off Konsolidasi BUMN di bawah Wamen BUMN I.
26. Memonitor Kantor Cabang Komersil Pekanbaru, BKI Academy, Cabang Komersil Banten via Zoom.
27. Menghadiri rapat Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN perihal Sosialisasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dekom Anak Perusahaan BUMN.
28. Menghadiri rapat dengan Wamen BUMN I perihal *Weekly Meeting* Konsolidasi BUMN di bawah Wamen BUMN I.
29. Menghadiri rapat dengan Wamen BUMN I perihal *Monthly Monitoring* LK Juni 2020 bersama Wamen BUMN I
30. Menghadiri rapat dengan Wamen BUMN I perihal Presentasi Hasil Analisis *Procurement Excellence Program Cluster* Pupuk oleh *Talent* BUMN & BCG.
17. Attending meeting to discuss documents on joint procurement of KAP audit services in 2020 with the Chair of the Joint Procurement of Survey Services SOEs.
18. Attending follow-up meeting on the direction of Deputy Minister I regarding the preparation of the 2020-2024 RJPP and the exposure of the BCG consultant on the 2020-2024 survey service master plan with the Ministry of SOEs.
19. Attending the 2020-2024 survey service master plan discussion meeting with BCG consultants in order to determine business focus with the Ministry of SOEs.
20. Attending discussion on monitoring the financial performance of the SOE survey cluster in May 2020 with the Ministry of SOEs.
21. Attended the final discussion of the joint procurement document for KAP audit services in 2020 with the chairman of the joint procurement of the Survey Services BUMN.
22. Attending the Company's financial performance monitoring and discussion meeting in May 2020 with Deputy Minister I.
23. Attending the Audited General Meeting of Shareholders (GMS) of PT BKI (Persero).
24. Attending meeting regarding the discussion of the RJPP PT BKI (Persero) for the year 2020-2024.
25. Attending meeting with the Deputy Minister of SOE I regarding the Kick Off of the Consolidation of SOE under the Deputy Minister of SOE I.
26. Monitoring the Pekanbaru Commercial Branch Office, BKI Academy, Banten Commercial Branch via Zoom.
27. Attending meeting with the Deputy for Law and Legislation of the Ministry of SOEs regarding the Socialization of the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/06/2020 concerning Amendments to PER-03/MBU/2012 concerning Guidelines for Appointing Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of SOEs Subsidiaries.
28. Attending meeting with the Deputy Minister of SOE I regarding the Weekly Meeting of the SOE Consolidation under the Deputy Minister of SOE I.
29. Attending meeting with the Deputy Minister of SOE I regarding Monthly Monitoring LK June 2020 with the Deputy Minister of SOE I.
30. Attending meeting with the Deputy Minister of SOE I regarding the Presentation of the Results of the Procurement Excellence Analysis of the Fertilizer Cluster Program by BUMN & BCG Talent.

31. Menghadiri rapat dengan Direksi PT BKI (Persero) perihal Pelaksanaan Pengadaan Jasa Audit LK Tahun Buku 2020 BUMN Jasa Survei.
32. Menghadiri rapat dengan Direksi PT BKI (Persero) perihal TIC Summit (Peluncuran TIC Institute).
33. Menghadiri undangan dengan Wamen BUMN I perihal Pembahasan *Monthly Monitoring* LK Juli-Agustus 2020.
34. Menghadiri undangan rapat dengan WAMEN I BUMN *Kick Off* Discussion BUMN Research Institute.
35. Menghadiri rapat dengan Direksi perihal sosialisasi transformasi *human capital*/PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
36. Mengikuti *Zoom Meeting Conference* dan *Live Streaming* melalui Akun Resmi Youtube Kementerian BUMN RI.
37. Menghadiri rapat dengan Direksi terkait Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.
38. Menghadiri rapat dengan Direksi pembahasan *Issue Terkini* PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) & Permasalahannya dan pembahasan RKAP Tahun 2021.
39. Menghadiri konsinyering dalam rangka persiapan parameter dan menginventarisasi kelengkapan dokumen penilaian *assessment GCG* Tahun 2020.
40. Menghadiri rapat dengan WAMEN I BUMN Pembahasan *Monthly Monitoring* Laporan Keuangan September 2020.
41. Menghadiri rapat dengan Kementerian BUMN Sosialisasi Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021.
42. Menghadiri *National Conference Enhancing Communication & Collaboration : Learning From The Pandemic*.
43. Menghadiri konsinyering dalam rangka tindak lanjut persiapan parameter dan menginventarisasi kelengkapan dokumen penilaian *assessment GCG* Tahun 2020.
44. Memberikan tanggapan, pendapat dan saran kepada Pemegang Saham di antaranya :
- Surat Nomor : PS.02/DK.BKI/IV/2020 Tanggal 01 April 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT BKI s/d Triwulan IV Tahun 2019.
31. Attending meeting with the Board of Directors of PT BKI (Persero) regarding the Implementation of LK Audit Services Procurement for Fiscal Year 2020 BUMN Survey Services.
32. Attending meeting with the Board of Directors of PT BKI (Persero) regarding the TIC Summit (Launching of the TIC Institute).
33. Attended meeting with the Deputy Minister of SOE I regarding the Monthly LK Monitoring Discussion July-August 2020.
34. Attending meeting with Deputy Minister of SOE I regarding the Kick Off Discussion on SOE Research Institute.
35. Attending meeting with the Board of Directors regarding the socialization of human capital transformation at PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
36. Participate in the Zoom Meeting and Live Streaming via the Official Youtube Account of the Ministry of SOEs.
37. Attending meeting with the Board of Directors regarding the Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs.
38. Attending meeting with the Board of Directors to discuss the latest issue of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) & its problems and discussion of the 2021 RKAP.
39. Attending consignments for preparation of parameter and inventory of the completeness of the 2020 GCG assessment documents.
40. Attending meeting with Deputy Minister of SOE I regarding Discussion Monthly Monitoring Financial Report September 2020.
41. Attending a meeting with the Ministry of SOEs Disseminating the Aspirations of Shareholders/Capital Owners for the Preparation of the 2021 Company Work Plan and Budget.
42. Attending the National Conference on Enhancing Communication & Collaboration: Learning From The Pandemic.
43. Attending consignments in the context of following up on parameter preparation and taking an inventory of the completeness of the 2020 GCG assessment documents.
44. Provide responses, opinions and suggestions to Shareholders, including:
- Letter Number: PS.02/DK.BKI/IV/2020 April 01, 2020 regarding the Board of Commissioners' Response to the Management Report of PT BKI up to Quarter IV of 2019.



- b. Surat Nomor : PS.03/DK.BKI/IV/2020 Tanggal 01 April 2020 perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2019.
- c. Surat Nomor : PS.04/DK.BKI/IV/2020 Tanggal 05 April 2020 perihal Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT BKI (Persero) Tahun 2020 dan Penetapan Tantiem atas Kinerja Usaha Tahun 2019 serta Penggunaan Laba Bersih.
- d. Surat Nomor : PS. 05/DK.BKI/IV/2020 Tanggal 13 April 2020 perihal Usulan Penunjukan KAP untuk Audit Umum atas Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.
- e. Surat Nomor : PS. 06/DK.BKI/IV/2020 Tanggal 30 April 2020 perihal Penyampaian *Talent* BOD-1 (Top 20% *Talent*) dan *Talent* BOD PT BKI (Persero).
- f. Surat Nomor : PS.07/DK.BKI/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen s/d Triwulan I Tahun 2020 PT BKI (Persero).
- g. Surat Nomor : PS. 09/DK.BKI/VI/2020 Tanggal 13 Juni 2020 perihal Usulan Pengadaan KAP untuk Audit atas Laporan keuangan PT BKI (Persero) Tahun Buku 2020.
- h. Surat Nomor : PS.10/DK.BKI/VIII/2020 Tanggal 4 Agustus 2020 perihal Laporan Manajemen PT BKI (Persero) s/d Triwulan II Tahun 2020.
- i. Pengajuan RJPP PT BKI (Persero) Tahun 2020-2024.
- j. Surat Nomor : PS.11/DK.BKI/IX/2020 Tanggal 17 September 2020 perihal Permohonan Penetapan KAP untuk mengaudit LK dan LK PKBL PT BKI (Persero) Tahun Buku 2020.
- k. Surat Nomor : PS.12/DK.BKI/IX/2020 Tanggal 18 September 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas Kinerja Keuangan Perusahaan Bulan Mei 2020.
- l. Surat Nomor : PS.13/DK.BKI/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas Kinerja Keuangan Perusahaan Bulan Juni 2020.
- m. Surat Nomor : PS.14/DK.BKI/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 perihal Permohonan Penetapan
- b. Letter Number : PS.03/DK.BKI/IV/2020 April 01, 2020 regarding the 2019 Board of Commissioners Supervisory Duty Report.
- c. Letter Number: PS.04/DK.BKI/IV/2020 April 5, 2020 regarding the Proposed Remuneration of the Directors and Board of Commissioners of PT BKI (Persero) in 2020 and the Determination of Tantiem on Business Performance in 2019 and the Use of Net Profit.
- d. Letter Number : PS. 05/DK.BKI/IV/2020 April 13, 2020 regarding the Proposal for Appointment of Public Accountants for the General Audit of Financial Statements and Annual Report on the Implementation of the Partnership and Community Development Program for the 2020 Financial Year.
- e. Letter Number : PS. 06/DK.BKI/IV/2020 April 30, 2020 regarding Submission of Talent BOD-1 (Top 20% Talent) and Talent BOD PT BKI (Persero).
- f. Letter Number: PS.07/DK.BKI/V/2020 May 13, 2020 regarding the Board of Commissioners' Response to the Management Report up to Quarter I of 2020 PT BKI (Persero).
- g. Letter Number : PS. 09/DK.BKI/VI/2020 dated June 13, 2020 regarding the Proposed Procurement of Public Accountants for Auditing the Financial Statements of PT BKI (Persero) for the 2020 Financial Year.
- h. Letter Number: PS.10/DK.BKI/VIII/2020 dated August 4, 2020 regarding the Management Report of PT BKI (Persero) up to Quarter II of 2020.
- i. Submission of PT BKI (Persero) RJPP for 2020-2024.
- j. Letter Number: PS.11/DK.BKI/IX/2020 September 17, 2020 regarding the Application for Determination of KAP to audit PT BKI (Persero) LK and PKBL LK (Persero) Fiscal Year 2020.
- k. Letter Number: PS.12/DK.BKI/IX/2020 September 18, 2020 regarding the Response of the Board of Commissioners of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) on the Company's Financial Performance in May 2020.
- l. Letter Number: PS.13/DK.BKI/IX/2020 September 23, 2020 regarding the Response of the Board of Commissioners of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) on the Company's Financial Performance in June 2020.
- m. Letter Number: PS.14/DK.BKI/X/2020 dated October 14, 2020 regarding the Application for

- KAP untuk Audit LK Konsolidasian Perseroan dan LK PKBL PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
- n. Surat Nomor : PS.15/DK.BKI/XI/2020 Tanggal 2 November 2020 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas RJPP PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Tahun 2020-2024.
 - o. Surat Nomor : PS.16/DK.BKI/XI/2020 Tanggal 4 November 2020 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen s/d Triwulan III Tahun 2020 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
 - p. Surat Nomor : PS.17/DK.BKI/XI/2020 Tanggal 30 November 2020 Perihal Penyampaian Usulan Indikator Aspek Operasional dalam RKAP Tahun 2021 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
45. Memberikan tanggapan kepada Direksi Surat Nomor: A.01/DK.BKI/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 perihal Kegiatan Dewan Komisaris s/d Triwulan IV 2019.
46. Memberikan tanggapan dan persetujuan kepada Direksi yaitu surat Nomor : A.02/DK.BKI/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal persetujuan penetapan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan.
47. Memberikan tanggapan dan persetujuan kepada Direksi yaitu surat Nomor : A.03/DK.BKI/I/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Hasil Pembahasan Bersama atas Kinerja PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) s/d Bulan Desember 2019.
48. Memberikan tanggapan kepada Direksi Surat Nomor: A.04/DK.BKI/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada PT BKI (Persero).
49. Memberikan tanggapan dan persetujuan kepada Direksi yaitu surat Nomor :A.05/DK.BKI/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi dan Peningkatan Status Cabang Madya Banten Klas.
50. Memberikan tanggapan dan persetujuan kepada Direksi yaitu surat Nomor :A.06/DK.BKI/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal persetujuan perpanjangan kontrak jasa audit atas laporan keuangan tahun 2019.
51. Memberikan tanggapan kepada Direksi Surat Nomor: A.07/DK.BKI/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Evaluasi Pelaksanaan Audit oleh KAP RSM Indonesia Tahun 2019.
- Determination of KAP for the Audit of the Company's Consolidated LK and PKBL LK of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
- n. Letter Number : PS.15/DK.BKI/XI/2020 dated November 2, 2020 Regarding the Board of Commissioners' Response to the RJPP of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) for 2020-2024.
 - o. Letter Number: PS.16/DK.BKI/XI/2020 dated November 4, 2020 Regarding the Board of Commissioners' Response to the Management Report up to Quarter III of 2020 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
 - p. Letter Number : PS.17/DK.BKI/XI/2020 dated November 30, 2020 Regarding Submission of Proposed Operational Aspect Indicators in the 2021 RKAP PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
45. Responding to the Board of Directors Letter Number: A.01/DK.BKI/I/2020 dated January 08, 2020 regarding the Activities of the Board of Commissioners up to Quarter IV 2019.
46. Provided response and approval to the Board of Directors, namely letter Number: A.02/DK.BKI/I/2020 dated January 27, 2020 regarding the approval of the appointment of the Head of the Corporate Secretary Division.
47. Provided response and approval to the Board of Directors, namely letter Number: A.03/DK.BKI/I/2020 dated February 7, 2020 regarding the Results of the Joint Discussion on the Performance of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) until December 2019.
48. Provided a response to the Board of Directors Letter Number: A.04/DK.BKI/II/2020 dated February 10, 2020 regarding the Follow-up to BPK Examination Results at PT BKI (Persero).
49. Provided response and approval to the Board of Directors, namely letter Number: A.05/DK.BKI/II/2020 dated February 17, 2020 regarding Approval of Changes in Organizational Structure and Status Improvement of Banten Class Middle Branch.
50. Provided response and approval to the Board of Directors, namely letter Number: A.06/DK.BKI/II/2020 dated February 14, 2020 regarding approval of the extension of the audit service contract on the 2019 financial statements.
51. Responding to the Board of Directors Letter Number: A.07/DK.BKI /III/2020 dated March 31, 2020 regarding Evaluation of Audit Implementation by KAP RSM Indonesia in 2019.

52. Memberikan tanggapan kepada Direksi yaitu surat Nomor : A.08/DK.BKI/IV/2020 tanggal 6 April 2020 perihal Laporan Bulanan dan Pelaksanaan Rapat Rutin Bulanan selama Pandemi Covid-19.
53. Memberikan tanggapan kepada Direksi surat Nomor: A.09/DK.BKI/IV/2020 tanggal 07 April 2020 perihal Hasil Pembahasan Bersama Wamen BUMN I.
54. Memberikan tanggapan kepada Direksi surat Nomor: A.10/DK.BKI/IV/2020 tanggal 08 April 2020 perihal Hasil Pembahasan Bersama atas Kinerja PT BKI (Persero) s/d bulan Februari 56. Mengirimkan surat kepada Direksi Nomor : A.11/DK.BKI/IV/2020 tanggal 22 April 2020 Perihal Kegiatan Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2020.
55. Memberikan tanggapan kepada Direksi surat Nomor: A.12/DK.BKI/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 perihal Hasil Pembahasan Bersama atas Kinerja PT BKI (Persero) s/d bulan Maret 2020.
56. Memberikan tanggapan kepada Direksi surat Nomor: A.13/DK.BKI/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Penggunaan Spesimen Tanda Tangan Dewan Komisaris.
57. Memberikan tanggapan kepada Direksi surat Nomor: A.14/DK.BKI/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 perihal Hasil Pembahasan Bersama atas Kinerja PT BKI (Persero) s/d bulan April 2020 dan Arahan Wamen BUMN I.
58. Memberikan tanggapan kepada Direksi surat Nomor: A.16/DK.BKI/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 kepada Direksi PT BKI (Persero) perihal Hasil Pembahasan Bersama atas Kinerja PT BKI (Persero) s/d Bulan Mei 2020.
59. Memberikan tanggapan kepada Direksi surat Nomor: A.17/DK.BKI/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Rekomendasi Dewan Komisaris tentang Tinjauan Manajemen ISO 37001-2016 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
60. Mengirimkan surat kepada Direksi Nomor : A.20/DK.BKI/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 Perihal Kegiatan Dewan Komisaris Semester I Tahun 2020.
61. Memberikan tanggapan kepada Direksi surat Nomor: A.21/DK.BKI/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 perihal Hasil Pembahasan Bersama atas Kinerja PT BKI (Persero) s/d bulan Juni 2020.
62. Mengirimkan surat kepada Direksi Nomor : A.23/DK.BKI/VIII/2020 dan Nomor: A.24/DK.BKI/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dalam rangka melakukan *sampling*
52. Provided a response to the Board of Directors, namely letter Number: A.08/DK.BKI/IV/2020 dated April 6, 2020 regarding Monthly Reports and Implementation of Monthly Routine Meetings during the Covid-19 Pandemic.
53. Provided a response to the Board of Directors letter Number: A.09/DK.BKI/IV/2020 dated April 7, 2020 regarding the results of the Joint Discussion with the Deputy Minister of SOE I.
54. Responding to the Board of Directors letter Number: A.10/DK.BKI/IV/2020 dated April 08, 2020 regarding the results of the Joint Discussion on the Performance of PT BKI (Persero) until February 56. Sending a letter to the Board of Directors Number: A. 11/DK.BKI/IV/2020 dated April 22, 2020 Regarding the Activities of the Board of Commissioners for the First Quarter of 2020.
55. Provided a response to the Board of Directors letter Number: A.12/DK.BKI/V/2020 dated May 06, 2020 regarding the results of the Joint Discussion on the Performance of PT BKI (Persero) until March 2020.
56. Responding to the Board of Directors letter Number: A.13/DK.BKI/V/2020 dated May 20, 2020 regarding the use of the Board of Commissioners' signature specimen.
57. Provided a response to the Board of Directors letter Number: A.14/DK.BKI/VI/2020 dated June 08, 2020 regarding the results of the Joint Discussion on the Performance of PT BKI (Persero) up to April 2020 and the direction of the Deputy Minister of SOE I.
58. Responding to the Board of Directors letter Number: A.16/DK.BKI/VII/2020 dated July 6, 2020 to the Directors of PT BKI (Persero) regarding the Results of the Joint Discussion on the Performance of PT BKI (Persero) up to May 2020.
59. Responding to the Board of Directors letter Number: A.17/DK.BKI/VII/2020 dated July 6, 2020 regarding the Recommendation of the Board of Commissioners regarding the ISO 37001-2016 Management Review of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
60. Sending a letter to the Board of Directors Number: A.20/DK.BKI/VII/2020 dated July 22, 2020 Regarding the Activities of the Board of Commissioners in Semester I of 2020.
61. Provided a response to the Board of Directors letter Number: A.21/DK.BKI/VIII/2020 dated August 7, 2020 regarding the results of the Joint Discussion on the Performance of PT BKI (Persero) until June 2020.
62. Sending a letter to the Board of Directors Number: A.23/DK.BKI/VIII/2020 and Number: A.24/DK.BKI/VIII/2020 dated August 28, 2020 in order to conduct sampling

- penghapusbukuan aset PT BKI (Persero) ke Kantor Cabang Batam dan Cabang Pekanbaru.
63. Memberikan tanggapan kepada Direksi surat Nomor: A.26/DK.BKI/IX/2020 tanggal 8 September 2020 perihal Hasil Pembahasan Bersama atas Kinerja PT BKI (Persero) s/d bulan Juli 2020.
64. Memberikan tanggapan kepada Direksi surat Nomor: A.27/DK.BKI/IX/2020 tanggal 9 September 2020 perihal Hasil Pelaksanaan Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 pada BUMN Jasa Survei 2020.
65. Mengirimkan surat kepada Direksi Nomor : A.28/DK.BKI/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Hasil Pembahasan Bersama atas Kinerja PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) s/d Bulan Agustus 2020.
66. Mengirimkan surat kepada Direksi Nomor : A.32/DK.BKI/IV/2020 tanggal 22 April 2020 Perihal Kegiatan Dewan Komisaris Triwulan III Tahun 2020.
67. Mengirimkan surat kepada Direksi Nomor : A.34/DK.BKI/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kantor BKI Klas Banten.
68. Mengirimkan surat kepada Direksi Nomor : A.35/DK.BKI/XI/2020 tanggal 2 November 2020 perihal Hasil Pembahasan Bersama atas Kinerja PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) s/d Bulan September 2020.
69. Mengirimkan surat kepada Direksi Nomor : A.37/DK.BKI/XI/2020 tanggal 9 November 2020 Perihal Persetujuan Penghapusbukuan Aset PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
70. Mengirimkan surat kepada Direksi Nomor : A.38/DK.BKI/XI/2020 tanggal 17 November 2020 Perihal Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
71. Mengirim surat kepada Direksi Nomor : A.42/DK.BKI/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Tindak Lanjut Hasil Pembahasan Bersama atas Kinerja s/d Bulan Oktober 2020 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
72. Selain itu Dewan Komisaris juga memberikan masukan, arahan dan penekanan pada beberapa aspek lain yang perlu mendapat perhatian Direksi terkait :
- Peningkatan pengendalian internal Perusahaan terutama pada pengendalian terhadap mekanisme write-off of PT BKI (Persero) assets to the Batam Branch Office and Pekanbaru Branch.
63. Provided a response to the Board of Directors letter Number: A.26/DK.BKI/IX/2020 dated September 8, 2020 regarding the results of the Joint Discussion on the Performance of PT BKI (Persero) until July 2020.
64. Provided a response to the Board of Directors letter Number: A.27/DK.BKI/IX/2020 dated September 9, 2020 regarding the Results of the Implementation of Procurement of Audit Services for Financial Statements for the Financial Year 2020 at State-Owned Enterprises for Survey Services 2020.
65. Sending a letter to the Board of Directors Number: A.28/DK.BKI/X/2020 dated October 9, 2020 regarding the results of the Joint Discussion on the Performance of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) until August 2020.
66. Sending a letter to the Board of Directors Number: A.32/DK.BKI/IV/2020 dated April 22, 2020 regarding the activities of the Board of Commissioners in the third quarter of 2020.
67. Sending a letter to the Board of Directors Number: A.34/DK.BKI/X/2020 dated October 26, 2020 regarding Land Procurement for the Expansion of the Banten Class BKI Office.
68. Sending a letter to the Board of Directors Number: A.35/DK.BKI/XI/2020 dated November 2, 2020 regarding the results of the Joint Discussion on the Performance of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) up to September 2020.
69. Sending a letter to the Board of Directors Number: A.37/DK.BKI/XI/2020 dated November 9, 2020 regarding the Approval for the Write-off of Assets of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
70. Sending a letter to the Board of Directors Number: A.38/DK.BKI/XI/2020 dated November 17, 2020 regarding the Establishment of the Public Accounting Firm (KAP) of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
71. Sending a letter to the Board of Directors Number: A.42/DK.BKI/XII/2020 dated December 11, 2020 regarding the Follow-up to the Results of the Joint Discussion on the Performance up to October 2020 of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
72. In addition, the Board of Commissioners also provides input, direction and emphasis on several other aspects that need the attention of the relevant Directors:
- Improvement of the Company's internal control, especially in controlling the mechanism of the

- sistem prosedur yang diterapkan dalam cabang regional yang telah mulai diterapkan dalam tahun sebelumnya.
- b. Percepatan proses pelaksanaan investasi agar anggaran yang sudah disediakan dalam RKAP dapat terlaksana sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
 - c. Penyempurnaan yang berkelanjutan terhadap aplikasi SAP beserta tata cara penggunaannya sehingga dapat bermanfaat bagi kegiatan operasional dan pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan perusahaan, baik di kantor pusat maupun di unit-unit usaha PT BKI (Persero).
 - d. Penguatan pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian usaha yang didukung oleh direksi, manajemen dan karyawan, guna mengantisipasi risiko-risiko yang akan dihadapi PT BKI di masa mendatang.
 - e. Kesiapan PT BKI (Persero) dalam rangka pelaksanaan *holding* jasa survei yang perlu semakin ditingkatkan.

system procedures implemented in regional branches which have been implemented in the previous year.

- b. Accelerate the investment implementation process so that the budget that has been provided in the RKAP can be implemented in accordance with good corporate governance.
- c. Continuous improvement of the SAP application and the procedures for its use so that it can be useful for operational activities and recording transactions and financial reporting of the company, both at the head office and in the business units of PT BKI (Persero).
- d. Strengthening the implementation of risk management and business control supported by the board of directors, management and employees, in order to anticipate the risks that will be faced by PT BKI in the future.
- e. Readiness of PT BKI (Persero) in the context of implementing holding survey services that need to be further improved.

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Direksi adalah salah satu organ Perseroan dalam struktur tata kelola PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Persero. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial mengelola Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Tiap anggota Direksi dapat mengambil keputusan sesuai pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas oleh anggota Direksi tetap menjadi tanggung jawab bersama. Kedudukan anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

Independensi Direksi

Setiap anggota Direksi wajib berpegang teguh pada prinsip independensi dalam mengambil keputusan dan memimpin jalannya Perseroan dengan mengutamakan kepentingan BKI. Untuk menjamin independensi Direksi, Perseroan memiliki Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan dan memberikan nasihat/rekomendasi kepada Direksi.

Dasar Pengangkatan Direksi

Pengangkatan Anggota Direksi didasarkan pada

- Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN;
- Anggaran Dasar Perusahaan.

Komposisi, jumlah dan pengangkatan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi dan rencana strategis Perseroan, serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Anggaran Dasar Perusahaan. Struktur dan jumlah keanggotaan Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri lebih dari satu orang anggota Direksi, seorang di antaranya menjadi Direktur Utama.

The Board of Directors is the Company's organ in the governance structure of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), which has the collegial duty and responsibility of managing the Company and representing the Company both inside and outside the court. Each member of the Board of Directors can make decisions according to the division of duties and authority, but the implementation of duties by each member of the Board of Directors remains a shared responsibility. The position of each member of the Board of Directors including the President Director is equal. The duty of the President Director is to coordinate the activities of the Directors.

Independence of the Board of Directors

Each member of the Board of Directors must uphold the principle of independence in making decisions and leading the course of the Company by prioritizing the interests of BKI. To ensure the independence of the Board of Directors the Company has a Board of Commissioners that supervises and provides advice/recommendations to the Directors.

Legal Basis for the Appointment of the Board of Directors

The appointment of members of the Board of Directors is based on

- Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
- Regulation of the Minister of SOEs No. PER-03/MBU/2012 concerning Guidelines for Appointing Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of SOEs Subsidiaries;
- Company's articles of association.

The composition, number and appointment of members of the Board of Directors are determined by the GMS by taking into account the Company's vision, mission and strategic plans, as well as meeting the requirements set out in the Company's Articles of Association. The structure and number of members of the Board of Directors is adjusted to the needs of the Company. In the event that the Board of Directors consists of more than one member of the Board of Directors, one of whom is the President Director.



Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 100 UUPT, yaitu:

1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi.
2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan
3. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 102 UUPT tugas Direksi yang harus mendapat persetujuan dari RUPS dalam pengurusan kekayaan Perseroan adalah:

1. Mengalihkan kekayaan Perseroan.
2. Menjadikan kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang.

Direksi wajib melaporkan saham yang dimilikinya dan/ atau keluarganya di Perusahaan dan perusahaan lain untuk dicatat dalam daftar khusus.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan mengacu peraturan eksternal baik dari Pemegang Saham maupun *regulator*, serta ketentuan internal mencakup Anggaran Dasar dan *Board Manual*.

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas Perusahaan, bertindak secara cermat, berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan. Direksi menggunakan wewenang dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan semata-mata hanya untuk kepentingan Perusahaan.

Tugas Utama Direksi

- Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan.
- Menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang sehat dalam perusahaan.
- Bertugas sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS serta peraturan lainnya.
- Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS.

Duties, Authorities and Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directors is obliged to carry out several duties during their tenure in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) Article 100 of the Company Law, namely:

1. Prepare a list of shareholders, special lists, minutes of the GMS and minutes of the board of directors' meetings.
2. Prepare annual reports and financial documents of the Company
3. Maintain all registers, minutes and financial documents of the Company.

In accordance with Article 102 of the Limited Liability Company Law, the duties of the Board of Directors that must be approved by the GMS in managing the Company's assets are:

1. Transferring the assets of the Company.
2. Making the Company's assets as collateral for debt.

The Board of Directors is required to report the shares owned and/or their families in the Company and other companies to be recorded in a special register.

The duties, responsibilities and authorities of the Board of Directors in managing the Company refer to external regulations from both Shareholders and regulators, as well as internal regulations including the Articles of Association and Board Manual.

In carrying out its duties, the Board of Directors pays attention to the balance of interests of all parties related to the Company's activities, acts carefully, carefully and considers various important relevant aspects. The Board of Directors uses the authority and resources of the Company solely for the benefit of the Company.

The Main Duties of the Directors

- Lead and manage the Company in accordance with the aims and objectives of the Company.
- Increase the efficiency and effectiveness of the Company.
- Implement healthy corporate governance (GCG) practices within the company.
- Servin in accordance with the Company's Articles of Association, RUPS decisions and other regulations.
- The Board of Directors is responsible to the Shareholders through the GMS.



Wewenang Direksi

1. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
2. Mempergunakan saran profesional.
3. Menetapkan kebijakan dan ketentuan dalam kepemimpinan dan kepengurusan Perusahaan.
4. Melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Direksi

1. Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan perusahaan.
2. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
3. Menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang merupakan penjabaran tahunan dari RJPP dan selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
4. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan.
5. Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup, menyampaikan laporan tahunan yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
6. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, dan pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
7. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan jalannya perusahaan berupa laporan kegiatan perusahaan termasuk laporan keuangan baik dalam bentuk laporan berkala menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini serta setiap kali diminta oleh RUPS.
8. Menyiapkan susunan organisasi perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
9. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau diminta anggota Dewan Komisaris.
10. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

Authority of the Board of Directors

1. Representing the Company inside and outside the court.
2. Get professional advice.
3. Establish policies and provisions in the leadership and management of the Company.
4. Performing all actions and actions both regarding the management and ownership, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

Obligations of the Board of Directors

1. Devoting full energy, thought, attention and dedication to the duties, obligations and achievement of the Company's goals.
2. Prepare the Company's Long-Term Plan (RJPP) which is a strategic plan that contains the company's goals and objectives to be achieved within a period of 5 (five) years, which has been jointly signed with the Board of Commissioners to be submitted to the GMS for approval.
3. Prepare a draft Work Plan and Corporate Budget (RKAP) which is an annual elaboration of the RJPP and subsequently submitted to the GMS for approval.
4. Organize and maintain bookkeeping and company administration in accordance with the norms that apply to a company.
5. Within 5 (five) months after the closing of fiscal year, submit an annual report signed by the Board of Directors and the Board of Commissioners to the GMS for approval.
6. Arrange the accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, and recording, storage and supervision.
7. Provide accountability and all information regarding the running of the company in the form of company activity reports including financial reports in the form of periodic reports according to the manner and time specified in this Articles of Association and whenever requested by the GMS.
8. Prepare the Company's organizational structure complete with details and tasks.
9. Provide an explanation of all matters stated or requested by members of the Board of Commissioners.
10. Performing other obligations in accordance with the provisions stipulated in this Articles of Association



Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

and those determined by the GMS based on the applicable laws and regulations.

Struktur Direksi

Pada tahun 2020 tidak terjadi perubahan struktur dan komposisi Direktur PT BKI. Komposisi Direksi terdiri dari empat orang. Seorang di antaranya menjabat sebagai direktur utama. Sampai dengan 31 Desember 2020 struktur Direksi PT Biro Klasifikasi Indonesia adalah:

Structure of the Board of Directors

In 2020 there was no change in the structure and composition of the Board of Directors of PT BKI. The composition of the Board of Directors consists of four persons. One of them serves as the President Director. As of December 31, 2020, the structure of the Board of Directors of PT Biro Klasifikasi Indonesia is:

Nama/Name	Jabatan/Position	Dasar Pengangkatan/ Legal Basis of Appointment
Rudiyanto	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri BUMN No. SK-304/MBU/12/2018 tanggal 19 Desember 2018 Decree of the Minister of SOE No. SK-304/MBU/12/2018 dated December 19, 2018
Mohamad Cholil	Direktur Operasi Director of Operation	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN No: SK-255/MBU/11/2017 tanggal 24 November 2017 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) No: SK-255/MBU/11/2017 dated November 24, 2017
Saifuddin Wijaya	Direktur Pengembangan Sumber Daya Director of Human Resources Development	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN No: SK-255/MBU/11/2017 tanggal 24 November 2017 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) No: SK-255/MBU/11/2017 dated November 24, 2017
Bandung Pardede	Direktur Keuangan & Administrasi Director of Finance & Administration	Keputusan Menteri BUMN No. SK-304/MBU/12/2018 tanggal 19 Desember 2018 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-304/MBU/12/2018 dated December 19, 2018

Pembagian tugas Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi bertugas sesuai dengan latar belakang profesi, pengetahuan, pengalaman dan kapasitas anggota Direksi. Pembagian tugas Direksi sebagai berikut:

Division of duties of the Board of Directors

Members of the Board of Directors carry their duties and responsibilities according to their professional background, knowledge, experience and capacity of the members of the Board of Directors. The division of tasks for the Board of Directors is as follows:

Nama/Name	Uraian Tugas/Job Description
Rudiyanto Direktur Utama/ President Director	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan perusahaan; 2. Memberikan arahan dan mengendalikan kebijakan, visi, misi, dan strategi perusahaan; 3. Memimpin dan mengkoordinasi anggota Direksi dalam melaksanakan keputusan Direksi dan mengesahkan semua Keputusan Direksi; 4. Mengkoordinasikan pemecahan masalah eksternal perusahaan, kebijakan perencanaan, pengendalian, pencapaian sasaran jangka panjang perusahaan, kebijakan audit, peningkatan kultur, citra, dan tata kelola perseroan (GCG); 5. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal perusahaan; 6. Mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan persetujuan anggota Direksi lainnya pada Rapat Direksi; 7. Menentukan Keputusan Direksi, apabila di dalam <i>voting</i> pada Rapat Direksi terdapat jumlah suara yang sama banyak antara suara yang setuju dengan tidak setuju; 8. Memimpin menyiapkan mengarahkan menempatkan dan melakukan pembinaan di bidang aspek legal/hukum dan kehumasan sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan; 9. Memilah dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan/stakeholders atas segala sesuatu tentang perusahaan; 10. Memberikan arahan atas pengelolaan Dana Pensiun Pegawai perusahaan untuk Program Manfaat Pasti atau Iuran Pasti. <ul style="list-style-type: none"> 1. In charge of the overall management of the company; 2. Directing and controlling the Company's policies, vision, mission, and strategy; 3. To lead and coordinate members of the Board of Directors in implementing the decisions of the Board of Directors and to ratify all decisions of the Board of Directors; 4. Coordinate the solution of the Company's external problems, planning policies, controlling, achieving the Company's long-term goals, audit policies, improving the culture, image, and corporate governance (GCG); 5. Lead and direct the implementation of the Company's internal supervision and control; 6. Represent the Company inside and outside the court based on the approval of other members of the Board of Directors at the Board of Directors Meeting; 7. Determine the Decision of the Board of Directors, if in the voting at the Meeting of the Board of Directors there is an equal number of votes between the votes that agree with the votes that do not agree 8. Leading in preparing, directing, placing and conducting guidance in the fields of legal/legal aspects and public relations according to established policies; 9. Sorting and providing information to stakeholders on everything about the Company; 10. Provide direction on the management of the company's Employee Pension Fund for the Defined Benefit Program or Defined Contribution.
Mohamad Cholil Direktur Operasi/ Operations Director	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas pengelolaan aspek teknis dan operasional segmen usaha klasifikasi dan komersil; 2. Merancang strategi teknis dan operasional usaha perusahaan berdasarkan prioritas, ketersediaan sumber daya, teknologi, dan prospek bisnis; 3. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan teknis dan operasional sesuai rencana strategi perusahaan; 4. Memimpin dan mengelola serta mengendalikan aspek teknis dan kegiatan produksi/operasi jasa klasifikasi dan komersil secara efektif dan efisiensi dengan mengacu kepada perencanaan dan strategi perusahaan; 5. Mengelola dan mengawasi perencanaan, pengendalian serta evaluasi atas penerapan aspek teknis dan operasional pengelolaan perusahaan; 6. Membina dan mengawasi kegiatan unit kerja dan unit produksi khususnya untuk kegiatan teknik dan operasional serta menjamin terpeliharanya peralatan produksi dan fasilitas pendukungnya; 7. Melaksanakan koordinasi dengan para pengguna jasa untuk kelancaran operasional perusahaan; 8. Memimpin dan mengarahkan seluruh aktifitas dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja; <ul style="list-style-type: none"> 1. In charge of the management of technical and operational aspects of the classification and commercial business segment; 2. Designing the Company's technical strategy and business operations based on priorities, availability of resources, technology, and business prospects; 3. Lead and direct the implementation of technical and operational activities in accordance with the Company's strategic plan; 4. To lead and manage and control technical aspects and production activities/operations of classification and commercial services effectively and efficiently with reference to the Company's planning and strategy;

Nama/Name	Uraian Tugas/Job Description
	<ul style="list-style-type: none"> 5. Manage and supervise the planning, control and evaluation of the implementation of the technical and operational aspects of the Company's management; 6. Fostering and supervising the activities of work units and production units in particular for technical and operational activities as well as ensuring the maintenance of production equipment and its supporting facilities; 7. Coordinate with service users for the smooth operation of the Company; 8. Lead and direct all activities with due regard to occupational safety and health aspects;
Saifuddin Wijaya Direktur Pengembangan Sumber Daya/ Director of Resource Development	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan SDM; 2. Menyiapkan dan melakukan pembinaan serta menyelenggarakan program pemasaran, merancang dan melaksanakan serta mengendalikan kegiatan pengembangan kegiatan segmen usaha klasifikasi dan komersil. 3. Memimpin, mengarahkan dan mengelola aktifitas perencanaan serta kegiatan penelitian & pengembangan khususnya kegiatan pengkajian, penerapan, dan pengembangan peraturan teknik yang terkait dengan segmen klasifikasi dan komersil; 4. Memimpin dan mengelola kegiatan penelitian pasar serta menyiapkan konsep strategi usaha; 5. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi/keahlian SDM khususnya yang terkait dengan pengembangan segmen jasa klasifikasi dan komersil serta pengembangan usaha sesuai peraturan yang berlaku; 6. Melakukan upaya penciptaan pasar baru, unit-unit usaha baru, melakukan penetrasi pasar dan meningkatkan penguasaan pangsa pasar yang telah dikuasai perusahaan; 7. Mengkoordinasikan pembinaan karyawan serta peningkatan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia perusahaan khususnya di bidang teknologi; 8. Memimpin dan mengarahkan pengelolaan serta pengembangan aplikasi teknologi informasi yang disesuaikan dengan perkembangan usaha; 9. Memimpin dan mengarahkan transformasi organisasi perusahaan; 10. Memimpin, menyiapkan, mengarahkan, menempatkan dan melakukan pembinaan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia, Administrasi SDM, dan Organisasi sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan; 11. Mengelola dan mengoptimalkan upaya-upaya pemasaran dan penjualan produk jasa yang dihasilkan perusahaan sesuai dengan perencanaan dan strategi perusahaan; 12. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan kesehatan karyawan dan purna bhakti. 13. Memimpin dan mengendalikan kegiatan usaha baik yang dikelola secara langsung oleh perusahaan maupun melalui kerja sama, sekaligus melakukan kegiatan sinergi usaha/kemitraan dengan badan klas asing maupun perusahaan/instansi lain yang terkait, sesuai dengan strategi perusahaan. <p>Director of Resource Development</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. In charge of HR management and development; 2. Prepare and conduct guidance and conduct marketing programs, design and implement and control activities for the development of activities for the classification and commercial business segments. 3. Leading, directing and managing planning activities as well as research & development activities, especially the assessment, application, and development of technical regulations related to the classification and commercial segment; 4. Lead and manage market research activities and prepare business strategy concepts; 5. To develop and improve the competence/expertise of human resources, especially those related to the development of the classification and commercial service segment as well as business development in accordance with applicable regulations; 6. Make efforts to create new markets, new business units, penetrate the market and increase market share that has been controlled by the company; 7. Coordinate the development of employees and increase the ability and competence of the company's human resources, especially in the field of technology; 8. To lead and direct the management and development of information technology applications adapted to business developments; 9. Lead and direct the transformation of the company's organization; 10. Leading, preparing, directing, placing and conducting guidance in the field of Human Resources development, Human Resources Administration, and Organization in accordance with established policies; 11. Manage and optimize the marketing and sales efforts of the company's products and services in accordance with the company's planning and strategy; 12. Provide guidance on the management of employee health and retirement. 13. Leading and controlling business activities both managed directly by the company as well as through cooperation, as well as carrying out business synergy activities/partnerships with foreign class entities and other related companies/agencies, in accordance with the company's strategy.

Nama/Name	Uraian Tugas/Job Description
Bandung Pardede Direktur Keuangan & Administrasi/ Director of Finance & Administration	<p>1. Penanggungjawab atas pengelolaan aspek keuangan dan umum perusahaan;</p> <p>2. Memimpin dan mengendalikan pembuatan kebijakan pengelolaan dan pelaporan keuangan, mencakup kegiatan fungsi akuntansi, administrasi keuangan, dan pendanaan, serta program kermitraan dan bina lingkungan guna peningkatan kinerja perusahaan;</p> <p>3. Melaksanakan dan pengendalian seluruh kebijakan keuangan sesuai keputusan Direksi serta melaksanakan efisiensi dan efektifitas fungsi-fungsi keuangan perusahaan;</p> <p>4. Mengkoordinasikan penyusunan RKAP serta pengendalian akuntansi atas biaya-biaya, pendapatan, dan Keuntungan/laba serta tingkat investasi perusahaan;</p> <p>5. Mengonsolidasikan, mengendalikan, dan mengawasi penyusunan dan pelaksanaan arus kas perusahaan berdasarkan RKAP dalam rangka peningkatan efisiensi;</p> <p>6. Mengarahkan dan membina pengelola keuangan perusahaan meliputi kebijakan anggaran, administrasi, keuangan, akuntansi, investasi dan pendanaan;</p> <p>7. Memimpin, menyiapkan, mengarahkan, menempatkan dan melakukan pembinaan di bidang kesejahteraan, kerumah tanggaan dan perlengkapan kantor sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan;</p> <p>8. Mengendalikan sarana dan prasarana perusahaan secara efisien dan efektif;</p> <p>9. Mengendalikan kegiatan pengelolaan aset perusahaan;</p> <p>10. Memimpin dan mengarahkan aktifitas keamanan dan pengamanan lingkungan perusahaan;</p> <p>11. Menetapkan, mengendalikan dan melaporkan hasil pembinaan kegiatan kerja manajemen risiko serta menyiapkan rencana penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;</p> <p>1. In charge of managing the financial and general aspects of the company;</p> <p>2. To lead and control the making of policies on financial management and reporting, including the activities of the accounting, financial administration, and funding functions, as well as partnership and community development programs to improve company performance;</p> <p>3. Implement and control all financial policies in accordance with the decisions of the Board of Directors and implement the efficiency and effectiveness of the company's financial functions;</p> <p>4. Coordinate the preparation of the RKAP and accounting control over costs, revenues, and Profit/profit and level of company investment;</p> <p>5. Consolidating, controlling, and supervising the preparation and implementation of the company's cash flows based on the RKAP in order to increase efficiency;</p> <p>6. Directing and fostering the company's financial management including budget, administration, finance, accounting, investment and funding policies;</p> <p>7. Leading, preparing, directing, placing and conducting guidance in the field of welfare, household and office equipment in accordance with established policies;</p> <p>8. Controlling the company's facilities and infrastructure efficiently and effectively;</p> <p>9. Controlling the company's asset management activities;</p> <p>10. Leading and directing the security and security activities of the company's environment;</p> <p>11. To determine, control and report the results of the development of risk management work activities and prepare a plan for the implementation of the quality management system in accordance with the established policies;</p>

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi Tahun 2020

2020 Board of Directors Education and/or Training

Nama/Name	Nama pelatihan/pendidikan Name of training/education	Tanggal/Date
Rudiyanto	Sertifikasi internasional peneliti kuantitatif International certification of quantitative researchers	14 September 2020 September 14, 2020
Bandung Pardede	<i>The Awareness Training of ISO 37001:2016</i>	12 Maret 2020 March 12, 2020

Rapat Direksi

Rapat direksi sekurang-kurangnya dilakukan satu (1) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis Perseroan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Perseroan. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Sekretaris Perusahaan. Dalam panggilan rapat dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani pimpinan rapat dan anggota Direksi yang hadir. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat.

Board of Directors Meeting

Meetings of the board of directors are held at least once a month and at any time if deemed necessary to discuss various important issues and business developments of the Company as well as to evaluate the performance of the Company. The summons for the Board of Directors meeting is made in writing by the Corporate Secretary. The summons must state the event, date, time and place. All Board of Directors meetings are chaired by the President Director. In the event that the President Director is absent or unavailable, the meeting of the Board of Directors shall be chaired by another member of the Board of Directors appointed by the President Director. All decisions in the Board of Directors meeting are taken by deliberation for consensus. At each meeting of the Board of Directors, minutes of the meeting are made. The minutes of the meeting are signed by the chairman of the meeting and members of the Board of Directors present. Each member of the Board of Directors is entitled to receive a copy of the minutes of the Board of Directors meeting, even if he is not present at the meeting.

Tabel Kehadiran Rapat Direksi

Board of Directors Meeting Attendance Table

Nama	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Rudiyanto Direktur Utama/ President Director	Hadir/ Present											
Mohamad Cholil Direktur Operasi/ Operations Director	Hadir/ Present											
Saifuddin Wijaya Direktur Pengembangan Sumber Daya/ Director of Resource Development	Hadir/ Present											
Bandung Pardede Direktur Keuangan & Administrasi/ Director of Finance & Administration	Hadir/ Present											

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi ditetapkan dalam RUPS berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi. Penilaian kinerja Direksi juga dapat dilakukan secara individu yang diajukan oleh Komite Remunerasi Komisaris atau oleh Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS, setidak-tidaknya meliputi:

1. Penyusunan KPI pada awal tahun dan evaluasi pencapaianya.
2. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Direksi maupun rapat dengan Dewan Komisaris.
3. Kontribusinya dalam aktivitas bisnis Perusahaan.
4. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu.
5. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan.
6. Pencapaian target perusahaan yang tertuang dalam RKAP dan Kontrak Manajemen.

Appraisal of the Board of Directors Performance

The appraisal of the Board of Directors performance is determined in the GMS based on the Board of Directors Key Performance Indicators (KPI). The performance evaluation of the Board of Directors can also be carried out individually submitted by the Board of Commissioners' Remuneration Committee or by the Board of Commissioners to be determined at the GMS, at least covering:

1. Preparation of KPIs at the beginning of the year and evaluation of their achievements.
2. Level of attendance at Board of Directors' Meetings and meetings with the Board of Commissioners.
3. Contribution to the Company's business activities.
4. Involvement in certain assignments.
5. Commitment in advancing the interests of the Company.
6. Achievement of the Company's targets as stated in the RKAP and Management Contract.

Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Tahun 2020

Key Performance Indicator (KPI) Achievement in 2020

No.	KPI	Satuan/Unit	Target	Polaritas/ Polarity	Realisasi/ Realization	Bobot/Weight (%)	
						Sub	Skor/ Score
	A. Economic and Social Value for Indonesia					31,80	
1.	EBITDA	Rp miliar Rp billion	118,52	Maximize	160,50	5	5,50
2.	Debt to EBITDA	X (kali) X (times)	0	Minimize	0	4	4,00
3.	Net Income	Rp miliar Rp billion	56,86	Maximize	100,50	5	5,50
4.	Penyelesaian Past Service Liabilities (PSL) Settlement of Past Service Liability (PSL)	Waktu/Time	Des 20	Minimize	Des 20	4	4,00
5.	Penurunan Piutang > 1 tahun Decrease in Accounts Receivable > 1 year	Rp miliar Rp billion	40,56	Maximize	268,81	4	4,40
6.	Mempertahankan penugasan statutory dari Kementerian Perhubungan Maintaining statutory assignments from the Ministry of Transportation	Waktu/Time	Des 2020	Minimize	Des 20	4	4,00
7.	Laba dari penugasan terhadap EBITDA Profit from assignment on EBITDA	%	50	Minimize	20,45	4	4,40

No.	KPI	Satuan/Unit	Target	Polaritas/ Polarity	Realisasi/ Realization	Bobot/Weight (%)	
						Sub	Skor/ Score
	B. Business Model Innovation						30,00
1.	Penyelesaian Holding Jasa Survei: Pelaksanaan RUPS LB, Penandatanganan akta inbreng dan persetujuan Menkumham atas peningkatan modal BKI Completion of Holding Survey Services: Implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, Signing of the inbreng deed and approval of the Minister of Law and Human Rights on the increase in BKI capital	Waktu/Time	Des 20	Minimize	Des 20	15	15,00
2.	Persetujuan Kementerian BUMN atas rencana integrasi produk dan layanan, <i>network</i> , cabang, laboratorium Approval of the Ministry of SOEs on the plan to integrate products and services, networks, branches, laboratories	Waktu/Time	Okt 20	Minimize	Okt 20	5	5,00
3.	Penyelesaian kajian <i>Refocusing Bisnis</i> untuk masing-masing entitas sesuai kajian <i>master plan</i> Jasa Survei Completion of Business Refocusing for each entity according to the Survey Services master plan study	Waktu/Time	Juni 20	Minimize	Juni 20	5	5,00
4.	Penerapan VR/AR untuk <i>tools marketing</i> Application of VR/AR for marketing tools	Waktu/Time	Nov 20	Minimize	Nov 20	5	5,00
	C . Technology Leadership						10,00
1.	Pengembangan <i>rule Naval Ship, Autonomous ship</i> Naval Ship rule development, Autonomous ship	Jumlah / Amount	2	Maximize	2	5	5
2.	Digitalisasi Produk / Layanan / Proses Product / Service / Process Digitization	Jumlah / Amount	5	Maximise	5	5	5
	D. Energize Investment						10,50
1.	Jumlah Peningkatan Kompetensi Amount of Competency Increase	Sertifikat/ Certificate	150	Maximize	411	5	5,50
2.	Sinergi BUMN Jasa Survei terkait optimalisasi kantor cabang Synergy of BUMN Survey Services related to branch office optimization	Jumlah / Amount	1	Maximize	1	5	5,00
	E. Unleashed Talent						19,99
1.	Pembentukan Indonesian TIC Institute Establishment of Indonesian TIC Institute	Waktu/Time	Sept 20	Minimize	Sep 20	10	10,00
2.	Persetujuan Kementerian BUMN untuk program pengembangan <i>talent</i> , termasuk di dalamnya program suksesi Direksi dan pengembangan <i>top talent</i> muda (< 40 tahun) Approval of the Ministry of SOEs for talent development programs, including the succession program for the Board of Directors and the development of young top talent (< 40 years)	Waktu/Time	Sept 20	Minimize	Okt 20	10	9,99
	TOTAL						102,29



Remunerasi Direksi

Remunerasi adalah imbalan yang diberikan kepada Direksi atas peran yang diberikan dalam pengurusan dan pengelolaan Perseroan. Sesuai dengan Keputusan RUPS tanggal 30 Juni 2020 dan sesuai surat Plt. Asisten Deputi Bidang Industri Semen, Survei, dan Industri Lainnya No. S-10/Wk1.MBU.F/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Tahun 2020, remunerasi Direksi ditetapkan sebagai berikut:

Remuneration of the Board of Directors

Remuneration is a reward given to the Board of Directors in return for the functions carried out in the management of the Company. In accordance with the GMS Resolution dated June 30, 2020 and according to the letter of the Acting Assistant Deputy for Cement Industry, Surveys, and Other Industries No. S-10/Wk1.MBU.F/08/2020 dated August 4, 2020 regarding the Determination of Income for the Directors and Board of Commissioners of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) in 2020, the remuneration for the Board of Directors is determined as follows:

Jabatan/Position	Nama/Name	Honorarium	Tunjangan Perumahan/ Housing Allowance
Direktur Utama/President Director	Rudiyanto	110.000	27.500
Direktur Operasi/Director of Operation	Mohamad Cholil	93.500	27.500
Direktur Pengembangan SDM/ Director of HR Development	Saifuddin Wijaya	99.000	27.500
Direktur Keuangan & Administrasi/Director of Finance & Administration	Bandung Pardede	93.500	27.500

Selain remunerasi dan Tunjangan Perumahan, Direksi juga mendapat:

1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
2. Asuransi Purna Jabatan.

Fasilitas yang diberikan kepada Direksi adalah:

1. Fasilitas Kendaraan;
2. Fasilitas Kesehatan;
3. Fasilitas Bantuan Hukum.

In addition to remuneration and housing benefits, the Board of Directors also gets:

1. Religious holiday allowance;
2. Full-Term Insurance.

The Board of Directors also gets facilities, i.e

1. Vehicle Facilities;
2. Medical Facilities;
3. Legal Aid Facilities.

Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2020

Kegiatan Direksi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) selama tahun 2020 secara garis besar sebagai berikut :

1. Menghadiri rapat pembahasan perubahan dan penambahan kegiatan usaha pada anggaran dasar BUMN di Kementerian BUMN.
2. Menghadiri konsinyering dalam rangka kebijakan perubahan pembebanan terhadap unit produksi di Bogor.
3. Melakukan pemasaran ke PT Dumas Tg. Perak Shipyard di Surabaya.
4. Melakukan rapat dengan Dewan Komisaris pembahasan evaluasi kinerja perusahaan s/d Desember 2019.

Implementation of the Duties of the Board of Directors in 2020

The activities of the Board of Directors of the PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) during 2020 are as follows:

1. Attend a meeting to discuss amendment and additions of business activities to the Articles of Association of SOEs at the Ministry of SOEs.
2. Attending a consignment in the context of the policy of changing the burden on production units in Bogor.
3. Doing marketing to PT Dumas Tg. Silver Shipyard in Surabaya.
4. Hold a meeting with the Board of Commissioners to discuss the evaluation of the company's performance until December 2019.



5. Melakukan pemasaran ke PT Pertamina Trans Kontinental - Tanjung Priok.
6. Mengikuti rapat pembahasan progres Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 dengan KAP RSM Indonesia.
7. Mengikuti RUPS atas RKAP tahun 2020 PT BKI (Persero) di Kementerian BUMN.
8. Mengikuti rapat Evaluasi Kinerja tahun 2019, kebijakan RKAP 2020 dan penandatanganan Kontrak Manajemen.
9. Menghadiri rapat pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasi BUMN jasa survei.
10. Menghadiri rapat koordinasi *Autonomous Boat* di ITS Surabaya.
11. Melakukan rapat dengan PT Trinet Prima Solusi.
12. Melakukan rapat dengan Puspektindo.
13. Melakukan penandatangan MoU dengan PT Dinamika Laju Utama.
14. Menghadiri peresmian KMP New Rose milik PT Alfa Teknik Dinamika di Makassar.
15. Menghadiri pengukuhan & pembekalan anggota pengurus Serikat Pekerja PT BKI.
16. Mengikuti rapat pembahasan penguatan PMMB BUMN Tahun 2020 di Kementerian BUMN.
17. Mengikuti rapat penyelarasan kajian Direksi *Holding* dengan RPJMN Pemerintah dengan Pokja *Holding*.
18. Melakukan rapat dengan Dewan Komisaris pembahasan struktur PT BKI (Persero) dan rencana *holding*.
19. Mengikuti rapat RAPIMNAS dengan PT Surveyor Indonesia.
20. Mengikuti forum grup diskusi atas tindak lanjut hasil Audit KAP tahun 2019.
21. Mengikuti rapat komisi DK3N.
22. Menghadiri rapat *Holding* dengan Pokja *Holding*.
23. Mengikuti rapat RAPIMNAS dengan PT Sucofindo.
24. Mengikuti rapat pembahasan rencana pelaksanaan investasi 2020.
25. Menghadiri *closing meeting GCG*.
26. Melakukan penandatanganan MoU dengan PT Rekayasa Teknologi Global.
27. Menghadiri pembukaan *In House Training DPA ISM Code* PT ASDP Indonesia Ferry.
28. Menghadiri acara Pemberitahuan Perubahan *Venue Pelaksanaan Seminar-High Level Forum & BUMN Performance Excellent Award 2020*.
5. Marketing to PT Pertamina Trans Kontinental - Tanjung Priok.
6. Participate in the meeting to discuss the progress of the 2019 Financial Statement Audit with KAP RSM Indonesia.
7. Following the GMS on the 2020 RKAP of PT BKI (Persero) at the Ministry of SOEs.
8. Participated in the 2019 Performance Evaluation meeting, the 2020 RKAP policy and the signing of the Management Contract.
9. Attending a meeting to discuss the Consolidated Financial Statements of SOE survey services.
10. Attending the Autonomous Boat coordination meeting at ITS Surabaya.
11. Hold a meeting with PT Trinet Prima Solusi.
12. Hold a meeting with Puspektindo.
13. Signing the MoU with PT Dinamika Laju Utama.
14. Attended the inauguration of the KMP New Rose owned by PT Alfa Teknik Dinamika in Makassar.
15. Attending the inauguration & briefing of members of the management of the PT BKI Workers Union.
16. Participate in the 2020 SOE PMMB strengthening discussion meeting at the Ministry of SOEs.
17. Participate in a meeting to harmonize the review of the Board of Directors of Holding with the Government's RPJMN with the Pokja Holding.
18. Hold a meeting with the Board of Commissioners to discuss the structure of PT BKI (Persero) and the holding plan.
19. Participate in the RAPIMNAS meeting with PT Surveyor Indonesia.
20. Participate in the discussion group forum on the follow-up to the 2019 KAP Audit results.
21. Following the DK3N commission meeting.
22. Attend a Holding meeting with the Holding Working Group.
23. Participated in the RAPIMNAS meeting with PT Sucofindo.
24. Participate in the 2020 investment implementation plan discussion meeting
25. Attending the GCG closing meeting.
26. Signing the MoU with PT Rekayasa Teknologi Global
27. Attended the opening of the PT ASDP Indonesia Ferry DPA ISM Code In House Training.
28. Attended the Notification of Venue Changes for the Implementation of the Seminar-High Level Forum & BUMN Performance Excellent Award 2020.

29. Melakukan kunjungan peninjauan kantor PT BKI Cabang Banten dalam rangka renovasi gedung kantor.
30. Menghadiri rapat pembahasan *drafting* Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT BKI (Persero) di Kementerian Keuangan.
31. Mengikuti rapat pembahasan Teknis Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 Audited PT BKI (Persero) di Kementerian BUMN.
32. Melakukan pertemuan dengan Menteri KKP di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
33. Mengikuti rapat Laporan Manajemen dengan WAMEN I di Kementerian BUMN.
34. Menghadiri acara Dialog Nasional "Regulasi Pelabuhan Perlukah Didata Ulang?" di Jakarta.
35. Menghadiri sosialisasi integrasi data perpajakan dan pembahasan nota kesepahaman bersama di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.
36. Presentasi kepada Wamen I KBUMN mengenai dampak Covid-19 pada *Cluster/BUMN* dan pengaruhnya terhadap perubahan RKAP 2020.
37. Mengikuti rapat *Cluster Jasa Survei* dengan Kementerian BUMN.
38. Presentasi *update* RKAP dan dampak Covid-19 bagi *Holding Jasa Survei*.
39. Melakukan rapat dengan Dewan Komisaris pembahasan Laporan Kinerja s/d Maret 2020.
40. Mengikuti rapat revisi RKAP 2020 dengan Kementerian BUMN.
41. Mengikuti Webinar dengan Kementerian BUMN tentang "Bagaimana Pemimpin Menghadapi Covid-19"
42. Mengikuti rapat tindak lanjut arahan Wakil Menteri I Kementerian BUMN atas Rancangan RKAP perubahan 2020 BUMN *Cluster Survey*.
43. Mengikuti rapat pembahasan Agenda RUPST TB 2019 BUMN Jasa Survei.
44. Melakukan rapat dengan DJKN mengenai permintaan masukan dan pembahasan terkait pembentukan *holding* BUMN *Cluster Jasa Survei*.
45. Mengikuti rapat dengan Kementerian BUMN pembahasan KPI Revisi RKAP 2020 Jasa Survei.
46. Mengikuti rapat dengan Kementerian BUMN pembahasan RKAP 2020 Jasa Survei KBUMN dan BCG.
47. Mengikuti rapat dengan Kementerian BUMN pembahasan Kesiapan *New Normal* BUMN.
48. Melakukan rapat kordinasi tentang Insiden Kebakaran Kapal MT Jag Leela.
29. Conducted a visit to the office of PT BKI Banten Branch for the renovation of the office building.
30. Attending a meeting to discuss the drafting of the Government Regulation Plan (RPP) regarding the Addition of State Equity Participation into the Shared Capital of PT BKI (Persero) at the Ministry of Finance.
31. Participate in the technical discussion meeting of the 2019 Audited Financial Statements of PT BKI (Persero) at the Ministry of SOEs.
32. Hold a meeting with the Minister of Marine Affairs and Fisheries at the Ministry of Marine Affairs and Fisheries.
33. Attending the Management Report meeting with WAMEN I at the Ministry of SOEs.
34. Attending the National Dialogue "Do You Need to Collect New Data for Port Regulations?" in Jakarta.
35. Attending socialization of tax data integration and discussion of joint memorandum of understanding at the Regional Office of the DGT for Large Taxpayers.
36. Presentation to Deputy Minister I KBUMN regarding the impact of Covid-19 on Clusters/BUMN and its effect on changes to the 2020 RKAP.
37. Participate in the Survey Services Cluster meeting with the Ministry of SOEs.
38. Presentation of RKAP updates and the impact of Covid-19 for Survey Services Holding.
39. Hold a meeting with the Board of Commissioners to discuss the Performance Report until March 2020.
40. Participate in the 2020 RKAP revision meeting with the Ministry of SOEs.
41. Participated in a Webinar with the Ministry of SOEs on "How Leaders Deal With Covid-19"
42. Following a follow-up meeting on the direction of Deputy Minister I of the Ministry of SOEs on the Draft RKAP for 2020 changes to the SOE Cluster Survey.
43. Following the discussion meeting on the 2019 TB AGMS Agenda for Survey Services SOEs.
44. Conducted a meeting with DJKN regarding requests for input and discussion related to the establishment of the BUMN Holding Cluster for Survey Services.
45. Following a meeting with the Ministry of SOEs to discuss KPI Revised RKAP 2020 Survey Services.
46. Following a meeting with the Ministry of SOEs discussing the 2020 RKAP for KBUMN and BCG Survey Services.
47. Participate in a meeting with the Ministry of SOEs to discuss the New Normal Readiness of SOEs.
48. Conducted a coordination meeting on the MT Jag Leela Ship Fire Incident.

49. Mengikuti rapat dengan Dewan Komisaris pembahasan Laporan Kinerja s/d April 2020.
50. Mengikuti Diskusi dengan Kementerian BUMN mengenai *Masterplan Jasa Survei*.
51. Melakukan rapat pembahasan SOP Piutang.
52. Menghadiri rapat Persiapan Audit Keuangan 2020 untuk Penunjukan Kantor KAP 2020.
53. Mengikuti rapat dengan Kementerian BUMN pembahasan paparan profil dan Isu Strategis Perusahaan, Kinerja Tahun 2019, Persiapan RUPS/ RPB Tahun Buku 2019, dan Revisi RKAP 2020.
54. Mengikuti rapat dengan Kementerian BUMN tentang tindak lanjut arahan Wamen I KBUMN untuk RJPP 2020-2024, paparan BCG untuk *Masrterplan Jasa Survei* 2020-2024.
55. Mengikuti *Laboratory Meeting* BUMN Jasa Survei.
56. Mengikuti rapat pembahasan *Masterplan Jasa Survei* tahun 2020-2024 dengan konsultan BCG dalam rangka menentukan fokus bisnis.
57. Mengikuti rapat dengan Kementerian BUMN pembahasan lanjutan *Refocussing Business BUMN Cluster Survey*.
58. Mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.
59. Mengikuti rapat dengan Dewan Komisaris pembahasan Laporan Kinerja s/d Mei 2020
60. Mengikuti rapat pembahasan *Wajib Docking* pada masa *Intermediate Survey* dan *Special Survey*.
61. Mengikuti rapat *Holding* pembahasan konsolidasi Bisnis Laboratorium.
62. Menghadiri penyaluran bantuan Covid-19 bersama Kementerian Sosial.
63. Mengikuti Webbinar K3 dengan DK3N.
64. Mengikuti rapat dengan Kementerian Perdagangan.
65. Mengikuti Webbinar dengan PT Surveyor Indonesia tentang “*Restart Your Bussiness With SIBV and Start Embrace The New Normal*”
66. Melakukan pelaksanaan rapat Tinjauan Manajemen.
67. Menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat BUMN.
68. Melakukan diskusi tentang *Guidelines* bersama TNI AL dan Perhubungan.
69. Mengikuti Webbinar dengan APITINDO.
70. Mengikuti pembukaan *meeting ISO Anti Penyuapan*.
71. Pembicara dalam Seminar DK3N.
49. Attended a meeting with the Board of Commissioners to discuss the Performance Report until April 2020.
50. Participate in discussions with the Ministry of SOEs regarding the Survey Services Masterplan.
51. Conducting a meeting to discuss the SOP for Receivables.
52. Attending the 2020 Financial Audit Preparation Meeting for the Appointment of the 2020 KAP Office.
53. Participated in a meeting with the Ministry of SOEs to discuss the profile and strategic issues of the Company, 2019 Performance, Preparation of the GMS/RPB for the 2019 Financial Year, and Revised RKAP 2020.
54. Following a meeting with the Ministry of SOEs regarding the follow-up to the directives of the Deputy Minister of State-Owned Enterprises I KBUMN for the 2020-2024 RJPP, exposure to BCG for the 2020-2024 Survey Service Master Plan.
55. Participate in the Survey Services SOE Laboratory Meeting.
56. Participate in the Survey Services Masterplan discussion meeting 2020-2024 with BCG consultants in order to determine business focus.
57. Participated in a meeting with the Ministry of SOEs to continue discussing the Refocussing Business SOE Cluster Survey.
58. Participated in the General Meeting of Shareholders (GMS) Financial Statements for the 2019 Financial Year.
59. Following the meeting with the Board of Commissioners discussing the Performance Report until May 2020
60. Participate in Mandatory Docking discussion meetings during the Intermediate Survey and Special Survey.
61. Participate in the holding meeting to discuss the consolidation of the Laboratory Business.
62. Attending the distribution of Covid-19 aid with the Ministry of Social Affairs.
63. Participate in K3 Webbinar with DK3N.
64. Attend a meeting with the Ministry of Trade.
65. Participated in a Webinar with PT Surveyor Indonesia on “*Restart Your Business With SIBV and Start Embrace The New Normal*”
66. Conducting Management Review meetings.
67. Attend the inauguration and oath taking of BUMN officials.
68. Conducting discussions on Guidelines with the Indonesian Navy and Transportation.
69. Participate in a webinar with APITINDO.
70. Following the opening of the ISO Anti-Bribery meeting.
71. Speaker at the DK3N Seminar.



72. Mengikuti *Pembukaan Holding TIC Institute*.
73. Melakukan rapat Integrasi Investasi (*Procurement Cluster*) Jasa Survei dengan KBUMN.
74. Mengikuti rapat dengan PT Trinet.
75. Melakukan kunjungan ke BKI Banten, Cirebon & Semarang dalam rangka pemantauan penerapan protokol Covid-19.
76. Mengikuti rapat konsolidasi BUMN dengan Wakil Menteri BUMN 1.
77. Mengikuti rapat pembahasan KPI Revisi 2020 dengan Kementerian BUMN.
78. Mengikuti rapat pembahasan SMK3 dengan DK3N.
79. Mengikuti rapat koordinasi Pembahasan Permasalahan Terkait Kegiatan Operasi.
80. Mengikuti rapat *Refocusing Business BUMN Cluster Survey* dengan Kementerian BUMN.
81. Mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri BUMN Pedoman Pengangkatan Direksi & Komisaris BUMN dengan Kementerian BUMN.
82. Mengikuti rapat komite Talenta.
83. Mengikuti acara Penandatanganan MoU 5 BUMN dengan Kemenaker.
84. Mengikuti rapat Pembahasan RJPP 2020-2024 *Cluster Survey*.
85. Mengikuti rapat BOD BOC Pembahasan Laporan Kinerja Juni 2020.
86. Mengikuti rapat Pleno RPP PMN dengan Kemenkumham.
87. Mengikuti Webinar Pengenalan & Internalisasi *Core Values* BUMN
88. Mengikuti rapat *Internal Review R&D* pada Kapal PT ASDP.
89. Mengikuti Pembukaan ISM *Code* Kementerian Perhubungan.
90. Mengikuti rapat Pembahasan *Monitoring Capex* dan Investasi BUMN Binaan Wakil Menteri BUMN 1.
91. Melakukan rapat persiapan penyelesaian piutang bersama Tim Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
92. Mengikuti rapat Pembahasan Progres Pengadaan bersama jasa KAP untuk audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.
93. Mengikuti rapat Pembahasan *Monitoring Capex* dan Investasi BUMN Binaan Wakil Menteri BUMN 1.
94. Mengikuti rapat Pembahasan Evaluasi Kinerja dan Koordinasi Pencapaian Target Tahun 2020.
72. Following the Opening of the Holding TIC Institute.
73. Conducting a meeting of Investment Integration (*Procurement*) Survey Services Cluster with KBUMN.
74. Attend a meeting with PT Trinet.
75. Visited BKI Banten, Cirebon & Semarang in order to monitor the implementation of the Covid-19 protocol.
76. Participate in the SOE consolidation meeting with the Deputy Minister of SOEs 1.
77. Participate in the 2020 Revised KPI discussion meeting with the Ministry of SOEs.
78. Participate in the SMK3 discussion meeting with DK3N.
79. Participate in coordination meetings for Discussion of Problems Related to Operational Activities.
80. Participate in the SOE Business Refocusing Cluster Survey meeting with the Ministry of SOEs.
81. Following the socialization of the Regulation of the Minister of SOEs Guidelines for the Appointment of Directors & Commissioners of SOEs with the Ministry of SOEs.
82. Attending Talent committee meetings.
83. Participated in the signing of the MoU of 5 SOEs with the Ministry of Manpower.
84. Participate in the 2020-2024 Cluster Survey RJPP Discussion meeting.
85. Participated in the BOD BOC meeting to discuss the June 2020 Performance Report.
86. Participate in the Plenary Meeting of the PMN RPP with the Ministry of Law and Human Rights.
87. Attending Webinar Introduction & Internalization of BUMN Core Values
88. Participate in the Internal Review R&D meeting on PT ASDP Vessel.
89. Following the Opening of the ISM Code of the Ministry of Transportation.
90. Participate in the Capex Monitoring and Investment Discussion meeting for SOEs assisted by the Deputy Minister of SOEs 1.
91. Conducting a preparatory meeting for the settlement of accounts receivable with the North Jakarta District Attorney's Team.
92. Participate in the Procurement Progress Discussion meeting with KAP services for the 2020 Financial Statement audit.
93. Participate in the Capex Monitoring and Investment Discussion meeting for SOEs Assisted by the Deputy Minister of SOEs 1.
94. Participate in the Performance Evaluation Discussion Meeting and Coordination of Achievement of the 2020 Target.



95. Mengikuti *weekly meeting* konsolidasi BUMN di bawah Wakil Menteri BUMN 1.
96. Mengikuti rapat pembahasan *Monthly Monitoring Laporan Keuangan Juni 2020* bersama Wakil Menteri BUMN 1.
97. Mengikuti rapat BOD BOC Pembahasan Laporan Kinerja Juli 2020.
98. Mengikuti pembukaan eksternal Audit ISO 9001.
99. Mengikuti rapat perumusan jadwal dan langkah kerja penyusunan rencana peraturan pemerintah tentang industri maritim dengan Kementerian Perindustrian.
100. Mengikuti acara WSO Indonesia *Safety Culture Awards* (WISCA 2020).
101. Menghadiri pembukaan dan penutupan bimbingan teknis pelaksanaan fungsi pengawasan operasional SDP dengan Kementerian Perhubungan.
102. Mengikuti rapat pembahasan Evaluasi Laporan Tahunan 2019 dari *Tokyo Memorandum Port State* dengan Kemenko Maritim.
103. Mengikuti konsinyering "Kelaikan Petikemas Berat & Kotor dengan Kementerian Perhubungan.
104. Menghadiri pembukaan kegiatan koordinasi tata kelola bidang Kesyahbandaran.
105. Mengikuti sosialisasi RJPP dengan kluster Manufaktur dengan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN.
106. Mengikuti sosialisasi restrukturisasi polis asuransi PT Asuransi Jiwasraya dengan Kementerian BUMN.
107. Mengikuti rapat BOD-BOC Pembahasan Laporan Kinerja Agustus 2020.
108. Mengikuti *Launching EVP & Employer Branding BUMN*
109. Mengikuti rapat Pembahasan *Draft APS Sub Cluster Surveyor*.
110. Melakukan rapat pembahasan RKAP 2021 terkait Program Kerja, *Training*, Piutang & Investasi.
111. Mengikuti *Kick of Discussion BUMN Research Institute* dengan Kementerian BUMN.
112. Presentasi Pelaksanaan Seleksi Lembaga Verifikasi Industri dengan Kementerian Perindustrian.
113. Presentasi Program Pengembangan *Talent Klaster* Deputi SDMTI Kementerian BUMN.
114. Mengikuti Pendalaman Fungsi Riset BUMN.
95. Participate in the weekly meeting of SOE consolidation under the Deputy Minister of SOEs 1.
96. Participated in the Monthly Monitoring Financial Report June 2020 discussion meeting with the Deputy Minister of SOEs 1.
97. Participated in the BOD BOC meeting to discuss the July 2020 Performance Report.
98. Following the opening of the external ISO 9001 Audit.
99. Participate in the meeting to formulate the schedule and work steps for the preparation of a government regulation plan on the maritime industry with the Ministry of Industry.
100. Participate in the WSO Indonesia Safety Culture Awards (WISCA 2020).
101. Attend the opening and closing of technical guidance on the implementation of the SDP operational supervision function with the Ministry of Transportation.
102. Following the discussion meeting on the 2019 Annual Report Evaluation from the Tokyo Port State Memorandum with the Coordinating Ministry for Maritime Affairs.
103. Participated in the "Heavy & Dirty Container Eligibility" consignment with the Ministry of Transportation.
104. Attending the opening of coordination activities for the management of the harbor management sector.
105. Participated in the socialization of the RJPP with the Manufacturing cluster with the Deputy for Finance and Risk Management at the Ministry of SOEs.
106. Participated in the socialization of the restructuring of PT Asuransi Jiwasraya's insurance policy with the Ministry of SOEs.
107. Participated in the BOD-BOC meeting to discuss the August 2020 Performance Report.
108. Participate in the Launching of BUMN EVP & Employer Branding
109. Participate in the APS Sub Cluster Surveyor Draft Discussion meeting.
110. Conducting a meeting to discuss the 2021 RKAP regarding Work Programs, Training, Receivables & Investments.
111. Participated in the Kick Of Discussion BUMN Research Institute with the Ministry of BUMN.
112. Presentation of the Selection Implementation of Industrial Verification Institutions with the Ministry of Industry.
113. Presentation of the Cluster Talent Development Program for Deputy HRTI of the Ministry of SOEs.
114. Participate in the deepening of BUMN Research Functions.



115. Mengikuti acara sosialisasi Transformasi *Human Capital* Perihal Migrasi Sistem Pangkat/Golongan ke Sistem Grading.
116. *Internal Review* Peraturan Teknik *Rules For Classification & Survey*.
117. Mengikuti rapat pembahasan *Monthly Monitoring* September 2020 dengan Kementerian BUMN.
118. Mengikuti *Weekly Meeting* Konsolidasi BUMN dibawah Wamen BUMN I dengan Kementerian BUMN.
119. Mengikuti Peluncuran IFG-Holding BUMN Perasuransi & Penjaminan dengan Kementerian BUMN.
120. *Monitoring Progres* Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya dengan Kementerian BUMN.
121. Mengikuti Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dengan Kementerian BUMN.
122. Mengikuti rapat BOD BOC Pembahasan Laporan Kinerja September 2020.
123. Mengikuti rapat pembahasan Proposal Integrasi Lab. BUMN dengan Kementerian BUMN.
124. *CEO Talk* (Menjadi CEO Ber AKHLAK) dengan Kementerian BUMN.
125. Menghadiri *Glad* Segmen Bidang Klas & Komersil.
126. Menhadiri Pembukaan Pelaksanaan Audit KAP Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.
127. Mengikuti rapat pembahasan *Grand Design* TJSL dengan Kementerian BUMN.
128. Menghadiri *Opening Program Scholarship Digital Mindset* dengan Kementerian BUMN.
129. Mengikuti rapat pembahasan RKAP 2021 *Holding* BUMN Jasa Survei dengan Kementerian BUMN.
130. Mengikuti rapat tentang tindaklanjut pembahasan RKAP 2021 *Holding* BUMN Jasa Survei dengan Kementerian BUMN.
131. Mengikuti rapat pembahasan Laporan Progres Sistem Manajemen Kepegawaian Yang Baru SSI dengan Grading.
132. Mengikuti sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja.
133. Menghadiri acara penyerahan penghargaan K3 Tahun 2020.
134. Menghadiri rapat perumusan rancangan peraturan pemerintah tentang industri maritim.
135. Mengikuti acara penganugerahan penghargaan keselamatan Migas Tahun 2020.
136. Mengikuti rapat integrasi Aset BUMN.
137. Mengikuti rapat sosialisasi APS 2021.
115. Participate in the socialization of Human Capital Transformation Regarding the Migration of Rank/ Class System to Grading System.
116. Internal Review of Technical Regulations Rules For Classification & Survey.
117. Participated in the September 2020 Monthly Monitoring discussion meeting with the Ministry of SOEs.
118. Participated in the Weekly Meeting on the Consolidation of BUMN under the Deputy Minister of BUMN I with the Ministry of BUMN.
119. Following the launching of IFG-Holding BUMN Insurance & Guarantee with the Ministry of BUMN.
120. Monitoring the Progress of PT Asuransi Jiwasraya's Policy Restructuring with the Ministry of SOEs.
121. Participated in Good Corporate Governance (GCG) Implementation Training with the Ministry of SOEs.
122. Participated in the BOD BOC meeting to discuss the September 2020 Performance Report.
123. Participate in the Lab Integration Proposal discussion meeting. SOEs with the Ministry of SOEs.
124. CEO Talk (Being a CEO with AKHLAK) with the Ministry of SOEs.
125. Attending Class & Commercial Segment Glad.
126. Attended the Opening of the Audit Implementation of the Financial Statements KAP for Fiscal Year 2020.
127. Participate in the TJSL Grand Design discussion meeting with the Ministry of SOEs.
128. Attended the Opening of the Digital Mindset Scholarship Program with the Ministry of SOEs.
129. Following the discussion meeting of the 2021 RKAP Holding BUMN Survey Services with the Ministry of SOEs.
130. Participate in a follow-up meeting on the 2021 RKAP discussion of Holding BUMN Survey Services with the Ministry of SOEs.
131. Attended a meeting to discuss the Progress Report of SSI's New Personnel Management System with Grading.
132. Participate in the socialization of the Job Creation Act.
133. Attended the 2020 K3 award ceremony.
134. Attending a meeting to formulate a draft government regulation on the maritime industry.
135. Participated in the 2020 Oil and Gas safety award ceremony.
136. Participate in BUMN Asset integration meeting.
137. Participate in the 2021 APS socialization meeting.

- 138. Mengikuti ACS EC Meeting 28th.
- 139. Menghadiri *Keel Laying* Terpadu Pekerjaan Pembangunan 4 Unit Kapal Wisata Bottom Glass.
- 140. Mengikuti rapat forum pajak BUMN.
- 141. Mengikuti *Weekly Meeting* dengan Wakil Menteri I Kementerian BUMN.
- 142. Menghadiri Peluncuran *Indonesia Financial Group*.
- 143. Mengikuti rapat BOD BOC pembahasan Laporan Kinerja Oktober 2020.
- 144. Mengikuti Rapimtas Wamenkeu-RPP Holding BUMN.
- 145. Mengikuti rapat Konsesus RSNI *Life Jacket* Kementerian Perindustrian.
- 146. Menjadi Narasumber Webbinar *Digital Talent* untuk Maritim Indonesia.
- 147. Mengikuti Sosialisasi Pengisian Laporan Keuangan Konsolidasi dengan Kementerian BUMN.
- 138. Participated in the 28th ACS EC Meeting.
- 139. Attended Keel Laying Integrated Construction Work of 4 Units of Bottom Glass Tourist Boat.
- 140. Participate in BUMN tax forum meetings.
- 141. Participate in the Weekly Meeting with Deputy Minister I of the Ministry of SOEs.
- 142. Attended the Launch of Indonesia Financial Group.
- 143. Participated in the BOD BOC meeting to discuss the October 2020 Performance Report.
- 144. Following the Rapimtas of the Deputy Minister of Finance-RPP Holding BUMN.
- 145. Following the RSNI Life Jacket Consensus meeting of the Ministry of Industry.
- 146. Become a Resource Person for a Digital Talent Webinar for Maritime Indonesia.
- 147. Participate in the Socialization of Completing Consolidated Financial Statements with the Ministry of SOEs.

Pelaksanaan Arahan RUPS

Pada tahun 2020 Direksi telah menerima arahan dari Pemegang Saham melalui RUPS 2020 yang diselenggarakan pada 28 Januari 2020. Direksi telah melaksanakan arahan tersebut.

Implementation of GMS Directions

In 2020 the Board of Directors has received direction from the Shareholders through the 2020 GMS which was held on January 28, 2020. The Board of Directors has carried out the directive.

No.	Arahan RUPS/GMS Directions	Tindak Lanjut/Follow Up
I.	I. Tindak lanjut terhadap arahan Pemegang Saham terhadap RUPS RKAP Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 Follow-up to the direction of the Shareholders on the 2020 RKAP GMS on January 28, 2020	Buku RKAP, RKA-PKBL, RKA Dewan Komisaris, KPI (<i>Key Performance Indicators</i>) Tahun 2020 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada Tahun 2020 serta sebagai saran pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris. Target-target RKAP dan KPI Korporat agar dilakukan <i>cascading & deployment</i> ke pejabat/karyawan <i>level</i> bawah, seluruh wilayah, cabang, dan unit kerja, termasuk anak perusahaan.
1.	The books of RKAP, RKA-PKBL, RKA Board of Commissioners, KPI (Key Performance Indicators) 2020, which have been approved and ratified by the General Meeting of Shareholders (GMS), are an integral part of the Minutes of this GMS and serve as guidelines for the Board of Directors in implementing work programs and performance targets in 2020 as well as monitoring and supervising suggestions for the Board of Commissioners. RKAP and Corporate KPI targets must be cascading & deploying to lower level officials/employees, all regions, branches, and work units, including subsidiaries.	The books of RKAP, RKA PKBL, RKA of the Board of Commissioners, have been used as guidelines by the BOD and BOC and their implementation is monitored/monitored and evaluated every month. Evaluation results will be presented and discussed in the monthly BOC and BOD meetings. Corporate KPIs have been cascading & deploying both units and individuals.

No.	Arahan RUPS/GMS Directions	Tindak Lanjut/Follow Up
2.	<p>Direksi dan Dewan Komisaris agar bekerja dengan sungguh-sungguh demi memajukan perusahaan dan mengupayakan yang terbaik (<i>best effort</i>) dalam mencapai target-target RKAP dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG dan profesionalisme, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direksi dan Dewan Komisaris berkewajiban untuk melaksanakan RKAP secara efektif dan dengan biaya efisien serta selalu bersikap hati-hati, beritikad baik, kewajaran serta penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan. Direksi agar memiliki rencana antisipasi (<i>contingency plan</i>) sehingga dalam hal terjadi perubahan asumsi dan kondisi bisnis, target RKAP tetap dapat tercapai.</p> <p>The Board of Directors and the Board of Commissioners are asked to work seriously to advance the company and strive for the best in achieving RKAP targets while still referring to the principles of GCG and professionalism, and in accordance with the provisions of the legislation. The Board of Directors and the Board of Commissioners are obliged to implement the RKAP effectively and cost-efficiently and always be prudent, have good intentions, be fair and full of responsibility for the interests of the Company. The Board of Directors must prepare a contingency plan so that in the event of a change in assumptions and business conditions, the RKAP target can still be achieved.</p>	<p>Dewan Komisaris dan Direksi telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RKAP, dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) serta mematuhi peraturan/ketentuan yang berlaku. RKAP 2020 telah diusulkan revisi sesuai dengan kondisi dampak pandemi Covid-19, dan telah disetujui oleh Kementerian BUMN tanggal 1 September 2020 dengan No. Surat S618/MBU/09/2020.</p> <p>The Board of Commissioners and the Board of Directors have achieved the targets set in the RKAP, and in their implementation in accordance with good corporate governance (GCG) and complying with applicable regulations/stipulations. RKAP 2020 has been proposed for revision in accordance with the conditions of the impact of the Covid-19 pandemic, and has been approved by the Ministry of SOEs on September 1, 2020 with No. Letter S618/MBU/09/2020.</p>
3.	<p>Direksi dan Dewan Komisaris agar melaksanakan arahan umum sebagaimana Surat Menteri BUMN Nomor. S-574/MBU/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Aspirasi Pemegang Saham. Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020.</p> <p>The Board of Directors and Board of Commissioners are asked to carry out general directions as stated in the Letter of the Minister of SOEs No. S-574 MBU/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Shareholder's Aspiration. Owner of Capital for the Preparation of the Company's 2020 Work Plan and Budget.</p>	<p>RKAP 2020 telah disusun sesuai dengan Aspirasi Pemegang Saham telah disetujui oleh Kementerian BUMN tanggal 1 September 2020 dengan No. Surat S618/MBU/09/2020.</p> <p>The 2020 RKAP has been prepared in accordance with the Shareholders' Aspiration which was approved by the Ministry of SOEs on September 1, 2020 with No. Letter S618/MBU/09/2020.</p>
4.	<p>Direksi agar meningkatkan kinerja penyerapan Belanja Modal dengan segera merealisasikan program-program yang sudah disetujui dalam RKAP sesuai dengan skala prioritas. Pelaksanaan program belanja modal agar didukung dengan perencanaan dan persiapan yang lebih matang sehingga risiko kegagalan dapat dihindari.</p>	<p>Saran diperhatikan dan ditindaklanjuti, Realisasi investasi s/d Triwulan IV Tahun 2020 sebesar Rp4.908 juta atau 26,71% dari RKAP 2020. Ada beberapa investasi yang nilai anggarannya signifikan belum dilaksanakan, hal ini disebabkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait dengan adanya pandemi Covid-19 yang sampai akhir Triwulan IV 2020 juga belum selesai, maka sesuai kebijakan manajemen telah dilakukan revisi anggaran biaya dan investasi. Investasi tahun 2020 yang semula dianggarkan Rp85 miliar direvisi menjadi Rp18 miliar. Adapun pengurangan/penundaan investasi tersebut meliputi pengadaan tanah/bangunan. Pengadaan tanah perluasan kantor BKI Klas Banten telah terealisasi dengan nilai investasi sebesar Rp1,1 miliar atau 55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2 miliar, sedangkan untuk Kantor PT BKI Banjarmasin telah dilakukan MoU dengan PT Sucofindo, dalam rangka meningkatkan sinergi BUMN dan <i>holding</i> BUMN Jasa Survey telah di bentuk Kantor Bersama PT BKI dan PT Sucofindo di Banjarmasin.

No.	Arahan RUPS/GMS Directions	Tindak Lanjut/Follow Up
2.	The Board of Directors is asked to improve the performance of capital expenditure absorption by immediately realizing the programs that have been approved in the RKAP in accordance with the priority scale. The implementation of the capital expenditure program should be supported by more mature planning and preparation so that the risk of failure can be avoided.	Suggestions have been heeded and acted upon. Realization of investment up to Quarter IV of 2020 amounted to Rp4,908 million or 26.71% of the 2020 RKAP. There are several investments whose significant budget value has not been implemented, this is due to: 1. The investment in 2020 which was originally budgeted at Rp85 billion was revised to Rp18 billion. The reduction/delay in investment includes the acquisition of land/buildings. The land acquisition for the expansion of the BKI Klas Banten office has been realized with an investment value of Rp1.1 billion or 55% of the set budget of Rp2 billion, while for the PT BKI Banjarmasin office, an MoU has been carried out with PT Sucofindo, in order to increase the synergy between BUMN and a holding survey service SOE has been established with a Joint Office of PT BKI and PT Sucofindo in Banjarmasin. 2. For production facilities whose realization through imports has been delayed, this is due to the impact of the Covid-19 pandemic which has not ended until the end of the year, so that many projects/works are delayed, thus affecting the procurement of production facilities, vendors cannot accept the schedule delivery of goods in 2020 due to import difficulties.
5.	Direksi beserta jajaran agar terus berinovasi dalam rangka penyediaan produk dan layanan dengan mutu yang terbaik bagi seluruh customer dan mitra perusahaan, serta menjamin pemenuhan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	Perusahaan telah mendapatkan penunjukan dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat terkait pekerjaan pemeriksaan Kapal Sungai, Danau, dll. Melakukan digitalisasi untuk proses bisnis internal maupun eksternal (pelayanan), guna meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan kualitas pelayanan.
6.	The Board of Directors and staff are asked to continue to innovate in order to provide products and services of the best quality for all customers and company partners, as well as ensure the fulfillment of the Service Level Agreement (SLA) in accordance with established standards.	The Company has received an appointment from the Directorate General of Land Transportation regarding the inspection work of River Ships, Lakes, etc. Digitizing for internal and external business processes (services), in order to improve the convenience, speed, and quality of service.
	In order to support the Company's operations and business development, the Board of Directors is asked to continue to improve the quality of professional human resources, as well as improve operational systems and procedures. The Board of Directors is also asked to implement an objective reward & punishment mechanism and a performance-based remuneration system that can spur employee productivity, as well as an appropriate pension policy that does not burden the company.	Sistem <i>Rewards & Punishment</i> telah disiapkan Divisi MHC bersama Konsultan melalui mekanisme perubahan struktur remunerasi dan manajemen talenta yang diharapkan dapat diterapkan pada Januari 2021. Saat ini juga sedang dilakukan migrasi sistem pengelolaan SDM berbasis <i>Grading</i> yang sedang dikerjakan oleh konsultan <i>People Prime</i> dimana didalamnya juga akan mendesain aturan pola karir dan <i>talent management</i> yang baru.
		The Rewards & Punishment system has been prepared by the MHC Division with the Consultants through changes to the remuneration structure and talent management which are expected to be implemented in January 2021. Currently, a Grading-based HR management system migration is being carried out by the People Prime consultant which will also design the pattern rules new career and talent management.

No.	Arahan RUPS/GMS Directions	Tindak Lanjut/Follow Up
7.	<p>Rekrutmen pegawai tetap agar dilakukan dengan perhitungan yang cermat terhadap kebutuhan perusahaan. Peningkatan jumlah SDM, terutama pegawai tetap harus dapat memberikan peningkatan produktivitas perusahaan.</p> <p>Recruitment of permanent employees must be carried out with careful calculations according to the needs of the Company. Increasing the number of human resources, especially permanent employees, must be able to increase the productivity of the Company.</p>	<p>Untuk tahun 2020 kebijakan manajemen (Direksi) tetap <i>zero growth</i> pegawai, yaitu menunda untuk sementara penerimaan pegawai tetap dengan mengupayakan optimalisasi pegawai yang ada. Adapun untuk beberapa kebutuhan pegawai yang sangat diperlukan dioptimalkan program <i>internship</i> (magang) bersertifikat dari lulusan perguruan tinggi.</p> <p>For 2020, the management (Board of Directors) will continue to implement a zero employee growth policy, which is to temporarily postpone the recruitment of permanent employees by optimizing existing employees. As for some of the employees' needs, it is necessary to optimize the certified internship program from university graduates.</p>
8.	<p>Tantiem yang dianggarkan dan dibebankan dalam RKAP 2020 realisasi pelaksanaannya berdasarkan pencapaian target kinerja tahun 2020 yang diputuskan dalam RUPS Tahunan.</p> <p>The tantiem that is budgeted and charged in the 2020 RKAP is realized based on the achievement of the 2020 performance targets decided at the Annual GMS.</p>	<p>Arahan diperhatikan dan dilaksanakan, pelaksanaannya sesuai keputusan RUPS.</p> <p>The directions have been observed and implemented, and is in accordance with the GMS resolution.</p>
9.	<p>Dalam rangka mewujudkan BUMN yang memiliki kinerja dan reputasi yang sekelas dengan perusahaan TIC (<i>Testing, Inspection & Certification</i>) Global, Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris agar mendukung kebijakan konsolidasi BUMN Jasa Survei, secara aktif mengupayakan sinergi antar BUMN, melakukan transformasi bisnis dengan bersinergi dengan 2 (dua) perusahaan Jasa Survey lainnya serta fokus dalam menciptakan produk dan layanan yang dapat ditangani, serta meraih peluang dalam bisnis perdagangan di luar Indonesia.</p> <p>In order to realize an SOE with a performance and reputation that is in the same class as a Global TIC (<i>Testing, Inspection & Certification</i>) company, the Board of Directors with the supervision of the Board of Commissioners to support the survey service SOE consolidation policy, actively seek synergy between SOEs, carry out business transformation by synergizing with 2 (two) other Survey Service companies and focus on creating products and services that can be handled, as well as seizing opportunities in the trading business outside Indonesia.</p>	<p>Untuk merealisasikan implementasi <i>Holding</i> sudah dilakukan langkah langkah Integrasi seperti Laboratorium, <i>Procurement</i>/pengadaan, optimalisasi gedung kantor cabang, Kolaborasi Portofolio Jasa Eksisting untuk semua sektor, pengembangan portofolio jasa baru, TIC Institute dll.</p> <p>To realize the implementation of Holding, integration steps have been taken such as Laboratory, Procurement, optimization of branch office buildings, Collaboration of Existing Service Portfolios for all sectors, development of new service portfolios, TIC Institute etc.</p>
10.	<p>Untuk mendukung konsolidasi BUMN Jasa Survei beroperasi lebih efisien dan efektif, Direksi diminta untuk memformulasikan dan melaksanakan berbagai penggunaan alat-alat produksi yang dimiliki. Dalam hal pengeluaran investasi khususnya biaya Capex (<i>Capital Expenditure</i>) berupa pengadaan tanah dan bangunan dilakukan secara selektif sesuai dengan skala prioritas perusahaan.</p> <p>To support the consolidation of the Survey Service SOEs to operate more efficiently and effectively, the Board of Directors is asked to formulate and implement the sharing of the use of production equipment owned. In terms of investment expenditure, especially the cost of Capex (<i>Capital Expenditure</i>) in the form of land and building procurement, it is carried out selectively according to the Company's priority.</p>	<p>Arahan diperhatikan dan ditindaklanjuti. Dalam Tim <i>Holding</i> BUMN Jasa Survei telah dibentuk Tim Aset Manajemen BUMN Jasa Survei. Tim ini bertugas menginventarisir seluruh aset BUMN Jasa Survei. Telah dilakukan verifikasi bersama atas usulan Capex 2020 untuk mengoptimalkan aset yang ada. Telah dibuat SOP pengadaan bersama dengan tujuan memastikan bahwa aset yang akan dibeli telah dilakukan verifikasi secara mendetail, sehingga dapat mengurangi aset yang <i>idle</i>.</p> <p>Directives have been heeded and acted upon. In the Survey Services BUMN Holding Team, a Survey Services BUMN Asset Management Team has been formed. This team is tasked with taking an inventory of all the assets of the Survey Services BUMN. A joint verification of the Capex 2020 proposal has been carried out to optimize existing assets. A joint procurement SOP has been made with the aim of ensuring that the assets to be purchased have been verified in detail, so as to reduce idle assets.</p>

No.	Arahan RUPS/GMS Directions	Tindak Lanjut/Follow Up
11.	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris agar fokus meningkatkan pertumbuhan perusahaan melalui peningkatan <i>market share</i> pada bisnis inti perusahaan, serta mengupayakan pertumbuhan anorganik di bidang usaha yang potensial dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.	Direksi meningkatkan proforma/kualitas bisnis inti (<i>core</i> bisnis klasifikasi) secara konsisten guna memenuhi persyaratan menjadi anggota IACS, untuk program peningkatan pangsa pasar jasa Komersil melalui strategi investasi anorganik pada perusahaan di sektor kemaritiman, <i>advance technology</i> dan proses digitalisasi proses bisnis dan menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil.
	The Board of Directors, with the supervision of the Board of Commissioners, should focus on increasing the Company's growth through increasing market share in the Company's core business, as well as pursuing inorganic growth in potential business fields while still applying the principles of prudence and risk management.	The Board of Directors consistently improves the performance/quality of core business (core business classification) in order to fulfill the requirements to become a member of IACS, for programs to increase market share for commercial services through inorganic investment strategies in companies in the maritime sector, <i>advance technology</i> and business process digitization processes and implement Risk Management in any policies taken.
12.	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk mengoptimalkan kondisi keuangan perusahaan dengan menjaga agar <i>Operating Cash Flow</i> tetap positif, EBITDA tumbuh, dan <i>Debt to EBITDA</i> tidak lebih dari 3 kali.	Arahan diperhatikan dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara periodik, baik secara internal maupun dengan Kementerian BUMN.
	The Board of Directors, under the supervision of the Board of Commissioners, is asked to optimize the Company's financial condition by keeping the Operating Cash Flow positive, EBITDA growing, and Debt to EBITDA no more than 3 times.	The directives have been heeded and followed up by conducting periodic monitoring and evaluation, both internally and with the Ministry of SOEs.
13.	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk menjaga integritas dan kredibilitas perusahaan (<i>trusted entities</i>) dengan terus meningkatkan kualitas SDM, bisnis proses, dan budaya perusahaan.	Integritas dan Kredibilitas perusahaan untuk peningkatan kualitas SDM, bisnis proses serta budaya perusahaan tetap diutamakan. Pada Juni tahun 2020 BKI telah mendapatkan sertifikasi ISO 37001 (SMAP) terkait dengan anti penyuapan dan menjaga kualitas dari pelayanan ke <i>customer</i> dengan produk-produk jasa terbaik di bidangnya meskipun pada saat pandemi. Bisnis Proses secara bertahap telah menuju penggunaan digitalisasi, di antaranya penggunaan sistem informasi HRIS, OGS, <i>E-Office</i> , SIKom, dll. Internalisasi Budaya BKI (Kompak Nice Juara) diselaraskan dengan <i>Core Value</i> BUMN AKHLAK dengan berbagai rangkaian kegiatan di antaranya <i>NiCelebration</i> , Kalender Budaya, <i>Agent of Change</i> , dll
	The Board of Directors, under the supervision of the Board of Commissioners, are required to maintain the integrity and credibility of the Company (<i>trusted entities</i>) by continuously improving the quality of human resources, business processes, and corporate culture.	Integrity and Credibility of the Company to improve the quality of human resources, business processes and corporate culture are still prioritized. In June 2020 BKI has obtained ISO 37001 (SMAP) certification related to anti-bribery and maintaining the quality of service to customers with the best service products in their fields even during a pandemic. The Business Process has gradually moved towards the use of digitization, including the use of HRIS, OGS, <i>E-Office</i> , SIKom, etc. information systems. Internalization of BKI Culture (Kompak Nice Champion) is aligned with SOE Core Value AKHLAK with various series of activities including NiCelebration, Cultural Calendar, Agent of Change, etc.
14.	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta agar segera menetapkan langkah-langkah penyelesaian piutang-piutang perusahaan, khususnya piutang berumur lebih dari 1 tahun. Terhadap <i>outstanding</i> piutang sampai dengan 31 Desember 2019 (<i>unaudited</i>) sebesar Rp398,97 miliar, Direksi diminta untuk menugaskan jajarannya untuk lebih intensif dalam melakukan penagihan terhadap debitur.	Manajemen telah menerbitkan surat No. A.0285/KU.301/KI-20 tanggal 23 Januari 2020 ditujukan kepada seluruh Unit Produksi agar melakukan percepatan penagihan piutang yang telah jatuh tempo. Direksi telah membentuk satuan tugas berupa Tim Penagihan/Pencairan Piutang termasuk piutang yang telah berumur lebih dari 1 (satu) tahun. Terhadap <i>outstanding</i> piutang BUMN, Direksi PT BKI telah mengadakan pertemuan/rapat dengan Direksi BUMN yang terkait untuk percepatan pembayaran piutang.
	The Board of Directors under the supervision of the Board of Commissioners is requested to immediately determine the steps to settle the company's receivables, especially receivables older than 1 year. For outstanding receivables up to December 31, 2019 (unaudited) of Rp398.97 billion, the Board of Directors is asked to assign their staff to be more intensive in collecting debtors.	Management has issued letter No. A.0285/KU.301/KI-20 dated January 23, 2020 is addressed to all Production Units in order to accelerate the collection of receivables that are due. The Board of Directors has formed a task force in the form of a Receivable Collection / Disbursement Team including receivables that are more than 1 (one) year old. Regarding the outstanding receivables of SOEs, the Board of Directors of PT BKI has held a meeting with the relevant SOE Directors to accelerate the payment of receivables.

No.	Arahan RUPS/GMS Directions	Tindak Lanjut/Follow Up
15.	Direksi bersama Dewan Komisaris agar menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya pada akhir Februari 2020. The Board of Directors and the Board of Commissioners are required to submit the 2019 Financial Statements which have been audited by the Public Accounting Firm no later than the end of February 2020.	Arahan diperhatikan dan telah dilaksanakan penyampaian Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 pada tanggal 28 Februari 2020. The directives were heeded and the submission of the 2019 Financial Year Financial Statements on February 28, 2020.
16.	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk menyesuaikan strategi perusahaan dengan RPJMN Kementerian BUMN Tahun 2020-2024. The Board of Directors with the supervision of the Board of Commissioners are asked to adjust the company's strategy with the RPJMN of the Ministry of SOEs for 2020-2024.	Sesuai arahan RJPP tahun 2020-2024 telah mengacu kepada RPJMN Pemerintah dan 5 Prioritas utama dari Kementerian BUMN . In accordance with the direction of the 2020-2024 RJPP, it has referred to the Government's RPJMN and the 5 main priorities of the Ministry of SOEs.
17.	Direksi diminta untuk memperhatikan pencatatan transaksi keuangan perusahaan harus sesuai dengan standar pembukuan yang berlaku dan menerapkan PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 pada Tahun Buku 2020. The Board of Directors is required to heed that the recording of the Company's financial transactions must comply with applicable bookkeeping standards and apply PSAK 71, PSAK 72, and PSAK 73 in the 2020 Fiscal Year.	Arahan diperhatikan dan telah dilakukan penyusunan GAP analisis bersama konsultan terkait penerapan PSAK 71, 72, 73 dan telah dilakukan perhitungan secara <i>manual</i> sesuai dengan GAP analisis. Directions are considered and the preparation of GAP analysis with consultants related to the application of PSAK 71, 72, 73 has been carried out and manual calculations have been carried out in accordance with GAP analysis.
18.	Direksi diminta terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya, serta produktivitas karyawan di setiap lini dan cabang perusahaan sebagaimana tercermin pada rasio BOPO (Beban Operasional dibagi Pendapatan Operasional) yang semakin rendah dan memberikan Rasio Net Profit per Employee yang semakin meningkat. The Board of Directors is asked to continue to improve cost effectiveness and efficiency, as well as employee productivity in every line and branch of the company as reflected in the lower BOPO (Operating Expenses divided by Operating Income) ratio and an increasing Net Profit per Employee Ratio.	Saran diperhatikan dan telah dilaksanakan dimana pada posisi s/d Triwulan IV tahun 2020 (<i>Audited</i>) BOPO telah mencapai 81.57% dan <i>net profit per employee</i> mencapai Rp126 juta per <i>employee</i> . Suggestions have been considered and have been implemented where in the position up to Quarter IV of 2020 (<i>Audited</i>) the BOPO has reached 81.57% and the net profit per employee has reached Rp126 million per employee.
19.	Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk menyampaikan laporan berkala kepada Pemegang Saham secara tepat waktu atas pelaksanaan RKAP Tahun 2020, yang meliputi laporan triwulan, laporan semester dan laporan berkala lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan penyampaian laporan berkala secara elektronik melalui portal Silaba. The Board of Directors and the Board of Commissioners are requested to submit periodic reports to Shareholders in a timely manner on the implementation of the 2020 RKAP, which includes quarterly reports, semester reports and other periodic reports in accordance with applicable regulations, including provisions for submitting periodic reports electronically through the Silaba portal.	Arahan diperhatikan dan telah ditindaklanjuti dengan selalu aktif mengupload seluruh laporan manajemen ke portal Silaba sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Directions have been heeded and followed up by always actively uploading all management reports to the Silaba portal in accordance with the predetermined time limit.

No.	Arahan RUPS/GMS Directions	Tindak Lanjut/Follow Up
20.	<p>Direksi diminta untuk memperhatikan dan melaksanakan Tanggapan dan arahan Dewan Komisaris yang disampaikan melalui surat Nomor : PS.09/DK.BKI/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 merupakan satu kesatuan dengan Keputusan RUPS ini.</p> <p>The Board of Directors is requested to pay attention to and implement the Board of Commissioners' responses and directions submitted by letter Number: PS.09/DK.BKI/XII/2019 dated December 13, 2019 is an integral part of this GMS Resolution.</p>	<p>Arahan diperhatikan dan telah dilaksanakan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RKAP Tahun 2020 telah dijabarkan dalam bentuk RKAP bulanan dan triwulan yang berisikan strategi dan kebijakan perusahaan. - Direksi telah menyusun matriks program kerja, Divisi Manajemen <i>Human Capital</i> telah menyusun <i>Annual Training Plan</i> tahun 2020 berdasarkan <i>Learning Need Analysis</i>. - Direksi telah melakukan tindakan berupa Evaluasi dan Peningkatan kinerja baik dari aspek operasional maupun aspek keuangan, melakukan upaya-upaya penetrasi pasar dan kualitas layanan yang baik, Direksi telah memaksimalkan sinergi baik dengan K/L Pemerintah, BUMN lain maupun pihak Swasta. - Direksi telah pro aktif dalam bekerja sama dengan INSA dalam hal klasifikasi kapal-kapal pelaku usaha yang berada di bawah naungan INSA. - Direksi telah memberikan perhatian secara penuh serta mengantisipasi risiko-risiko yang berpotensi timbul dalam proses investasi. - Pelaksanaan PKBL telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku. - Direksi telah menerapkan manajemen risiko terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil. - Manajemen dan jajarannya telah melaksanakan program-program yang telah ditetap RKAP Tahun 2020 secara konsisten dgn berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam GCG. <p>The following directives have been observed and implemented:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The 2020 RKAP has been described in the form of monthly and quarterly RKAP which contains company strategies and policies. - The Board of Directors has compiled a matrix of work programs, the Human Capital Management Division has prepared the 2020 Annual Training Plan based on Learning Need Analysis. - The Board of Directors has taken actions in the form of evaluation and performance improvement both from the operational and financial aspects, making efforts to penetrate the market and good service quality, the Board of Directors has maximized the synergy with the government ministries/agencies, other SOEs and the private sector. - The Board of Directors has been pro-active in cooperating with INSA in terms of classifying business vessels under the auspices of INSA. - The Board of Directors has given full attention and anticipated risks that could potentially arise in the investment process. - The implementation of PKBL has been guided by the applicable regulations. - The Board of Directors has implemented risk management on the policies to be taken. - Management and staff have implemented the programs that have been set in the 2020 RKAP consistently based on the principles set out in GCG.
21.	<p>Terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor (BPK, BPKP, KAP dan SPI) yang belum tuntas, Direksi diminta memprioritaskan dan mendorong penyelesaiannya dengan target waktu dan penanggung jawab (<i>Person in Charge</i>) yang jelas. Fungsi dan peran SPI agar lebih dioptimalkan untuk membantu penyelesaian temuan, serta mendeteksi dan mencegah pelanggaran secara lebih dini.</p> <p>Regarding the findings of the auditor's examination (BPK, BPKP, KAP and SPI) that have not been completed, the Board of Directors is asked to prioritize and encourage its completion with a clear target time and person in charge. The function and role of SPI to be more optimized to help resolve findings, as well as detect and prevent violations earlier</p>	<p>Arahan diperhatikan dan ditindaklanjuti, SPI telah menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan dengan pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja secara berkala dalam pelaksanaan PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) maupun pemeriksaan khusus. Penyelesaian temuan PKPT 83% yang telah selesai dan lengkap dari semua obyek audit unit produksi dan divisi. Tanggapan dan pelaksanaan tindak lanjut atas temuan PKPT dijadikan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) unit produksi dan divisi.</p> <p>Directions have been heeded and followed up, SPI has carried out the function of control and supervision by checking financial reports and performance periodically in the implementation of PKPT (Annual Audit Work Program) as well as special inspections. Completion of 83% PKPT findings that have been completed and complete from all audit objects of production units and divisions. Responses and follow-up implementation of PKPT findings are used as Key Performance Indicators (KPI) for production units and divisions.</p>

No.	Arahan RUPS/GMS Directions	Tindak Lanjut/Follow Up
22.	Berkenaan dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Direksi agar memperhatikan catatan dalam Risalah Rapat Pembahasan bersama Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Nomor : RIS-35/D7.MBU.3/11/2019 tanggal 19 November 2019. With regard to the implementation of the Partnership and Community Development Program, the Board of Directors should pay attention to the notes in the Minutes of the Discussion Meeting with the Deputy for Social and Environmental Responsibility Number: RIS-35/D7.MBU.3/11/2019 dated November 19, 2019.	Arahan diperhatikan dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan Risalah RUPS No. RIS-35/D7.MBU.3/11/2019 tanggal 19 November 2019. Directions are considered and have been followed up in accordance with the Minutes of GMS No. RIS-35/D7.MBU.3/11/2019 on November 19, 2019.
II.	I. Tindak lanjut terhadap arahan Pemegang Saham terhadap RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 tanggal 30 Juni 2020 Follow-up to the direction from the Shareholders on the GMS Financial Statements for the Financial Year 2019 dated June 30, 2020 1. Direksi dan Dewan Komisaris agar menindaklanjuti semua temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dari auditor (antara lain KAP dan BPK-RI) pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai. The Board of Directors and the Board of Commissioners are asked to follow up on all findings and recommendations from the auditors (including KAP and BPK-RI) in 2019 and previous years that have not been completed. 2. Terhadap usulan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, Direksi bersama Dewan Komisaris agar menjalankan proses pengadaan berkoordinasi dengan BUMN Klaster Jasa Survei yang lain serta Kedeputian Keuangan dan Manajemen Risiko, sehingga diperoleh KAP yang diharapkan memiliki independensi, kompetensi, reputasi pengalaman serta standar mutu pekerjaan yang baik. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris agar memastikan laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan secara lengkap dan benar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Regarding the proposal of KAP to audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2020, the Board of Directors together with the Board of Commissioners must carry out the procurement process in coordination with other SOEs for Survey Services Clusters and the Deputy for Finance and Risk Management, so that KAP is expected to have independence, competence, reputation, experience and standards. good quality of work. The Board of Directors with the supervision of the Board of Commissioners to ensure that the company's financial statements have been prepared and presented completely and correctly in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.	Manajemen telah menindaklanjuti temuan KAP tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Management has followed up on the findings of KAP in 2019 and previous years. Arahan diperhatikan dan ditindaklanjuti dimana telah dilakukan pengadaan KAP dengan ditunjuk KAP Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Palilingan dan Rekan (PKF Hadiwinata) untuk melaksanakan Audit laporan Keuangan tahun 2020 sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan surat penunjukan No. A.38/DK.BKI/XI/2020 tanggal 17 November 2020. The directives have been heeded and followed up where the procurement of KAP has been carried out with the appointment of KAP Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Palilingan and Partners (PKF Hadiwinata) to carry out the 2020 Financial Statement Audit in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, with a letter of appointment No. A.38/DK.BKI/XI/2020 dated November 17, 2020.

No.	Arahan RUPS/GMS Directions	Tindak Lanjut/Follow Up
3.	Direksi bersama Dewan Komisaris agar senantiasa mengawal proses pembentukan <i>Holding BUMN Jasa Survey</i> agar target penerbitan Peraturan Pemerintah <i>Holding BUMN Jasa Survey</i> dapat tercapai.	Manajemen terus mengawal proses pembentukan <i>Holding Jasa Survey</i> yakni dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang lebih intensif dengan kedua Jasa Survey. Untuk merealisasikan implementasi <i>Holding</i> sudah dilakukan langkah-langkah Integrasi seperti Laboratorium, <i>Procurement/Pengadaan</i> , optimalisasi gedung kantor cabang, Kolaborasi Portofolio Jasa Eksisting untuk semua sektor, pengembangan portofolio jasa baru, TIC Institute, dll.
	The Board of Directors together with the Board of Commissioners should always oversee the process of establishing the Holding BUMN Survey Services so that the target of issuing Government Regulations for Holding BUMN Survey Services can be achieved.	Management continues to oversee the process of establishing the Survey Services Holding by holding more intensive meetings with the two Survey Services. To realize the implementation of Holding, integration steps have been taken such as Laboratories, Procurement, optimization of branch office buildings, Collaboration of Existing Service Portfolios for all sectors, development of new service portfolios, TIC Institute, etc.
4.	Direksi bersama Dewan Komisaris agar menjalankan mekanisme <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja perusahaan secara lebih intensif dan periodik, terutama untuk parameter kinerja inti yang menjadi perhatian utama pemegang saham, yaitu pencapaian EBITDA yang positif dan meningkat, serta arus kas operasi yang positif dan meningkat.	Arahan diperhatikan dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaporan keuangan secara periodik (per bulan, triwulan) pada unit kerja dan unit produksi baik secara internal maupun dengan Kementerian BUMN.
	The Board of Directors and the Board of Commissioners are required to carry out more intensive and periodic monitoring and evaluation of the company's performance, especially for the core performance parameters that are the main concern of shareholders, namely the achievement of positive and increasing EBITDA, as well as positive and increasing operating cash flow.	The directives have been heeded and followed up by monitoring and evaluating financial reporting periodically (monthly, quarterly) in work units and production units both internally and with the Ministry of SOEs.
5.	Direksi diminta menjalankan manajemen <i>working capital</i> secara lebih optimal, antara lain dengan mempercepat penagihan piutang usaha dan menurunkan tagihan bruto.	Manajemen telah menerbitkan surat No. A.0285/KU.301/KI-20 tanggal 23 Januari 2020 ditujukan kepada seluruh unit produksi agar melakukan percepatan penagihan piutang yang telah jatuh tempo. Direksi telah membentuk tim validasi piutang dimana salah satu tugas tim adalah melakukan verifikasi dan didukung oleh Keputusan Direksi berdasarkan SK No. DU.101/HK.503/KI-20 tanggal 12 Juni 2020 piutang yang telah berumur lebih dari 1 (satu) tahun, melakukan upaya percepatan penagihan melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Telah dilakukan pertemuan dengan pihak ketiga untuk pembentukan kerjasama penyelesaian piutang.
	The Board of Directors was asked to carry out more optimal working capital management, among others, by accelerating the collection of accounts receivable and reducing gross receivables.	The Management has issued letter No. A.0285/KU.301/KI-20 dated January 23, 2020 is addressed to all production units in order to accelerate the collection of receivables that are due. The Board of Directors has formed a receivable validation team where one of the team's tasks is to verify and is supported by the Board of Directors' Decree based on Decree No. DU.101/HK.503/KI-20 dated June 12, 2020, receivables that are more than 1 (one) year old, make efforts to accelerate collection through collaboration with the North Jakarta District Attorney. Meetings with third parties have been held to establish cooperation for settlement of receivables.
6.	Direksi agar mengimplementasikan manajemen proyek secara optimal sehingga proyek yang sedang berjalan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan, dengan biaya yang efisien serta tetap menjaga kualitas/mutu pekerjaan sesuai standar.	Arahan diperhatikan dan ditindaklanjuti. Dimana adanya <i>monitoring</i> dan pengendalian biaya untuk kegiatan komersil (Proyek) atas setiap usulan RAB dengan memperhatikan jadwal pekerjaan serta kualitas pekerjaan.
	The Board of Directors to implement project management optimally so that ongoing projects can be completed according to a predetermined schedule, at an efficient cost and while maintaining the quality of work according to standards.	Directions are heeded and followed up. Where there is monitoring and cost control for commercial activities (projects) for each proposed RAB by taking into account the work schedule and quality of work.

No.	Arahan RUPS/GMS Directions	Tindak Lanjut/Follow Up
7.	Direksi diminta mengambil langkah-langkah perbaikan pada cabang-cabang yang memberikan <i>margin</i> relatif lebih kecil dari cabang-cabang lainnya atau di bawah standar yang ditetapkan. The Board of Directors is asked to take corrective steps in branches that provide relatively smaller margins than other branches or are below the established standards.	Manajemen telah melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara periodik dengan acuan Kontrak Manajemen dan KPI. Terkait kinerja unit produksi, khususnya unit produksi yang memberikan kontribusi <i>margin</i> relatif kecil, dilakukan efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan. Management has carried out periodic monitoring and evaluation with reference to Management Contracts and KPIs. Regarding the performance of the production units, especially the production units that contribute relatively small margins, cost efficiency and revenue increase were carried out.
8.	Pelaksanaan program Belanja Modal (Investasi) agar didukung dengan kajian kelayakan, perencanaan dan persiapan matang, termasuk skema pendanaan yang paling optimal sehingga tidak terjadi <i>mismatch</i> dan membebani perusahaan di masa mendatang. The implementation of the Capital Expenditure (Investment) program is to be supported by a feasibility study, careful planning and preparation, including the most optimal funding scheme so that there is no mismatch and burdens the company in the future.	Setiap proses usulan realisasi investasi oleh unit produksi kepada Direksi, dilampiri TOR, kajian investasi dan mitigasi risiko, untuk memastikan bahwa usulan investasi tersebut kesesuaian untuk pengadaannya dan dapat meningkatkan bisnis perusahaan. Each process of investment realization proposal by the production unit to the Board of Directors is accompanied by a TOR, investment review and risk mitigation, to ensure that the investment proposal is appropriate for the procurement and can improve the company's business.
9.	Direksi diminta agar terus memperkuat kompetensi dan kapasitas SDM sehingga dapat menjaga keunggulan kompetitif perusahaan ke depannya, antara lain menyelaraskan program pendidikan dan pengembangan SDM agar sejalan dengan rencana pengembangan bisnis ke depan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. The Board of Directors is requested to continue to strengthen the competence and capacity of HR so as to maintain the company's competitive advantage going forward, among others, by aligning education and HR development programs to be in line with future business development plans and tailored to the needs of the organization.	Manajemen telah dan terus berupaya memperkuat kompetensi dan kapasitas SDM antara lain : 1. Migrasi sistem pengelolaan SDM berbasis <i>Grading</i> yang sedang dikerjakan oleh konsultan <i>People Prime</i> dimana didalamnya juga akan mendesain aturan pola karir dan <i>talent management</i> yang baru. 2. Secara periodik peningkatan SDM internal BKI tetap dilaksanakan peningkatan mutu meskipun dalam situasi pandemi dengan <i>training/ pelatihan online</i> sesuai kebutuhan baik untuk operasi maupun support. The Management has been and continues to strive to strengthen the competence and capacity of HR among others : 1. Grading-based HR management system migration which is being worked on by People Prime consultants which will also design new career patterns and talent management rules. 2. Periodically improving BKI's internal human resources, quality improvement is still carried out even in a pandemic situation with online training/training as needed for both operations and support.
10.	Dewan Komisaris diminta untuk meningkatkan peran pengawasan dalam aspek tata kelola perusahaan, pencapaian kinerja keuangan, pengembangan SDM, dan pelaksanaan program investasi dan inisiatif strategis. The Board of Commissioners is asked to increase its supervisory role in aspects of corporate governance, financial performance achievement, human resource development, and implementation of investment programs and strategic initiatives.	Arahan diperhatikan dan telah dilaksanakan dimana Direksi bersama Dewan Komisaris melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi melalui rapat bulanan terkait tata kelola perusahaan, pencapaian kinerja keuangan, pengembangan SDM, realisasi investasi dan inisiatif strategis. The directives have been heeded and implemented where the Board of Directors together with the Board of Commissioners carry out monitoring and evaluation through monthly meetings related to corporate governance, financial performance achievement, HR development, investment realization and strategic initiatives.
11.	Dalam rangka mewujudkan BUMN yang memiliki kinerja dan reputasi yang sekelas dengan perusahaan TIC (<i>Testing, Inspection & Certification</i>) Global, Direksi beserta jajaran diminta untuk mendukung kebijakan konsolidasi BUMN Jasa Survei. In order to realize a BUMN that has a performance and reputation that is in the same class as a Global TIC (<i>Testing, Inspection & Certification</i>) company, the Board of Directors and staff are asked to support the survey service BUMN consolidation policy.	Untuk merealisasikan implementasi <i>Holding</i> sudah dilakukan langkah langkah Integrasi seperti Laboratorium, <i>Procurement/pengadaan</i> , optimalisasi gedung kantor cabang, Kolaborasi Portofolio Jasa Eksisting untuk semua sektor, pengembangan portofolio jasa baru, TIC Institute dll. To realize the implementation of Holding, integration steps have been taken such as laboratories, procurement, optimization of branch office buildings, Collaboration of Existing Service Portfolios for all sectors, development of new service portfolios, TIC Institute etc.

No.	Arahan RUPS/GMS Directions	Tindak Lanjut/Follow Up
12.	Dalam pelaksanaan kegiatan PKBL, Direksi diminta untuk senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan kebijakan dan arahan yang disampaikan oleh Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kementerian BUMN sebagaimana Risalah Nomor : RIS-18/D7. MBBU.3/03/2020 tanggal 30 Maret 2020. In implementing PKBL activities, the Board of Directors is asked to always be guided by the provisions of laws and regulations, and pay attention to the policies and directions submitted by the Deputy for Social and Environmental Responsibility, Ministry of SOEs as stated in Minutes Number: RIS-18/D7.MBBU.3/03/2020 March 30, 2020.	Arahan diperhatikan dan secara bertahap telah dilaksanakan/ ditindaklanjuti. The directives have been heeded and have been gradually implemented/ followed up.
13.	Direksi diminta segera menyusun dan menyampaikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Strategis/ <i>Master Plan</i> Klaster Jasa Survey yang telah disetujui oleh Kementerian BUMN melalui surat wakil Menteri BUMN I Nomor S-118/WK1. MBU/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 RJPP tersebut agar disampaikan paling lambat tanggal 27 Juli 2020. The Board of Directors is required to immediately prepare and submit the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2020-2024 based on the Strategic Plan/ Master Plan for the Survey Services Cluster which has been approved by the Ministry of SOEs through the letter of the Deputy Minister of SOEs I Number S-118/WK1.MBU/ 06/2020 dated June 12, 2020 the RJPP must be submitted no later than July 27, 2020.	Arahan diperhatikan dan telah ditindaklanjuti dimana Revisi Buku RJPP 2020-2024 telah disusun dan disampaikan ke KBUMN pada tanggal 24 Juli 2020. The directives have been heeded and followed up where the 2020-2024 RJPP Book Revision has been compiled and submitted to KBUMN on July 24, 2020.
14.	Untuk menunjang peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan BUMN, Direksi agar melakukan pengisian dan pemutakhiran data portal Silaba, portal Aset, portal SDM, portal PKBL, dan portal Publik secara akurat dan tepat waktu. To support the improvement of the quality of supervision and development of SOEs, the Board of Directors is required to fill out and update data on the Silaba portal, Asset portal, HR portal, PKBL portal, and Public portal in an accurate and timely manner.	Arahan diperhatikan dan telah ditindaklanjuti dengan selalu aktif meng- <i>upload</i> seluruh laporan manajemen ke portal Silaba, portal Aset, portal SDM, portal PKBL sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan portal publik sesuai ketentuan yang berlaku. Directions have been taken into account and have been followed up by always actively uploading all management reports to the Silaba portal, Asset portal, HR portal, PKBL portal according to the predetermined time limit and public portal according to applicable regulations.
15.	Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan PKBL, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Laporan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang telah diaudit oleh KAP, Risalah Rapat Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban PKBL Tahun 2019 dan Tanggapan Dewan Komisaris merupakan bagian tidak terpisahkan dari Risalah ini. Financial Statements, PKBL Reports, Performance Evaluation Reports, Compliance Reports on Legislation and Internal Controls, Key Performance Indicators (KPI) Reports that have been audited by KAP, Minutes of Discussion Meetings on 2019 PKBL Accountability Reports and Responses from the Board of Commissioners are an integral part of this Treatise.	Arahan diperhatikan dimana KPI <i>Corporate</i> telah di- <i>cascading</i> dan di- <i>deploy</i> ke pejabat/karyawan di seluruh unit kerja/unit produksi. The directions are observed and the Corporate KPIs have been cascading and deployed to officials/employees in all work units/production units.

No.	Arahan RUPS/GMS Directions	Tindak Lanjut/Follow Up
16.	Dalam rangka menjalankan setiap kegiatan operasional perusahaan Direksi beserta jajaran diminta agar senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan manajemen risiko secara konsisten. In order to carry out every operational activity of the Company, the Board of Directors and staff are required to always comply with the laws and regulations and apply the principles of Good Corporate Governance and risk management consistently.	Arahan diperhatikan dan telah ditindaklanjuti, dengan adanya sosialisasi penerapan GCG dan manajemen risiko kepada semua unit kerja . The directives have been heeded and followed up, with the socialization of the implementation of GCG and risk management to all work units.
17.	Direksi diminta untuk menindaklanjuti seluruh arahan Pemegang Saham, tanggapan dan saran Dewan Komisaris yang sejalan dengan keputusan RUPS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari risalah dan keputusan RUPS ini. The Board of Directors is requested to follow up on all directions from the Shareholders, responses and suggestions from the Board of Commissioners that are in line with the decisions of the GMS which are an integral part of the minutes and decisions of this GMS.	Arahan diperhatikan dan telah ditindaklanjuti sesuai risalah dan keputusan RUPS . The directives have been heeded and followed up in accordance with the minutes and decisions of the GMS.

Pelaksanaan Arahan Dewan Komisaris

Selain menindaklanjuti arahan RUPS, Direksi juga memperhatikan dan melaksanakan arahan Dewan Komisaris.

Implementation of the Board of Commissioners' Directions

In addition to following up on the direction of the GMS, the Board of Directors also pays attention to and implements the direction of the Board of Commissioners.

- | | | |
|----|--|---|
| I | Tindak lanjut arahan Dewan Komisaris terhadap RUPS RKAP Tahun 2020.
Follow-up to the direction of the Board of Commissioners on the 2020 RKAP GMS. | RKAP targets and corporate KPIs have been cascading through Work Unit KPIs and Individual KPIs in each work unit to support the success of each indicator of the success of corporate targets. |
| 1 | RKAP Tahun 2020 yang telah disusun dijabarkan dalam bentuk RKAP bulanan dan triwulan yang berisikan strategi dan kebijakan perusahaan yang lebih rinci sebagai tahapan untuk pencapaian target RKAP dalam 1 tahun. Target-target RKAP dan KPI corporate agar dilakukan <i>cascading</i> ke pejabat/karyawan pada tiap level, Unit Kerja, Unit Usaha SBU.

2020 RKAP to be elaborated in the form of monthly and quarterly RKAP which contains more detailed company strategies and policies as stages for achieving RKAP targets in 1 year. Corporate RKAP and KPI targets should be cascading to officials/employees at each level, Work Unit, SBU Business Unit. | Target RKAP dan KPI <i>corporate</i> telah dilakukan <i>cascading</i> melalui KPI Unit Kerja dan KPI Individu pada tiap-tiap unit kerja untuk dapat mendukung keberhasilan setiap indikator keberhasilan target <i>corporate</i> . |
| 2. | Seluruh program kerja yang telah disusun agar dilaksanakan sesuai dengan hasil dan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk itu, Direksi diminta untuk menyusun matriks program kerja pada masing-masing bidang yang memuat informasi tentang <i>timeline</i> , kebutuhan biaya dan progres pelaksanaan serta personil yang bertanggung jawab, untuk kemudian menjadi bahan evaluasi secara berkala bagi Direksi dan Dewan Komisaris. | RKAP, RKA PKBL, RKA Dewan Komisaris, telah dijadikan pedoman oleh BOD, BOC dan dalam pelaksanaannya dipantau/dimonitor serta dievaluasi setiap bulan, Hasil Evaluasi akan disampaikan dan didiskusikan dalam rapat bulanan BOC dan BOD dimana KPI Korporat telah di <i>cascading & deployment</i> baik secara unit maupun individu. |

All work programs that have been prepared to be carried out in accordance with the results and schedule that have been set. For this reason, the Board of Directors is asked to compile a matrix of work programs in each field that contains information on the timeline, cost requirements and progress of implementation as well as responsible personnel, to then become material for periodic evaluations for the Board of Directors and the Board of Commissioners.

3. Direksi diminta agar memperkuat kompetensi dan kapasitas SDM sehingga dapat menjaga keunggulan kompetitif perusahaan ke depan yang dapat bersaing dengan badan klasifikasi internasional maupun perusahaan jasa teknik lainnya, melalui :
1. Melaksanakan program pengelolaan SDM secara profesional secara menyeluruh dan konsisten yang meliputi proses penerimaan pegawai, pelaksanaan mutasi, pengembangan dan promosi dengan berdasarkan pada sistem penilaian dengan kriteria yang jelas, obyektif dan transparan.
 2. Menyelaraskan program pendidikan dan pengembangan SDM agar sejalan dengan rencana pengembangan bisnis ke depan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi antara lain pengiriman staf untuk mengikuti sidang-sidang/*working grup* IMO, IACS, ACS, PSC, pengefektifan pemanfaatan BKI Academy, serta *benchmarking* prosedur *training surveyor* dan *technical staff* pada badan klasifikasi asing anggota IACS dalam rangka pemenuhan persyaratan QSCS-IACS.
 3. Mengupayakan peningkatan produktifitas karyawan melalui pemberian *reward & punishment* yang berbasis kinerja (*merit system*).
 4. Melakukan peningkatan SDM dan peningkatan mutu BKI Academy melalui program-program pengembangan kapabilitas dan kompetensi guna mendorong pengembangan PT BKI yang jauh lebih besar.

The Board of Directors is requested to strengthen the competence and capacity of human resources so as to maintain the company's competitive advantage in the future that can compete with international classification bodies and other technical service companies, through:

1. Implement a comprehensive and consistent professional HR management program which includes the recruitment process, transfer, development and promotion based on an assessment system with clear, objective and transparent criteria.
2. Aligning education and HR development programs so that they are in line with future business development plans and adapted to organizational needs, including sending staff to attend IMO, IACS, ACS, PSC working group sessions, making effective use of BKI Academy, as well as benchmarking training procedures surveyors and technical staff at foreign classification bodies that are members of the IACS in order to fulfill the requirements of the QSCS-IACS.
3. Strive to increase employee productivity through the provision of performance-based rewards & punishments (*merit system*).
4. Improve human resources and improve the quality of BKI Academy through capability and competency development programs to encourage the development of a much larger PT BKI.

RKAP, RKA PKBL, RKA Board of Commissioners, have been used as guidelines by BOD, BOC and in their implementation are monitored/monitored and evaluated every month, Evaluation Results will be submitted and discussed in BOC and BOD monthly meetings where Corporate KPIs have been cascading & deployment both in units as well as individuals.

Arahan Dekom telah dan sedang dilaksanakan melalui Transformasi *Human Capital* di bidang *People* (Manusia) dan Organisasi. Transformasi ini dimulai dari tahun 2019.

The direction of the Board of Commissioners has been and is being implemented through Human Capital Transformation in the field of People and Organizations. This transformation started in 2019.

4. Mengingat masih tingginya nilai piutang, kepada Direksi diminta untuk :
- Memerintahkan kepada cabang-cabang PT BKI untuk melakukan penagihan secara intensif dengan biaya yang seefisien mungkin.
 - Dalam rangka menghindari risiko terjadinya piutang macet pada mitra kerja perusahaan pada masa yang akan datang, maka kepada Direksi dan jajarannya baik pusat dan daerah diminta untuk berhati-hati (*prudent*) dalam pemilihan mitra kerja dan disertai dengan analisa risiko serta kajian hukum atas dokumen kontrak.

Given the high value of receivables, the Board of Directors is requested to:

- Ordered PT BKI branches to carry out intensive billing at the most efficient cost possible.
- In order to avoid the risk of bad debts happening to the company's partners in the future, the Directors and their staff, both central and regional, are asked to be prudent in the selection of work partners and be accompanied by risk analysis and legal studies of contract documents.

5. Terhadap kinerja segmen komersil yang belum optimal, Direksi diminta untuk melakukan :
- Mengevaluasi dan mengupayakan peningkatan kinerja baik dari aspek operasional maupun aspek keuangan di setiap lini proses, serta memperbaiki sistem bisnis dan mencari informasi tentang kesalahan pada sistem bisnis yang menyebabkan belum optimalnya kinerja segmen komersil tersebut. Sistem bisnis ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada didalamnya. Untuk itu perlu dilakukan tinjauan terhadap SDM yang ada pada saat ini. Apabila dari hasil tinjauan menunjukkan kinerja SDM yang tidak optimal, maka perlu dilakukan tindakan sehingga target yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik.
 - Melakukan upaya-upaya penetrasi pasar dan kualitas layanan yang baik, diharapkan kinerjanya dapat tumbuh dengan lebih cepat daripada bidang klasifikasi melalui intensifikasi pekerjaan turunan klas dan perluasan penguasaan pasar.

Regarding the suboptimal performance of the commercial segment, the Board of Directors is asked to:

- Evaluate and seek to improve performance from both operational and financial aspects in each process line, as well as improve business systems and seek information about errors in business systems that cause the commercial segment's performance to be suboptimal. This business system is related to the human resources in it. For this reason, it is necessary to review the existing human resources at this time. If the results of the review show that the performance of human resources is not optimal, it is necessary to take action so that the targets set can be realized properly.
- Undertake efforts to penetrate the market and good service quality, it is hoped that its performance can grow faster than the classification sector through the intensification of class-derived jobs and expansion of market domination.

Arahan telah dilaksanakan dimana Manajemen telah menerbitkan surat No. A.0285/KU.301/KI-20 tanggal 23 Januari 2020 ditujukan kepada seluruh Unit Produksi agar melakukan percepatan penagihan piutang yang telah jatuh tempo, Direksi telah membentuk satuan tugas berupa Tim Penagihan/ Pencairan Piutang termasuk piutang yang telah berumur lebih dari 1 (satu) tahun, terhadap *outstanding* piutang BUMN Direksi PT BKI telah mengadakan pertemuan/rapat dengan Direksi BUMN yang terkait untuk percepatan pembayaran piutang.

The directive has been implemented where the Management has issued letter No. A.0285/KU.301/KI-20 dated January 23, 2020 is addressed to all Production Units in order to accelerate the collection of receivables that are due, the Board of Directors has formed a task force in the form of a Receivable Collection Team including receivables that are more than 1 (one) old year, for the outstanding receivables of SOEs, the Board of Directors of PT BKI held a meeting with the relevant SOE Directors to accelerate the payment of receivables.

- Pengukuran optimalisasi SDM dilakukan dengan menghitung produktivitas dan mengukur Analisa Beban Kerja. Sejumlah pegawai yang tidak optimal diminta untuk tidak diperpanjang. Selain itu untuk meningkatkan kinerja SDM, manajemen juga mengupayakan peningkatan produktifitas melalui pemberian *reward & punishment* yang berbasis kinerja (*merit system*) serta melalui program-program pengembangan kapabilitas dan kompetensi guna mendorong pengembangan PT BKI yang jauh lebih besar.
- Untuk meningkatkan penetrasi pasar dilakukan dengan penambahan portofolio bisnis dan pemberian kualitas layanan yang optimal/memadai kepada pelanggan.

- Measurement of HR optimization is done by calculating productivity and measuring Workload Analysis. A number of employees who are not optimal were asked not to be extended. In addition to improving HR performance, management also seeks to increase productivity through the provision of performance-based rewards & punishments (*merit system*) as well as through capability and competency development programs to encourage the development of PT BKI which is much greater.
- To increase market penetration, it is carried out by adding to the business portfolio and providing optimal/adequate service quality to customers.

<p>6. Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk lebih memaksimalkan sinergi baik dengan K/L Pemerintah, BUMN lain maupun pihak swasta yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Direksi telah memaksimalkan sinergi baik dengan K/L Pemerintah, BUMN lain maupun pihak Swasta yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemhan dan TNI AL untuk kerjasama standar kapal perang dan Klasifikasinya. - Kemenhub untuk pelimpahan otorisasi kapal Sungai, Danau, dan Penyeberangan. - Pertamina dan anak usahanya Pertamina Trans Kontinental (PTK) dan Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI).
<p>The Board of Commissioners to encourage the Board of Directors to maximize synergies both with government ministries/agencies, other SOEs and private parties which have a direct impact on improving company performance and its implementation in accordance with applicable regulations.</p>	<p>The Board of Directors has maximized synergies both with government ministries/agencies, other SOEs and private parties that have a direct impact on improving company performance and its implementation in accordance with applicable regulations, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemhan and TNI AL for standard cooperation of warships and The classification. - Ministry of Transportation for delegation of river, lake and ferry vessel authorization. - Pertamina and its subsidiaries Pertamina Trans Kontinental (PTK) and Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI).
<p>7. Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk lebih pro aktif dalam bekerja sama dengan INSA (<i>Indonesian National Shipowners Association</i>) dalam hal klasifikasi kapal-kapal pelaku usaha yang berada di bawah naungan INSA termasuk pengembangan SDMnya melalui BKI Academy.</p>	<p>Direksi telah pro aktif dalam bekerja sama dengan INSA dalam hal klasifikasi kapal-kapal pelaku usaha yang berada di bawah naungan INSA termasuk pengembangan SDM melalui BKI Academy. Direksi juga menjalin hubungan baik dengan INSA, antara lain dengan menghadiri Rapat Umum Anggota INSA, BKI juga aktif berkomunikasi dengan asosiasi pemilik kapal di luar INSA yaitu Gapasdap (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan).</p>
<p>The Board of Commissioners to encourage the Board of Directors to be more pro-active in collaborating with INSA (Indonesian National Shipowners Association) in terms of classifying business vessels under the auspices of INSA, including developing their human resources through the BKI Academy.</p>	<p>The Board of Directors has been pro-active in collaborating with INSA in terms of classifying business vessels under the auspices of INSA, including human resource development through the BKI Academy. The Board of Directors also maintains good relations with INSA, among others by attending the General Meeting of INSA Members, BKI also actively communicates with shipowner associations outside INSA, namely Gapasdap (Association of River Lake and Crossing Transportation Entrepreneurs).</p>
<p>8. Terkait investasi perusahaan, perlu didukung dengan kajian investasi dan aspek risiko secara mendalam yang diselaraskan dengan rencana penguatan daya saing dan pengembangan bisnis perusahaan yang secara langsung meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam menyusun investasi, agar lebih matang (<i>achievable</i>) sehingga implementasinya akan lebih baik, dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Direksi diminta memberikan perhatian secara penuh serta mengantisipasi risiko-risiko yang berpotensi timbul dalam proses investasi.</p>	<p>Setiap proses usulan realisasi investasi oleh unit produksi kepada Direksi, dilampiri TOR, kajian investasi dan mitigasi risiko, untuk memastikan bahwa usulan investasi tersebut memiliki kesesuaian untuk pengadaannya dan dapat meningkatkan bisnis perusahaan.</p>
<p>The company's investment needs to be supported by an in-depth study of investment and risk aspects that are aligned with the plan to strengthen the company's competitiveness and business development which will directly improve the company's performance. In preparing investments, so that they are more mature (<i>achievable</i>) so that their implementation will be better, and on time according to a predetermined schedule. Therefore, the Board of Directors is requested to give full attention and anticipate risks that may arise in the investment process.</p>	<p>Each process of investment realization proposal by the production unit to the Board of Directors, is accompanied by a TOR, investment review and risk mitigation, to ensure that the investment proposal is appropriate for the procurement and can improve the company's business.</p>

<p>9. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku, serta kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi pengembangan usaha kecil dan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan.</p>	<p>PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dalam hal melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sudah mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN dan upaya dalam bidang PKBL khususnya Program Kemitraan bagi usaha kecil yang masih tertunda akan segera dilaksanakan survei lokasi serta <i>monitoring</i> pada sasaran yang tepat, sehingga penyaluran dana (anggaran) RKAP 2020 terpenuhi. Sehubungan dengan arahan Direksi untuk mendukung BL/CSR diupayakan penyaluran dana ke beberapa sektor bidang lainnya seperti pendidikan, prasarana umum, bencana alam, bidang litbang, dll sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan tercapai.</p>
<p>Implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL) to be guided by applicable regulations, and the activities carried out are expected to provide optimal benefits for the development of small businesses and have an impact on the welfare of the community so as to increase the reputation and value of the company.</p>	<p>In terms of implementing the Partnership and Community Development Program (PKBL), BKI has followed the rules issued by the Ministry of SOEs and efforts in the field of PKBL, especially the Partnership Program for small businesses which are still pending, will soon carry out site surveys and monitoring on targeted targets. appropriate, so that the distribution of funds (budget) of the 2020 RKAP is fulfilled. In connection with the direction of the Board of Directors to support BL/CSR, efforts are made to channel funds to several other sectors such as education, public infrastructure, natural disasters, R&D, etc. so that the company's goals are achieved.</p>
<p>10. Direksi diminta untuk menerapkan manajemen risiko terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Untuk itu perlu melakukan identifikasi terhadap risiko yang mungkin terjadi pada seluruh aktivitas kegiatan usaha. Dengan demikian perusahaan dapat melakukan mitigasi risiko secara proporsional terhadap kegiatan strategis sehingga ketidakpastian/risiko dapat dihindari untuk mencapai tujuan atau target perusahaan secara efektif dan efisien.</p>	<p>Manajemen telah melakukan upaya-upaya untuk pelaksanaan atas penerapan manajemen risiko yang efektif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan sosialisasi, panduan dan konsultasi dalam pelaksanaan Identifikasi Risiko. Konsultasi telah dilaksanakan baik dalam bentuk tatap muka maupun via digital teknologi terutama dalam kondisi pandemi Covid-19. Penetapan <i>Risk Owner Representatif</i> (ROR) sebagai perwakilan Manajemen Risiko di tiap-tiap unit kerja/produksi dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam penerapan Manajemen Risiko. Tugas dan fungsi ROR telah di tetapkan melalui SK. No. DU.098/KP.203/KI-20 tanggal 04 Juni 2020. Menyampaikan <i>reminder Feedback</i> Identifikasi Risiko kepada seluruh unit kerja/produksi sebagai komitmen dalam pemenuhan manajemen risiko. Dalam rangka meningkatkan wawasan dan mengikuti perkembangan manajemen risiko khususnya di lingkungan BUMN. Sejalan dengan komitmen BKI dalam pemenuhan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), manajemen secara pro-aktif melakukan peningkatan wawasan mengenai Risiko Suap sebagai upaya pemenuhan persyaratan SMAP.

The Board of Directors is asked to apply risk management to the policies to be taken. For this reason, it is necessary to identify the risks that may occur in all business activities. Thus the company can mitigate risk proportionally to strategic activities so that uncertainty/risk can be avoided to achieve the company's goals or targets effectively and efficiently.

The Management has made efforts to implement effective risk management implementation, namely:

- Provide socialization, guidance and consultation in the implementation of Risk Identification. Consultations have been carried out both in the form of face-to-face and via digital technology, especially in the conditions of the Covid-19 pandemic.
- Determination of a Risk Owner Representative (ROR) as a representative of Risk Management in each work/production unit in order to improve coordination in the implementation of Risk Management. The duties and functions of the ROR have been determined by decree. No. DU.098/KP.203/KI-20 dated June 04, 2020.
- Delivering reminders of Risk Identification Feedback to all work/production units as a commitment to fulfill risk management.
- In order to increase insight and follow the development of risk management, especially in the BUMN environment.
- In line with BKI's commitment to complying with ISO 37001 Anti-Bribery Management System (SMAP), management has proactively increased knowledge of Bribery Risk as an effort to fulfill SMAP requirements.

11. Manajemen dan jajarannya diharapkan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan RKAP 2020 secara konsisten dengan berdasar prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam *Good Corporate Governance* maupun peraturan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

The management and staff are expected to carry out the programs that have been set in the 2020 RKAP consistently based on the principles set out in Good Corporate Governance as well as other applicable rules and regulations.

Arahan diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai Dampak Pandemi Covid-19 beberapa program kerja ditunda pelaksanaannya, namun demikian tetap beberapa program kerja yang tetap bisa dilaksanakan seperti audit internal maupun audit eksternal, dan pertemuan rapat koordinasi tetap dilaksanakan menggunakan media *Video Converance*.

The directives are heeded and followed up, as the impact of the Covid-19 pandemic, several work programs have been postponed, however, there are several work programs that can still be carried out, such as internal audits and external audits, and coordination meetings are still being held using video conference media.

- II. Tindak lanjut saran dan arahan Dewan Komisaris terhadap RUPS Laporan Keuangan Tahun 2019.
Follow-up on the advice and direction of the Board of Commissioners on the 2019 Annual General Meeting of Shareholders. Financial Statements.

1. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas hasil capaian Direksi dalam usaha pencapaian kinerja perusahaan Tahun 2019 yang tercermin dengan pencapaian laba sebesar Rp170,969 miliar dan meminta Direksi agar tetap mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di Tahun-Tahun yang akan datang.

The Board of Commissioners appreciates the achievements of the Board of Directors in achieving the company's performance in 2019 which is reflected in the achievement of a profit of Rp170.969 billion and asks the Board of Directors to continue to maintain and improve performance achievements in the years to come.

Direksi berupaya dengan optimal untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

The Board of Directors strives optimally to maintain and improve performance achievements in the years to come.

2. Direksi diminta agar memperkuat kompetensi dan kapasitas SDM sehingga dapat menjaga keunggulan kompetitif perusahaan ke depan yang dapat bersaing dengan badan klasifikasi internasional maupun perusahaan jasa teknik lainnya, melalui:
1. Melaksanakan program pengelolaan SDM secara profesional secara menyeluruh dan konsisten yang meliputi proses penerimaan pegawai, pelaksanaan mutasi, pengembangan dan promosi dengan berdasarkan pada sistem penilaian dengan kriteria yang jelas, obyektif dan transparan.
 2. Mengupayakan peningkatan produktifitas karyawan melalui pemberian *reward & punishment* yang berbasis kinerja (*merit system*).
 3. Melakukan peningkatan SDM dan peningkatan mutu BKI Academy melalui program-program pengembangan kapabilitas dan kompetensi guna mendorong pengembangan PT BKI yang jauh lebih besar.

The Board of Directors is requested to strengthen the competence and capacity of human resources so as to maintain the company's competitive advantage in the future that can compete with international classification bodies and other technical service companies, through:

1. Implement HR management programs in a comprehensive and consistent manner which includes the process of recruitment, transfer, development and promotion based on an assessment system with clear, objective and transparent criteria.
2. Strive to increase employee productivity through the provision of performance-based rewards & punishments (*merit system*).
3. Improve human resources and improve the quality of BKI Academy through capability and competency development programs to encourage the development of a much larger PT BKI.

1. Saat ini sedang dilakukan migrasi sistem pengelolaan SDM berbasis *Grading* yang sedang dikerjakan oleh konsultan *People Prime* dimana didalamnya juga akan mendesain aturan pola karir dan *talent management* yang baru.
2. Dalam desain Struktur Remunerasi yang baru yang merupakan bagian dari migrasi ke sistem *Grading* akan memperhatikan *reward & punishment* terhadap kinerja.
3. Secara periodik peningkatan SDM internal BKI tetap dilaksanakan peningkatan mutu meskipun dalam situasi pandemi dengan *training/pelatihan online* sesuai kebutuhan baik untuk operasi maupun *support*.

1. Currently, a Grading-based HR management system migration is being carried out by the People Prime consultant, which will also design new career patterns and talent management rules.
2. In the design of the new Remuneration Structure which is part of the migration to the Grading system, it will pay attention to rewards & punishments on performance.
3. Periodically improving BKI's internal human resources, quality improvement is still carried out even in a pandemic situation with online training / training as needed for both operations and support.

3. Mengingat sifat perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan berbasis SDM, PT BKI perlu secara konsisten melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui Diklat, mengikuti sidang-sidang/working group IMO, IACS, ACS, PSC, dan benchmarking prosedur *training surveyor* dan *technical staff* pada badan klasifikasi asing anggota IACS dalam rangka pemenuhan persyaratan QSCS-IACS, sehingga dapat meningkatkan *skill* dan kemampuan karyawan, baik yang terkait langsung dengan bidang operasional (*core business*) perusahaan maupun pendukung 138 (*supporting*). Pengembangan SDM tersebut harus dapat merespon perubahan lingkungan bisnis dan kemajuan teknologi, sehingga dapat bersaing dengan badan klasifikasi internasional maupun perusahaan jasa teknik lainnya.

Considering the nature of the company that is engaged in services and based on human resources, PT BKI needs to consistently improve HR competencies through training, attending IMO, IACS, ACS, PSC working group sessions, and benchmarking procedures for training surveyors and technical staff at the agency. foreign classification of IACS members in order to fulfill the requirements of the QSCS-IACS, so as to improve the skills and abilities of employees, both those directly related to the company's core business and supporting sectors. HR development must be able to respond to changes in the business environment and technological advances, so that they can compete with international classification bodies and other technical service companies.

4. Terhadap kinerja segmen komersil yang belum optimal, Direksi diminta untuk melakukan :
1. Mengevaluasi dan mengupayakan peningkatan kinerja baik dari aspek operasional maupun aspek keuangan di setiap lini proses, serta memperbaiki sistem bisnis dan mencari informasi tentang kesalahan pada sistem bisnis yang menyebabkan belum optimalnya kinerja segmen komersil tersebut. Sistem bisnis ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Untuk itu perlu dilakukan tinjauan terhadap SDM yang ada pada saat ini. Apabila dari hasil tinjauan menunjukkan kinerja SDM yang tidak optimal, maka perlu dilakukan tindakan sehingga target yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik.
 2. Melakukan upaya-upaya penetrasi pasar dan kualitas layanan yang baik,diharapkan kinerjanya dapat tumbuh dengan lebih cepat daripada bidang klasifikasi melalui intensifikasi pekerjaan turunan klas dan perluasan pengusaan pasar.

Regarding the suboptimal performance of the commercial segment, the Board of Directors is asked to:

1. Evaluate and seek to improve performance from both operational and financial aspects in each process line, as well as improve business systems and seek information about errors in business systems that cause the commercial segment's performance to be suboptimal. This business system is related to the human resources in it. For this reason, it is necessary to review the existing human resources at this time. If the results of the review show that the performance of human resources is not optimal, it is necessary to take action so that the targets set can be realized properly.
2. Undertake efforts to penetrate the market and good service quality, it is hoped that its performance can grow faster than the classification sector through the intensification of class-derived jobs and expansion of market domination.

Pelatihan mengacu kepada standar IACS PR 7 dan IMO *Model Course* dilakukan diantaranya:

- a. *Training enhanced survey program* (ESP) yang dilaksanakan terhadap 24 surveyor.
- b. *Refreshment training* terhadap MMSA auditor dilaksanakan untuk auditor guna mendapat kualifikasi auditor ISM dan ISPS *Code*.
- c. *Training ship welding inspector* terhadap 22 surveyor dari unit produksi serta dari BKI Pusat.

The training refers to the IACS PR 7 standard and the IMO Model Course, including:

- a. Training enhanced survey program (ESP) conducted for 24 surveyors.
- b. Refreshment training for MMSA auditors is carried out for auditors to obtain ISM and ISPS Code auditor qualifications.
- c. Training ship welding inspector for 22 surveyors from the production unit and from the Central BKI.

Pengukuran optimalisasi SDM dilakukan dengan menghitung produktivitas dan mengukur Analisa Beban Kerja. Sejumlah pegawai yang tidak optimal diminta untuk tidak diperpanjang. Untuk meningkatkan kinerja SDM, manajemen juga mengupayakan peningkatan produktifitas melalui pemberian *reward & punishment* yang berbasis kinerja (*merit system*) serta melalui program-program pengembangan kapabilitas dan kompetensi guna mendorong pengembangan PT BKI yang jauh lebih besar.

Untuk meningkatkan penetrasi pasar dilakukan dengan penambahan portofolio bisnis dan pemberian kualitas layanan yang optimal/memadai kepada pelanggan.

Measurement of HR optimization is done by calculating productivity and measuring Workload Analysis. A number of employees who are not optimal were asked not to be extended. To improve HR performance, management also seeks to increase productivity through the provision of performance-based rewards & punishments (merit system) as well as through capability and competency development programs to encourage the development of PT BKI which is much greater.

To increase market penetration, the Company expands its business portfolio and provides optimal/adequate service quality to customers.

5. Dari aspek piutang, total piutang sampai dengan Desember 2019 sejumlah Rp308,069 miliar, terdapat potensi piutang bermasalah yaitu piutang tahun 2018 ke bawah mencapai 15,56% atau Rp47,934 miliar. Di samping itu, kemampuan menagih piutang juga rendah yang ditunjukkan oleh rasio *collecting period*. Realisasi rasio *collecting period* pada Desember 2019 dicapai 124 hari atau 44 hari lebih tinggi dari target RKAP Tahun 2019 yang ditetapkan 80 hari.

Terhadap hal tersebut Direksi diminta untuk:

1. Memperbaiki percepatan pencairan piutang.
2. Membentuk tim *ad hoc* dari unit yang terkait untuk memverifikasi saldo piutang yang ada saat ini.
3. Khusus terhadap piutang pada BUMN perlu dilakukan pertemuan khusus antara Direksi PT BKI dengan Direksi BUMN yang bersangkutan agar segera membayarnya.
4. Melakukan pengendalian internal yang memadai terhadap proses penerbitan *invoice* sehingga *invoice* yang terbit lebih berkualitas dan dapat ditagih dengan baik.
5. Memperbaiki SOP yang ada sehingga lebih memperjelas mekanisme penagihan yang dilakukan terutama oleh kantor cabang.
6. Merevisi kebijakan penetapan umur piutang dan harus disesuaikan dengan PSAK untuk memperoleh nilai piutang yang riil.

Regarding the aspect of receivables, the total receivables as of December 2019 were Rp308.069 billion, there is a potential for non-performing receivables, namely receivables in 2018 and below reaching 15.56% or Rp47.934 billion. In addition, the ability to collect receivables is also low as indicated by the collecting period ratio. The realization of the collecting period ratio in December 2019 was 124 days or 44 days higher than the 2019 RKAP target which was set at 80 days.

In this regard, the Board of Directors is requested to:

1. Improving the acceleration of receivable disbursement.
 2. Forming an ad hoc team from related units to verify the current balance of receivables.
 3. Specifically for receivables from SOEs, it is necessary to hold a special meeting between the Directors of PT BKI and the Directors of the SOEs concerned to pay them immediately.
 4. Carry out adequate internal control over the invoice issuance process so that the invoices issued are of higher quality and can be billed properly.
 5. Improve existing SOPs so as to further clarify the billing mechanism carried out mainly by branch offices.
 6. Revise the policy for determining the age of receivables and must be adjusted to PSAK to obtain the real value of receivables.
6. Secara umum kemampuan aktivitas perusahaan juga terlihat belum optimal selama tahun 2019. Dari sisi aset lancar perusahaan, sebagian besar adalah piutang usaha. Kemampuan *me-manage* piutang dan *current asset* secara keseluruhan untuk menghasilkan pendapatan juga dirasa belum optimal. Direksi diminta untuk mampu meningkatkan aktivitas dalam menciptakan pendapatan terutama kemampuan merealisasikan piutang menjadi kas.

Arahan telah dilaksanakan dimana Manajemen telah menerbitkan surat No. A.0285/KU.301/KI-20 tanggal 23 Januari 2020 ditujukan kepada seluruh Unit Produksi agar melakukan percepatan penagihan piutang yang telah jatuh tempo, Direksi telah membentuk tim validasi piutang dimana salah satu tugas tim adalah melakukan verifikasi dan didukung oleh Keputusan Direksi berdasarkan SK No. DU.101/HK.503/KI-20 tanggal 12 Juni 2020 piutang yang telah berumur lebih dari 1 (satu) tahun, melakukan upaya percepatan penagihan melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan telah dilakukan pertemuan dengan pihak ketiga untuk pembentukan kerjasama penyelesaian piutang.

The directive has been implemented where the Management has issued letter No. A.0285/KU.301/KI-20 dated January 23, 2020 is addressed to all Production Units in order to accelerate the collection of receivables that have matured, the Board of Directors has formed a receivable validation team where one of the team's tasks is to verify and be supported by the Directors' Decision based Decree No. DU.101/HK.503/KI-20 dated June 12, 2020 receivables that are more than 1 (one) year old, made efforts to accelerate collection through collaboration with the North Jakarta District Attorney, and a meeting was held with third parties to establish a settlement cooperation accounts receivable.

Saran diperhatikan dan telah ditindaklanjuti, antara lain telah dibentuknya Tim Piutang dan peningkatan *reminder & monitoring* piutang ke *Customer* dan akan dibangun sistem *e-collection*.

	<p>In general, the company's activity capability also looks not optimal during 2019. In terms of the company's current assets, most of it is trade receivables. The ability to manage receivables and current assets as a whole to generate income is also not optimal. The Board of Directors is asked to be able to increase activities in creating income, especially the ability to realize receivables into cash.</p>	<p>Suggestions have been duly considered and have been followed up, including the establishment of an Accounts Receivable Team and an increase in reminders & monitoring of receivables to customers and an e-collection system will be built.</p>
7.	<p>Dibandingkan dengan RKAP, penggunaan dana investasi (<i>capex</i>) baru mencapai 26,12% dari RKAP Tahun 2019, sehingga penyerapannya belum optimal. Maka dari itu Direksi diminta untuk tahun yang akan datang agar meningkatkan kinerja penyerapan investasi dengan segera merealisasikan program-program yang telah dianggarkan sesuai dengan skala prioritas. Pelaksanaan investasi tersebut agar didukung dengan perencanaan dan persiapan yang lebih matang, sehingga risiko kegagalan dapat dihindari.</p> <p>Compared to the RKAP, the use of investment funds (<i>capex</i>) has only reached 26.12% of the 2019 RKAP, so the absorption has not been optimal. Therefore, the Board of Directors is requested for the coming year to improve investment absorption performance by immediately realizing the programs that have been budgeted according to the priority scale. The implementation of these investments should be supported by more mature planning and preparation, so that the risk of failure can be avoided.</p>	<p>Arahan diperhatikan dimana Setiap proses usulan realisasi investasi oleh unit produksi kepada Direksi, dilampirkan TOR, kajian investasi dan mitigasi risiko, untuk memastikan bahwa usulan investasi tersebut kesesuaian untuk pengadaannya dan dapat meningkatkan bisnis perusahaan.</p> <p>Directions have been heeded in which each process of investment realization proposal by the production unit to the Board of Directors is attached to a TOR, investment review and risk mitigation, to ensure that the investment proposal is appropriate for the procurement and can improve the company's business.</p>
8.	<p>Direksi bersama-sama dengan Direksi PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia, diminta untuk segera menyelesaikan pembentukan <i>Holding Jasa Survei</i> dengan melakukan kajian terkait ada tidaknya <i>overlap</i> (tumpang tindih) pada kegiatan usaha dari BUMN Jasa Survei saat ini yang menyangkut hal-hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk contohnya Bisnis "TIC"; 2. Nasabah/<i>Customer</i>; 3. Proses Bisnis mana yang lebih efisien dan efektif; 4. Lokasi; 5. Keberadaan kantor cabang; <p>The Board of Directors together with the Directors of PT Sucofindo and PT Surveyor Indonesia, requested to immediately complete the establishment of the Survey Services Holding by conducting studies related to whether there is overlap in activities the current survey services SOEs concerning the following matters:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Products for example "TIC" business; 2. Customers/Customers; 3. Which Business Process is more efficient and effective; 4. Location; 5. Existence of branch offices; 	<p>Sudah dilaksanakan beberapa kali pertemuan dengan Direksi PT Sucofindo dan Direksi PT Surveyor Indonesia dalam membahas ada tidaknya <i>overlap</i> (tumpang tindih) bisnis masing-masing BUMN Jasa Survei.</p> <p>Several meetings have been held with the Board of Directors of PT Sucofindo and the Board of Directors of PT Surveyor Indonesia to discuss whether there is overlap in the business of each of the Survey Services SOEs.</p>

9. Untuk menciptakan perusahaan TIC berdaya saing tinggi dengan kinerja dan reputasi yang sekelas dengan perusahaan TIC besar dunia, akan dilakukan restrukturisasi pada BUMN sektor jasa survei dengan membentuk *Holding* BUMN Jasa Survei. Tujuan pembentukan *Holding* tersebut diharapkan untuk :
1. Peningkatan posisi keuangan dan pangsa pasar.
 2. Sinergi bisnis dan operasi dengan *Shared Services*.
 3. Memberikan jasa yang lebih komprehensif dan berdaya saing kuat.
 4. Akselerasi bisnis terkait dengan pertumbuhan anorganik.
 5. Memperkuat peran pemerintah terkait dengan stabilitas nasional dalam hal *safety, security and quality*.
- To create a highly competitive TIC company with performance and reputation in the same class as the world's big TIC companies, a restructuring of the survey service sector BUMN will be carried out by forming a Survey Services BUMN Holding. The purpose of the establishment of the Holding is expected to:
1. Improved financial position and market share.
 2. Synergy of business and operations with Shared Services.
 3. Providing services that are more comprehensive and highly competitive.
 4. Business acceleration is related to inorganic growth.
 5. Strengthening the role of the government in relation to national stability in terms of safety, security and quality.
10. Direksi dan Jajarannya diminta untuk terus mencari peluang pasar yang ada sangat ini seperti pada sektor Perkapalan, Sektor Kemaritiman, dan Sektor Pelabuhan, untuk itu Direksi diminat untuk proaktif melakukan komunikasi atau pendekatan pada Kementerian/Lembaga terkait agar kapal-kapal milik negara yang ada di Kementerian/Lembaga tersebut dapat diklasifikasikan pada PT BKI (Persero). Di samping itu, mengingat masih besarnya potensi pasar pada segmen Komersil Direksi dan jajarannya juga dimintakan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor usaha Komersil melalui kerjasama dengan Pemerintah, BUMN maupun Swasta.
- Direksi berikut Kadiv. Pemasaran & Hubungan Pelanggan dan Kadiv. Direktorat Operasi telah melaksanakan pendekatan atau komunikasi atau membuat MoU kepada berbagai Instansi Kementerian, Pemerintah, BUMN, Lembaga atau pihak Swasta terkait dengan jasa yang dapat diberikan oleh PT BKI dan pihak galangan (IPERINDO) yang rencana akan membangun kapal baru atau mengkelaskan kapalnya ke BKI, antara lain : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Basarnas, PT Pertamina Trans Kontinental, PT Pertamina Drilling Services Indonesia, PT Pertamina Shipping, OT Musi Mas, Direktorat Navigasi Ditjen Hubla, & PT Rukindo. Namun dalam kondisi Pandemi Covid-19 Manajemen mengalami kendala untuk melakukan pertemuan akan tetapi Manajemen tetap melakukan komunikasi dengan berbagai *stakeholder* baik Kementerian, Pemerintah, BUMN dan Lembaga atau pihak Swasta dengan melakukan komunikasi *virtual*.
- The Board of Directors and its staff are asked to continue to look for market opportunities that exist, such as in the Shipping sector, Maritime Sector, and Port Sector, for that the Board of Directors is interested in proactively communicating or approaching related Ministries/ Institutions so that state-owned ships in These ministries/agencies can be classified under PT BKI (Persero). In addition, given the large market potential in the Commercial segment, the Board of Directors and staff are also requested to increase revenue from the Commercial business sector through collaboration with the Government, BUMN and Private.
- The Board of Directors and Head of Division of Marketing & Customer Relations and Head of Division of Directorate of Operations has implemented approaches or communications or made MoUs to various Ministry Agencies, Governments, BUMN, Institutions or private parties related to services that can be provided by PT BKI and shipyard parties (IPERINDO) who plan to build new ships or their class ships to BKI, among others: Directorate General of Land Transportation, Basarnas, PT Pertamina Trans Kontinental, PT Pertamina Drilling Services Indonesia, PT Pertamina Shipping, OT Musi Mas, Directorate of Navigation, Directorate General of Hubla, & PT Rukindo. However, in the conditions of the Covid-19 Pandemic, Management had problems holding meetings, but Management continued to communicate with various stakeholders, both Ministries, Government, BUMN and Institutions or private parties by conducting virtual communications.

11.	Dalam melaksanakan kegiatan usaha kepada Direksi beserta Jajarannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan pendapatan harus lebih tinggi atau sama dengan pertumbuhan biaya; 2. Arus Kas Operasional harus positif; 3. EBITDA harus positif dan tumbuh; 4. Ratio Hutang terhadap EBITDA sama dengan 3 kali. <p>In carrying out business activities, the Board of Directors and their staff need to pay attention to the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revenue growth must be higher than or equal to cost growth; 2. Operating Cash Flow must be positive; 3. EBITDA must be positive and growing; 4. Debt to EBITDA ratio is equal to 3 times. 	Arahan diperhatikan dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara periodik, baik secara internal maupun dengan Kementerian BUMN.
12.	Peningkatan peran SPI sebagai mitra kerja Direksi melalui pemberian peran yang lebih besar perlu didukung dengan SDM yang cukup dan kompeten, dengan demikian kegiatan pengawasan di PT BKI dapat berjalan dengan lebih efektif.	Kompetensi untuk auditor SPI terus ditingkatkan dari mulai Auditor Muda s.d. Auditor Senior sesuai usulan yang diberikan SPI.
13.	Increasing the role of SPI as a working partner of the Board of Directors through the provision of a larger role needs to be supported by sufficient and competent human resources, so that supervisory activities at PT BKI can run more effectively.	The competence of SPI auditors continues to be improved from Junior Auditors to Junior Auditors. Senior Auditor according to the proposal given by SPI.
14.	Dalam rangka pelaksanaan <i>performance audit</i> oleh BPK/ auditor independen, maka fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) agar dioptimalkan di setiap lini organisasi sehingga potensi penyimpangan sejauh mungkin dapat dihindari.	SPI telah menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan dengan pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja secara berkala dan pelaksanaan PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) maupun pemeriksaan khusus. Penyelesaian temuan PKPT 83% yang telah selesai dan lengkap dari semua obyek audit unit produksi dan divisi. Tanggapan dan pelaksanaan tindak lanjut atas temuan PKPT dijadikan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) unit produksi dan divisi.
15.	Regarding the performance audit carried out by BPK/independent auditors, the Internal Audit Unit (SPI) should be optimized in every line of the organization so that potential deviations can be avoided as far as possible.	SPI has carried out the function of control and supervision by examining financial and performance reports on a regular basis and implementing PKPT (Annual Audit Work Program) as well as special inspections. Completion of 83% PKPT findings that have been completed and complete from all audit objects of production units and divisions. Responses and follow-up implementation of PKPT findings are used as Key Performance Indicators (KPI) for production units and divisions.
14.	Direksi diminta untuk menindaklanjuti catatan/temuan dan saran auditor yang tertuang dalam <i>management letter</i> dan menyelesaikan secara tuntas sehingga catatan/temuan tersebut tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Proses penyelesaian atas catatan/temuan dan saran auditor tersebut agar disampaikan kepada Pemegang Saham.	Saran diperhatikan dan untuk catatan/temuan Auditor secara bertahap telah ditindaklanjuti.
15.	The Board of Directors is requested to follow up on the notes/ findings and suggestions of the auditors contained in the management letter and complete them completely so that these records/findings do not occur again in the future. The process of completing the notes/findings and suggestions of the auditors to be submitted to the Shareholders.	Suggestions have been taken into account and the Auditor's notes/findings have been gradually followed up.
15.	Direksi diminta untuk melakukan efisiensi dan meningkatkan pengendalian biaya operasional dan non operasional (<i>cost improvement</i>) secara lebih cermat di berbagai bidang sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.	Arahan diperhatikan dan ditindaklanjuti dimana Direksi terus melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara periodik untuk pengendalian biaya dengan acuan RKAP, Kontrak Manajemen dan KPI.
	The Board of Directors is asked to make efficiency and improve operational and non-operational cost control (<i>cost improvement</i>) more carefully in various fields so as to increase the company's profitability.	Directions have been heeded and followed up, the Board of Directors continues to monitor and evaluate on a periodic basis for cost control with reference to the RKAP, Management Contract and KPI.

KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

Komite Audit adalah organ di bawah Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam mewujudkan tanggung jawab pengawasan secara mandiri, baik yang terkait dengan pelaksanaan tugas maupun pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, berdasarkan penugasan tertulis dari Dewan Komisaris.

Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya seorang anggota Komisaris/Dewan Pengawas, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota lainnya yang berasal dari luar Perseroan. Anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan. Komite Audit tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perseroan.

Pedoman Kerja Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yaitu:

- Undang-Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Anggaran Dasar Perusahaan;
- Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/2014;
- Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* 2006.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- Memastikan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tugas eksternal dan internal auditor berjalan efektif;
- Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh internal maupun eksternal auditor;

The Audit Committee is an organ under the Board of Commissioners that works collectively and functions to assist the Board of Commissioners in realizing their responsibilities independently, related to duties and reporting, and be accountable directly to the Board of Commissioners. The Audit Committee can access records or information about employees, funds, assets, and other company resources related to the implementation of their duties, based on written assignments from the Board of Commissioners.

The Audit Committee consists of at least one Commissioner/member of Supervisory Board, and at least 2 (two) other members who come from outside the Company. Audit Committee members must have good integrity and sufficient knowledge and experience in the field of supervision/audit. The Audit Committee has no personal interests/relationships that can cause negative impacts and conflicts of interest on the Company.

Audit Committee Work Guidelines

In carrying out its duties, the Audit Committee is guided by the rules and regulations, namely:

- Law No.40/2007 concerning Limited Liability Companies;
- Law No.19/2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN);
- Company's articles of association;
- SOE Minister of State Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in SOEs that have been amended by SOE Minister of State Regulation No. PER-09/MBU/2014;
- General Guidelines for Good Corporate Governance in Indonesia from the National Committee on Corporate Governance Policy 2006.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

- Ensuring effective implementation of internal control system as well as effective implementation of external and internal auditor duties running;
- Evaluate the implementation of the activities and results of audits carried out by internal and external auditors;



- Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan;
- Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, serta tugas-tugas Komisaris lainnya;
- Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen, dan informasi lainnya;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
- Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan;
- Mengkaji kecukupan Fungsi Internal Audit, termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan;
- Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya;
- Memastikan laporan keuangan serta informasi lainnya yang diberikan oleh Perusahaan kepada pihak terkait dan publik, yang disajikan secara transparan, handal, dapat dipercaya dan tepat waktu;
- Memastikan Perusahaan telah memiliki pengendalian intern memadai yang dapat melindungi kekayaan miliknya;
- Memastikan Perusahaan bekerja secara efektif dan efisien serta mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- Provide recommendations regarding improvement of the management control system and its implementation;
- Ensuring a satisfactory procedure of reviewing information to be released by the Company;
- Identifying matters that require the attention of the Commissioners, as well as other duties of the Commissioner;
- Reviewing information about the Company, as well as the Long-Term Plan, Work Plan and Corporate Budget, management reports, and other information;
- Reviewing the Company's compliance with laws and regulations relating to the Company's activities;
- Reviewing complaints related to the Company;
- Reviewing the adequacy of the Internal Audit Function, including the number of auditors, annual work plans and assignments that have been carried out;
- Reviewing the adequacy of external audits including audit planning and the number of auditors;
- Ensuring financial reports and other information provided by the Company to related parties and the public, are presented transparently, reliably, reliably and on timely manner;
- Ensuring that the Company has adequate internal control to protect its assets;
- Ensuring the company works effectively and efficiently and complies with applicable laws and regulations.

Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit di antaranya melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perseroan serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, laporan manajemen, dan informasi lainnya. Komite Audit juga melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

The Board of Commissioners may provide other assignments to the Audit Committee including reviewing information about the Company and the Long-Term Plan, Work Plan and Budget, management reports and other information. The Audit Committee also reviews the Company's compliance with the laws and regulations relating to the Company's activities.

Struktur Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit pada akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. M. Amperawan | Ketua Komite Audit/Chairman of the Audit Committee |
| 2. Nur Abdillah | Anggota Komite Audit/Member of the Audit Committee |
| 3. Bangun Tiroi Ruhut Hutagalung | Anggota Komite Audit/Member of the Audit Committee |

Audit Committee Structure

The composition of the members of the Audit Committee at the end of 2020 is as follows:

- | |
|--|
| Ketua Komite Audit/Chairman of the Audit Committee |
| Anggota Komite Audit/Member of the Audit Committee |
| Anggota Komite Audit/Member of the Audit Committee |



Profil singkat ketua Komite Audit

Brief profile of the chairman of the Audit Committee

Nama/Name	M. Amperawan
Tanggal Lahir/Date of birth	Tanjung Karang, 31 Mei 1966
Pendidikan/Education	S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana, S2 Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Fisip Universitas Indonesia. Bachelor's Degree in Management from the Faculty of Economics, Krisnadwipayana University, Master's Degree in Administration and Public Policy, Faculty of Social Sciences, University of Indonesia.
Pengalaman/Experience	Menjabat sebagai Kasubag Anggaran Pembangunan Biro Anggaran I Sekretariat Negara RI (2000-2005), Kabag Program dan Anggaran II Biro Perencanaan Sekretariat Menteri Sekretariat Negara RI (2005-2011), Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet RI (2011), Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet RI (2015-2019), Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (2019-sekarang). Served as Head of Development Budget Division Head of Budget Bureau I State Secretariat of the Republic of Indonesia (2000-2005), Head of Program and Budget Division II of Planning Bureau of State Secretariat of the Minister of State Secretariat of the Republic of Indonesia (2005-2011), Head of Planning and Finance Bureau, Deputy of Administration for the Secretariat of the Republic of Indonesia (2011), Expert Staff for the Economy and People's Welfare of the Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia (2015-2019), Commissioner at Biro Klasifikasi Indonesia (2019-present).

Masa Jabatan Anggota Komite

Masa jabatan Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Komisaris/Dewan Pengawas Perseroan paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatannya berikutnya.

Term of Office of Committee Members

The term of office of the Audit Committee who is not member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of the Company maximum is 2 (two) years without prejudice to the right of the Board of Commissioner/Supervisory Board to dismiss at any time. Audit Committee members who have ended their terms of office may be reappointed only for 1 (one) subsequent term.

Independensi Komite

Komite Audit dan komite lainnya bertindak secara independen terhadap Direksi dan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris secara berkala. Hal-hal terkait tata kerja Komite Audit dan komite lainnya tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaporan komite, rapat-rapat komite, rencana kerja dan penganggaran, dan evaluasi kinerja komite diatur dalam piagam komite yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan komite terkait. Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan dan hubungan bisnis dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

Independence of the Committee

The Audit Committee and other committees act independently of the Board of Directors and report regularly to the Board of Commissioners. Matters related to the work procedures of the Audit Committee and other committees, including but not limited to committee reporting, committee meetings, work plans and budgeting, and evaluation of the committee's performance, are governed in the committee's charter determined by the Board of Commissioners based on the proposal of the relevant committee. All members of the Audit Committee have no affiliation, either family or business relations, with members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Bersama dengan Komite Manajemen Risiko dan SDM, pada tahun 2020 Komite Audit telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Program Kerja Komite Audit yang ditetapkan pada awal tahun. Dalam melakukan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas kinerja perseroan, Komite Audit melakukan pembahasan fungsi Internal Audit dan fungsi terkait lainnya.

Implementation of Audit Committee Activities

Together with the Risk Management and HR Committee, in 2020, the Audit Committee has carried out activities in accordance with the Audit Committee Work Program, which was set at the beginning of the year. In carrying out supervision, monitoring, and evaluation of the Company's performance, the Audit Committee discusses the Internal Audit function and other related functions.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia No. SK.01/DEKOM. BKI/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan Komite Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia menjadi Komite Manajemen Risiko. Surat keputusan tersebut juga membuat pemberhentian Ketua Komite Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia dan Pengangkatan Ketua Komite Manajemen Risiko serta Alih Tugas Anggota Komite Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia Perusahaan Perseroan (Persero).

The Risk Management Committee was formed based on the Decree of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia No. SK.01/DEKOM.BKI/IV/2020 dated April 20, 2020 regarding the Change of the Risk Management and Human Resources Committee to the Risk Management Committee. The decree also makes the dismissal of the Chairman of the Risk Management and Human Resources Committee and the appointment of the Chairman of the Risk Management Committee as well as the Transfer of Duties of the Risk Management and Human Resources Committee of the Company (Persero).

Komite Manajemen Risiko bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan. Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

The Risk Management Committee works collectively and functions to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties, being independent both in carrying out their duties and in reporting. The Risk Management Committee reports directly to the Board of Commissioners.

Tugas Komite Manajemen Risiko adalah menyusun dan menyampaikan program Kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan dan diselaraskan dengan rencana kerja tahunan dan kebijakan manajemen risiko perusahaan yang dikelola oleh Direksi, melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugasnya.

The task of the Risk Management Committee is to prepare and submit an annual work program to the Board of Commissioners to be determined and harmonized with the annual work plan and company risk management policies managed by the Board of Directors, reporting in writing to the Board of Commissioners on each performance of its duties.



Struktur Komite Manajemen Risiko pada akhir tahun 2020 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:

Nama/Name	Jabatan/Position
Dwi Budi Sutrisno	Ketua Komite/Chairman of Committee
Trisyu Wimartono	Anggota Komite/Member of Committee

Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia

Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris. Komite ini bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan tanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Nominasi Remunerasi, dan Sumber Daya Manusia menyusun dan menyampaikan program Kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan dan diselaraskan dengan rencana kerja tahunan dan kebijakan Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia perusahaan yang dikelola oleh Direksi. Komite ini memiliki kewenangan untuk mengakses catatan atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, berdasarkan penugasan tertulis dari Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia No. SK.02/DEKOM.BKI/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang pembentukan Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia, struktur Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia ditetapkan sebagai berikut:

The structure of the Risk Management Committee at the end of 2020 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) is as follows:

Nomination, Remuneration and Human Resources Committee

The Nomination, Remuneration and Human Resources Committee works collectively and functions to assist the Board of Commissioners. This committee is independent both in carrying out its duties as well as in reporting and direct responsibility to the Board of Commissioners. The Nomination, Remuneration and Human Resources Committee prepares and submits the annual Work program to the Board of Commissioners to be determined and harmonized with the annual work plan and policies of the Company's Nomination, Remuneration and Human Resources Committee managed by the Board of Directors. This committee has the authority to access records or information related to the implementation of its duties, based on a written assignment from the Board of Commissioners.

Based on the Decree of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia No. SK.02/DEKOM.BKI/IV/2020 dated April 20, 2020 regarding the establishment of the Nomination, Remuneration and Human Resources Committee of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia, the structure of the Nomination, Remuneration and Human Resources Committee is set as follows:

Nama/Name	Jabatan/Position
Agung Kuswandono	Ketua Komite/Chairman of the Committee
R. Harry Hikmat	Sekretaris Komite/Committee Secretary
Lisda Y Satria	Anggota Komite/Committee Member

Profil Singkat Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia

Brief Profile of the Chairperson of the Nomination, Remuneration and Human Resources Committee

Nama/Name	Agung Kuswandono
Tanggal Lahir/Date of birth	Banyuwangi, 29 Maret 1967/March 29, 1967
Pendidikan/Education	S1 Kehutanan Hasil Hutan Institut Pertanian Bogor, Master of Economics University of Colorado Bachelor's Degree in Forestry from Bogor Agricultural University, Master of Economics from University of Colorado
Pengalaman/Experience	<p>Pelaksana Dirjen Bea dan Cukai - Direktorat Pabean (1992), Kepala Seksi Tarip A.I Dirjen Bea dan Cukai- Direktorat Tarip dan Harga (Juli 1997), Kepala Seksi Klasifikasi I Dirjen Bea dan Cukai - Direktorat Teknis Kepabeanan (Maret 1998- Desember 2001), Pelaksana Dirjen Anggaran - Kantor Wilayah II Dirjen Anggaran Medan - Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Sibolga - Seksi Perbendaharaan (Januari 2002), Kepala Subdirektorat Kemudahan Ekspor II Dirjen Bea dan Cukai - Direktorat Kepabeanan Internasional - Sub Direktorat Kemudahan Ekspor II (Oktober 2003), Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional II Dirjen Bea dan Cukai - Direktorat Kepabeanan Internasional - Sub Direktorat Kerjasama Internasional II (November 2006).</p> <p>Staff of the Director General of Customs and Excise - Directorate of Customs (1992), Head of Tariff Section A1 of the Director General of Customs and Excise - Directorate of Tariffs and Prices (July 1997), Head of Classification Section I of the Director General of Customs and Excise - Directorate of Customs Technical (March 1998 - December 2001), Implementing Director General of Budget - Regional Office II Director General of Budget Medan - Office of Treasury and State Treasury Sibolga - Treasury Section (January 2002), Head of Sub-Directorate of Export Ease II Director General of Customs and Excise - Directorate of International Customs - Sub-Directorate of Export Ease II (October 2003), Head of Sub Directorate of International Cooperation II Director General of Customs and Excise - Directorate of International Customs - Sub Directorate of International Cooperation II (November 2006).</p>

Pedoman Kerja Komite KNRSDM

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite MRSDM mengacu pada pedoman, peraturan dan perundang-undangan:

- Undang-Undang No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* 2006.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/2014;
- Anggaran Dasar Perusahaan;

KNRSDM Committee Work Guidelines

In carrying out its duties, the MRSDM Committee refers to the following guidelines, rules and regulations:

- Law No.19/2003 concerning State-Owned Enterprises;
- Law No.40/2007 concerning Limited Liability Companies;
- General Guidelines for Good Corporate Governance in Indonesia from the 2006 National Committee on Corporate Governance Policy.
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs which has been amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/2014;
- Company's articles of association;



SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY



Iqbal Fikri, S.T., MSC

Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan adalah unit kerja struktural satu tingkat di bawah Direktorat Utama dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Tugas Sekretaris Perusahaan adalah sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*) dalam komunikasi dengan *Stakeholder*, pengelolaan kehumasan (*relation officer*) dan legal. Pembentukan Sekretaris Perusahaan mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.KEP-117/MMBU/2002 Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.

Sekretaris Perusahaan ditunjuk dan diangkat Direksi, serta bertanggung jawab kepada Direksi. Sekretaris Perusahaan bertugas menetapkan strategi dan memastikan program kerja dan anggaran Sekretariat Perusahaan untuk disetujui dalam rapat kerja tahunan dengan melakukan sinkronisasi rencana kerja dan anggaran bagian di bawahnya. Sekretaris Perusahaan juga menjadi sumber informasi dan berfungsi untuk meningkatkan hubungan komunikasi internal dan eksternal terkait dengan kegiatan usaha.

The Corporate Secretary is a structural work unit one level under the Main Directorate and reports directly to the President Director. The Corporate Secretary functions as liaison officer in communication with stakeholders, relations officers and legal management. The establishment of a Corporate Secretary refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) No.KEP-117/MMBU/2002 Regarding the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises.

The Corporate Secretary is appointed by the Board of Directors, and is responsible to the Board of Directors. The Corporate Secretary is in charge of setting the strategies and ensuring the work program and budget of the Corporate Secretariat to be approved in the annual work meeting by synchronizing the work plan and budget for the sections under its tutelage. The Corporate Secretary also serves as a source of information and functions to improve internal and external communication relations related to business activities.

Profil Singkat Sekretaris Perusahaan

Brief Profile of the Corporate Secretary

Nama/Name	Iqbal Fikri, S.T., MSC
Tanggal Lahir /Date of birth	8 Juni 1979/June 8, 1979
Pendidikan/Education	<ul style="list-style-type: none">• Sarjana Teknik Perkapalan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)• S2 World Maritime University (WMU) Swedia.• Bachelor's Degree in Naval Engineering from the Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)• Master's Degree World Maritime University (WMU) Sweden.
Pengalaman/Experience	Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Pjs Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Pjs Kepala Divisi Statutoria, Senior Manager Konvensi, Pjs Senior Manager Regulasi dan Pengembangan. Head of Corporate Secretary Division, Acting Head of Corporate Secretary Division, Acting Head of Statutory Division, Senior Manager of Conventions, Acting Senior Manager of Regulation and Development.

AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) BKI mengembangkan sistem pengendalian internal yang terdiri atas struktur tata kelola, prosedur, serta kegiatan. Sistem pengendalian intern BKI mencakup pengendalian keuangan dan pengendalian operasional. Sistem pengendalian internal keuangan menjamin keandalan sistem akuntansi serta kewajaran penggunaan aset dan peralihan kepemilikan. Pelaksanaan tugas pengendalian internal keuangan merupakan tanggung jawab setiap satuan kerja.

Struktur tata kelola pengendalian intern mencakup RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Satuan Pengendalian Intern, serta juga memposisikan auditor eksternal. Struktur ini memisahkan dengan tegas fungsi dan peran Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Hubungan antara ketiga organ Perusahaan itu diatur dengan ketat, sehingga Dewan Komisaris hanya dapat mengadakan rapat konsultatif dengan Direksi sementara Direksi hanya dapat mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris. Tidak ada hubungan keluarga ataupun keuangan antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Prosedur pengendalian intern diuraikan dan ditetapkan di dalam Piagam Komite Audit dan Piagam Satuan Pengawasan Intern. Kegiatan pengendalian intern mencakup audit keuangan, audit operasional, audit kepatuhan, audit sistem informasi, *desk audit*, serta *specific review*.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), or BKI, develops internal control system consisting of governance structures, procedures, and activities. BKI's internal control system includes financial and operational control. The financial internal control system guarantees the reliability of the accounting system as well as the fairness of the use of assets and ownership transfer. The implementation of financial internal control tasks is the responsibility of each work unit.

The internal control governance structure includes the GMS, the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Audit Committee, the Internal Control Unit, and also positions the external auditor. This structure strictly separates the functions and roles of the Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors. The relationships between the three Company organs are strictly regulated, so that the Board of Commissioners can only hold consultative meetings with the Board of Directors while the Board of Directors can only hold coordination meetings with the Board of Commissioners. There is no family or financial relationship between the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Internal control procedures are described and specified in the Audit Committee Charter and the Internal Audit Unit Charter. Internal control activities include financial audits, operational audits, compliance audits, information systems audits, desk audits, and specific

Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Strategi

Perseroan memiliki dan melihara sistem pengendalian internal keuangan yang menjamin keandalan sistem akuntansi. Sistem pengendalian internal keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan yang wajar dalam hubungannya dengan penjagaan aset dari penyalahgunaan dan peralihan kepemilikan secara tidak sah, menjaga keabsahan catatan-catatan akuntansi, dan keandalan informasi keuangan yang dapat dipercaya yang digunakan dalam Perusahaan maupun yang dipublikasikan. Pelaksanaan tugas pengendalian internal merupakan tanggung jawab seluruh unit/satuan kerja. Perusahaan menetapkan Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai unit yang bertanggung jawab atas efektivitas sistem pengendalian internal.

Internal Control System and Strategic Management

The Company owns and maintains a financial internal control system that ensures the reliability of the accounting system. The financial internal control system is implemented to provide reasonable guarantees in relation to safeguarding assets from misuse and unauthorized transfer of ownership, maintaining the validity of accounting records, and the reliability of reliable financial information used in the Company and published. The implementation of internal control tasks is the responsibility of all units/work units. The Company has established an Internal Control Unit (SPI) as the unit responsible for the effectiveness of the internal control system.



Selain itu perusahaan juga memiliki fungsi Sistem Manajemen untuk memastikan diterapkannya Sistem Manajemen Mutu berdasarkan persyaratan standar ISO 9001:2015 sebagai wujud komitmen manajemen dalam meningkatkan kepuasan pemakai jasa (*customer satisfaction*) dan penyempurnaan yang berkesinambungan (*continuous improvement*). PKPT SPI selama tahun 2020 yang telah dilaksanakan terdiri dari : Divisi Kantor Pusat yaitu 1 (satu) Divisi Umum, 5 (lima) unit produksi Segmen Klasifikasi yaitu : Cabang Utama Klas Samarinda, Cabang Pratama Klas Ambon, Cabang Utama Klas Banten, Cabang Klas Semarang, dan Cabang Klas Utama Tanjung Priok. Dan 7 (tujuh) unit produksi Segmen Komersil yaitu : BKI Academy, Cabang Utama Komersil Balikpapan, Cabang Pratama Komersil Ambon, SBU Marine & Offshore, SBU Energi & Industri, Cabang Pratama Komersil Banten dan Cabang Komersil Semarang. Seluruh temuan hasil pemeriksaan SPI bersifat administratif dan dapat ditindaklanjuti tuntas oleh *auditee*.

In addition, the company also has a Management System function to ensure the implementation of a Quality Management System based on the requirements of the ISO 9001:2015 standard as a form of management's commitment to increasing customer satisfaction and continuous improvement. The SPI PKPT during 2020 that has been implemented consists of: Head Office Division, namely 1 (one) General Division, 5 (five) Classification Segment production units, namely: Samarinda Class Main Branch, Ambon Class Pratama Branch, Banten Class Main Branch, Semarang Class Branch, and Tanjung Priok Main Class Branch. And 7 (seven) production units for the Commercial Segment, namely: BKI Academy, Balikpapan Commercial Main Branch, Ambon Commercial Pratama Branch, Marine & Offshore SBU, Energy & Industrial SBU, Banten Commercial Primary Branch and Semarang Commercial Branch. All findings from the SPI examination are administrative in nature and can be followed up thoroughly by the auditee.

Pelaksanaan Tugas Internal Audit

Pada tahun 2020 Program Kerja Pengawasan Tahunan SPI Tahun 2020

Implementation of Internal Audit Tasks

In 2020 SPI Annual Supervision Work Program 2020

I	Divisi Kantor Pusat/Head Office Division	Divisi Umum/ General Affairs Division
II	Kantor Cabang/Branch Office	
1.	Segmen Klasifikasi/Classification Segment	Cabang Utama Klas Samarinda, Cabang Pratama Klas Ambon, Cabang Utama Klas Banten, Cabang Klas Semarang , dan Cabang Klas Utama Tanjung Priok. Samarinda Class Main Branch, Ambon Class Primary Branch, Banten Class Main Branch, Semarang Class Branch, and Tanjung Priok Main Class Branch.
2.	Segmen Komersil/Commercial Segment	BKI Academy, Cabang Utama Komersil Balikpapan, Cabang Pratama Komersil Ambon, SBU Marine & Offshore, SBU Energi & Industri, Cabang Pratama Komersil Banten dan Cabang Komersil Semarang. BKI Academy, Balikpapan Commercial Main Branch, Ambon Commercial Primary Branch, Marine & Offshore SBU, Energy & Industry SBU, Banten Commercial Primary Branch and Semarang Commercial Branch.

Seluruh temuan hasil pemeriksaan SPI bersifat administratif dan dapat ditindaklanjuti tuntas oleh *auditee*.

All findings from the SPI examination are administrative in nature and can be followed up thoroughly by the auditee.

Pelaksanaan Internal Audit oleh Manajemen Strategi

Internal Audit ISO-9001 : 2015

Implementation of Internal Audit by Strategy Management

Internal Audit ISO-9001 : 2015

Segment/ Segment	Kantor Cabang/ Branch Office	Kantor Pusat/Head Office
Klas/Class		
Cabang Utama Surabaya/Surabaya Main Branch	Divisi Manajemen <i>Human Capital</i> / <i>Human Capital Management</i> Division	
Cabang Utama Banten/Banten Main Branch	Divisi Manajemen Resiko & Kendali Usaha/ <i>Risk Management & Business Control</i> Division	
Cabang Utama Batam/Batam Main Branch	Divisi Pemasaran & Hubungan Pelanggan/ <i>Marketing & Customer Relations</i> Division	
Cabang Utama Samarinda/Samarinda MainBranch	Divisi Riset & Pengembangan/ <i>Research & Development</i> Division	
Cabang Utama Tanjung Priok/Tanjung Priok Main Branch	Divisi Persetujuan Rancang Bangun/ <i>Design Engineering Approval</i> Division	
Cabang Utama Singapura/Singapore Main Branch	Divisi Survei/Survey Division	
Cabang Madya Pekanbaru/Pekanbaru Class Middle Branch	Divisi Statutoria/Statutory Division	
Cabang Madya Pontianak/Pontianak Class Middle Branch	Divisi Manajemen Strategi/Strategic Management Division	
Cabang Madya Banjarmasin/Banjarmasin Class Middle Branch	Divisi Material & Komponen/Materials & Components Division	
Cabang Madya Palembang/Palembang Class Middle Branch	Divisi Umum/General Affairs Division	
Cabang Pratama Jambi/Jambi Class Primary Branch	Divisi Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary Division	
Cabang Pratama Semarang/Semarang Class Primary Branch	Departemen Operasi Klas/Class Operations Department	
Cabang Pratama Cirebon /Cirebon Class Primary Branch		
Cabang Pratama Sorong/Sorong Class Primary Branch		
Cabang Pratama Ambon/Ambon Class Primary Branch		
Cabang Pratama Makassar/Makassar Class PrimaryBranch		
Cabang Pratama Belawan/Belawan Class Primary Branch		
Cabang Pratama Bitung/Bitung Class Primary Branch		
Segmen Komersil/Commercial Segment		
Cabang Utama Komersil Balikpapan / Balikpapan Commercial Main Branch	Departemen Operasi Komersil/Department of Commercial	
Cabang Utama Komersil Surabaya/Surabaya Commercial Midlle Branch		
Cabang Madya Komersil Pekanbaru/Pekanbaru Commercial Middle Branch		
Cabang Madya Komersil Batam/Batam Commercial Middle Branch		
Cabang Pratama Jambi/Jambi Middle Branch		
Cabang Pratama Komersil Semarang/Semarang Commercial Primary Branch		

Segment/ Segment	Kantor Cabang/ Branch Office	Kantor Pusat/Head Office
	Cabang Pratama Cirebon/Cirebon Primary Branch	
	Cabang Pratama Sorong/Sorong Primary Branch	
	Cabang Pratama Komersil Belawan/Belawan Commercial Primary Branch	
	Cabang Pratama Komersil Makassar/Makassar Commercial Primary Branch	
	Cabang Pratama Bitung/Bitung Primary Branch	
	Cabang Pratama Komersil Banjarmasin/Banjarmasin Commercial Primary Branch	
	Cabang Pratama Komersil Palembang/Palembang Commercial Primary Branch	
	Cabang Pratama Komersil Banten/Banten Commercial Primary Branch	
	Cabang Pratama Komersil Pontianak/Pontianak Commercial Primary Branch	
	Cabang Pratama Ambon/Ambon Primary Branch	
	SBU Marine & Offshore Migas	
	SBU Energi & Industri/Energy & Industry SBU	
	BKI Academy	

**Internal Audit Health, Safety & Environment
(HSE)** **Internal Audit Health, Safety & Environment
(HSE)**

Segment/ Segment	Kantor Cabang/Branch Office	Kantor Pusat /Head Office
Segmen Klas/Class Segment		
	Cabang Utama Klas Surabaya/Surabaya Class Main Branch	Divisi Umum/General Affairs Division
	Cabang Utama Klas Banten/Banten Class Main Branch	
	Cabang Utama Klas Batam/Batam Class Main Branch	
	Cabang Utama Klas Samarinda/Samarinda Class Main Branch	
	Cabang Utama Klas Tanjung Priok/Tanjung Priok Class Main Branch	
	Cabang Utama Klas Singapura/Singapore Class Main Branch	
	Cabang Madya Klas Pekanbaru/Pekanbaru Class Middle Branch	
	Cabang Madya Klas Palembang/Palembang Class Middle Branch	
	Cabang Madya Klas Pontianak/Pontianak Class Middle Branch	
	Cabang Madya Klas Banjarmasin/Banjarmasin Class Middle Branch	
	Cabang Pratama Cirebon/Cirebon Primary Branch	
	Cabang Pratama Sorong/Sorong Class Primary Branch	
	Cabang Pratama Klas Belawan/Belawan Class Primary Branch	
	Cabang Pratama Bitung/Bitung Class Primary Branch	

Segmen/ Segment	Kantor Cabang/Branch Office	Kantor Pusat /Head Office
Segmen Komersil/Commercial Segment		
	Cabang Utama Komersil Balikpapan/Balikpapan Commercial Main Branch	
	Cabang Madya Komersil Surabaya/Surabaya Commercial Middle Branch	
	Cabang Madya Komersil Makassar/Makassar Commercial Middle Branch	
	Cabang Madya Komersil Batam/Batam Commercial Middle Branch	
	Cabang Madya Komersil Pekanbaru/Pekanbaru Commercial Middle Branch	
	Cabang Pratama Jambi/Jambi Primary Branch	
	Cabang Pratama Komersil Semarang/Semarang Commercial Primary Branch	
	Cabang Pratama Sorong/Sorong Commercial Primary Branch	
	Cabang Pratama Komersil Banten/Banten Commercial Primary Branch	
	Cabang Pratama Komersil Belawan/Belawan Commercial Primary Branch	
	Cabang Pratama Komersil Pontianak/Pontianak Commercial Primary Branch	
	Cabang Pratama Komersil Banjarmasin/Banjarmasin Commercial Primary Branch	
	Cabang Pratama Komersil Palembang/Palembang Commercial Primary Branch	
	Cabang Pratama Ambon/Ambon Class Primary Branch	
	SBU Energi & Industri/Energy & Industry SBU	
	Laboratorium SBU Energi & Industri/Energy & Industry SBU Laboratory	

Vertical Contract Audit (VCA) Internal

Vertical Contract Audit (VCA) Internal

Segmen Klas/ Class Segment	Cabang Utama Klas Batam/Batam Class Main Branch Cabang Utama Klas Banten/Banten Class Main Branch
-------------------------------	--

Internal Audit ISO 17020

Internal Audit ISO 17020

Segmen Komersil/ Commercial Segment	Cabang Utama Komersil Balikpapan/Balikpapan Commercial Main Branch Cabang Madya Komersil Pekanbaru/Pekanbaru Commercial Middle Branch Cabang Madya Komersil Makassar/Makassar Commercial Middle Branch Cabang Pratama Komersil Palembang/Palembang Commercial Primary Branch Cabang Pratama Komersil Belawan/Belawan Commercial Primary Branch SBU Energi & Industri/Energy & Industry SBU
--	---

Internal Audit ISO 17025:2008

Internal Audit ISO 17025:2008

Segmen Komersil/ Commercial Segment	Cabang Utama Komersil Balikpapan/Balikpapan Commercial Main Branch Cabang Madya Komersil Batam/Batam Commercial Middle Branch Laboratorium SBU ENI/ENI SBU Laboratory
--	---

EKSTERNAL AUDIT

EXTERNAL AUDIT

Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan kegiatan audit secara eksternal dan memberikan opini atas laporan keuangan yang telah disusun oleh Direksi. Hal tersebut sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No.423/ KMK.06/2002 Tahun 2002 tentang Jasa Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik.

Sesuai keputusan RUPS tanggal 30 Juni 2020, RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP yang akan bertindak sebagai auditor independen untuk melaksanakan audit atas laporan tahunan dan perhitungan tahunan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Tahun Buku 2020. Berdasarkan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan/PKF sebagai auditor atas Laporan Keuangan PT BKI Tahun Buku 2020.

Auditor eksternal terbebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perseroan, serta perseroan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, keazasan dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

KAP yang melakukan Audit Laporan Keuangan BKI

The Company appointed a Public Accounting Firm (KAP) to conduct external audit activities and provide an opinion on the financial statements that have been prepared by the Board of Directors. This is in accordance with the Decree of the Minister of Finance No. 423/ KMK.06/2002 of 2002 concerning Public Accountant Services and Government Regulation No. 20 of 2015 concerning the Practice of Public Accountants.

In accordance with the GMS decision on June 30, 2020, the GMS authorized the Board of Commissioners to appoint KAP who will act as an independent auditor to carry out audits of the annual report and annual calculations of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) for Fiscal Year 2020. Based on the procurement process in accordance with the provisions stipulated and principles of GCG, the Board of Commissioners has appointed the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat Arsono, Retno, Palilingan and Partners/PKF as auditors for the Financial Statements of PT BKI for Fiscal Year 2020.

The external auditor is free from the influence of the Board of Commissioners, the Board of Directors and other interested parties in the company, and the company is required to provide all accounting records and supporting data required by the external auditor so as to enable the external auditor to provide his opinion on the fairness, compliance, principle and conformity of the company's financial statements with Indonesian Financial Accounting Standards.

Table of KAP that conducts BKI Financial Report Audit

Tahun/ Year	KAP	Akuntan Publik/ Public Accountant	Biaya/Cost
2020	Paul Hadiwinata, Hidajat Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan/PKF	Yusef Kresna Budi, CAP	Rp605.000.000,- termasuk PPN 10% Rp605,000,000,- including 10% VAT
2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, mawar & Rekan	Benny Andria	Rp514.800.000,- termasuk PPN 10%. Rp514,800,000,- including 10% VAT
2018	Hertanto Grace Karunawan	Hertanto	Rp260.700.000,- termasuk PPN 10% Rp260,700,000,- including 10% VAT
2017	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Syamsudin	Rp214.500.000,- termasuk PPN 10%. Rp214,500,000,- including 10% VAT

Tugas Auditor Eksternal

Tugas Auditor Eksternal adalah melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan dan memberikan pendapat (opini) secara independen terhadap kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan menjamin proses penunjukan auditor eksternal dan pelaksanaan audit dilakukan secara independen tanpa pengaruh Direksi dan pihak-pihak di luar Perseroan.

Temuan Auditor dan Tanggapan Manajemen

Temuan hasil pemeriksaan terhadap perundang-undangan

Berdasarkan pemeriksaan atas laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020, temuan audit terkait dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam audit kepatuhan antara lain:

External Auditor Duties

The external auditor has the duty of conducting an audit of the Company's financial statements and provides an independent opinion on the fairness and suitability of the Company's financial statements with the Financial Accounting Standards and applicable laws and regulations.

The Company guarantees that the process of appointing an external auditor and conducting the audit is carried out independently without the influence of the Board of Directors and parties outside the Company

Auditor Findings and Follow Up

Findings from the examination of legislation

Based on an examination of the Company's Financial Statements for fiscal year 2020, audit findings related to compliance with legislation that are used as a reference in compliance audits include:

Kondisi/Condition	Kriteria/Criteria	Tanggapan Manajemen/Management response	
1. Terdapat Keterlambatan Setor dan Lapor Hutang Pajak Penghasilan/Delay in Deposit and Reporting Income Tax Debt	Berdasarkan hasil pemeriksaan akun hutang pajak PPh 21, Pph 23, dan Pph 4(2) untuk yang berakhir 31 Desember 2020, terdapat keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan.	Sesuai dengan Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 dan Undang-Undang dibidang Perpajakan bahwa atas pembayaran Pph 21, Pph 23, dan Pph 4(2) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan batas lapor tanggal 20 bulan berikutnya. Based on the results of the examination of the tax payable accounts for PPh 21, Pph 23, and Pph 4(2) for those ending December 31, 2020, there was a delay in payment and reporting of income.	Keterlambatan penyetoran dan pelaporan PPh disebabkan karena adanya keterbatasan personil dan pembatasan jumlah personil yang masuk kerja sebagai 102 dampak pemberlakuan PSBB. Oleh karena itu, untuk meminimalisir keterlambatan penyetoran, manajemen akan memberlakukan sistem pembayaran pajak terpusat, dan akan meningkatkan pengendalian terkait administrasi perpajakan. The delay in depositing and reporting income tax is due to limited personnel and restrictions on the number of personnel who come to work as a 102 result of the PSBB implementation. Therefore, to minimize delays in depositing, the management will implement a centralized tax payment system, and will improve controls related to tax administration.



Kondisi/Condition	Kriteria/Criteria	Tanggapan Manajemen/ Management response
<p>2. Transaksi yang Melewati Nilai Nominal di atas Jumlah yang Diatur dalam Peraturan Perusahaan dan Perundang-Undangan Tidak Disertakan Bea Materai./Transactions that exceed the nominal value above the Amount Regulated in Company Regulations and Laws are Not Included Stamp Duty.</p> <p>Dalam uji petik yang kami lakukan, kami mencatat adanya Beban ATK & Cetak Mencetak, Biaya Fasilitas Perlengkapan Kerja, serta Beban Pemeliharaan Gedung/Rumah Dinas yang melebihi Rp1.000.000, tidak disertakan materai Rp6.000.</p>	<p>Kondisi ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP), yakni Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) pada Bab 2 Pasal 13, No. 2 Poin 7 yang menyatakan bahwa "Pembelian langsung untuk barang yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara pembelian langsung dengan bukti kuitansi bermaterai secukupnya tanpa Surat Perintah Kerja/Surat. Berdasarkan Pasal 2, UU BM Jo PP No. 24 Tahun 2000, tentang Objek dan tarif Bea Materai, materai Rp3.000 dapat digunakan untuk transaksi senilai Rp250.000 – Rp1.000.000 dan materai Rp6.000 dapat digunakan untuk transaksi di atas Rp1.000.000.</p>	<p>Manajemen akan meningkatkan pengendalian serta arahan untuk menyamakan persepsi atas pelaksanaan pengeluaran barang dan jasa, agar SOP dan peraturan perundang-undangan terkait transaksi keuangan, disamping itu verifikasi serta klarifikasi oleh kantor pusat atas laporan keuangan bulanan unit kerja/produksi akan ditingkatkan termasuk pemberian konsekuensi bagi pegawai yang tidak melaksanakan SOP dan perundang-undangan yang berlaku.</p>

Temuan Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengendalian Internal

Berdasarkan pemeriksaan atas laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2020, temuan audit terkait dengan kepatuhan terhadap pengendalian internal yang dijadikan rujukan dalam audit kepatuhan antara lain sebagai berikut:

Findings of Examination Results on Internal Control

Based on the examination of the Company's financial statements for the 2020 financial year, audit findings related to compliance with internal controls that are used as references in the compliance audit include the following:

Latar Belakang/Background	Rekomendasi/Recommendation	Tanggapan Manajemen/Management Response
<p>1. Tidak Terdapat Pemisahan Tugas yang Baik pada Bagian Keuangan Cabang / There is no Proper Division of Duties in the Finance Section at the Branch Office</p> <p>Ditemukan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi kasir dan pencatatan pada Cabang Madya Surabaya Komersil (SBC), Cabang Madya Banten Komersil (CGC), Cabang Pratama Cirebon Komersil (CNC), 104 Cabang Pratama Cirebon Klas (CN), dan KSO (SBU ENI) tergabung menjadi satu. Kasir sebagai pemegang kas juga melakukan fungsi pencatatan. b. Keterbatasan user ID SAP menyebabkan user ID dipakai bergantian antara staf akuntansi, keuangan, dan bagian manajer yang berfungsi me-review dan otorisasi transaksi pada semua cabang yang dikunjungi (Cabang Utama Klas Batam (BM), Cabang Utama Klas Samarinda (BP), Cabang Utama Klas Surabaya (SB), Cabang Utama Klas Tanjung Priok (TP), Cabang Utama Klas Banten (CG), Cabang Madya Klas Banjarmasin (BJ), Cabang Pratama Klas Cirebon (CN), SBU <i>Marine & Offshore</i> (SBU MNO), SBU Energi & Industri (SBU ENI), Cabang Utama Komersil Balikpapan (BPC), Cabang Madya Komersil Banten (CGC), dan Segmen Komersil Cabang Pratama Cirebon (CNC). <p>The following conditions were found:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cashier and recording functions at the Surabaya Commercial Middle Branch Office (SBC), Banten Commercial Middle Branch Office (CGC), Cirebon Commercial Pratama Branch Office (CNC), 104 Pratama Cirebon Klas (CN) Branch Offices, and KSO (SBU ENI) are combined into one. The cashier as the cash holder also performs the recording function. b. The limitations of the SAP user ID cause the user ID to be used alternating between accounting, finance, and manager sections whose function is to review and authorize transactions at all branches visited (Batam Klas Main Branch (BM), Samarinda Klas Main Branch (BP), Surabaya Klas Main Branch (SB), Tanjung Klas Main Branch Priok (TP), Banten Class Main Branch (CG), Banjarmasin Middle Class Branch (BJ), Cirebon Class Pratama Branch (CN), Marine & Offshore SBU (MNO SBU), Energy & Industry SBU (ENI SBU), Commercial Main Branch Balikpapan (BPC), Banten Commercial Intermediate Branch (CGC), and Cirebon Primary Branch Commercial Segment (CNC). 	<p>Perusahaan agar melakukan pemisahan fungsi tugas pencatatan dan pemegang kas di cabang guna mencegah potensi kesalahan dalam pencatatan, pengelolaan, dan penyimpanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya personil di Cabang, untuk hal ini manajemen telah melakukan Analisa beban kerja disetiap unit kerja/produksi, sehingga kebutuhan staf di unit kerja/produksi akan diisi oleh personil dari unit kerja yang lain yang personilnya berlebih. b. Untuk User ID SAP, sudah dianggarkan untuk penambahan User ID termasuk untuk cabang lain dan unit kerja Kantor Pusat yang masih diperlukan.

Latar Belakang/Background	Rekomendasi/Recommendation	Tanggapan Manajemen/ Management Response
2. Terdapat Saldo Uang Muka Survey (UMS) yang Tidak Teridentifikasi Nama dari per masing-masing Sub Kode/There is a Survey Advance Balance (UMS) which is not identified by the name of each sub code	Saldo UMS posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp10.934.556.248 Uji petik menghasilkan informasi bahwa terdapat sebesar Rp1.187.559.330 yang tidak dapat diidentifikasi nomor <i>invoice</i> -nya.	Manajemen untuk melakukan tindak lanjut status dari UMS yang tidak teridentifikasi tersebut, agar dapat diketahui apakah terdapat UMS yang seharusnya sudah di <i>net-off</i> dengan piutang.
The balance of UMS as of December 31, 2020 was Rp10,934,556,248. The random test yielded information that there were Rp1,187,559,330 of balance which the invoice number could not be identified.	The Management to follow up on the status of the unidentified UMS, so that it can be seen whether there are UMS that should have been net-off with receivables.	The Management will intensify cooperation and educate customers to use Virtual Accounts consistently and confirm invoices that have been paid off, then for UMS that are not identified, management continues to reconcile UMS whose company name is still listed for the agreed settlement of invoices.
3. Perawatan Aset Tetap/Fixed Asset Maintenance	<p>Terdapat beberapa aset tetap di Unit Produksi dalam kondisi yang tidak layak digunakan</p> <p>Several fixed assets in the Production Unit are in a condition that is not suitable for use</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan inventarisasi kembali perhitungan atas aset tetap dengan kondisi serupa agar masuk kedalam kategori aset tetap <i>extra compatible</i>; b. Melelang/menjual aset tetap dengan kondisi serupa; c. Merawat lebih baik aset tetap yang dimiliki; d. Melakukan inventarisasi kembali perhitungan aset tetap di cabang dan melakukan penyesuaian <i>listing</i> sesuai dengan kondisi sebenarnya. <p>a. Re-inventory the calculation of fixed assets with similar conditions so that they are included in the category of extra-compatible fixed assets;</p> <p>b. Auction/sell fixed assets with similar conditions;</p> <p>c. Taking better care of the fixed assets owned;</p> <p>d. Re-inventory the calculation of fixed assets at the branch and make adjustments to the listing according to actual conditions.</p>

Latar Belakang/Background	Rekomendasi/Recommendation	Tanggapan Manajemen/Management Response
<p>4. Aset Tetap yang Tidak Memiliki Kodifikasi/Fixed Assets with No Codification</p> <p>Dari hasil kunjungan, terdapat tiga jenis temuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perbedaan kodefikasi antara sistem SAP dengan <i>One Get System</i> (OGS). b. Kodefikasi menggunakan <i>barcode</i> belum dijalankan di beberapa cabang karena tidak adanya kertas <i>barcode</i> Cabang Utama Surabaya (SB), Cabang Madya Komersil Surabaya (SBC), Cabang Utama Klas Samarinda (BP). c. Pada beberapa cabang, aset tetap yang ada tidak memiliki nomor aset. Cabang Madya Komersil Surabaya (SBC), Cabang Utama Klas Batam (BM), Cabang Pratama Klas Cirebon (CN). <p>From the results of the visit, there were three types of findings as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The difference between the codification of the SAP system and the One Get System (OGS). b. Codification using barcodes has not been implemented in several branches due to the absence of barcode paper for the Surabaya Main Branch (SB), Surabaya Commercial Middle Branch (SBC), and Klas Samarinda Main Branch (BP). c. In some branches, existing fixed assets do not have an asset number. Madya Commercial Branch Surabaya (SBC), Main Branch Klas Batam (BM), Branch Pratama Klas Cirebon (CN). 	<p>Memberikan <i>codering aset</i> dan memperbarui daftar aset dengan menyertakan kode aset, lokasi, tahun perolehan, harga perolehan unit, jenis aset nama aset, dan kondisi sehingga dapat memudahkan unit produksi memonitoring aset yang sudah rusak atau masih layak pakai.</p> <p>Provide asset coding and update asset list by including asset code, location, year of acquisition, unit cost, asset type, asset name, and conditions so as to make it easier for the production unit to monitor assets that have been damaged or are still fit for use.</p>	<p>Tim Manajemen kantor Pusat telah melakukan sosialisasi cara/metode <i>barcoding</i> kepada masing-masing PIC Penanggungjawab Aset Unit Produksi dan telah mengirimkan alat <i>labelling tool/barcoding</i> (Surat A.3391/UM.209/KI-20 tanggal 25 November 2020) bagi Unit Produksi yang belum memiliki alat <i>barcoding</i> dan selanjutnya akan dilakukan monitoring yang lebih intensif.</p> <p>The Head Office Management Team has socialized the barcoding method/method to each PIC in charge of the Production Unit Assets and has sent a labelling tool/barcoding tool (Letter A.3391/UM.209/KI-20 dated November 25, 2020) for Production Units that have not have a barcoding tool and further more intensive monitoring will be carried out.</p>

MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menerapkan sistem manajemen risiko sejak tahun 2014. Hal ini untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*, GCG) sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER - 01/MBU/2011. Perseroan meyakini penerapan Sistem Manajemen Risiko Korporat yang efektif tidak sekedar kepatuhan, namun juga menjadi alat bantu untuk memastikan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Perseroan memahami setiap kegiatan perusahaan memiliki risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi. Direktur, sebagai pemegang akuntabilitas tertinggi memberikan mandat kepada seluruh unit kerja untuk menerapkan manajemen risiko secara konsisten dan komprehensif.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) has implemented a risk management system since 2014. This is to support the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER - 01/MBU/2011. The Company believes that the implementation of an effective Corporate Risk Management System is not only a compliance, but also a tool to ensure the achievement of the strategic targets that have been set.

The Company understands that every company activity has risks that can affect the achievement of the vision and mission. The Director, as the highest accountability holder, mandates all work units to implement risk management consistently and comprehensively.



Perseroan telah menyusun pedoman Manajemen Risiko sebagai bagian dari sistem manajemen yang diterapkan secara optimal. Pedoman ini merupakan pengembangan dari Kebijakan Umum dan Penerapan Sistem Manajemen Risiko Korporasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

The Company has developed Risk Management guidelines as part of the optimally implemented management system. This guideline is a development of the General Policy and Implementation of the Corporate Risk Management System of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Selera dan Toleransi Risiko

Perseroan menetapkan selera dan toleransi risiko guna memberikan kejelasan informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai sikap perusahaan terhadap risiko. Sikap tersebut menjadi ukuran kesediaan Perseroan dalam menerima atau mengelola risiko demi pencapaian sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam upaya mencapai visi dan misi, BKI berkomitmen memilih risiko dengan tingkat rendah terhadap perspektif finansial, perspektif konsumen, perspektif proses internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Risk Appetite and Risk Tolerance

The Company establishes risk appetite and tolerance in order to provide clear information to stakeholders regarding the company's attitude towards risk. This attitude is a measure of the Company's willingness to accept or manage risks in order to achieve the goals or objectives to be achieved. In an effort to achieve its vision and mission, BKI is committed to choosing a low level of risk from a financial perspective, a consumer perspective, an internal process perspective, and a learning and growth perspective.

Selera Risiko

Selera risiko merupakan pernyataan sikap Direksi terhadap besaran dan jenis risiko yang akan dikelola perusahaan. Selera risiko merupakan acuan dalam menyusun toleransi risiko.

Risk Appetite

Risk appetite is a statement of the Board of Directors' attitude towards the amount and type of risk that will be managed by the company. Risk appetite is a reference in developing risk tolerance.

Toleransi Risiko

Toleransi risiko merupakan pernyataan batas minimum dan maksimum atas setiap parameter kriteria dampak yang digunakan sebagai basis penilaian risiko. Toleransi risiko menjadi representasi praktis atas pernyataan selera risiko dan menjadi panduan bagi pemilik risiko untuk menentukan penanganan terhadap risiko.

Risk Tolerance

Risk tolerance is a statement of the minimum and maximum limits for each impact criterion parameter that is used as the basis for risk assessment. Risk tolerance becomes a practical representation of the risk appetite statement and becomes a guide for risk owners to determine risk management.

Peta Selera & Toleransi Risiko

Peta risiko merupakan alat bantu visual untuk menyatakan besaran risiko perusahaan. Peta risiko dibangun dengan dua dimensi, yaitu dimensi dampak dan dimensi kemungkinan yang masing-masing memiliki skala Empat. Setiap area di dalam peta risiko menggambarkan nilai yang dihasilkan dari perkalian skala nilai dampak dan kemungkinan.

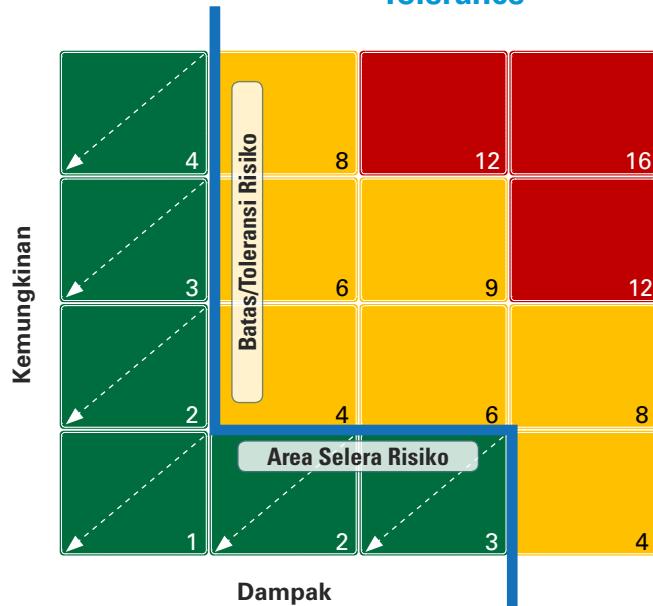
Map of Appetite & Risk Tolerance

The risk map is a visual aid to state the magnitude of the Company's risk. The risk map is built with two dimensions, namely the impact dimension and the possibility dimension, each of which has a scale of Four. Each area in the risk map describes the value resulting from the multiplication of the impact and likelihood value scale.



Peta Selera dan Toleransi Risiko

Map of Risk Appetite and Risk Tolerance



Tingkat Risiko

Risk Level

Nilai Risiko Risk Value	Tingkat Risiko Risk Level	Tingkat Eksposur Risiko Risk Exposure Level
1 - 3	Rendah (Low)	Kecil Kondisi aman; perusahaan perlu menjaga efektivitas pengendalian internalnya.
		Small Safe condition; the Company needs to maintain the effectiveness of their internal controls.
4 - 9	Moderat (Medium)	Sedang Kondisi gangguan; perusahaan perlu meningkatkan efektivitas pengendalian internalnya.
		Medium Disturbed condition; the Company needs to improve the effectiveness of their internal controls.
12 - 16	Tinggi (High)	Tinggi Kondisi berbahaya; perusahaan perlu melaksanakan rencana penanganan risiko.
		High Dangerous condition; the Company needs to implement a risk management plan.

Pelaksanaan Manajemen Risiko

Setiap Unit Kerja telah melakukan identifikasi, penilaian, penanganan, *monitoring* dan evaluasi risiko, serta pelaporan secara berkala sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Pelaporan manajemen risiko merupakan salah satu item dalam penilaian KPI unit kerja.

Implementation of Risk Management

Each Work Unit has identified, assessed, handled, monitored and evaluated risks, and reported on a regular basis as scheduled. Risk management reporting is one of the items in the work unit KPI assessment.

Sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan penerapan sistem manajemen berbasis risiko yang efektif telah ditunjuk personil sebagai *Risk Owner Representative* di setiap Unit Kerja/Produksi untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi dan komunikasi dalam rangka penerapan manajemen risiko yang berkelanjutan baik di lingkungan kerjanya maupun secara korporasi.

Sepanjang tahun 2020 Perseroan telah melaksanakan Manajemen Risiko berdasarkan prioritas risiko di unit Produksi Klas, Unit Produksi Komersil, dan Unit Kerja. Selanjutnya dilaksanakan penanganan risiko atas *Top Risk* yaitu risiko yang menjadi prioritas utama untuk mendapat penanganan dengan tepat.

Perseroan telah membuat rencana untuk menentukan target pelaksanaan penanganan risiko oleh masing-masing Unit Kerja (*action plan*) pada tahun 2021. Progres dan efektifitas penanganan risiko di pantau oleh Unit Manajemen Risiko dengan dukungan penuh dari manajemen. Perseroan telah menjadikan pelaksanaan manajemen risiko yang baik sebagai budaya (*risk culture*) sekaligus sebagai sistem peringatan dini dalam upaya mencapai tujuan Perseroan.

As one of the efforts to implement an effective risk-based management system, personnel have been appointed as Risk Owner Representatives in each Work/Production Unit to optimize the coordination and communication functions in the context of implementing sustainable risk management both in the work environment and as a corporation.

Throughout 2020 the Company has implemented Risk Management based on risk priorities in Class Production Units, Commercial Production Units, and Work Units. Furthermore, risk management is carried out on Top Risk, namely the risk that becomes the main priority to receive proper handling.

The Company has made a plan to determine the implementation target of risk management by each Work Unit (*action plan*) in 2021. The progress and effectiveness of risk management is monitored by the Risk Management Unit with full support from management. The Company has made the implementation of good risk management a culture (*risk culture*) as well as an early warning system in an effort to achieve the Company's goals.

Risk Register 2020

Sebagai hasil penerapan manajemen risiko, maka diterbitkan Register Risiko (*Risk Register*) tahun 2020 yang memberikan gambaran secara umum mengenai risiko yang dihadapi dan sebagai laporan hasil pelaksanaan manajemen risiko selama 1 (satu) tahun. Register risiko yang disajikan mencakup risiko proses bisnis baik yang teridentifikasi di Unit-Unit Produksi (Bidang Klas dan Komersil) dan Unit-unit Kerja. Dengan demikian, register risiko ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengetahui risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan berfungsi sebagai *early-warning system* dalam menyusun strategi pencapaian sasaran perusahaan ke depan, serta dalam rangka perbaikan dan pengembangan sistem manajemen yang berbasis risiko.

Risk Register 2020

As a result of implementing risk management, the 2020 Risk Register was issued which provides a general description of the risks faced and as a report on the results of risk management implementation for 1 (one) year. The risk register presented includes both business process risks identified in Production Units (Class and Commercial Sector) and Work Units. Thus, this risk register can be used as a tool to determine the risks faced by the company and serves as an early-warning system in formulating strategies for achieving company goals in the future, as well as in the context of improving and developing a risk-based management system.

TOP RISK

Kategori Risiko/ Risk Category	Risk Event	Mitigasi/Mitigation
Risiko Operasional/ Operational Risk	Overload kapasitas <i>bandwidth server</i> /Server bandwidth capacity overload	Mengatur kapasitas <i>bandwidth</i> setiap unit kerja/produksi/ Manage the bandwidth capacity of each work/production unit
	Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan terkendala/Research and development activities are disrupted.	Menjalankan <i>plan review</i> , aplikasi dikembangkan sesuai dengan skala prioritas/Carry out a review plan, the application is developed accordingly with priority scale
	Pelaksanaan survei/ audit dan sertifikasi terkendala/ Disrupted survey/audit and certification	Melaksanakan program pelatihan dan pembekalan yang memadai/Implement adequate training and debriefing programs.
	Pelaksanaan Pelaporan survei terkendala/ The implementation of the survey Reporting is constrained	Peningkatan performa sistem TI/IT system performance improvement
	Pelaksanaan pekerjaan <i>project</i> terhambat/Project work is interrupted.	Optimalisasi Aplikasi SIKOM/SIKOM Application Optimization
Risiko Strategis/ Strategic Risk	Ketidakakuratan data dalam SK/Inaccuracy of data in SK	Penyempurnaan sistem OGS/OGS system improvements
	Personil yang dipromosikan dalam KSP tidak maksimal/Personnel promoted in KSP are not maximal.	Membuat peta KSP di perusahaan, mengidentifikasi kandidat yang ada dan melaporkan ke manajemen/ Mapping the KSP in the Company, identify existing candidates and report to management.
	Mendapatkan pekerjaan strategis terkendala/ Acquiring strategic work is disrupted	Konsolidasi unit/divisi dan Analisa pasar secara optimal dan inovasi/Consolidation of units/divisions and Optimal market analysis and innovation.
Risiko Kepatuhan/ Compliance Risk	Pengurusan sertifikat/Certificate Administration	<i>Refreshing & Awareness</i> terhadap SMAP, Pengembangan E-Certificate/Refreshing & Awareness of SMAP, E-Certificate Development.
Risiko Hukum/ Legal Risk	Pelanggaran kontrak/Breach of Contract	2-Tier Monitoring & Evaluasi berbasis aplikasi SIKOM/ 2-Tier Monitoring & Evaluation based on SIKOM application.



KODE ETIK

CODE OF ETHICS

Penerapan Kode Etik atau Kode Perilaku (*Code of Conduct*) adalah salah satu komitmen PT BKI untuk melakukan bisnis yang sah dan beretika untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kode Etik Perseroan disusun untuk menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh individu yang bekerja di dalam lingkungan PT BKI (Persero) dalam beretika dan bertingkah laku dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta melakukan aktivitas di Perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan Perseroan. *Code of Conduct* merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam menerapkan GCG secara konsisten. PT BKI (Persero) memiliki sistem nilai yang menentukan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja merujuk pada nilai perusahaan sehingga menjadi pedoman perilaku. Etika bisnis merujuk pada:

1. Integritas dalam berusaha;
2. Data perusahaan dan kerahasiaan informasi;
3. Pernyataan palsu, klaim palsu, dan konspirasi;
4. Penyelewengan dan penyimpangan;
5. Benturan kepentingan
 - Benturan dalam hasil survei;
 - Benturan kepentingan dalam pengadaan;
 - Benturan kepentingan dalam aktivitas sampingan.

The application of the Code of Ethics or Code of Conduct is one of PT BKI's commitments to conduct legitimate and ethical business to achieve the targets that have been set. The Company's Code of Ethics is prepared to be a reference and guideline for all individuals who work within PT BKI (Persero) in ethics and behavior in carrying out their duties and obligations, as well as carrying out activities in the Company in order to achieve the vision, mission and goals of the Company. The Code of Conduct is a manifestation of the Company's commitment to implementing GCG consistently. PT BKI (Persero) has a value system that determines work ethics and business ethics. Work ethic refers to the company's values so that it becomes a code of conduct. Business ethics refers to:

1. Integrity in business;
2. Company data and information confidentiality;
3. False statements, false claims, and conspiracies;
4. Misappropriation and deviation;
5. Conflict of interest
 - Conflicts in survey results;
 - Conflict of interest in procurement;
 - Conflict of interest in side activities.

Integritas dalam Berusaha

Penerapan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip GCG melandasi seluruh aktivitas Perusahaan dalam menjalankan usahanya. Pada Agustus 2014, telah diterbitkan penyempurnaan *manual handbook GCG Code*, sekaligus diterbitkan *handbook Pedoman penanganan Gratifikasi dan Whistleblower System (WBS)*. Perusahaan telah mensosialisasikan pedoman ini dan mendistribusikan *Handbook* tersebut kepada seluruh pegawai BKI sebagai pedoman dalam bekerja dalam rangka mempertahankan kejujuran, transparansi, independensi, akuntabilitas, integritas, dan keadilan dalam proses kerja dan transaksi di lingkungan masing-masing. Perusahaan telah menerapkan fungsi pengawasan dengan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar tindakan-tindakan ilegal, tidak fair dan pelanggaran atas norma-norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi, baik administrasi, maupun perdata. Perseroan telah menetapkan kebijakan melarang anggota Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perusahaan dan pihak yang terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip GCG. Pengertian yang bertentangan dengan hukum dan

Integrity in Business

The application of ethical standards in all business activities based on GCG principles underlies all of the Company's activities in running its business. In August 2014, a revised GCG Code handbook was published, as well as a handbook for the Handbook of Gratification Handling and the Whistleblower System (WBS). The Company has socialized this guideline and distributed the Handbook to all BKI employees as a guideline in their work in order to maintain honesty, transparency, independence, accountability, integrity, and fairness in work processes and transactions in their respective environments. The Company has implemented a supervisory function using audits based on correct and generally accepted principles and always strives for illegal, unfair actions and violations of applicable norms and regulations to be subject to sanctions, both administrative and civil. The Company has established a policy of prohibiting members of the Commissioners, Directors and all employees of the Company and related parties from conducting transactions that are contrary to the law and GCG principles. Definitions that are against the law and the principles of GCG are used to describe every business transaction that is categorized as against the law or against the integrity of the Company. These

prinsip-prinsip GCG digunakan untuk menggambarkan setiap transaksi bisnis yang dikategorikan melawan hukum atau bertentangan dengan integritas Perseroan. Transaksi tersebut, antara lain pemberian atau penerimaan suap dan hadiah yang diberikan dalam upaya mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan.

Pedoman dan prosedur pelaksanaan Integritas dalam Berusaha

- a. *Board Manual GCG*
- b. Prosedur Penanganan Gratifikasi
- c. Prosedur Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* (WBS)
- d. Petunjuk Kerja Tata Kelola
- e. Panduan Kode Etik
- f. Pakta intergritas
- g. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan beserta prosedur terkait
- h. Penerbitan Surat Edaran Larangan Gratifikasi Dalam Rangka Momen Hari Raya

transactions include the giving or receiving of bribes and gifts given in an effort to influence decisions related to the Company's business.

Guidelines and procedures for the implementation of Integrity in Business

- a. GCG Manual Board
- b. Gratuity Handling Procedure
- c. Whistleblowing System (WBS) Violation Reporting Procedure
- d. Governance Work Instructions
- e. Code of Conduct Guide
- f. Integrity Pact
- g. Anti-Bribery Management System Guidelines and related procedures
- h. Issuance of a Circular on the Prohibition of Gratification in the Context of Hari Raya

Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi

Perusahaan selalu melakukan pencatatan yang akurat dan andal mengenai aktivitas usaha dan operasional Perusahaan secara berkelanjutan. Setiap pembayaran uang, pengalihan kepemilikan, penyelesaian pemberian layanan, dan transaksi lainnya harus terefleksikan secara penuh dan detail pada sistem akuntansi dan catatan bisnis Perusahaan. Semua pihak harus mengungkapkan semua informasi yang relevan dan bekerja sama sepenuhnya dengan auditor internal dan eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya. Kebijakan Perusahaan telah melarang Komisaris, Direksi dan karyawan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan atau pelanggan kepada pihak ketiga, baik didalam maupun diluar Perusahaan.

Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia tersebut dapat merugikan Perusahaan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus melalui persetujuan Direksi. Perusahaan juga bekerja dengan data khusus milik pelanggan, rekanan, dan mitra usaha. Hal ini merupakan kepercayaan yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian utama dari Perusahaan untuk menghargai kerjasama yang

Company Data and Confidentiality of Information

The Company always keeps accurate and reliable records of the Company's business activities and operations on an ongoing basis. Every payment of money, transfer of ownership, completion of service delivery, and other transactions must be fully and in detail reflected in the accounting system and business records of the Company. All parties must disclose all relevant information and cooperate fully with internal and external auditors in compliance audits or other investigations. Company policy prohibits Commissioners, Directors and employees from disclosing confidential information about the Company or customers to third parties, both inside and outside the Company.

Given that the disclosure of confidential information may harm the Company or customers and provide benefits to other parties, the provision of confidential information according to its needs must be approved by the Board of Directors. The company also works with custom data belonging to customers, associates and business partners. This is a very important trust and must get the main attention of the Company to appreciate the continuous cooperation of customers, partners, and other business



berkelanjutan dari pelanggan, rekanan, dan mitra usaha lainnya. Informasi rahasia tersebut tidak boleh diungkap kepada pihak luar tanpa persetujuan Direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh Direksi.

Pernyataan Palsu, Klaim Palsu, dan Konspirasi

Seluruh jajaran BKI yang berkaitan dengan tugas pemasaran, *drawing approval*, pelaksanaan survei dan inspeksi, proses sertifikasi, pembuatan kontak/perjanjian dan administrasi keuangan termasuk akuntansi, telah menyadari pentingnya membuat pernyataan yang akurat dan klaim yang benar kepada Pimpinan, Pemerintah maupun kepada pihak lain. Hal ini mencakup setiap pernyataan lisan dan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan pihak lain atau yang digunakan oleh Perseroan. Kesengajaan menyampaikan pernyataan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang lain untuk merugikan pihak lain dapat mengakibatkan dikenakannya hukuman administratif, pidana, perdata bagi personil yang bersangkutan dan pihak lain yang terlibat, termasuk mitra kerja Perseroan dan pegawainya.

Penyelewengan dan Penyimpangan

Perusahaan telah menetapkan kebijakan untuk melarang setiap bentuk penyelewengan dan penyimpangan serta senantiasa menerapkan prosedur yang wajib ditaati dan diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan dan penyimpangan. Penyelewengan dan penyimpangan yang dimaksud adalah :

- Pelanggaran terhadap peraturan Perseroan.
- Melakukan ketidakjujuran atau kebohongan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan.
- Melakukan penggelapan, penghilangan, atau pemindahtangankan segala sesuatu yang dapat merugikan Perseroan secara langsung maupun tidak langsung.
- Melakukan pemalsuan atau manipulasi surat berharga Perusahaan seperti cek, giro, sertifikat, dan lain-lain.
- Menyalahgunakan aset Perseroan.
- Melakukan pengalihan kas, surat berharga atau aset Perseroan untuk penggunaan atau keuntungan pribadi.

partners. Such confidential information may not be disclosed to outside parties without the approval of the Board of Directors or an official appointed by the Board of Directors.

False Statements, False Claims and Conspiracies

All levels of BKI related to marketing tasks, drawing approval, conducting surveys and inspections, certification processes, making contacts/agreements and financial administration including accounting, have realized the importance of making accurate statements and correct claims to the leadership, government and other parties. This includes any oral and written statements submitted to the leadership of other parties or used by the Company. Deliberately submitting statements or claims that are untrue or misleading or which involve a conspiracy with other people to harm other parties may result in administrative, criminal, civil penalties for the personnel concerned and other parties involved, including the Company's partners and employees.

Deviations and Deviations

The Company has established a policy to prohibit any form of fraud and irregularities and always implements procedures that must be adhered to and followed in relation to findings, confessions, reporting, investigations, and investigations against suspicions of fraud and irregularities. The deviations and deviations referred to are:

- Violation of the Company's regulations.
- Committing dishonesty or lying in connection with the performance of job duties.
- Embezzlement, disappearance, or transfer of anything that may harm the Company directly or indirectly.
- Counterfeit or manipulate the Company's securities such as cheques, demand deposits, certificates, and others.
- Misappropriating the Company's assets.
- Divert cash, securities or assets of the Company for personal use or benefit.



- Melakukan penanganan dan pelaporan transaksi bisnis dan keuangan Perseroan yang tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
- Melakukan pemalsuan atas catatan akuntansi Perseroan atau laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

- Handling and reporting of the Company's business and financial transactions that are not in accordance with applicable procedures and regulations.
- Do falsification of the Company's accounting records or financial statements for personal interests or other interests that are detrimental to the Company, either directly or indirectly.

Benturan Kepentingan

Perseroan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai suatu situasi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau karyawan BKI yang mendapat kekuasaan dan kewenangan memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Benturan ini dapat melibatkan kepentingan pemakai jasa, instansi lain yang berkepentingan dengan jasa BKI, rekanan, karyawan (pensiunan, aktif, atau calon karyawan) atau bahkan anggota masyarakat di tempat Perseroan beroperasi.

Dua prinsip utama untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang ditimbulkan:

- Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan atau untuk kepentingan orang dan atau pihak lain yang terkait.
- Menghindari setiap aktivitas di luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan; aktivitas dimaksud tentunya merupakan aktivitas yang dapat bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat merugikan citra dan reputasi Perusahaan.

Benturan Kepentingan dalam Keputusan Hasil Survei/Inspeksi

PT BKI sebagai Perseroan yang memprioritaskan aspek keselamatan telah menyadari bahwa hasil survei, laporan, dan sertifikat yang diterbitkan mempunyai implikasi terhadap aspek keselamatan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain pemilik kapal, pemilik cargo, asuransi, galangan, penumpang, awak kapal, Pemerintah, dan masyarakat umum secara luas. Seluruh jajaran Direksi, para Kepala Divisi, Kepala Satuan, Kepala Unit Produksi dan Wakilnya, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Surveyor, Inspektor dan staf teknik Kantor Pusat wajib menjaga independensinya dalam pengambilan keputusan, memberikan rekomendasi,

Conflict of Interest

The Company defines a conflict of interest as a situation where a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, or an employee of BKI who has the power and authority has a personal interest in any use of his authority, so that it can affect the quality and performance that should be. This conflict may involve the interests of service users, other agencies with an interest in BKI services, partners, employees (retired, active, or prospective employees) or even members of the community where the Company operates.

There are two main principles to prevent conflicts of interest from occurring and the further implications that arise:

- Not taking advantage of position for personal gain and or for the benefit of other people and or related parties.
- Avoid any activities outside the service that may negatively affect the independence and objectivity of consideration in decision making; The activity in question is certainly an activity that can conflict with the performance of the position or which can harm the image and reputation of the Company.

Conflict of Interest in Survey/Inspection Result Decision

PT BKI as a company that prioritizes safety aspects has realized that the results of surveys, reports, and certificates issued have implications for the safety aspects required by interested parties, including ship owners, cargo owners, insurance, shipyards, passengers, crew members, Government, and the general public at large. All levels of the Board of Directors, Heads of Divisions, Heads of Units, Heads of Production Units and their Deputy, Heads of Sections, Heads of Divisions, Surveyors, Inspectors and technical staff of the Head Office are required to maintain their independence in making decisions, providing



keputusan hasil survei, dan pembuatan laporan. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka pertimbangan aspek keselamatan adalah mutlak menjadi prioritas utama dengan mengacu peraturan dan regulasi yang berlaku.

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Manajemen, dan Karyawan tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu Perseroan di mana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai andil atau kepemilikan saham yang signifikan, atau mempunyai kepentingan finansial tertentu. Yang dimaksud dengan berpartisipasi dalam proses pengadaan adalah :

- Mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan kontraktor dan pemasok yang berkompetisi, yaitu setiap entitas usaha yang kemungkinan di masa mendatang dapat menjadi pesaing atau pemenang kontrak dari Perusahaan.
- Meminta atau menerima uang, pemberian/hadiah (gratifikasi), atau hal-hal lain yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kontraktor dan pemasok yang berkompetisi.
- Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan, dan sebaliknya. Pemasok barang dan jasa/kontraktor yang diundang untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan harus memenuhi persyaratan menghindari benturan kepentingan yang sama sebagaimana yang diberlakukan pada Komisaris, Direksi, Manajemen dan karyawan perusahaan.

Benturan Kepentingan dalam Aktivitas Sampingan

Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Manajemen, dan karyawan BKI dapat diizinkan melakukan aktivitas lain di luar jam kerja yang telah ditetapkan, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak menurunkan kemampuan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan. Keterlibatan dalam aktivitas lain di luar Perusahaan tidak boleh mengurangi independensi dan objektivitas dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi efektifitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan karyawan yang bersangkutan.

recommendations, decisions on survey results, and preparing reports. If there is a conflict of interest, then the consideration of the safety aspect is absolutely a top priority with reference to the applicable rules and regulations.

Conflict of Interest in Procurement

Members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Management, and Employees may not participate in any procurement activities involving a Company in which the person concerned or the family concerned has a significant share or share ownership, or has a particular financial interest. What is meant by participating in the procurement process is:

- Invite, approve, or discuss future work with competing contractors and suppliers, ie any business entity that may in the future become a competitor or contract winner from the Company.
- Request or accept money, gifts/gifts (gratuities), or other things of value, either directly or indirectly from competing contractors and suppliers.
- Attempt to obtain or disclose information related to the procurement process, and vice versa. Suppliers of goods and services/contractors who are invited to participate in the procurement process must meet the same requirements to avoid conflicts of interest as applied to the Commissioners, Directors, Management and employees of the company.

Conflict of Interest in Side Activities

Members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Management, and employees of BKI may be permitted to carry out other activities outside the stipulated working hours, provided that these activities do not reduce their ability to fulfill the mandated tasks. Involvement in other activities outside the Company must not reduce the independence and objectivity in making decisions or affect the effectiveness and timeliness of completing the work of the employee concerned.



Setiap karyawan harus menjunjung tinggi standar kinerja tanpa terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam setiap kegiatan sehari-hari. Apabila kemudian anggota Direksi dan atau karyawan Perusahaan merasakan kemungkinan timbulnya benturan kepentingan dalam kegiatan yang dilaksanakan, yang bersangkutan wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada anggota Direksi. Permohonan izin untuk melakukan aktivitas sampingan harus disampaikan dan mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang yang ditunjuk sebelum karyawan yang bersangkutan menjalankan pekerjaan sampingan tersebut atau melakukan kegiatan konsultansi selepas kerja apabila terjadi salah satu atau lebih dari beberapa hal-hal berikut :

- Terdapat kemungkinan benturan kepentingan.
- Aktivitas luar dinas tersebut merupakan hasil pengetahuan yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan di Perusahaan.
- Aktivitas luar dinas tersebut merupakan aktivitas yang tumpang tindih dengan hari dan jam kerja Perusahaan.
- Aktivitas tersebut melebihi enam jam kerja pada suatu hari kerja tertentu atau lebih dari 20 jam kerja pada minggu kerja tertentu.
- Dapat mengganggu kepentingan Perusahaan dan atau tugas dan tanggung jawab pokok karyawan yang bersangkutan.

Penyelewengan, Penyimpangan dan Sejenisnya

Perusahaan telah menetapkan kebijakan untuk melarang setiap bentuk penyelewengan dan penyimpangan serta senantiasa menerapkan prosedur yang wajib ditaati dan diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan dan penyimpangan.

Penyelewengan dan penyimpangan yang dimaksud adalah:

- Pelanggaran terhadap peraturan Perusahaan.
- Melakukan ketidakjujuran atau kebohongan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan.
- Melakukan penggelapan, penghilangan, atau pemindahtanganan segala sesuatu yang dapat merugikan Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung.
- Melakukan pemalsuan atau manipulasi surat berharga Perusahaan seperti cek, giro, sertifikat, dan lain-lain.

Every employee must uphold the standard of performance without exception and as much as possible act objectively and independently in every day-to-day activity. If later members of the Board of Directors and or employees of the Company feel the possibility of a conflict of interest in the activities being carried out, the person concerned must notify the members of the Board of Directors in writing. Applications for permission to carry out side activities must be submitted and obtained approval from the authorized official who is appointed before the employee concerned carries out such side work or conducts consulting activities after work if one or more of the following things occur:

- There is a potential conflict of interest.
- These out-of-office activities are the result of knowledge gained either directly or indirectly with work in the Company.
- These out-of-office activities are activities that overlap with the Company's working days and hours.
- The activity exceeds six hours of work on a certain work day or more than 20 hours of work on a certain work week.
- May interfere with the interests of the Company and or the main duties and responsibilities of the employee concerned.

Misappropriation, Deviation and the Like

The Company has established a policy to prohibit any form of fraud and irregularities and always implements procedures that must be adhered to and followed in relation to findings, confessions, reports, investigations, and investigations against suspicions of fraud and irregularities.

The deviations and deviations referred to are:

- Violation of Company regulations.
- Committing dishonesty or lying in connection with the performance of job duties.
- Embezzle, omit, or transfer anything that can harm the Company directly or indirectly.
- Counterfeit or manipulate the Company's securities such as cheques, demand deposits, certificates, and others.

- Menyalahgunakan aset Perusahaan.
- Melakukan pengalihan kas, surat berharga atau aset Perusahaan untuk penggunaan atau keuntungan pribadi.
- Melakukan penanganan dan pelaporan transaksi bisnis dan keuangan Perusahaan yang tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
- Melakukan pemalsuan atas catatan akuntansi Perusahaan atau laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

- Misappropriating Company assets.
- Divert cash, securities or Company assets for personal use or gain.
- Handling and reporting of the Company's business and financial transactions that are not in accordance with applicable procedures and regulations.
- Do falsification of the Company's accounting records or financial statements for personal interests or other interests that are detrimental to the Company, either directly or indirectly.

Hubungan dengan Pejabat Negara

Hubungan dengan pejabat negara adalah kebijakan Perseroan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap jajaran pejabat negara yang memiliki wewenang pada bidang operasi Perseroan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sejak tahun 2014, BKI telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system* atau WBS) untuk menampung pengaduan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Insan BKI dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Hal itu dikukuhkan dengan Keputusan Direksi No. DU.060C/LT.101/KI-14 tanggal 5 Februari 2014 tentang Pedoman Pelaporan pelanggaran/*Whistleblowing System* (WBS). Sistem ini dikembangkan dengan azas menjamin kerahasiaan pelapor di lingkungan kerja. Setiap karyawan dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pedoman GCG secara pribadi melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Utama atau Kepala SPI dalam hal terlapor bukan merupakan anggota Direksi. Apabila terlapor merupakan anggota Direksi, laporan ditujukan kepada Komisaris Utama. Setiap laporan wajib disidik oleh tim investigasi yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Direktur Utama atau Komisaris Utama. Tim ini bekerja secara independen, dengan menjaga integritas dan akuntabilitasnya. Meskipun demikian, perusahaan tetap melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja tim investigasi. Tim investigasi wajib menindaklanjuti setiap laporan yang dianggap sah, serta melaporkan perkembangan tindak lanjut laporan yang bersangkutan kepada Direktur Utama, dengan tembusan kepada anggota Direksi.

Relations with State Officials

Relations with state officials is the Company's policy to develop and maintain good relations and effective communication with every level of state officials who have authority in the Company's operations within the tolerance limits allowed by law.

Violation Reporting System

Since 2014, BKI has had a whistleblowing system (WBS) to accommodate complaints regarding alleged violations committed by BKI personnel in carrying out their duties and responsibilities. This was confirmed by the Decree of the Board of Directors No. DU.060C/LT.101/KI-14 dated February 5, 2014 concerning Guidelines for Reporting Pe Whistleblowing System (WBS). This system was developed with the principle of ensuring the confidentiality of the reporter in the work environment. Each employee can submit reports regarding alleged violations of the GCG Guidelines personally through a letter addressed to the President Director or Head of SPI in the event that the reported party is not a member of the Board of Directors. If the reported member is a member of the Board of Directors, the report is addressed to the President Commissioner. Each report must be investigated by an investigation team formed on an ad hoc basis by the President Director or President Commissioner. This team works independently, maintaining its integrity and accountability. Nevertheless, the company continues to monitor and evaluate the performance of the investigation team. The investigation team is required to follow up on every report deemed valid, as well as report the progress of the follow-up to the report concerned to the President Director, with copies sent to members of the Board of Directors.



Perlindungan terhadap Pelapor

Perseroan wajib memberikan perlindungan bagi Pelapor dan menjamin atas kerahasiaan identitasnya. Informasi terkait Pelapor terdokumentasikan dengan baik dan hanya boleh diketahui oleh Direktur Utama atau Kepala Pengawasan Intern dan Komisaris Utama atau Komite Audit, dalam hal ini penerima pengaduan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak lanjut pelaporan pelanggaran. Kebijakan perlindungan terhadap Pelapor:

1. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan;
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun;
3. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/Penyimpangan tersebut;

Kebijakan perlindungan Pelapor dimaksudkan pula untuk mendorong setiap Pegawai Perusahaan dan Pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor maupun keluarganya. Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor yang beritikad baik dan Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem penyelenggaraan perlindungan Pelapor. Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pelapor dari tindakan sebagai berikut :

1. Pemecatan yang tidak adil;
2. Penurunan jabatan atau pangkat;
3. Pelecehan dan/atau diskriminasi dan/atau tekanan dan/atau intimidasi dalam segala bentuknya;
4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

Whistleblower Protection

The Company is obliged to provide protection for the Whistleblower and guarantee the confidentiality of his/her identity. Information regarding the Whistleblower is well documented and may only be known by the President Director or Head of Internal Control and the President Commissioner or the Audit Committee, in this case the recipient of the complaint as the party responsible for the follow-up to reporting violations. Protection policy for Whistleblowers:

1. The identity of the Whistleblower is guaranteed by the Company;
2. The Company guarantees the protection of the Whistleblower from all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party as long as the Whistleblower maintains the confidentiality of the reported violation to any party;
3. The protection of the Whistleblower also applies to the parties conducting the Investigation as well as the parties providing information related to the Complaint/Disclosure;

The whistleblower protection policy is also intended to encourage every employee of the company and other whistleblowers to dare to report violations and ensure the safety of the Whistleblower and his/her family. The Company is committed to protecting Whistleblowers who have good intentions and the Company will comply with all relevant laws and regulations that apply to the implementation of the Whistleblower protection system. The Company provides protection to the Whistleblower from the following actions:

1. Unfair dismissal;
2. Demotion or rank;
3. Harassment and/or discrimination and/or pressure and/or intimidation in all its forms;
4. Adverse records in the personal data file (personal file record).





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY





TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, PT BKI membawa misi Pemerintah sebagai katalisator penggerak perekonomian nasional. Hal itu tercermin dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan dalam wujud Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan oleh Perseroan.

Hal tersebut merupakan bentuk komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat bagi Perseroan, komunitas setempat, dan masyarakat luas. Hal ini juga sebagai bentuk kepatuhan Perseroan terhadap Undang-undang (UU) No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di lingkungan BKI berlandaskan pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen Perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya dengan cara yang sesuai peraturan perundangan dan norma-norma yang berlaku umum.

As a State-Owned Enterprise (BUMN) whose entire capital is derived from separated state assets, PT BKI carries the Government's mission as a catalyst that drives the national economy. This is reflected in the implementation of the Company's Social and Environmental Responsibility (TJSL) in the form of the Partnership and Community Development Program (PKBL) carried out by the Company.

PKBL is also proof of the Company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment, which is beneficial for the Company, the local community, and the wider community. This is also a form of the Company's compliance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

The application of the principles of good corporate governance (GCG) within BKI is based on compliance with applicable laws and regulations. This shows the Company's commitment to realizing its vision and mission in accordance with laws and regulations, and generally accepted norms.

LANDASAN HUKUM

LEGAL FOUNDATION

Undang-Undang

Undang-undang (UU) No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Constitution

Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Keputusan Menteri

- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 316/KMK.16/1994 tanggal 27 Juni 1994 dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan

Ministerial decree

- Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 316/KMK.16/1994 dated June 27, 1994 and Decree of the Minister of SOE Number KEP-236/MBU/2003 dated June 17, 2003 concerning

Badan Usaha Milik Negara dengan Pengusaha Kecil dan Program Bina Lingkungan selanjutnya disebut PKBL.

- b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas perubahan PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pengganti Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 dan diubah dengan PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- d. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- e. Surat Edaran Nomor: SE-03/MBU.S/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Wilayah Binaan dan BUMN Koordinator PKBL tahun 2007.

the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Entrepreneurs and the Community Development Program, hereinafter referred to as PKBL.

- b. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-20/MBU/2012 dated December 27, 2012 concerning Amendments to the amendment to PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007 concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and the Community Development Program in lieu of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number KEP-236/MBU/2003 dated June 17, 2003 concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and the Community Development Program.
- c. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-07/MBU/05/2015 dated May 22, 2015 and amended by PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 concerning the Partnership and Community Development Program for State-Owned Enterprises.
- d. Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises SE-433/MBU/2003 dated September 16, 2003 concerning Guidelines for the Implementation of the BUMN Partnership Program with Small Business and the Community Development Program.
- e. Circular Letter Number: SE-03/MBU.S/2007 dated July 17, 2007 regarding the Target Areas and BUMN Coordinator for PKBL in 2007.

Peraturan Internal Perseroan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor DU.086/KP.903/KI-14 tanggal 25 Februari 2014, Surat Keputusan Direksi Nomor DU.181/KP.903/KI-15 tanggal 09 Oktober 2015 dan Surat Keputusan Direksi Nomor DU.051/KP.903/KI-17 tanggal 10 Februari 2017.

Tujuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

- a. Program PKBL dimaksudkan untuk mengembangkan dan menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus menjaga hubungan yang saling menunjang antara BUMN, koperasi, dan swasta khususnya pengusaha kecil dan koperasi.

Company Internal Regulations

Technical Guidelines for the Implementation of the Partnership Program and Community Development Program (PKBL) of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) in accordance with the Decree of the Board of Directors Number DU.086/KP.903/KI-14 dated February 25, 2014, the Decree of the Board of Directors Number DU.181/KP. 903/KI-15 dated October 09, 2015 and Decree of the Board of Directors Number DU.051/KP.903/KI-17 dated February 10, 2017.

The Objectives of the Partnership and Community Development Program

- a. The PKBL program is intended to develop and create a healthy business climate while maintaining mutually supportive relationships between SOEs, cooperatives, and the private sector, especially small entrepreneurs and cooperatives.



- b. Mendorong koperasi dan usaha kecil menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mampu melaksanakan, meningkatkan dan mengembangkan usahanya secara lebih efektif dan efisien, serta dapat memberi nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya, maupun masyarakat di sekitar.
- c. Perusahaan turut serta dalam rangka program pelestarian lingkungan pada setiap cabang sesuai dengan program di daerah masing-masing dan Pemerintah Pusat, terutama pada *marine pollution* yang merupakan salah satu kegiatan usaha PT BKI.
- b. Supporting the cooperatives and small enterprises to become people's economic institutions capable to implement, improve and develop their businesses more effectively and efficiently, and can provide added value and greater benefits for their members, as well as the surrounding community.
- c. The Company takes part in environmental conservation programs at each branch in accordance with the programs in their respective regions and the Central Government, especially on marine pollution which is one of PT BKI's business activities.

SASARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

THE TARGETS OF THE PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

- a. Terciptanya kesempatan usaha dan lapangan kerja yang lebih luas bagi usaha kecil dan koperasi sampai ke masyarakat pedesaan.
- b. Terselenggaranya sistem manajemen yang lebih rasional dan efisien yang diikuti dengan peningkatan kemampuan baik permodalan, personil, administrasi, keuangan maupun kemandirian wirausaha.
- c. Pembinaan tahun 2020 diprioritaskan kepada usaha kecil perorangan.
- a. The creation of wider business opportunities and employment opportunities for small businesses and cooperatives to the rural community.
- b. The implementation of a more rational and efficient management system that is followed by an increase in the ability of both capital, personnel, administration, finance and entrepreneurial independence.
- c. The fostering program for 2020 is prioritized for individual small businesses.

PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

IMPLEMENTATION OF THE PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015, PT BKI selaku BUMN Pembina dapat menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di seluruh wilayah Indonesia.

Based on Article 6 paragraph (1) Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015, PT BKI as Fostering SOE can channel the funds for Partnership Program and Community Development Program throughout Indonesia.

Program Kemitraan

Merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN untuk disalurkan kepada usaha kecil sesuai dengan PER-02/MBU/7/2017. Jumlah pinjaman untuk setiap mitra binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000.

Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.

Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan difokuskan pada kegiatan untuk memberdayakan kondisi sosial ekonomi di sekitar wilayah usaha Perusahaan. Sesuai dengan PER-02/MBU/04/2020, ruang lingkup Program Bina Lingkungan BUMN Pembina meliputi:

- a. Bantuan bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah;
- b. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
- c. Bantuan peningkatan kesehatan.
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e. Bantuan sarana ibadah;
- f. Bantuan pelestarian alam.
- g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Sumber Dana

Sumber Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menurut PER-03/MBU/12/2016 berasal dari:

- a. Penyisihan sebagian laba bersih dan/atau biaya yang ditetapkan oleh Menteri untuk Perum atau RUPS untuk Persero, maksimum sebesar 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan;

Partnership Program

It is a program to improve the capability of small businesses to become strong and independent through the use of funds from the portion of profit generated by SOE to be distributed to small businesses in accordance with PER-02/MBU/7/2017. The maximum loan amount for each fostered partner of the Partnership Program is Rp200,000,000.

The Partnership Program Funds are distributed in the form of:

- a. Loans to finance working capital and/or purchase of fixed assets in order to increase production and sales.
- b. Additional loans to finance short-term needs in order to fulfill orders from business partners of fostered partners.

Community Development Program

The Community Development Program is focused on activities to empower socio-economic conditions around the Company's business areas. In accordance with PER-02/MBU/04/2020, the scope of the State-Owned Enterprises Community Development Program includes:

- a. Assistance for natural disasters and non-natural disasters, including those caused by epidemics;
- b. Assistance for education, in the form of training, educational infrastructure and facilities;
- c. Assistance for health improvement.
- d. Assistance for the development of public infrastructure and/or facilities.
- e. Assistance for prayer facilities.
- f. Assistance for nature conservation.
- g. Social community assistance for poverty alleviation.

Source of funds

Sources of Funds for the Partnership Program and Community Development Program according to PER-03/MBU/12/2016 come from:

- a. Provision for a portion of net profit and/or costs as determined by the Minister for Perum or GMS for Persero, maximum of 4% (four percent) of the previous year's projected net profit, which is definitively determined at the time of ratification of the annual report;



- b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil dari Program Kemitraan;
 - c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan yang ditempatkan;
 - d. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada;
 - e. Sisa dana Program Kemitraan tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana berikutnya.
- b. Loan/margin/profit sharing administration services from the Partnership Program;
 - c. Proceeds from interest on deposits and/or demand deposits from the placement of Partnership Program funds;
 - d. Transfer of Partnership Program funds from other SOEs, if any;
 - e. The remaining funds for the Partnership Program for the previous financial year will become the source of funds for the next year.

Realisasi Penggunaan dana PKBL

Dana PKBL yang tersedia pada tahun 2020 sebesar Rp1.620 juta, dan dana yang disalurkan sebesar Rp1.270 juta. Efektifitas penyaluran mencapai 78,39 persen, lebih rendah dibanding tahun 2019 yakni sebesar 91,56 persen. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial bersekala besar terkait dengan pandemi Covid-19.

Tabel Realisasi Penggunaan Dana PKBL Komparatif

Realization of the use of PKBL funds

The PKBL funds in 2020 amounted to Rp1,620 million, and the funds disbursed are Rp1,270 million. The effectiveness of distribution reached 78.39 percent, lower than in 2019 which was 91.56 percent. This is due to the large-scale social restriction policy related to the Covid-19 pandemic.

Table of Comparison of Realized Use of Funds for PKBL

Uraian Description	Realisasi Realization			
	2020	2019	2018	2017
Saldo Awal/Beginning of Balance	141	104	569	985
Bagian Laba /Portion of Profit	0	0	500	900
Pengembalian Pokok Pinjaman/Repayment of Loan Principal	1.381	2.220	2.777	2.076
Jasa Administrasi/Administration Services	92	147	310	346
Jasa Giro/Current Account Services	6	8	3	19
Angsuran Belum Teridentifikasi/Unidentified Installment	0	0	2	6
Pendapatan Lain/Other Income	0	0	0	0
Jumlah Dana Tersedia/Amount of Funds Available	1.620	2.479	4.161	4.332
Jumlah Dana yang disalurkan/Amount of Funds disbursed	1.270	2.338	4.051	3.655
Efektivitas Penyaluran/Effectiveness of Channeling	78,39%	91,56%	97,36%	84,37%

Realisasi Program Kemitraan

Realisasi Program Kemitraan pada tahun 2020 sebesar Rp2.750 juta dalam bentuk pemberian pinjaman sebesar Rp2.650 juta dan dana pembinaan sebesar Rp100 juta. Sebagian besar sumber dana berasal dari Pengembalian Pinjaman dan Bunga yakni sebesar Rp2.711 juta.

Realization of Partnership Program

Realization of Partnership Program in 2020 amounted to Rp2,750 million in the form of loans of Rp2,650 million, and fostering funds of Rp100 million. Most of the sources of funds came from loan repayments and interest, which amounted to Rp2,711 million.

Tabel Realisasi Program Kemitraan**Table of Partnership Program Realization**

Uraian Description	Anggaran Budget 2020	Realisasi Realization 2020	Realisasi Realization 2019
Sumber Dana Kas/Source of Cash Funds			
Saldo Awal/Beginning of Balance	34	141	104
Bagian Laba/Portion of Profit	0	0	0
Pengembalian Pinjaman & Jasa Administrasi /Loan Repayment & Administrative Services	2.711	1.473	2.367
Jasa Giro/Current account service	5	6	8
Angsuran Belum Teridentifikasi/Unidentified Installment	0	0	0
Pendapatan Lain-lain/Other Revenues	0	0	0
Jumlah/Total	2.750	1.620	2.479
Penggunaan/Usage			
Pemberian Pinjaman/Loan Provision	2.650	1.270	2.270
Dana Pembinaan/Fostering Funds	100	0	68
Biaya Administrasi & Umum/Administration & General Fee	0	0	0
Biaya dan Pengeluaran Lainnya/Other Costs and Expenses	0	0	0
Jumlah Penggunaan/Total Expenses	2.750	1.270	2.338
Saldo Akhir Kas/Ending Balance	0	350	141

Penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan selama tahun 2020 diberikan kepada daerah mitra binaan di sepuluh provinsi dan terbagi dalam tujuh bidang usaha.

The distribution of loan funds for the Partnership Program during 2020 was given to fostered partners in ten provinces and divided into seven business fields.

Tabel Penyaluran Pinjaman dana Program Kemitraan Berdasarkan Provinsi**Table of Loan Distribution of Partnership Program by Province**

Provinsi Province	Anggaran Budget 2020	Realisasi Realization 2020	Realisasi Realization 2019
DKI Jakarta	450	1.050	180
DI Yogyakarta	250	0	250
Jawa Timur	300	0	464
Jawa Barat	250	0	300
Jawa Tengah	250	0	459
Kalimantan Barat	200	0	200
Kalimantan Timur	250	0	227
Sumatera Utara	300	220	0
Sulawesi Utara	200	0	190
Ambon	200	0	0
Jumlah/Total	2.650	1.270	2.270
Dana Pembinaan/Fostering Fund	100	0	68
Jumlah/Total	2.750	1.270	2.338

Provinsi yang paling banyak mendapat bantuan dana kemitraan adalah provinsi DKI Jakarta sebesar Rp450 juta, disusul provinsi Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Utara masing-masing sebesar Rp300 juta.

Berdasarkan bidang usaha, dana program kemitraan paling banyak dialokasi ke bidang perdagangan yaitu sebesar Rp740 juta. Jumlah bantuan Bidang Jasa sebesar Rp265 juta.

Tabel Penyaluran Pinjaman Dana Program Kemitraan Berdasarkan Bidang Usaha

The province that received the most partnership funding assistance was DKI Jakarta, amounting to Rp450 million, followed by the provinces of East Java, North Sumatra, and North Sulawesi with Rp300 million each.

Based on the line of business, most of the partnership program funds were allocated to the trade sector, amounting to Rp740 million. The amount of assistance in the Service Sector is Rp265 million.

Table of Distribution of Partnership Program Funds by Business Sector

Bidang Sector	Realisasi Realization 2020		Realisasi Realization 2019		(dalam jutaan rupiah/in million rupiah)
	Jumlah Mitra Number of Partners	Jumlah dana Amount of funds	Jumlah Mitra Number of Partners	Jumlah dana Amount of funds	
Bidang Jasa/Service Sector	8	265	15	85	
Bidang Peternakan/Animal Husbandry Sector	1	50	2	35	
Bidang Perindustrian/Industry Sector	2	25	24	789	
Bidang Perikanan/Fishery Sector	2	90	1	15	
Bidang Perdagangan/Trade Sector	16	740	26	752	
Bidang Pertanian/Agriculture Sector	0	0	2	70	
Bidang Perkebunan/Plantation Sector	2	100	1	524	
Dana Pembinaan/Fostering Fund	0	0	0	68	
Jumlah/Total	31	1.270	71	2.270	

Realisasi Program Bina Lingkungan

Dana Program Bina Lingkungan bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar wilayah usaha BUMN dengan jalan memberdayakan kondisi sosial. Bantuan diberikan dalam bentuk sumbangan korban bencana alam, pendidikan/pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, dan pengentasan kemiskinan.

Sepanjang tahun 2019 BKI menyalurkan dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp2.000 juta yang bersumber dari *dropping* dana dari kantor pusat.

Realization of Community Development Program

The Community Development Program Fund aims to provide benefits to the community around the BUMN business area by empowering social conditions. Assistance is given in the form of donations to victims of natural disasters, education/training, health improvement, development of public infrastructure and facilities, religious facilities, assistance for nature conservation, and poverty alleviation.

Throughout 2019, BKI disbursed funds of Rp2,000 million for the Community Development Program which came from dropping funds from the head office.

Tabel Realisasi Program Bina Lingkungan**Table of Community Development Program Realization**

Jenis Bantuan Type of Assistance	Anggaran Budget 2020	Realisasi Realization of 2020	Realisasi Realization of 2019
(dalam jutaan rupiah/in million rupiah)			
Bantuan BUMN Hadir Untuk Negeri (SMN)/Assistance for BUMN Hadir Untuk Negeri (SMN) Program	0	0	600
Bantuan Bencana Alam dan Non Alam/Natural and Non-Natural Disaster Assistance	500	1.378	150
Bantuan Pendidikan & Pelatihan/Education & Training Assistance	500	15	120
Bantuan Peningkatan Kesehatan/Health Improvement Assistance	100	100	10
Prasarana/Sarana Umum/Public Infrastructure/Facilities	300	19	103
Sarana Ibadah/Place of worship	400	125	170
Pelestarian Alam/Nature Conservation	150	0	0
Sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan/Social community for poverty alleviation	50	8	38
Jumlah/Total	2.000	1.645	1.191
Beban Pembinaan/Fostering Expenses	-	-	-
Beban Administrasi & Umum/Administration & General Expenses	-	-	-
Beban dan Pengeluaran Lainnya/Cost and Other Expenses	-	-	-
Jumlah Beban/Total Expenses	-	-	-
Jumlah Penggunaan/Total Usage	2.000	1.645	1.191
Saldo Akhir/Ending Balance	0	0	0

KEGIATAN CSR BKI SEPANJANG 2020

BKI CSR ACTIVITIES THROUGHOUT 2020



Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga sekitar Perusahaan, PT BKI (Persero) memberikan bantuan kepada RW setempat berupa alat pelindung diri (APD), alat semprot disinfektan, dan cairan disinfektan dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19.

As a form of caring for residents around the Company, PT BKI (Persero) provides assistance with personal protective equipment (PPE), disinfectant spray equipment, and disinfectant liquid for local residents in order to prevent the spread of the Covid-19 virus.



PT BKI (Persero) menyalurkan bantuan Bina Lingkungan kepada panitia pembangunan mushola Al-Hakmi di Perum Pesona Mutiara Indah di Desa Sriamur, Tambun Utara Bekasi.

PT BKI (Persero) distributed Community Development assistance to the committee for the construction of the Al-Hakmi mosque at Perum Pesona Mutiara Indah in Sriamur Village, Tambun Utara Bekasi.



PT BKI (Persero) melalui Cabang Pratama Belawan menyalurkan bantuan dana Program Kemitraan di Wilayah Sumatra Utara. Bantuan diberikan kepada pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi binaan PT BKI.

PT BKI (Persero), through the Belawan Pratama Branch, distributed funding assistance for the Partnership Program in the North Sumatra Region. The assistance is provided for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which become PT BKI's fostered partner.



Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar, PT BKI (Persero) menyalurkan dana Program Kemitraan kepada pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Jakarta.

As a form of implementing corporate responsibility towards the surrounding environment, PT BKI (Persero) distributes Partnership Program funds to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Jakarta area.



PT BKI (Persero) memberikan bantuan dana Bina Lingkungan kepada panitia pembangunan Taman Bacaan dan TPA Kanzul Arsy, di Harapan Mulya Bekasi Utara.

PT BKI (Persero) handed over Community Development fund assistance for Taman Bacaan and TPA Kanzul Arsy, in Harapan Mulya Bekasi Utara.



PT BKI menunjukkan kepedulian terhadap korban banjir dengan memberikan bantuan sembako di lingkungan RT 001/RW 015 Kelurahan Kebon Bawang Jakarta Utara. Bantuan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama BKI, Rudiyanto.

PT BKI showed its concern for flood victims by providing basic food assistance in the neighborhood of RT 001/RW 015, Kebon Bawang Village, North Jakarta. The assistance was delivered directly by the President Director of BKI, Rudiyanto.



LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL STATEMENTS





BUMN UNTUK
INDONESIA



2020 FINANCIAL STATEMENT AUDITED

bKI



PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero)

HEAD OFFICE

Address : Jl. Yos Sudarso No. 38 - 39 - 40, Tanjung Priok, JAKARTA - 14320, INDONESIA
Phone : (021) 4301017, (021) 4361903, Fax : (021) 43932509
E-mail : ho@bki.co.id
Website : www.bki.co.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
(PERSERO)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Rudyanto
Alamat kantor : Jl. Yos Sudarso No. 38-39-40,
Tanjung Priok, Jakarta 14320

Alamat rumah : Jl. Pancoran Timur II A/14
Jakarta Selatan

Nomor telepon : 021-4301017 / 021-4361903

Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Bandung Pardede
Alamat kantor : Jl. Yos Sudarso No. 38-39-40,
Tanjung Priok, Jakarta 14320

Alamat rumah : Taman Sari VIII No.24
Perum JTN Baru, Jakarta Timur

Nomor telefon : 021-4301017 / 021-4361903

Jabatan : Direktur Keuangan dan Administrasi

menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
 2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan dengan basis akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT
REGARDING RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020
PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
(PERSERO)**

We, the undersigned:

- 1. Name* : Rudiyanto
Office address : Jl. Yos Sudarso No. 38-39-40,
Tanjung Priok, Jakarta 14320

Residential address : Jl. Pancoran Timur II A/14
Jakarta Selatan

Phone number : 021-4301017 / 021-4361903

Position : President Director

2. Name : Bandung Pardede
Office address : Jl. Yos Sudarso No. 38-39-40,
Tanjung Priok, Jakarta 14320

Residential address : Taman Sari VIII No.24
Perum JTN Baru, Jakarta Timur

Phone number : 021-4301017 / 021-4361903

Position : Finance and Administration

state that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements;
 2. The special purpose financial statements have been prepared and presented on the basis of accounting in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
 3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statement;
b. The financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts;
 4. We are responsible for the Company's internal control systems.

Thus this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*
Jakarta, 15 Februari / *February* 2021



Direktur Utama / KARTA - U Direktur Keuangan dan Administrasi/
President Director *Finance and Administration Director*

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

No: 00080/2.1133/AU.1/05/0345-1/1/II/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris,
dan Direksi
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

The Shareholders, Board of Commissioners and
Directors
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

We have audited the accompanying financial statements of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) ("the Company"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Tel: +62 21 3144003 • Fax: +62 21 3144213 • Email: jkt.office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230

Executive Office : Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267 • Central Jakarta 10340 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 25 Februari 2020.

Auditor's responsibility (continued)

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) as of 31 December 2020 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

The financial statements of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) for the year ended 31 December 2019 were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on those financial statements on 25 February 2020.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Yosef Kresna Budi, CPA
Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0345
Izin Usaha/Business License No. 855/KM.1/2017

15 Februari/February 2021

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
ASET				ASSETS
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	3	405.648.860.026	246.545.816.799	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	4	273.080.523.245	308.068.607.163	Accounts receivable
Pendapatan akan diterima	8	4.980.557.160	17.886.800.858	Accrued revenue
Uang muka	5	254.317.979	3.565.445.437	Advance payment
Pajak dibayar di muka	13a	1.024.692.027	6.102.576.859	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka	6	2.049.467.071	11.135.788.881	Prepaid expenses
Aset lancar lainnya	7	987.149.444	1.092.002.661	Other current assets
Jumlah aset lancar		<u>688.025.566.952</u>	<u>594.397.038.658</u>	Total current assets
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset tetap	9	279.978.593.433	289.789.019.330	Fixed assets
Aset pajak tangguhan	13e	47.436.907.761	45.373.117.985	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	10	1.018.378.670	18.069.563.181	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar		<u>328.433.879.864</u>	<u>353.231.700.496</u>	Total non-current assets
JUMLAH ASET		<u>1.016.459.446.816</u>	<u>947.628.739.154</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang usaha	11	10.422.611.295	18.719.910.242	Accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	12	39.848.660.445	35.783.604.384	Accrued expenses
Utang pajak	13c	29.125.209.656	50.956.062.554	Taxes payable
Utang bruto	14	10.994.963.666	12.653.373.734	Gross payable
Liabilitas jangka pendek lainnya		-	17.473.914	Other current liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>90.391.445.062</u>	<u>118.130.424.828</u>	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Liabilitas imbalan pasca kerja	15	137.052.996.094	121.746.489.201	Post-employment benefits obligations
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>137.052.996.094</u>	<u>121.746.489.201</u>	Total liabilities non-current liabilities
Jumlah liabilitas		<u>227.444.441.156</u>	<u>239.876.914.029</u>	Total liabilities
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to the owner of parent entity
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham				Share capital - par value Rp1,000,000 per share
Modal dasar - 600.000 saham,				Authorized capital - 600,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 255.000 saham	16	255.000.000.000	255.000.000.000	Paid-up capital - 255,000 shares
Saldo laba				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya		425.985.561.750	326.857.397.309	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		100.499.284.090	110.143.164.441	Unappropriated
Komponen ekuitas lainnya				Others components of equity
Selisih penjabaran mata uang asing		2.759.096.286	2.759.096.286	Difference in foreign currency translation
Keuntungan aktuarial program imbalan pasca kerja		4.771.063.534	12.992.167.089	Actuarial gain of employee benefits
Jumlah ekuitas		<u>789.015.005.660</u>	<u>707.751.825.125</u>	Total equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>1.016.459.446.816</u>	<u>947.628.739.154</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
PENDAPATAN USAHA	17	791.835.142.259	908.438.955.359	REVENUE
BEBAN JASA LANGSUNG	18	(382.093.639.835)	(450.177.274.431)	DIRECT COST
BEBAN JASA TIDAK LANGSUNG	18	(88.991.949.588)	(100.119.297.407)	INDIRECT COST
LABA KOTOR		320.749.552.836	358.142.383.521	GROSS PROFIT
Beban penjualan	19	(5.515.316.535)	(6.295.960.581)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	20	(169.273.112.795)	(180.877.899.181)	General and administrative expenses
Beban lain-lain - bersih	21	(12.937.182.289)	(20.360.673.386)	Other expenses - net
LABA SEBELUM PAJAK		133.023.941.217	150.607.850.373	PROFIT BEFORE TAX
(Beban)/manfaat pajak penghasilan				Income tax (expenses)/benefit
Kini	13b	(32.269.674.105)	(45.102.652.241)	Current
Tangguhan	13b	(254.983.022)	4.637.966.309	Deferred
Jumlah beban pajak		(32.524.657.127)	(40.464.685.932)	Total tax expenses
LABA TAHUN BERJALAN		100.499.284.090	110.143.164.441	PROFIT FOR THE YEAR
(BEBAN)/PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE (LOSS)/INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be not reclassified subsequently to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	15	(10.539.876.353)	(9.869.347.831)	Remeasurement of defined benefit obligation
Pajak terkait		2.318.772.798	2.467.336.957	Related tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(8.221.103.555)	(7.402.010.874)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
		92.278.180.535	102.741.153.567	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

*The accompanying notes to financial statements
form an integral part of these financial statements.*

The original financial statements
included herein is in Indonesian language

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

	Saldo laba/ Retained earning		Komponen ekuitas lainnya/ Other components of equity		Balance as of 1 January 2019
	Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	
Saldo 1 Januari 2019		255.000.000.000	322.851.496.947.	11.295.677.362	2.759.096.286
Laba tahun berjalan	-	-	110.143.164.441	-	110.143.164.441
Pendapatan komprehensif lainnya	-	-	-	-	(7.402.010.874)
Cadangan umum	16	-	4.005.900.362	(4.005.900.362)	-
Dividen tunai	16	-	-	(7.289.777.000)	-
Saldo 31 Desember 2019		255.000.000.000	326.857.397.309	110.143.164.441	2.759.096.286
Laba tahun berjalan	-	-	100.449.284.090	-	100.449.284.090
Pendapatan komprehensif lainnya	-	-	-	-	(8.221.103.555)
Cadangan umum	16	-	99.128.164.441	(99.128.164.441)	-
Dividen tunai	16	-	-	(11.015.000.000)	-
Saldo 31 Desember 2020		255.000.000.000	425.985.561.750	100.449.284.090	2.759.096.286
					Balance as of 31 December 2020

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to financial statements
form an integral part of these financial statements.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan dan lainnya	849.432.006.148	908.705.337.093	<i>Cash receipts from customer and others</i>
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan	-	4.178.136.293	<i>Received from corporate income tax</i>
Penerimaan lebih bayar pajak pertambahan nilai	-	2.134.761.572	<i>Received from overpayment VAT</i>
Pembayaran kepada karyawan dan pemasok	(650.628.544.253)	(773.785.404.666)	<i>Payment to suppliers and employee</i>
Penyaluran kas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	(1.644.915.252)	(1.191.315.788)	<i>Cash payment for the partnership and community</i>
Pembayaran pajak penghasilan Badan	(35.422.217.622)	(35.575.131.334)	<i>Payment corporate income tax</i>
Penerimaan bunga	<u>12.756.913.983</u>	<u>6.794.050.298</u>	<i>Interest received</i>
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>174.493.243.004</u>	<u>111.260.433.468</u>	<i>Net cash flows provided by operating activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap	(4.512.458.024)	(12.465.431.586)	<i>Acquisition of fixed assets</i>
Penjualan aset tetap	<u>137.258.247</u>	<u>355.759.923</u>	<i>Disposal of fixed assets</i>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(4.375.199.777)</u>	<u>(12.109.671.663)</u>	<i>Net cash flows used in operating activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran dividen	(11.015.000.000)	(7.289.777.000)	<i>Payments of dividend</i>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(11.015.000.000)</u>	<u>(7.289.777.000)</u>	<i>Net cash flows used in financing activities</i>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS			NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	159.103.043.227	91.860.984.805	CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>246.545.816.799</u>	<u>154.684.831.994</u>	CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF YEAR
	<u>405.648.860.026</u>	<u>246.545.816.799</u>	

***TAMBAHAN INFORMASI-
TRANSAKSI NON-KAS**

Penambahan aset dalam pembangunan melalui beban yang masih harus dibayar

	2020	2019
	<u>396.037.500</u>	-

***SUPPLEMENTARY**

INFORMATION:

NON-CASH TRANSACTION

Addition on assets under constructions through accrual

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), selanjutnya disebut ("Perusahaan") merupakan peralihan dari PN Biro Klasifikasi Indonesia yang didirikan tanggal 1 Juli 1964. Peralihan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1977. Akta pendirian Perusahaan dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 57 tahun 1977 tanggal 21 April 1977 yang diperbaiki dengan Akta Nomor 35 tanggal 19 Oktober 1978 dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/345/19 tanggal 7 November 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11 tahun 1979 tanggal 6 Februari 1979 (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tahun 1999).

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat di hadapan H. Marthin Aliunir, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S299/MBU/05/2020 tertanggal 5 Mei 2020 perihal perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia. Perubahan tersebut menyetujui penambahan dan perubahan kegiatan usaha pada pasal 3 ayat (2) dan ayat (3). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0036611.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), hereinafter referred to as ("Company") is a transition from the PN Biro Klasifikasi Indonesian which was established on 1 July 1964. This transition was based on Government Regulation Number 1 of 1977. The Company's deed was made of by Notary Imas Fatimah, S.H., No. 57 of 1977 dated 21 April 1977 which was amended by Deed Number 35 dated 19 October 1978 and was ratified by Decree of the Minister of Justice Number Y.A.5/345/19 dated 7 November 1978 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 11 of 1979 dated 6 February 1979 (Additional State Gazette of the Republic of Indonesia No. 58 of 1999).

The Articles of Association of the Company have been amended several times most recently with Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 4 dated 18 May 2020 made by H. Marthin Aliunir, S.H., Notary in Jakarta. These changes concerning adjustments to Letter of Minister of Owned Enterprises No.S299/MBU05/2020 dated 5 May 2020 regarding the amandement to the Articles of Association of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia. The amandement approves the addition and changes business activities in article 3 (2) and article 3 (3). The amandement of the Articles of Association was approved by the Minister of Law and Republic of Human Rights Indonesia with decree No. AHU-0036611.AH.01.02. of 2020 dated 19 May 2020.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Berdasarkan anggaran dasar, ruang lingkup kegiatan usaha utama Perusahaan adalah melakukan kegiatan usaha klasifikasi dan register kapal, konsultasi dan supervisi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Anggaran Dasarnya, ruang lingkup kegiatan usaha utama Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Klasifikasi dan Registrasi Kapal:

- Pemeriksaan konstruksi, pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikasi klas dan registrasi kapal;
- Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai;
- Pengujian dan sertifikasi material dan komponen;
- Pengujian dan penerbitan sertifikasi kualifikasi juru las, inspektur las, dan ahli las;
- Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi bidang statutoria berdasarkan otorisasi dari pemerintah Republik Indonesia, maupun pemerintah negara lain;
- Bertindak sebagai agen dan/atau mewakili klasifikasi asing/konsultan asing dan;
- Melaksanakan sertifikasi sesuai standar internasional.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and general information (continued)

Based on the articles of association, the scope the main activity of the Company's business is to conduct business activities in the field of ship classification and registration services, consulting and supervision services and optimization of utilization of resources owned by the Company to produce goods and/or services of high quality and strong competitiveness, to obtain/pursue jurisdiction to increase the value of the Company by applying the principles of a Limited Liability Company.

In accordance with its Articles of Association, the scope of Company main business activities are as follows:

1. Business Activities of Ship Classification and Registration such as:

- *Inspection of construction, supervision and testing as well as recording of class certification and vessel registration;*
- *Inspection and testing of floating equipment and offshore construction facilities;*
- *Testing and certifying materials and components;*
- *Testing and publishing qualifications welders certification, welding inspectors, and welding experts;*
- *Perform inspection and certification of statutory based on authorization from the government of the Republic of Indonesia, as well as government of other countries;*
- *Act as an agent and/or representing foreign classification/ foreign consultant and;*
- *Perform certification according to international standards.*

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

2. Kegiatan Komersil (Konsultasi dan Supervisi), yaitu:

- Konsultasi dan supervisi dibidang kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- Penilaian, perencanaan, dan pengawasan dibidang teknologi kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- Pengujian material dan komponen;
- Konsultasi teknik/ *engineering* sesuai standar nasional Internasional;
- Pelatihan sertifikasi dan non sertifikasi dibidang maritime, k3, minyak dan gas minerba, energy baru dan terbarukan, kelistrikan, konstruksi, korosi, system manajemen, dan sumber daya manusia.
- Melakukan sertifikasi teknik pada umumnya;
- Kegiatan jasa rekayasa, jasa konstruksi, dan jasa pemborongan non konstruksi dibidang instalasi migas, panas bumi, serta industri pertambangan pada umumnya;

3. Kegiatan bisnis dalam rangka pengembangan digitalisasi bidang kelautan, industri minyak dan gas bumi, pertambangan dan industri pada umumnya maupun turunannya;

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk properti, perkantoran, apartemen, perhotelan, perencanaan dan penyelenggaraan konfrensi, pertemuan dan pameran bidang kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi, serta pertambangan pada umumnya maupun turunannya.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and general information (continued)

2. Commercial Activities (Consultation and Supervision), such as:

- Consultation and supervision in the field of marine and oil and gas, geothermal and mining industries in general;
- Assessment, planning, and supervision in the field of marine technology and the oil and gas industry, geothermal and mining in general;
- Testing of materials and components;
- Technical/ engineering consulting according to international national standards;
- Certification and non-certification training in the fields of maritime, K3, oil and gas and coal, new and renewable energy, electricity, construction, corrosion, management systems, and human resources;
- Perform technical certification in general;
- Engineering services, construction services, and non-construction contractor services in the fields of oil and gas, geothermal installations, and the mining industry in general;

3. Business activities in order to develop the digitization of the marine sector, the oil and gas industry, mining and industry in general and its derivatives;

In addition to the business activities as stated, the Company can conduct business activities in order to optimize the utilization of the Company's resources for property, offices, apartments, hotels planning and holding conferences, meetings and exhibitions in the field of tourism and the oil and gas, geothermal, as well as mining in general and its derivatives.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur Perusahaan

Kantor Pusat PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) berdomisili di Jl. Yos Sudarso No.38-40, Tanjung Priok Jakarta Utara, 14320.

Jumlah seluruh unit kerja yaitu Kantor Pusat dan cabang adalah berjumlah 38 unit kerja, yang terdiri dari 2 (dua) segmen usaha yaitu segmen klasifikasi 18 unit kerja dan segmen komersil berjumlah 20 unit kerja.

Pada tahun 2020, berdasarkan Keputusan Direksi No.DU.026/LT.101/KI-20 tanggal 18 Maret 2020 tentang penyempurnaan Struktur Organisasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), Perusahaan menetapkan perubahan status Kantor unit Produksi/ Cabang, yakni sebagai berikut:

1. Menetapkan Cabang Madya Klas Banten menjadi Cabang Utama Klas Banten;
2. Menetapkan Kantor Perwakilan Komersil Pontianak menjadi cabang Pratama Komersil Pontianak;
3. Menetapkan SBU Marine & Offshore menjadi SBU Marine, Offshore & Migas;
4. Menetapkan Cabang Utama Klas Tanjung Priok memiliki Bagian Offshore Klas;
5. Penambahan Portfolio bisnis yaitu PMU Telematika.

Kantor dan unit produksi masing-masing segmen adalah sebagai berikut:

No.	Cabang Segmen Klasifikasi
1	Cabang Utama Klas Batam
2	Cabang Utama Klas Samarinda
3	Cabang Utama Klas Singapore
4	Cabang Utama Klas Surabaya
5	Cabang Utama Klas Tanjung Priok
6	Cabang Utama Klas Banten
7	Cabang Madya Klas Banjarmasin
8	Cabang Madya Klas Palembang
9	Cabang Madya Klas Pekanbaru
10	Cabang Madya Klas Pontianak
11	Cabang Pratama Klas Ambon

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (continued)

b. Company Structure

The Head Office of the PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) is domiciled at Yos Sudarso street No. 38-40 Tanjung Priok, North Jakarta, 14320.

The total number of work units, Head Office and branches is 38 work units, consisting of 2 (two) business segments, which is the classification consisting of 18 work units and commercial segments totaling 20 work units.

In 2020, based on Decree of the Directors No. DU.026/LT.101/KI-20 dated 18 March 2020 regarding improvement organization chart of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), the Company determined the charge of the status Office Production/Branch unit which is as follows:

1. Establish the Banten Class Madya Branch as become the Banten Class Primary Branch;
2. Establish the Pontianak Commercial Representative Offices as become the Pontianak Commercial Pratama Branch;
3. Establish SBU Marine & Offshore as become the SBU Marine, Offshore & Oil and Gas;
4. Establish Tanjung Priok Class Main Branch has additional portfolio Class Offshore;
5. Additional business portfolio named PMU Telematics.

The offices and production units of each segment are as follows:

No.	Classification Branch Segment
1	Batam Class Main Branch
2	Samarinda Class Main Branch
3	Singapore Class Main Branch
4	Surabaya Class Main Branch
5	Tanjung Priok Class Main Branch
6	Banten Class Main Branch
7	Banjarmasin Class Middle Branch
8	Palembang Class Middle Branch
9	Pekanbaru Class Middle Branch
10	Pontianak Class Middle Branch
11	Ambon Class Pratama Branch

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur Perusahaan (lanjutan)

No.	Cabang Segmen Klasifikasi
12	Cabang Pratama Klas Belawan
13	Cabang Pratama Klas Bitung
14	Cabang Pratama Klas Cirebon
15	Cabang Pratama Klas Jambi
16	Cabang Pratama Klas Makassar
17	Cabang Pratama Klas Semarang
18	Cabang Pratama Klas Sorong
No.	Cabang Segmen Komersil
1	SBU Marine & Offshore
2	SBU Energi & Industri
3	PMU BKI Akademi
4	Cabang Utama Komersil Balikpapan
5	Cabang Madya Komersil Batam
6	Cabang Madya Komersil Makassar
7	Cabang Madya Komersil Pekanbaru
8	Cabang Madya Komersil Surabaya
9	Cabang Pratama Komersil Banjarmasin
10	Cabang Pratama Komersil Banten
11	Cabang Pratama Komersil Belawan
12	Cabang Pratama Komersil Palembang
13	Cabang Pratama Komersil Semarang
14	Cabang Pratama Komersil Pontianak
15	Segmen Komersil Cabang Pratama Klas Ambon
16	Segmen Komersil Cabang Pratama Klas Bitung
17	Segmen Komersil Cabang Pratama Klas Cirebon
18	Segmen Komersil Cabang Pratama Klas Jambi
19	Segmen Komersil Cabang Pratama Klas Sorong
20	PMU Telematika

c. Dewan komisaris dan direksi

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No. 01 tanggal 6 Februari 2019 notaris Marthin Aliunir, S.H.

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**31 Desember 2020 dan 2019/
31 December 2020 and 2019**

Dewan komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Agung Kuswandono
Dwi Budi Sutrisno
Raden Harry Hikmat
M. Amperawan

Board of commissioners

President commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (continued)

b. Company Structure (continued)

No.	Classification Branch Segment
12	Belawan Class Pratama Branch
13	Bitung Class Pratama Branch
14	Cirebon Class Pratama Branch
15	Jambi Class Pratama Branch
16	Makassar Class Pratama Branch
17	Semarang Class Pratama Branch
18	Sorong Class Pratama Branch
No.	Commercial Branch Segment
1	SBU Marine & Offshore
2	SBU Energi & Industri
3	PMU BKI Academy
4	Balikpapan Commercial Main Branch
5	Batam Commercial Middle Branch
6	Makassar Commercial Middle Branch
7	Pekanbaru Commercial Middle Branch
8	Surabaya Commercial Middle Branch
9	Banjarmasin Commercial Pratama Branch
10	Banten Commercial Pratama Branch
11	Belawan Commercial Pratama Branch
12	Palembang Commercial Pratama Branch
13	Semarang Commercial Pratama Branch
14	Pontianak Commercial Pratama Branch
15	Ambon Commercial Segment Pratama Branch
16	Bitung Commercial Segment Pratama Branch
17	Cirebon Commercial Segment Pratama Branch
18	Jambi Commercial Segment Pratama Branch
19	Sorong Commercial Segment Pratama Branch
20	PMU Telematics

c. Board of commissioners and directors

In accordance with deed of Statement of Decision Meeting PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No. 01 on 6 February 2019 notary Marthin Aliunir, S.H.

The composition of the Board of Commissioners and Directors 31 December 2020 and 2019 are as follows:

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan komisaris dan direksi (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

**c. Board of commissioners and directors
(continued)**

**31 Desember 2020 dan 2019/
31 December 2020 and 2019**

Direksi

Direktur utama
Direktur keuangan dan
administrasi
Direktur operasi
Direktur pengembangan
sumber daya

Rudiyanto

Directors
President director
Director of finance and
administration
Director of operational
Director of resource
development

Susunan komite audit pada tanggal
31 Desember 2020 dan 2019 adalah
sebagai berikut:

*As of 31 December 2020 and 2019 the
composition of the audit committee of the
Company is as follows:*

**31 Desember 2020 dan 2019/
31 December 2020 and 2019**

Ketua komite audit
Anggota

M. Amperawan
Nur Abdilah

*Audit committee chairman
Members*

Bangun Tiroi Ruhut Hutagalung

Susunan komite manajemen risiko pada
tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai
berikut:

*As of 31 December 2020 the composition of
the Risk Management Committee of the
Company is as follows:*

31 Desember/December 2020

Ketua komite manajemen
risiko
Anggota

Dwi Budi Sutrisno
Trisyu Wimartono

*Risk management committee
chairman
Member*

Susunan komite sumber daya manusia
pada tanggal 31 Desember 2020 adalah
sebagai berikut:

*As of 31 December 2020 the composition of
the Human Resources Committee of the
Company is as follows:*

31 Desember/December 2020

Ketua komite nominasi, remunerasi,
dan sumber daya manusia
Anggota

Agung Kuswandono
Raden Harry Hikmat
Lisda Y Satria

*Nomination, remuneration, and
human resources committee
Members*

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia
(Persero) No: SK.01/DEKOM.BKI/ IV/2020
tanggal 20 April 2020, memberhentikan
dengan hormat Sdr. Raden Harry Hikmat
sebagai anggota Komite Manajemen Risiko
dan Sumber Daya Manusia Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi
Indonesia (Persero) yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Komisaris Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia
No. SK.02/DEKOM.BKI/X/2018 tanggal
01 Oktober 2018.

*Based on Decree Board of Commissioners
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
No: SK.01/DEKOM.BKI/IV/2020 dated
20 April 2020, dismissing with respect Mr.
Raden Harry Hikmat as a member risk
management and human resources
committee PT Biro Klasifikasi Indonesia
(Persero) was appointed based on the
Decree board of commissioners of the
Company PT Biro Klasifikasi Indonesia
(Persero) No. SK.02/DEKOM.BKI/X/2018
dated 01 October 2018.*

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan komisaris dan direksi (lanjutan)

Susunan komite manajemen risiko dan sumber daya manusia pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (continued)

c. Board of commissioners and directors (continued)

As of 31 December 2019 the composition of the Human Resources Committee and Risk Management of the Company is as follows:

31 Desember/December 2019

Ketua komite manajemen risiko	Raden Harry Hikmat	Risk management committee chairman
Anggota	Trisyu Wimartono	Members

Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebanyak 797 dan 687 (tidak diaudit).

The total of employees as of 31 December 2020 and 2019 are 797 and 687 employees (unaudited), respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The Company financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI).

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classification of cash flows into operating, investing and financing activities.

b. Basis of measurement and preparation of financial statements

The financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the conducting in exchange for assets.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)	2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan (lanjutan)	b. Basis of measurement and preparation of financial statements (continued)
Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.	<i>The financial statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.</i>
Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.	<i>The presentation currency of the preparation of the financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Company.</i>
c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan	c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year
Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:	<i>New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early adoption is permitted, are as follows:</i>
<ul style="list-style-type: none">• PSAK 71: "Instrumen Keuangan";• PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";• PSAK 73: "Sewa";• PSAK 62 (Amandemen 2017): "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi";• PSAK 15 (Amandemen 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";• PSAK 71 (Amandemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";• ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";• PSAK 1 (Amandemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";• PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";• PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";	<ul style="list-style-type: none">• PSAK 71: "Financial Instrument";• PSAK 72: "Revenue from Contract with Customer";• PSAK 73: "Lease";• PSAK 62 (Amendment 2017): "Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract";• PSAK 15 (Amendment 2017): "Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures";• PSAK 71 (Amendment 2018): "Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation";• ISAK 35: "Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements";• PSAK 1 (Amendment 2019): "Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements";• PSAK 1 (Improvement 2019): "Presentation of Financial Statements";• PPSAK 13: "Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting";

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**
- c. **Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan (lanjutan)**
- PSAK 25 (Amendemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
 - PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
 - ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"; dan
 - ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".
- d. **Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020**
- Amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:
- PSAK 73 (Amandemen 2020): Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19.
- Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2020 tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan.
- e. **Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**
- Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun diakui dalam laba rugi.
- 2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**
- c. **New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year (continued)**
- PSAK 25 (Amendment 2019): "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";
 - PSAK 102 (Revised 2019): "Accounting for Murabahah";
 - ISAK 101: "Revenue Recognition on Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership"; and
 - ISAK 102: "Impairment on Murabahah Receivable".
- d. **New and Revised Statements of Financial Accounting Standard ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standard ("ISFAS") effective for the year beginning on or after 1 June 2020 and onwards**
- Amendments to standard effective for periods beginning on or after 1 June 2020, with early adoption is permitted is:
- PSAK 73 (Amendment 2020): Leases regarding Covid-19 related Rent Concessions.
- The application of the following revised accounting standard which is effective from 1 June 2020 had no material effect on the amounts reported for the financial statements.*
- e. **Transactions and Balances in Foreign Currency**
- Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rate prevailing at the date of transaction. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.*

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan) **2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

	2020	2019	
1 USD	14.105	13.901	1 USD
1 SGD	10.644	10.320	1 SGD

f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

e. Transactions and Balances in Foreign Currency (continued)

As at the statement of financial position dates, the exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows (full Rupiah amount):

	2020	2019	
1 USD	14.105	13.901	1 USD
1 SGD	10.644	10.320	1 SGD

f. Related Parties Transactions and Balances

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

- i. Has control or joint control over the reporting entity;*
- ii. Has significant influence over the reporting entity; or*
- iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

- i. The entity and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
- ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member);*

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)
- f. **Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi** (lanjutan)
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau;
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

- 2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)
- f. **Related Parties Transactions and Balances** (continued)
- iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or;
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
 - viii. The entity, or any member of a Company of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government. The Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset dan liabilitas keuangan

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan penerapan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan akuntansi lindung nilai.

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori:

- i. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain;
- ii. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 December 2020, Perusahaan memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, pendapatan akan diterima, piutang lain-lain dan aset lain-lain. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial assets and liabilities

From 1 January 2020, the Company has applied PSAK 71, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

The Company classifies its financial assets in the following categories:

- i. Financial assets at fair value through statements of profit or loss or other comprehensive income;*
- ii. Financial assets at amortised cost.*

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial application.

On 31 December 2020, the Company has financial assets classified as financial assets at amortised cost. Financial assets at amortised cost consist of cash and cash equivalents, trade receivables, accrued revenue, other receivables and other assets. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

Financial assets at amortised cost are recognised initially at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)	2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
g. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)	g. Financial assets and liabilities (continued)
Penurunan nilai aset keuangan	Impairment of financial assets
Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.	<i>At each reporting date, the Company assess whether the credit risk on a financial instrument has increase significantly since initial recognition.</i>
Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas kredit ekspektasian.	<i>When making the assessment, the Company use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.</i>
Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.	<i>To make that assessment, the Company compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.</i>
Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha, piutang lain-lain, dan pendapatan akan diterima tanpa komponen pendanaan yang signifikan.	<i>The Company applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables, other receivables, and accrued revenue without significant financing component.</i>
Liabilitas keuangan	Financial liabilities
Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.	<i>There are no changes in classification and measurement of financial liabilities.</i>
Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:	<i>Financial liabilities within the scope of PSAK 71 are classifies as follows:</i>
i. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; ii. Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.	<i>i. Financial liabilities at amortized cost; ii. Financial liabilities at fair value through profit and loss (FVTPL) or other comprehensive income (FVOCI).</i>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)	2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
g. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)	g. Financial assets and liabilities (continued)
Liabilitas keuangan (lanjutan)	Financial liabilities (continued)
Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.	<i>The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.</i>
Perusahaan memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.	<i>The Company has financial liabilities classified into the financial liabilities measured at amortised cost. All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in the profit or loss.</i>
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang lain-lain dan beban yang masih harus dibayar. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.	<i>Financial liabilities measured at amortised cost are trade, other payables and accrued expenses. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.</i>
Pemberhentian pengakuan atas liabilitas keuangan	Derecognition of financial liabilities
Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.	<i>Financial liabilities are derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.</i>
Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian	<i>Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition</i>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)	2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
g. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)	g. Financial assets and liabilities (continued)
Pemberhentian pengakuan atas liabilitas keuangan (lanjutan)	Derecognition of financial liabilities (continued)
pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.	of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognised in the statements of profit or loss.
Instrumen keuangan disalinghapus	Offsetting financial instruments
Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan nilainya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.	Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparties.
h. Kas dan Setara Kas	h. Cash and Cash Equivalent
Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.	Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (current accounts) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.
i. Biaya Dibayar di Muka	i. Prepayments
Beban dibayar di muka adalah saldo pembayaran di muka yang dilakukan dalam suatu periode yang memiliki manfaat di periode yang akan datang. Beban dibayar di muka akan diakui sebagai beban pada tahun berjalan sesuai dengan manfaat pada tahun tersebut dan pada saat masa manfaatnya berakhir.	Prepaid expenses are payments made in advances in a period that has benefits in the next period. Prepaid expenses will be paid in the current year in accordance with the benefits in this year and when the benefits expire.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi Manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya. Inventaris kantor disusutkan dengan metode saldo menurun ganda, sedangkan bangunan dan kendaraan bermotor disusutkan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Tahun/Years		
Bangunan	20 - 40	<i>Buildings</i>
Kendaraan bermotor roda 2	5	<i>2 wheeled vehicle</i>
Kendaraan bermotor roda 4	3 - 16	<i>4 wheeled vehicle</i>
Inventaris kantor	3	<i>Office equipments</i>

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

j. Fixed Assets

Property and Equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by Management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

After initial recognition, property and equipment, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Depreciation of property and equipments starts when its available for use. Office equipments depreciated by using double declining method, meanwhile buildings and vehicles by using straight line method based on the estimated useful lifes of assets as follows:

Self-constructed property and equipments are presented as part of the property and equipments under "Assets in Progress" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)	2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
j. Aset Tetap (lanjutan)	j. Fixed Assets (continued)
setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.	<i>amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.</i>
Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.	<i>The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and is depreciated since the operation.</i>
Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuan pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.	<i>The carrying amount of a fixed asset is derecognized on disposal or has no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss from derecognition (determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.</i>
Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.	<i>At the end of each reporting period, Company made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.</i>
k. Aset Takberwujud	k. Intangible Assets
Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode menurun ganda berdasarkan estimasi masa manfaat 4 tahun.	<i>Intangible asset is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be either finite or indefinite. Intangible assets are amortized by using double declining method based on estimated useful lives of 4 years.</i>
Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomis 50% per tahun.	<i>Amortisation is calculated so as to write off the cost of the asset, less its estimated residual value, over its useful economic life 50% per annum.</i>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Aset Dimiliki Untuk Dijual

Aset dimiliki untuk dijual merupakan aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi dan sudah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara untuk dijual. Aset ini dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Jika nilai buku aset belum mencapai Rp1, maka penyusutan untuk tahun bersangkutan hanya selama beberapa bulan sampai diterbitkannya Surat Persetujuan dari Menteri Negara BUMN. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap yang bersangkutan tercermin dalam operasi tahun berjalan.

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan penerapan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

I. Assets Available For Sales

Assets held for sale are fixed assets that are no longer used and have been approved by the State Minister of State-Owned Enterprises for sale. These assets are issued from the Company of fixed assets and their accumulated depreciation. If the book value of the asset has not reached Rp1, then the depreciation for the year concerned is only for a few months until the Letter of Approval is issued from the Minister of State for BUMN. The gain or loss from the sale of the property, plant and equipment concerned is reflected in current operations.

m. Recognition of Revenues and Expenses

Revenue from contracts with customers

From 1 January 2020, the Company has applied PSAK 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment as follows:

1. Identify contract(s) with a customer;
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer services that are distinct;
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)
- m. **Pengakuan pendapatan dan beban** (lanjutan)
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin;
 5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut). Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:
 - i. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan); atau
 - ii. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Pendapatan Akan Diterima" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Utang Bruto".

Kriteria spesifik berikut ini juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

2. **SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)
- m. **Recognition of revenues and expenses** (continued)
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relatives stand-alone selling prices of each distinct services promised in the contract. Where those are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin;*
 5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services). A performance obligation may be satisfied at the following:*
 - i. *Point in time (typically for promises transfer services to a customer); or*
 - ii. *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

Payment of the transaction price is differ for each contracts. A contract asset is recognised once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognised once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Accrued Revenue" and contract liabilities are presented under "Gross Payable".

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognised.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan) **2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

m. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan) ***m. Recognition of revenues and expenses (continued)***

Pendapatan/Revenue	2020 (PSAK 72)	2019 (PSAK 23)
Jasa klasifikasi/Classification Services	Pendapatan jasa klasifikasi diakui pada satu titik tergantung kesepakatan dengan pelanggan. <i>Classification services is recognised at point in time depending on the arrangement with customers.</i>	Pendapatan jasa klasifikasi diakui pada saat jasa tersebut telah diselesaikan. <i>Classification services recognised when the services has rendered.</i>
Jasa Komersil/Commercial Services	Pendapatan komersial dapat diakui secara satu titik maupun secara suatu periode waktu berdasarkan hasil pekerjaan, tergantung kesepakatan dengan pelanggan. <i>Commercial services could be recognized either one time or over the time based on the work result, depending on the arrangement with customers.</i>	Pendapatan komersial diakui secara bertahap sesuai tahap kemajuan yang dicapai pada tiap-tiap akhir bulan. Akun pendapatan akan diterima di laporan posisi keuangan mencerminkan pekerjaan yang masih dalam tahap penyelesaian pada akhir periode pelaporan keuangan. <i>Commercial services recognized based on progress completion at the end of the month. The gross amount due account in statement of financial position reflects work is still in completion at the end of the financial reporting period.</i>
Beban dari kontrak dengan pelanggan		<i>Expense from contracts with customers</i>
Beban/Expense	2020 (PSAK 72)	2019 (PSAK 23)
Beban dari kontrak dengan pelanggan dan beban lainnya/Expenses from contracts with customers and other expenses	Biaya penambahan yang secara langsung berhubungan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan, biaya tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 72 dan diakui sebagai "Biaya Kontrak". Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan jasa yang terkait dengan asset tersebut. <i>The incremental costs that directly relate to obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered are eligible for capitalization under PSAK 72 and recognised as "Contract costs". Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the services to which such asset relates</i>	Biaya operasi yang digolongkan sebagai beban jasa adalah meliputi biaya-biaya langsung dan overhead yang dapat diatribusikan langsung atau dialokasikan secara sistematis kepada tiap-tiap kontrak. Biaya-biaya yang tidak memenuhi kriteria biaya jasa digolongkan sebagai beban usaha. <i>Operating costs classified as service costs include direct and overhead costs that are directly attributable or systematically allocated to each contract. Costs that do not meet the criteria for service costs are classified as operating expenses. Operating expenses are recognized when incurred.</i>
Beban-beban lainnya/ Other expenses	Beban diakui pada saat terjadinya. <i>Expenses are recognised when they are incurred.</i>	

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

n. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Benefits related to tax losses that can be withdrawn to recover current tax of prior periods is recognized as an asset.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) Pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan aset pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Perusahaan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

n. Income Tax (continued)

Deferred tax asset is recognized for the carry forward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the taxable temporary differences arise from:

- a) *The initial recognition of goodwill; or*
- b) *The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period. The Company shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara asset untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak tangguhan; dan
- b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. Entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Perusahaan melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Perusahaan:

- Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

o. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

n. Income Tax (continued)

The Company offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) *The Company has a legally enforceable right to set off current tax assets against deferred tax liabilities; and*
- b) *the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. *The same taxable entity; or*
 - ii. *Different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

The Company offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Company:

- *Has legally enforceable right to set off the recognized amounts, and*
- *Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

o. Employee Benefits

Short-Term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short-term employee benefits consist of among others wages, salaries, bonus and incentive.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan) **2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**
(continued)

o. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU 13/2003").

Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Perusahaan mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesongan

Perusahaan mengakui pesongan sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

1. Ketika Perusahaan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
2. Ketika Perusahaan mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesongan.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

o. Employee Benefits (continued)

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The Company recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation is determined by discounting the benefit.

The Company account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Company recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

1. *When the Company can no longer withdraw the offer of those benefits; and*
2. *When the Company recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.*

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)	2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
o. Imbalan Kerja (lanjutan)	o. Employee Benefits (continued)
<u>Pesangon</u> (lanjutan)	<u>Termination Benefits</u> (continued)
Perusahaan mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.	<i>The Company measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.</i>
Perusahaan mengikuti program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Biro Klasifikasi Indonesia.	<i>The Company has pension insurance program which organized by pension fund Biro Klasifikasi Indonesia.</i>
<u>Program Masa Persiapan Pensiun</u>	<u>Pre-Retirement Program</u>
Imbalan masa persiapan pensiun dihitung dengan metode <i>projected unit credit</i> dan didiskontokan ke nilai kini.	<i>Other pre-retirement program calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.</i>
Perusahaan memberikan imbalan Masa Persiapan Pensiun (MPP) sesuai Perjanjian Kerja Bersama. Perusahaan tidak melakukan pendanaan atas program tersebut.	<i>Company provides pre retirement benefit program (MPP) as stated in company regulation. Company does not set up fund for this program.</i>
Manfaat dari program adalah karyawan yang akan mencapai usia pensiun normal berhak untuk tidak aktif selama 6 bulan sebelum mencapai usia pensiun dan tetap mendapatkan penghasilan bulanan.	<i>The benefits of the program are employees who will reach the normal retirement age have the right to be inactive for 6 months before reaching retirement age and still get a monthly income.</i>
<u>Program Imbalan Jangka Panjang Lainnya</u>	<u>Other Long-term Employee Benefit Program</u>
Imbalan jangka panjang lainnya dihitung dengan metode <i>projected unit credit</i> dan didiskontokan ke nilai kini.	<i>Other long-term employee benefit program calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.</i>
1. Cuti Besar Perusahaan memberikan imbalan jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti besar selama 12 hari kerja. Cuti ini diberikan kepada karyawan yang mempunyai masa kerja 5 tahun dan kelipatannya.	1. Long service leave <i>Company provides long leave amounting to 12 workdays. This benefit is provided for payment employee with 5 years of services and its multiplication.</i>
2. Penghargaan Masa Bakti Perusahaan memberikan imbalan penghargaan masa bakti berupa emas dan uang.	2. Long Service Award <i>Company provides long service award benefit in form of gold and money.</i>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Sewa

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan penerapan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Leases

From 1 January 2020, the Company has applied PSAK 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as 'operating lease'. This policy is applied to contracts entered into or changed, on or after 1 January 2020

As lessee

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assesses whether:

- *The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined and:*
 1. *The Company has the right to operate the asset;*
 2. *The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.*

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. **Sewa** (lanjutan)

Sebagai penyewa (lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

p. **Leases** (continued)

As lessee (continued)

The Company recognises a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- *fixed payments, including in-substance fixed payments;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. **Sewa** (lanjutan)

Sebagai penyewa (lanjutan)

- harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan Perusahaan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" dan "Liabilitas sewa" di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka-pendek

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

p. **Leases** (continued)

As lessee (continued)

- the exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise; and
- penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Company presents right-of-use assets as part of "Fixed assets" and "Lease liabilities" in the statement of financial position.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Short-term leases

The Company has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Company recognises the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)
- p. **Sewa** (lanjutan)
- Sebagai penyewa** (lanjutan)
- Modifikasi sewa
- Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:
- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
 - imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.
- Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan:
- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
 - menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
 - mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal efektif modifikasi;
 - menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perusahaan mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
 - membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.
2. **SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)
- p. **Leases** (continued)
- As lessee (continued)
- Lease modification
- The Company account for a lease modification as a separate lease if both:*
- *The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
 - *The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand- alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand- alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*
- For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Company:*
- *remeasure and allocate the consideration in the modified contract;*
 - *determine the lease term of the modified lease;*
 - *remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Company's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
 - *decrease the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Company recognise in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
 - *make a corresponding adjustment to the right-of-use assets for all other lease modifications.*

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)	2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
p. Sewa (lanjutan)	p. Leases (continued)
Sebagai penyewa (lanjutan)	As lessee (continued)
<u>Modifikasi sewa</u> (lanjutan)	<u>Lease modification</u> (continued)
Ketika Perusahaan bertindak sebagai pesewa, Perusahaan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.	<i>When the Company acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.</i>
Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Perusahaan membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Perusahaan mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomik asset pendasar.	<i>To classify each lease, the Company makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Company considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the underlying asset.</i>
Kebijakan akuntansi yang berlaku untuk transaksi sewa sebelum 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:	Accounting policies applied for leases before 1 January 2020 are as follows:
Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian pada tanggal awal sewa.	<i>The determination of whether an arrangement is or contains a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date.</i>
Perjanjian tersebut ditelaah apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.	<i>The arrangement is assessed whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in the arrangement.</i>
Sewa dimana seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset secara signifikan berada pada pesewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi.	<i>Leases in which a significant portion of the risks and rewards incidental to ownership retained by the lessor are classified as operating leases</i>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)	2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
p. Sewa (lanjutan)	p. Leases (continued)
Sebagai penyewa (lanjutan)	As lessee (continued)
Pembayaran sewa dalam sewa operasi dibebankan pada laporan laba rugi secara garis lurus selama masa sewa.	<i>Payments made under operating leases are charged to the statements of profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.</i>
Sewa dimana Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan pemilikan asset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.	<i>Leases whereby the Company has substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as finance leases.</i>
Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.	<i>Finance leases are capitalised at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments.</i>
Setiap pembayaran sewa pembiayaan dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Jumlah kewajiban sewa, dikurangi beban keuangan disajikan sebagai utang jangka panjang. Unsur bunga dalam biaya keuangan dibebankan di laporan laba rugi setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas.	<i>Each finance lease payment is allocated between the finance and liability. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to the statements of profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.</i>
Setiap pembayaran sewa pembiayaan dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Jumlah kewajiban sewa, dikurangi beban keuangan disajikan sebagai utang jangka panjang. Unsur bunga dalam biaya keuangan dibebankan di laporan laba rugi setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.	<i>Each finance lease payment is allocated between the finance and liability. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to the statements of profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. The fixed asset acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease term</i>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset dan liabilitas, pengungkapan aset dan liabilitas kontinjenji pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini.

Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Estimasi Umur Manfaat

Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset tak berwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material oleh perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements

The preparation of financial statements requires management to make judgement estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next reporting period.

The main assumption of the future and the other major source of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities for the year is disclosed below.

Company bases its assumption and estimates on parameters that are available at the time the financial statements are prepared.

Assumptions and situation about the future development, may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Company. The changes are reflected in the related assumptions at the time of the occurrence.

Critical Accounting Estimates and Judgements

Estimated of Useful Lives

Company conducts periodic reviews of the economic useful lives of fixed assets and intangible assets based on factors such as the condition of technical and technological developments in the future. Future operating results will be materially affected by the estimation changes caused by changes in factors mentioned above.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

<p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)</p> <p>q. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (lanjutan)</p> <p>Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (lanjutan)</p> <p><u>Estimasi Umur Manfaat</u> (lanjutan)</p> <p>Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat peralatan berdasarkan faktor-faktor seperti perubahan teknologi dan potensi keuntungan yang diperoleh dari penggunaan peralatan tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan Perusahaan melakukan penurunan maupun penghapusan aset tetap apabila peralatan tersebut sudah usang seiring dengan perkembangan teknologi. Jumlah tercatat aset tetap pada Catatan 9.</p> <p><u>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha</u></p> <p>Perusahaan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha.</p> <p><u>Imbalan Pascakerja</u></p> <p>Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU 13/2003").</p>	<p>2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)</p> <p>q. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements (continued)</p> <p>Critical Accounting Estimates and Judgements (continued)</p> <p><u>Estimated of Useful Lives</u> (continued)</p> <p><i>The Company performs periodic review over the useful life of the equipment based on factors such as changes in technology and the potential benefits arising from the use of such equipment. This condition can cause a decrease or elimination of the Company's property plant and equipment if the equipment is obsolete due to technological developments. The carrying amount of fixed assets is in Notes 9.</i></p> <p><u>Allowance for Impairment Losses on Accounts Receivable</u></p> <p><i>The Company evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit worthiness, to record specific provisions for receivable amounts that the Company expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and if additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.</i></p> <p><u>Post-Employment Benefits</u></p> <p><i>Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").</i></p>
--	--

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- | | |
|---|---|
| <p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)</p> <p>q. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (lanjutan)</p> <p><u>Imbalan Pascakerja</u> (lanjutan)</p> <p>Penentuan liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.</p> <p>Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.</p> <p>Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.</p> <p>Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai. Perbedaan signifikan pada hasil aktuari dan perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.</p> <p>r. Penerapan atas PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73</p> <p>Perusahaan melakukan penerapan atas PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.</p> <p>Atas penerapan PSAK 71, PSAK 72 dan PSAK 73 tidak terdapat dampak material terhadap laporan keuangan.</p> | <p>PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)</p> <p>2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)</p> <p>q. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements
(continued)</p> <p><u>Post-Employment Benefits</u> (continued)</p> <p><i>The determination of the Company's post-employment benefits liabilities is depend on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.</i></p> <p><i>Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interets on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.</i></p> <p><i>The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.</i></p> <p><i>Management believe the assumptions are reasonable and appropriate. Significant differences in the actuary result or significant changes in the assumptions may materially affect its employee benefits liabilities and net employee benefits expense.</i></p> <p>r. Application of PSAK 71, PSAK 72, and PSAK 73</p> <p><i>The Company has applied PSAK 71, PSAK 72, and PSAK 73 effectively for the financial year beginning 1 January 2020.</i></p> <p><i>The adoption of PSAK 71, PSAK 72 and PSAK 73 do not have a material effect on the Company's financial statements.</i></p> |
|---|---|

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. **Penerapan atas PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73** (lanjutan)

PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK 71 : Instrumen keuangan diterbitkan di bulan Juli 2017 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

Berikut perubahan utama dalam PSAK 71:

Instrumen keuangan berserta dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan:

- Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan

Dalam PSAK 71, aset keuangan diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Tabel berikut dan catatan terlampir di bawah ini menjelaskan kategori pengukuran awal berdasarkan PSAK 55 dan kategori pengukuran baru berdasarkan PSAK 71 untuk setiap kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020.

	Klasifikasi awal sesuai PSAK 55/ <i>Original classification under PSAK 55</i>	Klasifikasi baru sesuai PSAK 71/ <i>New classification under PSAK 71</i>	Nilai awal atau nilai baru/ <i>Original or new carrying amount</i>	
Aset keuangan				Financial assets
Kas dan setara kas	Piutang dan pinjaman/ <i>Loans and receivables</i>	Biaya yang diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	246.545.816.799	<i>Cash and cash equivalent</i>
Piutang usaha	Piutang dan pinjaman/ <i>Loans and receivables</i>	Biaya yang diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	308.068.607.163	<i>Account receivables</i>
Pendapatan akan diterima	Piutang dan pinjaman/ <i>Loans and receivables</i>	Biaya yang diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	17.886.800.858	<i>Accrued revenue</i>
Uang muka	Piutang dan pinjaman/ <i>Loans and receivables</i>	Biaya yang diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	3.565.445.437	<i>Advance payment</i>
Total aset keuangan			576.066.670.257	Total financial assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Utang usaha	Liabilitas keuangan lainnya/ <i>Other financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan lainnya/ <i>Other financial liabilities</i>	10.422.611.295	<i>Accounts payable</i>
Biaya yang masih harus dibayar	Liabilitas keuangan lainnya/ <i>Other financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan lainnya/ <i>Other financial liabilities</i>	39.848.660.445	<i>Accrued expenses</i>
Utang bruto	Liabilitas keuangan lainnya/ <i>Other financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan lainnya/ <i>Other financial liabilities</i>	10.994.963.666	<i>Gross payables</i>
Total liabilitas keuangan			61.266.235.406	Total financial liabilities

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

r. ***Application of PSAK 71, PSAK 72, and PSAK 73*** (*continued*)

PSAK 71: Financial Instrument

PSAK 71 : Financial instrument was issued in July 2017 and has an effective date of 1 January 2020 with earlier application permitted.

The main changes in regard to PSAK 71:

Financial instrument and impact of the Company's financial statements are follows:

- *Financial assets classification and measurement*

In PSAK 71, financial assets are classified to amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit and loss.

The following table and the accompanying notes below explain the original measurement categories under PSAK 55 and the new measurement categories under PSAK 71 for each class of the Company's financial assets and financial liabilities as at 1 January 2020.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

- r. **Penerapan atas PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73** (lanjutan)

PSAK 71: Instrumen Keuangan (lanjutan)

Untuk piutang usaha, Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang disyaratkan oleh PSAK 71 yang mengharuskan penggunaan provisi kerugian ekspektasian seumur hidup untuk semua piutang usaha. Atas penerapan PSAK 71 persyaratan penurunan nilai tidak mengakibatkan tambahan penyisihan penurunan nilai aset keuangan pada tanggal 1 Januari 2020.

PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Penerapan PSAK 72 menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi sebagaimana diungkapkan di notes 2m.

Penerapan panduan praktis

Perusahaan hanya menerapkan PSAK 72 untuk kontrak dengan pelanggan yang belum selesai pada tanggal 1 Januari 2020. Perusahaan memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk mengakui biaya yang terjadi untuk mendapatkan kontrak sebagai beban saat terjadinya jika periode amortisasi aset tersebut adalah satu tahun atau kurang.

Perusahaan juga memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk tidak menyesuaikan jumlah imbalan atas efek komponen pendanaan signifikan, jika Perusahaan mengharapkan, saat kontrak dimulai, bahwa periode antara saat Perusahaan mengalihkan jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan saat pelanggan melakukan pembayaran atas barang atau jasa adalah satu tahun atau kurang.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

- r. ***Application of PSAK 71, PSAK 72, and PSAK 73*** (continued)

PSAK 71: Financial Instrument
(continued)

For trade receivables, the Company applies the simplified approach to provide for expected credit losses prescribed by PSAK 71 which requires the use of lifetime expected loss provision of all trade receivables. The application of PSAK 71 impairment requirements did not result in additional allowance for impairment for financial assets at 1 January 2020.

PSAK 72: Revenue from contracts with customers

The application of PSAK 72 resulted in changes in accounting policies as disclosed in notes 2m.

Application of practical expedient

The Company only applies PSAK 72 to customer contracts that are not completed on 1 January 2020. The Company applies the practical expedient to recognise the incremental cost of obtaining a contracts as an expense when incurred if the amortisation period of the asset that the Company otherwise would have recognised is one year or less.

The Company also applies the practical expedient to not adjust the promised amount of consideration for the effects of significant financing component if the Company expects, at contract inception, that the period between when the Company transfers a promised services to customer and when the customer pays for the good or service will be one year or less.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

- r. Penerapan atas PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 (lanjutan)

PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

Pengakuan beban

Pada periode pelaporan sebelumnya, biaya dari kontrak dengan pelanggan diakui pada saat terjadinya. Berdasarkan PSAK 72, biaya yang berhubungan langsung untuk mendapatkan kontrak dikapitalisasi sebagai "Biaya kontrak" dan diamortisasi secara sistematis sejalan dengan penyerahan jasa terkait dengan pelanggan.

PSAK 73: Sewa

Atas penerapan PSAK 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, tidak memiliki dampak signifikan ke laporan keuangan.

3. KAS DAN SETARA KAS

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

- r. *Application of PSAK 71, PSAK 72, and PSAK 73 (continued)*

PSAK 72: Revenue from contracts with customers (continued)

Cost recognition

In previous reporting period, expense from contracts with customers are recognised when they are incurred. Under PSAK 72, the costs directly related to obtaining the contract are capitalized as "Contract cost" and amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the related services to customers.

PSAK 73: Leases

Transition to the PSAK 73 effectively for the financial year beginning 1 January 2020, do not have significant impact to the financial statements.

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2020	2019	
Kas			
Rupiah	4.159.306.114	2.706.903.381	<i>Cash on hand</i>
SGD	59.486.655	141.488.525	<i>Rupiah</i>
	<hr/>	<hr/>	<i>SGD</i>
	4.218.792.769	2.848.391.906	
Bank			
Pihak berelasi			
Rupiah			<i>Cash in bank</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.795.388.574	38.545.387.622	<i>Related parties</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	23.811.664.070	38.210.268.682	<i>Rupiah</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	249.373.156	247.381.370	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
USD			<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.395.301.224	477.710.645	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	373.776.999	321.387.825	<i>USD</i>
SGD			<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.655.839.087	3.126.648.074	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
	<hr/>	<hr/>	<i>SGD</i>
	61.281.343.110	80.928.784.218	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS
(continued)

	2020	2019	
Rupiah			<i>Rupiah</i>
PT Bank Jabar Banten Tbk	306.701.170	303.975.760	<i>PT Bank Jabar Banten Tbk</i>
Overseas Express Bank			<i>Overseas Express Bank</i>
Singapura	4.842.022.977	2.464.664.915	<i>Singapore</i>
	<u>5.148.724.147</u>	<u>2.768.640.675</u>	
Jumlah kas dan bank	<u>70.648.860.026</u>	<u>86.545.816.799</u>	<i>Cash on hand and in bank</i>
Deposito berjangka			<i>Time deposit</i>
Rupiah			<i>Rupiah</i>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	90.000.000.000	70.000.000.000	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	65.000.000.000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Syariah	45.000.000.000	-	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Syariah</i>
PT Bank Syariah Mandiri	30.000.000.000	-	<i>PT Bank Syariah Mandiri</i>
PT Bank BRI Syariah Tbk	15.000.000.000	-	<i>PT Bank BRI Syariah Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	50.000.000.000	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
	<u>245.000.000.000</u>	<u>120.000.000.000</u>	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Bank Jabar Banten Tbk	45.000.000.000	25.000.000.000	<i>PT Bank Jabar Banten Tbk</i>
PT Bank Mega Tbk	45.000.000.000	15.000.000.000	<i>PT Bank Mega Tbk</i>
	<u>90.000.000.000</u>	<u>40.000.000.000</u>	
Jumlah deposito berjangka	<u>335.000.000.000</u>	<u>160.000.000.000</u>	<i>Total time deposit</i>
Jumlah	<u>405.648.860.026</u>	<u>246.545.816.799</u>	<i>Total</i>
Tingkat suku bunga kontraktual berjangka per tahun (%)			<i>Contractual interest rate on time deposit per Annum (%)</i>
Tingkat suku bunga Jangka waktu	3.5% - 5.5% 1-3 bulan/months	6% - 7% 1-3 bulan/months	<i>Interest rate Period of time</i>

4. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha kepada pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

4. ACCOUNTS RECEIVABLE

Details of accounts receivable to related parties and third parties are as follows:

	2020	2019	
Pihak berelasi	82.218.601.051	89.984.463.905	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	<u>287.991.996.328</u>	<u>289.991.567.697</u>	<i>Third parties</i>
	<u>370.210.597.379</u>	<u>379.976.031.602</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(97.130.074.134)</u>	<u>(71.907.424.439)</u>	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
Jumlah	<u>273.080.523.245</u>	<u>308.068.607.163</u>	<i>Total</i>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Rincian piutang usaha berdasarkan jenis jasa adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Jasa klasifikasi	133.803.083.411	145.680.716.056	<i>Classification Services</i>
Jasa komersial	<u>236.407.513.968</u>	<u>234.295.315.546</u>	<i>Commercial Services</i>
	370.210.597.379	379.976.031.602	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(97.130.074.134)</u>	<u>(71.907.424.439)</u>	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
Jumlah	<u>273.080.523.245</u>	<u>308.068.607.163</u>	<i>Total</i>

Rincian umur piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
1 - 6 bulan	208.842.282.804	238.118.263.832	<i>1 - 6 months</i>
7 - 12 bulan	31.168.905.290	34.717.887.849	<i>7 - 12 months</i>
13 - 24 bulan	44.103.204.572	33.550.572.178	<i>13 - 24 months</i>
Lebih dari 24 bulan	<u>86.096.204.713</u>	<u>73.589.307.743</u>	<i>More than 24 months</i>
	370.210.597.379	379.976.031.602	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(97.130.074.134)</u>	<u>(71.907.424.439)</u>	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
Jumlah	<u>273.080.523.245</u>	<u>308.068.607.163</u>	<i>Total</i>

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Saldo awal tahun	71.907.424.439	50.479.836.840	<i>Beginning balance of the year</i>
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	<u>25.222.649.695</u>	<u>21.427.587.599</u>	<i>Provision for impairment losses</i>
Saldo akhir tahun	<u>97.130.074.134</u>	<u>71.907.424.439</u>	<i>Ending balance of the year</i>

Perusahaan telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang kepada pihak ketiga adalah cukup.

As of 31 December 2020 and 2019, the aging of accounts receivables are as follows:

The movements of allowance for impairment losses accounts receivable are as follows:

The Company applies the simplified approach to provide for expected credit losses prescribed by PSAK 71 on 1 January 2020, which permits the use of the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

Management believes that the allowance for impairment losses from third parties is adequate.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

5. UANG MUKA

	2020	2019	
Uang muka pembelian barang dan jasa	241.817.979	348.116.420	Advance purchase of goods and services
Uang muka operasional	12.500.000	3.217.329.017	Operational advances
Jumlah	<u>254.317.979</u>	<u>3.565.445.437</u>	Total

6. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	2020	2019	
Biaya kontrak:			Contract cost:
- Survei Konsultasi dan supervisi	576.309.785	8.250.187.013	Consultancy and supervision - survey
- Survei klasifikasi	<u>442.029.168</u>	<u>131.548.892</u>	Classification survey -
	<u>1.018.338.953</u>	<u>8.381.735.905</u>	
Sewa	535.180.084	567.083.334	Rent
Tunjangan perumahan	409.244.438	380.425.000	Housing allowance
Asuransi	<u>86.703.596</u>	<u>1.806.544.642</u>	Insurance
	<u>1.031.128.118</u>	<u>2.754.052.976</u>	
Jumlah	<u>2.049.467.071</u>	<u>11.135.788.881</u>	Total

Beban dibayar di muka adalah saldo pembayaran di muka yang dilakukan dalam suatu periode yang memiliki manfaat di periode yang akan datang. Beban dibayar di muka akan diakui sebagai beban pada tahun berjalan sesuai dengan manfaat pada tahun tersebut dan pada saat masa manfaatnya berakhir.

Prepaid expenses are payments made in advances in a period that has benefits in the next period. Prepaid expenses will be paid in the current year in accordance with the benefits in this year and when the benefits expire.

7. ASET LANCAR LAINNYA

	2020	2019	
Bunga deposito	536.241.096	417.431.507	Deposits interest
Piutang lain-lain	450.908.339	674.571.142	Other receivables
Aset dimiliki untuk dijual	<u>9</u>	<u>12</u>	Assets available for sale
Jumlah	<u>987.149.444</u>	<u>1.092.002.661</u>	Total

8. PENDAPATAN AKAN DITERIMA

	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 24)	2.120.528.000	15.255.045.981	Related parties (Note 24)
Pihak ketiga	<u>2.860.029.160</u>	<u>2.631.754.877</u>	Third parties
Jumlah	<u>4.980.557.160</u>	<u>17.886.800.858</u>	Total

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP

9. FIXED ASSETS

2020					Acquisition cost Land Building Vehicles Office equipment Assets under constructions
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga Perolehan					
Tanah	27.791.564.565	1.103.895.000	-	28.895.459.565	
Bangunan	247.572.281.937	509.000.000	-	253.889.498.637	
Kendaraan	18.626.898.352	-	(1.965.266.900)	16.661.631.452	
Inventaris kantor	125.489.087.668	1.180.272.000	(855.757.716)	125.813.601.952	
Aset dalam pembangunan	5.960.716.700	2.115.328.524	(12.500.000)	2.255.328.524	
	<u>425.440.549.222</u>	<u>4.908.495.524</u>	<u>(2.833.524.616)</u>	<u>427.515.520.130</u>	
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	(31.392.064.378)	(6.216.245.483)	-	(37.608.309.861)	
Kendaraan	(17.838.098.258)	(98.600.000)	1.965.266.899	(15.971.431.359)	
Inventaris kantor	(86.421.367.256)	(8.227.203.992)	691.385.771	(93.957.185.477)	
	<u>(135.651.529.892)</u>	<u>(14.542.049.475)</u>	<u>2.656.652.670</u>	<u>(147.536.926.697)</u>	
Nilai tercatat	<u>289.789.019.330</u>			<u>279.978.593.433</u>	Carrying value
2019					
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga Perolehan					
Tanah	27.791.564.565	-	-	27.791.564.565	
Bangunan	246.936.075.051	511.206.886	-	247.572.281.937	
Kendaraan	18.538.808.352	986.000.000	(897.910.000)	18.626.898.352	
Inventaris kantor	121.018.247.152	4.882.508.000	(411.667.484)	125.489.087.668	
Aset dalam pembangunan	-	6.085.716.700	-	(125.000.000)	
	<u>414.284.695.120</u>	<u>12.465.431.586</u>	<u>(1.309.577.484)</u>	<u>425.440.549.222</u>	
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	(25.090.774.785)	(6.301.289.593)	-	(31.392.064.378)	
Kendaraan	(18.255.527.179)	(480.481.072)	897.909.993	(17.838.098.258)	
Inventaris kantor	(77.676.671.687)	(9.156.362.995)	411.667.426	(86.421.367.256)	
	<u>(121.022.973.651)</u>	<u>(15.938.133.660)</u>	<u>1.309.577.419</u>	<u>(135.651.529.892)</u>	
Nilai tercatat	<u>293.261.721.469</u>			<u>289.789.019.330</u>	Carrying value

Alokasi beban penyusutan pada tahun 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Depreciation expense allocation for the years 31 December 2020 and 2019 were as follows:

	2020	2019	
Beban jasa	4.828.825.321	5.091.329.827	Service cost
Beban umum dan administrasi (Catatan 20)	9.713.224.153	10.846.803.830	General and administrative expenses (Note 20)
Jumlah	<u>14.542.049.474</u>	<u>15.938.133.657</u>	Total

Rincian atas penjualan aset pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The details of sale of fixed assets for the year 31 December 2020 and 2019 were as follows:

	2020	2019	
Harga jual	137.258.247	355.759.923	Selling price
Dikurangi nilai tercatat aset	(16)	(71)	Less: net carrying value
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 21)	137.258.231	355.759.852	Gain on sale of fixed assets (Note 21)

Rincian aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Details of Asset Under Construction 31 December 2020 and 2019 to the following:

	2020	2019	
Bangunan			Building
- Kantor Pusat	1.216.037.500	4.471.000.000	Head office -
- Klas Palembang	407.140.470	1.489.716.700	Class Samarinda -
- Klas Batam	346.900.000	-	Class Ambon -
- Klas Ambon	285.250.554	-	Class Batam -
- Klas Samarinda	-	-	Class Palembang -
Jumlah	<u>2.255.328.524</u>	<u>5.960.716.700</u>	Total

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

Sebagian aset tetap perusahaan diasuransikan dengan polis asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia Nomor 170345502 dan 160346383 yang berlaku mulai tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020. Manajemen berkeyakinan nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

10. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	2020	2019
Jaminan pelaksanaan peserta tender	748.021.070	17.647.206.116
Jaminan sewa	270.357.600	303.437.400
Nilai hak pakai atas tanah	267.569.246	267.569.246
Dikurangi: akumulasi amortisasi	<u>(267.569.246)</u>	<u>(148.649.581)</u>
Jumlah	<u>1.018.378.670</u>	<u>18.069.563.181</u>

Jaminan pelaksanaan peserta tender adalah dana yang dijaminkan oleh penerima jasa atas proyek-proyek yang dilaksanakan Perusahaan yang masa berlakunya lebih dari 12 bulan.

11. UTANG USAHA

	2020	2019
Pihak berelasi (Catatan 24)	4.136.577.780	2.551.405.845
Pihak ketiga	6.286.033.515	16.168.504.397
Jumlah	<u>10.422.611.295</u>	<u>18.719.910.242</u>

12. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2020	2019
Beban personel	29.343.311.048	25.401.243.500
Beban direksi dan komisaris	7.500.000.000	7.500.000.000
Beban produksi konsultasi dan supervisi	1.413.673.363	2.029.368.972
Beban fasilitas kerja	761.786.828	540.785.303
Beban pengembangan operasi	597.451.431	245.818.909
Beban pemeliharaan	67.568.400	41.192.700
Beban pemasaran	50.169.375	25.195.000
Beban lainnya	114.700.000	-
Jumlah	<u>39.848.660.445</u>	<u>35.783.604.384</u>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

9. FIXED ASSETS (continued)

Some of the Company's fixed assets are insured with insurance policies PT Asuransi Jasa Indonesia Number 170345502 and 160346383 which are effective starting 1 December 2019 until 1 December 2020. Management believes the insurance coverages are adequate to cover possible losses on the assets insured.

Based on management's review, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of fixed assets of 31 December 2020 and 2019.

10. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	2020	2019	
Jaminan pelaksanaan peserta tender	748.021.070	17.647.206.116	<i>Guarantee of the implementation of bidders</i>
Jaminan sewa	270.357.600	303.437.400	<i>Rent guarantee</i>
Nilai hak pakai atas tanah	267.569.246	267.569.246	<i>Value of right to use on land</i>
Dikurangi: akumulasi amortisasi	<u>(267.569.246)</u>	<u>(148.649.581)</u>	<i>Less: accumulate amortization</i>
Jumlah	<u>1.018.378.670</u>	<u>18.069.563.181</u>	<i>Total</i>

Guarantee of bidders implementation is fund guaranteed by the project provider for the implemented project by the Company with a validity period more than 12 months.

11. ACCOUNTS PAYABLE

	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 24)	4.136.577.780	2.551.405.845	<i>Related parties (Note 24)</i>
Pihak ketiga	6.286.033.515	16.168.504.397	<i>Third parties</i>
Jumlah	<u>10.422.611.295</u>	<u>18.719.910.242</u>	<i>Total</i>

12. ACCRUED EXPENSES

	2020	2019	
Beban personel	29.343.311.048	25.401.243.500	<i>Personel expenses</i>
Beban direksi dan komisaris	7.500.000.000	7.500.000.000	<i>Cost of directors and Commissioners</i>
Beban produksi konsultasi dan supervisi	1.413.673.363	2.029.368.972	<i>Production consulting and supervision expenses</i>
Beban fasilitas kerja	761.786.828	540.785.303	<i>Work facilities expenses</i>
Beban pengembangan operasi	597.451.431	245.818.909	<i>Expansion of operating Expenses</i>
Beban pemeliharaan	67.568.400	41.192.700	<i>Maintenance expenses</i>
Beban pemasaran	50.169.375	25.195.000	<i>Marketing expenses</i>
Beban lainnya	114.700.000	-	<i>Other expenses</i>
Jumlah	<u>39.848.660.445</u>	<u>35.783.604.384</u>	<i>Total</i>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN

13. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka

	2020	2019	
PPN - Masukan	1.024.692.027	6.102.576.859	VAT - In
Jumlah	<u>1.024.692.027</u>	<u>6.102.576.859</u>	Total

b. (Beban)/manfaat pajak penghasilan

	2020	2019	
Pajak kini	(32.269.674.105)	(45.102.652.241)	Current tax
Pajak tangguhan	(254.983.022)	4.637.966.309	Deferred tax
Jumlah	<u>(32.524.657.127)</u>	<u>(40.464.685.932)</u>	Total

c. Utang pajak

	2020	2019	
Pajak penghasilan			Income tax
Pasal 21	5.863.606.840	14.851.160.575	Articles 21
Pasal 22	2.609.201	3.424.522	Articles 22
Pasal 23	220.146.593	193.438.037	Article 23
Pasal 25	613.500.000	1.927.118.936	Articles 25
Pasal 29	11.776.423.155	19.050.428.838	Articles 29
Final	60.041.973	157.921.000	Final
PPN WAPU - Masukan	4.083.589.161	3.910.040.651	VAT WAPU - In
Bendahara negara - Keluaran	685.100.439	1.475.817.097	State Treasury - Out
Kepada pemungut - Keluaran	5.820.192.294	9.386.712.898	To Collector - Out
Jumlah	<u>29.125.209.656</u>	<u>50.956.062.554</u>	Total

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00319.PPN/WPJ.19/KP.0403/2018 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas kelebihan pembayaran PPN Masa Pajak Mei 2017 sebesar Rp2.183.445.746. Perusahaan telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp2.159.103.659 setelah dikurangi Rp24.342.087.

Based on the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Director General of Tax Decree No. KEP-00319.PPN/WPJ.19/KP.0403/2018 concerning Returning Excess of Payment of Taxes over excess payment of Domestic VAT for May 2017 Tax Period of Rp2,183,445,746. The Company has received return of tax overpayment on 12 February 2019 amounted Rp2,159,103,659 after deducting Rp24,342,087.

d. Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba akuntansi sebelum taksiran pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

d. Current tax

The reconciliation between accounting profit before income tax per comprehensive income and taxable income is as follows:

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN

d. **Pajak kini** (lanjutan)

	2020	2019	
Laba sebelum pajak	133.023.941.217	150.607.850.373	<i>Profit before tax</i>
Beda tetap			Permanent differences
Pendapatan jasa giro	(984.457.434)	(1.337.040.721)	Giro services revenue
Pendapatan bunga deposito	(11.772.456.549)	(5.456.886.818)	Deposit interest income
Pendapatan sewa	(942.421.926)	(600.936.362)	Rental income
Pengembangan perusahaan	792.215.191	1.190.769.472	Company development
Kerjasama pihak ketiga	1.345.956.700	1.999.169.033	Third party cooperation
Rekreasi dan olahraga	703.515.342	208.253.259	Recreation and sports
Koreksi beban pendapatan tahun lalu	422.643.622	733.796.436	Correction of last year's expenses
Listrik, air, telpon (rumah dinas)	44.016.016	43.653.098	Electricity, water, telephone (official residence)
Cinderamata	119.292.885	141.218.327	Souvenir
Sumbangan dan biaya duka	281.465.913	170.459.500	Grief and donations
Denda pajak	56.666.154	5.424.705.386	Tax penalty
	<u>(9.933.564.086)</u>	<u>2.517.160.610</u>	
Beda waktu			Timing differences
Penyisihan piutang	25.222.649.695	21.427.587.599	Allowance for receivables
Provisi imbalan kerja	4.766.630.538	12.222.605.860	Provision for employee benefits
Penyusutan aset	<u>(6.399.320.525)</u>	<u>(6.364.595.477)</u>	Depreciation assets
	<u>23.589.959.708</u>	<u>27.285.597.982</u>	
Penghasilan kena pajak	146.680.336.840	180.410.608.965	<i>Taxable income</i>
Taksiran beban pajak penghasilan	32.269.674.105	45.102.652.241	Provision for income tax Expense
Dikurangi kredit pajak:			Less tax credit
PPh pasal 23	5.548.342.186	2.926.796.171	Income tax article 23
PPh pasal 25	<u>14.944.908.764</u>	<u>23.125.427.232</u>	Income tax article 25
	<u>20.493.250.950</u>	<u>26.052.223.403</u>	
Kurang bayar PPh 29	11.776.423.155	19.050.428.838	Under pay income tax 29

Rekonsiliasi antara manfaat/(beban) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax benefit/(expense) and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit before tax is as follows:

	2020	2019	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	133.023.941.217	150.607.850.373	<i>Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income Pajak</i>
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif	29.265.267.067	37.651.962.592	<i>Income tax at effective tax rate</i>
Pengaruh pajak atas (beban) manfaat yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	(2.185.384.098)	629.290.153	<i>Tax effect of non-taxable income/(non-deductible expenses)</i>
Dampak penyesuaian tarif pajak	5.444.774.158	-	<i>Effect of tax rate adjustment</i>
Penyesuaian tahun berjalan	-	2.183.433.187	<i>Adjustment in current year</i>
Jumlah beban pajak penghasilan - bersih	<u>32.524.657.127</u>	<u>40.464.685.932</u>	<i>Total income tax expense - net</i>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN

e. Pajak tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari/ January 2020	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to statements of income (loss)	(Dibebankan) ke laporan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/ Adjustment due to changes in tax rates	31 Desember/ December 2020	
Liabilitas imbalan kerja	30.436.622.300	1.048.658.719	2.318.772.798	(3.652.394.675)	30.151.659.142	Post-employee benefit liabilities
Penyisihan piutang	17.976.856.110	5.548.982.933	-	(2.157.222.734)	21.368.616.309	Provision receivable
Depresiasi aset	(3.040.360.425)	(1.407.850.516)	-	364.843.251	(4.083.367.690)	Depreciation of assets
Jumlah aset pajak tangguhan	45.373.117.985	5.189.791.136	2.318.772.798	(5.444.774.158)	47.436.907.761	Deferred tax assets

	1 Januari/ January 2019	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to statements of income (loss)	(Dibebankan) ke laporan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	Penyesuaian/ Adjustment	31 Desember/ December 2019	
Liabilitas imbalan kerja	24.913.633.878	3.055.651.465	2.467.336.957	-	30.436.622.300	Post-employee benefit liabilities
Penyisihan piutang	12.482.074.894	5.356.896.900	-	137.884.316	17.976.856.110	Provision receivable
Depresiasi aset	872.105.947	(1.591.148.869)	-	(2.321.317.503)	(3.040.360.425)	Depreciation of assets
Jumlah aset pajak tangguhan	38.267.814.719	6.821.399.496	2.467.336.957	(2.183.433.187)	45.373.117.985	Deferred tax assets

f. Pemeriksaan pajak

Pada tanggal 11 April 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00011/406/17/415/19 dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyetujui pengembalian pajak penghasilan badan untuk tahun 2017.

f. Tax audits

On 11 April 2019, the Company received Corporate Income Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) No. 00011/406/17/415/19 from the Directorate General of Tax which approved the corporate income tax refund for the year 2017.

g. Perubahan tarif pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintahan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease ("COVID-19") yang di antara lain, merubah tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020-2021 dan 20% untuk tahun fiskal 2022 ke depan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan per 31 December 2020 telah dihitung dengan memperhitungkan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat realisasi.

g. Tax rate changes

On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation No. 1/2020 relating to state financial policies and financial system stability in response to Corona Virus Disease ("COVID-19") outbreak in which among others, changed the corporate income tax rate from 25% to 22% for fiscal year 2020-2021 and 20% for fiscal year 2022 onwards.

Deferred tax assets and liabilities as at 31 December 2020 have been calculated taking into account tax rates expected to be prevailing at the time they realise.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BRUTO

	2020	2019	
Pihak berelasi	313.467.515	2.266.969.477	Related parties
Pihak ketiga	10.681.496.151	10.386.404.257	Third parties
Jumlah	<u>10.994.963.666</u>	<u>12.653.373.734</u>	<u>Total</u>

Utang bruto untuk bidang klasifikasi dan bidang komersil adalah saldo uang muka survei yang diterima dari perusahaan pelayaran/rekanan yang akan diperhitungkan dengan *invoice* terbit yaitu pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

15. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan menghitung Beban dan (Liabilitas) untuk Program Imbalan Pascakerja menggunakan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan - (PSAK 24) - Imbalan Kerja. Untuk itu kewajiban atas masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* berdasarkan asumsi aktuaria jangka panjang.

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pascakerja (*post employment benefit*) sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berupa Program Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja. Perusahaan juga mengikutsertakan karyawan dalam Progam Pensiun (PPMP atau PPIP) dimana manfaat dari Program Pensiun akan menjadi pengurang manfaat dari UU No. 13/2003.

Pengelolaan dana program pensiun dilakukan oleh Dana Pensiun PT Biro Klasifikasi Indonesia. Adapun peraturan dana pensiunnya yang terakhir kali ditetapkan oleh Keputusan Direksi PT Biro Klasifikasi Indonesia No. B.0038D/KP903/KI-05 tanggal 1 Januari 2005 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-049/KM.12/2006 tanggal 3 Agustus 2006.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Perusahaan mencatat liabilitas imbalan pascakerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaria, aktuaris independen, dengan laporannya masing-masing tertanggal 12 Januari 2021 dan 2 Januari 2020 di mana menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

14. GROSS PAYABLE

	2019	
Related parties	2.266.969.477	
Third parties	10.386.404.257	
Total	<u>12.653.373.734</u>	

Gross payables for the classification and commercial fields is a survey advance balance received from a shipping company/partner that will be calculated with the published invoice, namely when the work has been completed.

15. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Company calculates Expense and (Liability) for Post Employment Benefit based on Statement of Financial Accounting Standards - (PSAK 24) - Employee Benefit. Past Service Liability is calculated using Projected Unit Credit Method with long-term actuarial assumption.

Company provide post-employment benefit program in accordance to labor regulation in Indonesia No. 13/2003 and Company Regulation (PKB) in form of Severance and Gratuity. The company also includes employees in the Pension Program (PPMP or PPIP) where the benefits of the Pension Program will be a offset from the benefits of Law No. 13/2003.

The pension fund management program is carried out by the PT Biro Klasifikasi Indonesia Pension Fund of the Indonesian Classification Bureau. The last pension fund regulation stipulated by the Decree of the Directors of PT Biro Klasifikasi Indonesia No. B.0038D/KP903/KI-05 dated 1 January 2005 and has been ratified by Minister of Finance Decree No. Kep-049/KM.12/2006 3 August 2006.

As of 31 December 2020 and 2019, the Company accrued post-employment benefits liabilities based on the actuarial calculation prepared by PT Padma Radya Aktuaria, an independent actuary, as stated in its report dated 12 January 2021 and 2 January 2020, respectively, which applied the "Project Unit Credit" method and using the following main assumptions:

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

15. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) **15. EMPLOYEE BENEFITS** **BENEFITS** **LIABILITIES**

	2020	2019	
Usia pensiun	56 tahun/ years	56 tahun/ years	
Tingkat diskonto:			
Imbalan pasca kerja	7,00%	7,50%	<i>Post-employment benefits</i>
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	6,75%	7,50%	<i>Other long-term employee benefits</i>
Tingkat kenaikan gaji	3,00% - 4,00%	3,00% - 4,00%	<i>Salary increment rate</i>
Tabel mortalita	100% TMI IV	100% TMI III	<i>Mortality table</i>
Tingkat cacat	1,00%	1,00%	<i>Disability rate</i>

Jumlah atas nilai kini kewajiban imbalan pasti, nilai wajar aset program, dan surplus (defisit) pada program 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The amounts of the present value of defined benefit obligations, the fair value of the plan assets and the surplus (deficit) in the plan were as follows:

	2020						
	Dana pensiun/ Pension	UU/Labor law No. 13/2003/	Cuti besar/ Long service leave	Masa persiapan pensiun/ Pre-retirement	Penghargaan masa bakti/ Long service award	Jumlah/ Total	
Kewajiban imbalan pasti	23.669.270.695	101.401.106.514	4.426.012.181	402.861.520	7.153.745.184	137.052.996.094	Obligations Defined benefit
Diakui pada laba rugi	3.571.986.333	13.031.489.673	542.805.197	53.503.824	3.225.455.534	20.425.240.561	Recognized in profit or loss
Pembayaran imbalan kerja							Benefits paid
Iuran pemberi kerja	(2.315.609.152)	(12.074.205.992)	(873.208.542)	(168.750.873)	(226.835.462)	(13.343.000.870)	Employer's contributions
Diakui pada penghasilan komprehensif lain	4.382.318.889	6.012.853.872	-	144.703.592	-	10.539.876.353	Recognized in other comprehensive income

	2019						
	Dana pensiun/ Pension	UU/Labor law No. 13/2003/	Cuti besar/ Long service leave	Masa persiapan pensiun/ Pre-retirement	Penghargaan masa bakti/ Long service award	Jumlah/ Total	
Kewajiban imbalan pasti	18.030.574.625	94.430.968.961	4.756.415.526	373.404.977	4.155.125.112	121.746.489.201	Defined benefit obligations
Diakui pada laba rugi	1.668.436.607	16.266.217.398	2.098.977.701	376.831.971	2.921.540.690	23.332.004.367	Recognized in profit or loss
Pembayaran imbalan kerja							Benefits paid
Iuran pemberi kerja	(2.059.096.870)	(7.235.348.668)	(1.533.437.669)	-	(281.515.300)	(9.050.301.637)	Employer's contributions
Diakui pada penghasilan komprehensif lain	11.172.906.266	(1.300.131.441)	-	(3.426.994)	-	9.869.347.831	Recognized in other comprehensive income

a. Program imbalan pascakerja - dana pensiun

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut:

a. Post-employee benefit pension program

The amounts recognised in the statement of financial position are determined as follows:

	2020	2019	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti yang didanai	109.632.583.115	100.498.078.458	Present value of the defined benefit obligation of funded obligation
Nilai wajar aktiva program	(85.963.312.420)	(82.467.503.833)	Fair value of assets
Liabilitas pada laporan posisi keuangan	<u>23.669.270.695</u>	<u>18.030.574.625</u>	Liability in the statements of financial position

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

15. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)	15. EMPLOYEE BENEFITS (continued)	LIABILITIES
a. Program imbalan pascakerja - dana pension (lanjutan)	a. Post-employee benefit program - pension program (continued)	
Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:	<i>The movement in the fair value of plan assets of the year is as follows:</i>	
2020	2019	
Pada awal tahun	82.467.503.833	<i>At beginning of the year</i>
Penghasilan bunga dan pengukuran kembali imbalan hasil atas aset program	4.878.173.278	<i>Interest income and remeasurements return on assets</i>
Iuran pemberi kerja	2.315.609.152	<i>Employer's contributions</i>
Iuran peserta	883.311.250	<i>Employee contributions</i>
Pembayaran manfaat	(4.581.285.093)	<i>Benefit paid</i>
Aset neto akhir tahun	<u>85.963.312.420</u>	<i>Net asset end of the year</i>
Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi adalah:	<i>The amounts recognized in profit or loss of the Company were as follows:</i>	
2020	2019	
Biaya jasa kini	1.789.844.465	<i>Current services cost</i>
Bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto	1.782.141.868	<i>Net interest on the net defined benefit liability</i>
Jumlah	<u>3.571.986.333</u>	<i>Total</i>
Mutasi nilai kini dari cadangan imbalan pasti adalah sebagai berikut:	<i>Changes in present value of defined benefit obligation are as follows:</i>	
2020	2019	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti-awal	18.030.574.625	<i>Liability (asset) beginning of period</i>
Iuran perusahaan	(2.315.609.152)	<i>Employer's contribution</i>
Total biaya yang diakui dalam laporan laba rugi	3.571.986.333	<i>Total cost charged to profit and loss</i>
Total biaya yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	<u>4.382.318.889</u>	<i>Total cost charged to other comprehensive income</i>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti-akhir	<u>23.669.270.695</u>	<i>Present value of defined obligations-end benefit</i>
b. Program imbalan pascakerja - UU No. 13/2003	b. Post-employee benefit program - Labor Law No. 13/2003	
Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi adalah:	<i>The amounts recognized in profit or loss of the Company were as follows:</i>	
2020	2019	
Biaya jasa kini	6.344.457.068	<i>Current services cost</i>
Biaya jasa lalu	-	<i>Past services cost</i>
Bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto	6.687.032.605	<i>Net interest on the net defined benefit liability</i>
Jumlah	<u>13.031.489.673</u>	<i>Total</i>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

15. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) **15. EMPLOYEE BENEFITS (continued)** **LIABILITIES**

b. Program imbalan pascakerja - UU No. 13/2003 (lanjutan) **b. Post-employee benefit program - Labor Law No. 13/2003 (continued)**

Mutasi nilai kini dari cadangan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti-awal	94.430.968.961	86.700.231.672	<i>Liability (asset) beginning of period</i>
Total biaya yang diakui dalam laporan laba rugi	13.031.489.673	16.266.217.398	<i>Total cost charged to profit and loss</i>
Total biaya yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	6.012.853.872	(1.300.131.441)	<i>Total Cost charged to other comprehensive income</i>
Pembayaran imbalan	<u>(12.074.205.992)</u>	<u>(7.235.348.668)</u>	<i>Benefit paid</i>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti-akhir	<u>101.401.106.514</u>	<u>94.430.968.961</u>	<i>Present value of defined obligations-end benefit</i>

c. Program masa persiapan pensiun

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut:

	2020	2019	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	402.861.520	373.404.977	<i>Present value of defined benefit obligation</i>
Nilai wajar aktiva program	-	-	<i>Fair value of asset</i>
Liabilitas pada laporan posisi keuangan	<u>402.861.520</u>	<u>373.404.977</u>	<i>Liability in the statements of financial position</i>

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi adalah:

	2020	2019	
Biaya jasa kini	26.828.936	23.837.903	<i>Current services cost</i>
Bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto	26.674.888	26.221.093	<i>Net interest on the net defined benefit liability</i>
Jumlah	<u>53.503.824</u>	<u>50.058.996</u>	<i>Total</i>

Mutasi nilai kini dari cadangan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti-awal	373.404.977	326.772.975	<i>Liability (asset) beginning of period</i>
Total biaya yang diakui dalam laporan laba rugi	53.503.824	50.058.996	<i>Total cost charged to profit and loss</i>
Total biaya yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	144.703.592	(3.426.994)	<i>Total Cost charged to other comprehensive income</i>
Pembayaran imbalan	<u>(168.750.873)</u>	<u>-</u>	<i>Benefit paid</i>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti-akhir	<u>402.861.520</u>	<u>373.404.977</u>	<i>Present value of defined obligations-end benefit</i>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

15. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) **15. EMPLOYEE BENEFITS (continued)** **LIABILITIES**

d. Program imbalan jangka panjang lainnya - cuti besar

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut:

	2020	2019	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	4.426.012.181	4.756.415.526	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aktiva program	-	-	Fair value of asset
Jumlah	<u>4.426.012.181</u>	<u>4.756.415.526</u>	Total

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi adalah:

	2020	2019	
Biaya jasa	1.787.966.497	1.589.322.941	Services cost
Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto	356.731.165	352.033.541	Net interest on the net defined benefit liability (asset)
(Keuntungan) kerugian	<u>(1.601.892.465)</u>	<u>157.621.219</u>	Actuarial (gain) loss
Jumlah	<u>542.805.197</u>	<u>2.098.977.701</u>	Total

Mutasi nilai kini dari cadangan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Liabilitas (aset) awal periode	4.756.415.526	4.190.875.494	Liability (asset) beginning of period
Total biaya yang diakui dalam laporan laba rugi	542.805.197	2.098.977.701	Total cost charged to profit and loss
Total biaya yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	<u>(873.208.542)</u>	<u>(1.533.437.669)</u>	Total cost charged to other comprehensive income
Nilai kini kewajiban imbalan pasti-akhir	<u>4.426.012.181</u>	<u>4.756.415.526</u>	Present value of defined obligations-end benefit

e. Program imbalan jangka panjang lainnya - masa bakti

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut:

	2020	2019	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	7.513.745.184	4.155.125.112	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aktiva program	-	-	Fair value of asset
Liabilitas pada laporan posisi keuangan	<u>7.513.745.184</u>	<u>4.155.125.112</u>	Liability in the statements of financial position

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

15. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) **15. EMPLOYEE BENEFITS (continued)** **LIABILITIES**

e. Program imbalan jangka panjang lainnya - masa bakti (lanjutan)

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi adalah:

	2020	2019	
Biaya jasa kini	475.960.020	367.213.640	Current services cost
Bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto	311.599.051	277.458.912	Net interest on the net defined benefit liability
Kerugian aktuarial	1.144.729.206	285.427.870	Actuarial loss
Jumlah	<u>1.932.288.277</u>	<u>930.100.422</u>	Total

Mutasi nilai kini dari cadangan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in profit or loss of the Company were as follows:

	2020	2019	
Liabilitas awal periode	4.155.125.112	1.515.099.722	Liability beginning of period
Koreksi	1.293.167.257	1.991.440.268	Adjustment
Total biaya yang diakui dalam laporan laba rugi	1.932.288.277	930.100.422	Total cost charged to profit and loss
Pembayaran imbalan	(226.835.462)	(281.515.300)	Benefit paid
Liabilitas di akhir periode	<u>7.153.745.184</u>	<u>4.155.125.112</u>	Liabilities ending of period

	2020	2019	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti yang didanai/ Present value of the defined benefit obligation of funded obligation	Nilai kini kewajiban imbalan pasti yang didanai/ Present value of the defined benefit obligation of funded obligation		
Tingkat diskonto +1% -1%	202.481.956.977 239.603.723.227	184.798.018.844 227.828.046.525	Discount rate +1% -1%
Tingkat kenaikan gaji +1% -1%	236.407.420.205 211.384.452.960	217.013.993.872 192.963.313.548	Future salary increment rate +1% -1%

16. EKUITAS

a. Modal saham

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

16. EQUITY

a. Share capital

The composition of shareholders as at 31 December 2020 and 2019 are as follows:

Nama pemegang saham	Jumlah saham/ Total shares	Kepemilikan/ Ownership	Jumlah modal/ Total shares	Name of stockholders
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	255.000	100%	255.000.000.000	Ministry of State-Owned Enterprises

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal saham (lanjutan)

Berdasarkan surat Menteri BUMN No: 539/MBU/09/2014 tanggal 17 September 2014, peningkatan modal dasar, penambahan modal disetor dan perubahan anggaran dasar PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) disebutkan bahwa modal dasar Perusahaan yang semula sebesar Rp180.000.000.000 ditingkatkan menjadi Rp600.000.000.000. Meningkatkan penempatan saham sebanyak 210.000 saham, masing-masing saham dengan nilai Rp1.000.000 sehingga seluruhnya seharga Rp210.000.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya penambahan modal disetor tersebut, maka modal ditempatkan/disetor PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang semula sebesar Rp45.000.000.000 menjadi sebesar Rp255.000.000.000. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar PT BKI (Persero) untuk disesuaikan dengan peningkatan modal dasar. Penambahan Modal dasar sebesar Rp210.000.000.000 di ambil dari kapitalisasi sebagian Cadangan Perusahaan sampai dengan tahun buku 2013.

b. Dividen dan cadangan umum

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2020 dengan Risalah Keputusan RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2019, pemegang saham telah menetapkan:

- Dividen tunai sebesar Rp11.015.000.000
- Menyisihkan cadangan umum sebesar Rp99.128.164.441

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

16. EQUITY (continued)

a. Share capital (continued)

Based on the letter of the Minister of SOE No: S-539/MBU/09/2014 dated 17 September 2014, the increase in authorized capital, additional paid-in capital and amendments to the articles of association of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) stated that the company's authorized capital of Rp180,000,000,000 was increased become Rp600,000,000,000. Increase the placement of shares by 210,000 shares, each share with a value of Rp1,000,000 so that all of them are worth Rp210,000,000,000, all of which are taken up by the State of the Republic of Indonesia.

With the addition of the paid-up capital, the issued/paid-up capital of the PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) was originally Rp45,000,000,000 to Rp255,000,000,000. Approved the amendment to Article 4 paragraph (1) and (2) of the Articles of Association of PT BKI (Persero) to be adjusted to increase in authorized capital. Additional authorized capital of Rp210,000,000,000 is taken from the capitalization of part of the Company's Reserves up to the 2013 financial year.

b. Dividend and general reserve

Based on the Decision of the General Meeting of Shareholders on 30 June 2020 with Minutes of RUPS Decision concerning Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for 2019, shareholders have determined:

- Cash dividend amounted to Rp11,015,000,000
- Setting aside a general reserve amount Rp99,128,164,441

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. EKUITAS (lanjutan)

b. Dividen dan cadangan umum (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2019 dengan Risalah Keputusan RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2018, pemegang saham telah menetapkan:

- Dividen tunai sebesar Rp7.289.777.000
- Menyisihkan cadangan umum sebesar Rp4.005.900.362.

17. PENDAPATAN USAHA

	2020	2019
Jasa klasifikasi	459.521.802.847	492.327.272.299
Jasa komersial	337.896.905.167	421.842.657.553
Bagian partner kerjasama	<u>(5.583.565.775)</u>	<u>(5.730.974.493)</u>
Jumlah	<u>791.835.142.259</u>	<u>908.438.955.359</u>

Rincian pendapatan jasa klasifikasi, jasa konsultasi dan supervisi dan bagian partner kerjasama untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

a. Jasa klasifikasi

	2020	2019
Klas tunggal		
Klas Tunggal (Dalam Negeri)		
Mempertahankan klas	200.626.388.770	238.937.080.607
Penerimaan klas	94.939.838.689	109.107.909.764
Statutoria	97.407.612.031	82.516.449.197
Material dan komponen	24.803.672.059	27.651.179.286
<i>Engineering</i>	<u>905.250.250</u>	<u>138.320.000</u>
	<u>418.682.761.799</u>	<u>458.350.938.854</u>
Tunggal (Luar Negeri)		
Statutoria	7.350.040.985	7.163.693.893
Mempertahankan Klas	5.679.371.985	4.956.258.820
Material dan Komponen	2.760.890.575	5.265.481.015
Penerimaan Klas	1.605.296.060	1.099.576.250
<i>Engineering</i>	<u>24.996.000</u>	<u>24.619.200</u>
	<u>17.420.595.605</u>	<u>18.509.629.178</u>
Jumlah klas tunggal	<u>436.103.357.404</u>	<u>476.860.568.032</u>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

16. EQUITY (continued)

b. Dividend and general reserve (continued)

Based on the Decision of the General Meeting of Shareholders on 3 May 2019 with Minutes of RUPS Decision concerning Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for 2018, shareholders have determined:

- Cash dividend amounted to Rp7,289,777,000
- Setting aside a general reserve amount Rp4,005,900,362.

17. REVENUE

<i>Classification services</i>	<i>Commercial services</i>	<i>Part of the partnership project</i>
<i>Classification services</i>	<i>Commercial services</i>	<i>Total</i>

Details of classification service income, consultation and supervision services and sharing partners for the years ended 31 December 2020 and 2019 are as follows:

a. Classification service

	2020	2019	Single class
Single class (Domestic)			
Maintain class			
Class acceptance			
Statutoria			
Material and components			
Engineering			
Single (Abroad)			
Statutoria			
Maintain Class			
Material and Components			
Class Acceptance			
Engineering			
Total single class			

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

17. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

17. REVENUE (continued)

a. Jasa klasifikasi (lanjutan)

Ganda	2020	2019	Dual class
Klas ganda (Dalam Negeri)			Dual class (Domestic)
Mempertahankan Klas	12.381.773.885	10.422.630.677	Maintain Class
Penerimaan Klas	5.911.811.400	777.025.000	Class Acceptance
Statutoria	3.129.608.038	2.491.331.950	Statutoria
Material dan Komponen	-	8.700.000	Material and Components
<i>Engineering</i>	56.654.840	-	Engineering
	<u>21.479.848.163</u>	<u>13.699.687.627</u>	
Klas ganda (Luar Negeri)			Dual class (Abroad)
Mempertahankan klas	960.353.900	1.300.808.065	Maintain Class
Penerimaan Klas	468.405.600	446.208.575	Statutoria
Statutoria	356.497.800	-	Class Acceptance
	<u>1.785.257.300</u>	<u>1.747.016.640</u>	
Klas tunggal (Asing)			Single class (Foreign)
Mempertahankan klas	120.790.000	6.000.000	Statutoria
Statutoria	32.550.000	14.000.000	Maintain Class
	<u>153.340.000</u>	<u>20.000.000</u>	
Jumlah klas ganda	<u>23.418.445.463</u>	<u>15.466.704.267</u>	Total dual class
Jumlah	<u>459.521.802.847</u>	<u>492.327.272.299</u>	Total

b. Jasa komersil

b. Commercial service

	2020	2019	
Bidang inspeksi	162.320.843.232	211.178.495.662	Field of inspection
Bidang pengujian	80.388.407.789	77.277.593.255	Field of testing
Bidang jasa sertifikasi	35.874.246.522	57.089.194.365	Field of certification services
Bidang jasa survei	22.632.954.497	17.215.487.489	Field of survey services
Bidang jasa pemetaan	10.581.707.830	9.754.241.907	Field of mapping services
Bidang jasa <i>assessment</i>	6.297.299.856	6.010.043.591	Field of assessment services
Bidang jasa training	5.702.851.818	10.230.632.419	Field of training services
Bidang jasa pengujian <i>labor</i>	4.586.360.455	5.019.310.000	Field of labor testing services
Bidang jasa supervisi	3.827.161.327	7.155.991.784	Field of supervision services
Bidang jasa audit	3.164.575.359	5.902.108.168	Field of audit services
Bidang jasa <i>labor supply</i>	1.855.001.027	7.744.064.223	Field of labor and supply
Bidang jasa konsultasi	363.395.455	6.615.021.404	Field of consultation services
Bidang jasa <i>monitoring</i>	302.100.000	650.473.286	Field of monitoring services
Jumlah	<u>337.896.905.167</u>	<u>421.842.657.553</u>	Total

c. Bagian Partner Kerjasama

c. Part of the Partnership Project

	2020	2019	
Kerjasama klas ganda	(3.016.565.775)	-	Double clas collaboration
Bagian agen KS	(2.567.000.000)	(5.730.974.493)	KS agent section
Jumlah	<u>(5.583.565.775)</u>	<u>(5.730.974.493)</u>	Total

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

18. BEBAN JASA

18. COST OF SERVICES

	2020	2019	
Beban jasa langsung			Direct cost
Beban personil teknik	152.864.673.165	168.707.676.524	Projects labor expenses
Beban fasilitas	101.611.546.854	112.660.170.058	Utilities expenses
Beban kerjasama pihak ketiga	67.359.300.447	80.188.381.740	Third parties service expenses
Beban perjalanan dinas	40.867.309.620	58.127.838.393	Survey travelling expenses
Beban pengembangan	10.315.301.520	20.023.727.028	Operational expenses
Beban penyusutan alat penunjang	4.742.579.958	4.992.763.697	Utility depreciation expenses
Beban perawatan alat penunjang	<u>4.332.928.271</u>	<u>5.476.716.991</u>	Maintenance utility expenses
	382.093.639.835	450.177.274.431	
Beban jasa tidak langsung			Indirect cost
Beban personil <i>supporting</i>	85.541.363.159	93.767.750.778	Supporting labor expenses
Beban pengembangan	1.695.074.901	2.396.389.882	Operational expenses
Beban fasilitas	877.160.995	838.578.322	Utilities expense
Beban perjalanan dinas	791.355.170	2.980.537.295	Survey travelling expenses
Beban penyusutan alat penunjang	86.245.363	98.566.130	Utility depreciation expenses
Beban perawatan alat penunjang	<u>750.000</u>	<u>37.475.000</u>	Maintenance utility expenses
	88.991.949.588	100.119.297.407	
Jumlah	<u>471.085.589.423</u>	<u>550.296.571.838</u>	Total

19. BEBAN PENJUALAN

19. SELLING EXPENSES

	2020	2019	
Beban pemasaran	4.124.473.531	4.821.748.688	Marketing expense
Beban humas	<u>1.390.843.004</u>	<u>1.474.211.893</u>	Public relation expense
Jumlah	<u>5.515.316.535</u>	<u>6.295.960.581</u>	Total

20. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

**20. GENERAL
EXPENSES**

AND

ADMINISTRATION

	2020	2019	
Beban personel	71.157.309.828	63.406.035.955	Personnel expense
Beban direksi dan komisaris	20.031.897.772	18.707.943.333	Director and commissioner expense
Beban provisi Imbalan jangka panjang karyawan	19.132.073.304	21.013.791.124	Long-term employee benefits provision expense
Beban pengembangan operasi	18.317.864.474	27.085.045.133	Operating Development expense
Beban fasilitas kerja	15.999.056.654	18.544.726.170	Utilities expense
Beban penyusutan	9.713.224.153	10.846.803.830	Depreciation expense
Beban pemeliharaan	7.537.778.309	7.955.185.290	Maintenance expense
Beban perjalanan dinas	2.519.448.165	6.745.594.009	Official travel expense
Beban program kemitraan dan bina lingkungan	1.644.915.252	1.191.315.788	Program kemitraan dan bina (PKBL) expense
Beban pendidikan dan riset	1.618.739.285	2.917.928.463	Research and education expense
Beban audit	<u>1.016.453.499</u>	<u>2.017.995.835</u>	Audit expense
Beban CSR	<u>584.352.100</u>	<u>445.534.251</u>	CSR expenses
Jumlah	<u>169.273.112.795</u>	<u>180.877.899.181</u>	Total

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

21. BEBAN LAIN-LAIN – BERSIH

21. OTHER EXPENSES - NET

	2020	2019	
Bunga deposito berjangka	11.772.456.549	5.456.886.818	<i>Interest on time deposits</i>
Jasa giro	984.457.434	1.337.163.480	<i>Current account</i>
Selisih kurs laba	911.452.563	1.795.055.247	<i>Gain on foreign exchange</i>
Laba penjualan aset	137.258.231	355.759.852	<i>Gain on sale of assets</i>
Pendapatan lain-lain	3.670.342.873	11.714.393.367	<i>Others income</i>
	17.475.967.650	20.659.258.764	
Beban penyisihan piutang usaha (Catatan 4)	25.222.649.695	21.427.587.599	<i>Bad debt expense (Note 4)</i>
Selisih kurs rugi	641.875.669	1.699.125.997	<i>Loss on foreign exchange</i>
Beban bank	476.890.359	775.933.566	<i>Bank expense</i>
Revisi pendapatan jasa komersil	389.510.320	534.602.556	<i>Revision of income comercial services</i>
Beban duka	289.465.913	189.812.984	<i>Grief expense</i>
Penghapusan aktiva	164.371.930	-	<i>Removal of assets</i>
Revisi pendapatan jasa klasifikasi	72.943.302	199.193.880	<i>Revision of income classification services</i>
Pajak Penghasilan (PPh) Final	60.035.643	-	<i>Final income tax (PPh)</i>
Denda pajak kurang bayar	56.666.154	5.424.705.386	<i>Underpaid tax penalties</i>
Denda	9.819.872	3.124.000	<i>Penalties</i>
Beban penurunan nilai	-	342.326.292	<i>Impairment expense</i>
Beban lain-lain	3.028.921.082	10.423.519.890	<i>Other expense</i>
	30.413.149.939	41.019.932.150	
Jumlah	12.937.182.289	20.360.673.386	<i>Total</i>

22. INSTRUMEN KEUANGAN DAN PENGUKURAN NILAI WAJAR

Untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar pada tanggal posisi keuangan, pengukuran nilai wajarnya diungkapkan dengan tingkatan hirarki pengukuran nilai wajar sebagai berikut:

1. Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik (harga yang tersedia di pasar yang aktif) - tingkat 1.

Risiko keuangan utama yang harus dikelola adalah risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas dan risiko pasar yang terdiri dari risiko nilai tukar mata uang asing.

2. Input selain harga kuotasi dalam pasar aktif yang dapat diobservasi untuk asset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (transaksi pasar yang dapat diobservasi) - tingkat 2.

22. FINANCIAL INSTRUMENT AND FAIR VALUE MEASUREMENT

For financial instruments that are measured at fair value at balance sheet date, the corresponding fair value measurements are disclosed by level of following fair value measurement hierarchy:

1. *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (quoted price in active markets) - level 1.*

The main financial risks that must be managed are credit risk, interest rate risk, liquidity risk, and market risk which includes foreign exchange rate risk.

2. *Inputs other than quoted prices in active markets that are observable for the assets or liability, either directly or indirectly (observable current market transactions) - level 2.*

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. INSTRUMEN KEUANGAN DAN PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga yang relevan.

3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi ("transaksi pasar yang tidak dapat diobservasi") - tingkat 3.

Pengungkapan nilai wajar dari aset keuangan yang diukur dengan hirarki nilai wajar tingkat 3 menggunakan teknik analisis arus kas yang didiskonto berdasarkan tingkat suku bunga kredit ritel pada akhir tahun, sementara untuk liabilitas keuangan, digunakan tingkat suku bunga efektif terakhir yang berlaku untuk utang jangka panjang.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan, beserta nilai tercatatnya, adalah sebagai berikut:

	2020		2019		<i>Financial assets</i>
	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	
Aset keuangan					
Pinjaman yang diberikan dan piutang					
Kas dan setara kas	405.648.860.026	405.648.860.026	246.545.816.799	246.545.816.799	<i>Loans and receivables</i>
Piutang usaha	273.080.523.245	273.080.523.245	308.068.607.163	308.068.607.163	<i>Cash and cash equivalents</i>
Pendapatan akan diterima	4.980.557.160	4.980.557.160	17.886.800.858	17.886.800.858	<i>Accounts receivable</i>
Aset lancar lainnya	987.149.444	987.149.444	1.092.002.661	1.092.002.661	<i>Accrued revenue</i>
Jaminan pelaksanaan peserta tender	748.021.070	684.820.409	17.647.206.116	16.156.185.149	<i>Other current assets</i>
Jumlah aset keuangan	685.445.110.945	685.381.910.284	591.240.433.597	598.749.412.630	<i>Guarantee of the implementation of bidders</i>
Liabilitas keuangan					
Diukur dengan biaya perolehan amortisasi					
Utang usaha	10.422.611.295	10.422.611.295	18.719.910.242	18.719.910.242	<i>Total financial assets</i>
Biaya yang masih harus dibayar	39.848.660.445	39.848.660.445	35.783.604.384	35.783.604.384	<i>Financial liabilities</i>
Utang bruto	10.994.963.666	10.994.963.666	12.653.373.734	12.653.373.734	<i>Measured at amortized cost</i>
Jumlah liabilitas keuangan	61.266.235.406	61.266.235.406	67.156.888.360	67.156.888.360	<i>Accounts payable</i>
					<i>Accrued expenses</i>
					<i>Gross payable</i>
					<i>Total financial liabilities</i>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

22. FINANCIAL INSTRUMENT AND FAIR VALUE MEASUREMENT (continued)

For financial instruments without quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially has the same characteristic or calculated based on the expected cash flows discounted by the relevant market rates.

3. *Inputs for the asset and liability that are not based on observable market data (non-observable current market transactions) - level 3.*

The disclosure of fair value for financial assets measured by level 3 fair value hierarchy using the discounted cash flow analysis based on the retail lending rate at the end of the year, while for the financial liabilities, the effective interest rate applicable in the latest utilization of long-term debt was applied.

The fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts, are as follows:

	2020	2019	
	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	
Aset keuangan			
Pinjaman yang diberikan dan piutang			
Kas dan setara kas	405.648.860.026	405.648.860.026	<i>Loans and receivables</i>
Piutang usaha	273.080.523.245	273.080.523.245	<i>Cash and cash equivalents</i>
Pendapatan akan diterima	4.980.557.160	4.980.557.160	<i>Accounts receivable</i>
Aset lancar lainnya	987.149.444	987.149.444	<i>Accrued revenue</i>
Jaminan pelaksanaan peserta tender	748.021.070	684.820.409	<i>Other current assets</i>
Jumlah aset keuangan	685.445.110.945	685.381.910.284	<i>Guarantee of the implementation of bidders</i>
Liabilitas keuangan			
Diukur dengan biaya perolehan amortisasi			
Utang usaha	10.422.611.295	10.422.611.295	<i>Total financial assets</i>
Biaya yang masih harus dibayar	39.848.660.445	39.848.660.445	<i>Financial liabilities</i>
Utang bruto	10.994.963.666	10.994.963.666	<i>Measured at amortized cost</i>
Jumlah liabilitas keuangan	61.266.235.406	61.266.235.406	<i>Accounts payable</i>
			<i>Accrued expenses</i>
			<i>Gross payable</i>
			<i>Total financial liabilities</i>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

23. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL

Ikhtisar nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan kebijakan manajemen risiko

Berikut ikhtisar nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan:

23. FINANCIAL INSTRUMENT FINANCIAL AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

Summary of carrying value and estimated fair value of financial instruments

Here's an overview of Company financial instruments carrying value and estimated fair value that are stated in the Company's statement of financial position:

Aset keuangan	2020					Financial assets
	Belum jatuh tempo/ Not yet due	0-90 hari/days	91-180 hari/days	> 181 hari/days	Jumlah/ Total	
Kas dan setara kas	405.648.860.026	-	-	-	405.648.860.026	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	-	-	187.879.927.550	85.200.595.696	273.080.523.245	Accounts receivable
Pendapatan akan diterima	-	-	-	-	4.980.557.160	Accrued revenue
Aset lancar lainnya	-	-	-	-	987.149.444	Other current assets Guarantee of the implementation of bidders
Jaminan pelaksanaan	-	-	-	748.021.070	748.021.070	
Jumlah aset keuangan	405.648.860.026	178.077.532.903	30.764.749.901	162.116.335.645	782.575.185.079	Total financial assets
Aset keuangan	2019					Financial assets
	Belum jatuh tempo/ Not yet due	0-90 hari/days	91-180 hari/days	> 181 hari/days	Jumlah/ Total	
Kas dan setara kas	246.545.816.799	-	-	-	246.545.816.799	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	-	-	238.118.263.832	69.950.343.331	308.068.607.163	Accounts receivable
Pendapatan akan diterima	-	-	-	-	17.886.800.858	Accrued revenue
Aset lancar lainnya	-	-	-	-	1.092.002.661	Other current assets Guarantee of the implementation of bidders
Jaminan pelaksanaan	-	-	-	17.647.206.116	17.647.206.116	
Jumlah aset keuangan	246.545.816.799	-	238.118.263.832	87.597.549.447	591.240.433.597	Total financial assets

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perusahaan terekspos terhadap berbagai risiko keuangan, termasuk dampak nilai tukar mata uang asing, tingkat harga komoditas dan tingkat suku bunga. Program manajemen risiko keseluruhan yang dimiliki Perusahaan ditujukan untuk menghadapi ketidakpastian harga komoditas dan untuk meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Perusahaan.

Financial risk management policies and objectives

Various activities undertaken to the Company is exposed to various financial risks, including the impact of foreign currency exchange rates, commodity prices and the level of interest rates. Company's overall risk management programs aim to deal with the uncertain price of commodities and to minimize its adverse impact to Company's financial performance.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**23. INSTRUMEN KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN DAN
MODAL (lanjutan)**

**Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan** (lanjutan)

Manajemen risiko dijalankan oleh Dewan Direksi Perusahaan. Dewan Direksi melakukan identifikasi, evaluasi dan lindung nilai terhadap risiko-risiko keuangan, apabila dianggap perlu. Komite menentukan prinsip manajemen risiko secara keseluruhan, termasuk risiko pasar, kredit dan likuiditas.

1. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar mengandung 3 tipe risiko: risiko harga, risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai mata uang asing. Instrumen keuangan yang terpengaruh oleh risiko pasar termasuk kas dan setara kas, piutang usaha dan utang usaha.

a. Risiko suku bunga

Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrument keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Perusahaan memiliki pinjaman jangka pendek dengan bunga mengambang. Tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan terjadi secara tiba-tiba dapat berpengaruh terhadap menurunnya laba Perusahaan.

b. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas dimasa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Perusahaan. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang pengadaan barang dan jasa dalam mata uang USD dan SGD.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

**23. FINANCIAL INSTRUMENT FINANCIAL AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Financial risk management policies and
objectives** (continued)

Risk management is run by Company's Board of Directors. Board of Directors perform identification, evaluation and hedging of financial risks, if deemed necessary. The Committee determines the overall risk management principles, including market risk, credit risk and liquidity risk.

1. Market risk

Market risk is the risk of the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk contains three types of risk: price risk, interest rate risk and foreign currency risk. Financial instruments affected by market risk include cash and cash equivalents, accounts receivable and accounts payable.

a. *Interest rate risk*

Cash flow interest rate risk is the risk that future cash flows of a financial instrument fluctuate due to changes in market interest rates. The Company has short-term loans with floating interest. The interest rate which is quite high and occurs in sudden decrease in income can affect the Company.

b. *Foreign currency risk*

The risk of foreign currency exchange rate is the risk of changes in fair value of future cash flows of a financial instrument fluctuate due to changes in foreign currency exchange rates used by the Company. The Company's exposure to exchange rate fluctuations primarily derived from procurement of debt denominated in USD and SGD.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN DAN MODAL (lanjutan)

2. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang dihadapi Perusahaan sebagai akibat wanprestasi dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu pelanggan dan pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

Kebijakan manajemen dalam mengantisipasi risiko kredit yang timbul dari pelanggan adalah sebagai berikut:

- a) Perusahaan hanya akan melakukan hubungan usaha dengan pihak ketiga yang diakui, kredibel dan *bankable*.
- b) Mempunyai kebijakan untuk penjualan kredit dan semua pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit.

Perusahaan meminimalkan risiko kredit aset keuangan seperti kas setara kas dengan mempertahankan saldo kas minimum dan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana. Eksposur maksimum risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat sebagaimana diungkapkan pada Catatan 3. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan.

	2020	2019	
Jasa klasifikasi	133.803.083.411	145.680.716.056	<i>Classification services</i>
Jasa komersil	<u>236.407.513.968</u>	<u>234.295.315.546</u>	<i>Commercial services</i>
Jumlah piutang usaha	370.210.597.379	379.976.031.602	<i>Total accounts receivable</i>
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(97.130.074.134)</u>	<u>(71.907.424.439)</u>	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
Jumlah - bersih	<u>273.080.523.245</u>	<u>308.068.607.163</u>	<i>Total - net</i>

3. Risiko likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Perusahaan dan pendanaan jangka pendek - menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

23. FINANCIAL INSTRUMENT FINANCIAL AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)

2. Credit risk

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss from defaulted third parties. Third parties are referred to the customers and counter parties that fail to discharge their contractual obligations.

Management policies in anticipation of this credit risk arise from the customer are as follows:

- a) *The Company will only do business relationship with third parties who are recognized, credible and bankable.*
- b) *Have a policy for credit sales and all third parties who will make credit sales have to go through credit verification procedures.*

The Company minimize credit risks financial assets such as cash and cash equivalent by maintaining minimum cash balance and select qualified bank for the placement of funds. The maximum exposure to the credit risk is represented by the carrying amount as shown in Note 3. There is no significant concentration of credit risk.

3. Liquidity risks

The ultimate responsibility for liquidity risk is in board of directors, whom has established liquidity risk management framework suitable for the management of the Company's short - medium and long-term funding as well as and liquidity management requirements.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**23. INSTRUMEN KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN DAN
MODAL (lanjutan)**

3. Risiko likuiditas (lanjutan)

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Manajemen risiko modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan disyaratkan untuk memelihara tingkat permodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipenuhi oleh entitas. Selain itu, Perusahaan juga dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipertimbangkan oleh Perusahaan serta telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

**23. FINANCIAL INSTRUMENT FINANCIAL AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)**

3. Liquidity risks (lanjutan)

The Company manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Capital risk management

The primary objective of the Company capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company are required under their respective loan agreements to maintain the level of existing share capital. This externally imposed capital requirement has been complied with by the relevant entities. In addition, the Company are also required by the Law No. 40 Year 2007. This externally imposed capital requirements are considered by the Company decided at the Annual General Meeting of shareholders (RUPS).

The Company manages theirs capital structure and makes adjustments to it, if necessary, based on changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the year ended 31 December 2020 and 2019.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. IKHTISAR SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat berelasi yang terjadi pada Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh menteri negara BUMN merupakan pemegang saham mayoritas Perusahaan. Oleh karena itu secara tidak langsung Perusahaan memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi dengan pihak berelasi yang terjadi pada Perusahaan adalah sebagai berikut:

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

24. SUMMARY OF RELATED PARTIES TRANSACTION AND BALANCE

The nature of related parties of the Company are as follows:

- a. *The Government of the Republic of Indonesia which was represented by Minister of State Owned Enterprise is the majority shareholder of the Company. Therefore the Company has indirect affiliation with other stated owned companies through the inclusion of government capital of the Republic of Indonesia.*

Details of the nature and type of material transactions with related parties are as follows:

Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan Perusahaan/ <i>Nature of relationship</i>	Sifat transaksi/ <i>Transactions</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas anak dari entitas sepengendali/ <i>Subsidiaries of entities under common control</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas anak dari entitas sepengendali/ <i>Subsidiaries of entities under common control</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah	Entitas anak dari entitas sepengendali/ <i>Subsidiaries of entities under common control</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	Entitas anak dari entitas sepengendali/ <i>Subsidiaries of entities under common control</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>
PT Bank Mandiri Syariah	Entitas anak dari entitas sepengendali/ <i>Subsidiaries of entities under common control</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>
PT Pertamina (Persero) Dit. Hilir Bidang Perkapalan	Entitas anak dari entitas sepengendali/ <i>Subsidiaries of entities under common control</i>	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau <i>fund placement</i> proyek komersil/ <i>Sale and purchase of classification services and/or commercial projects</i>
PT Pertamina Hulu Energi offshore North West Java	Entitas anak dari entitas sepengendali/ <i>Subsidiaries of entities under common control</i>	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau <i>fund placement</i> proyek komersil/ <i>Sale and purchase of classification services and/or commercial projects</i>
PT Sucofindo (Persero)	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau <i>fund placement</i> proyek komersil/ <i>Sale and purchase of classification services and/or commercial projects</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau <i>fund placement</i> proyek komersil/ <i>Sale and purchase of classification services and/or commercial projects</i>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

24. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BEREKALASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) **24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION** (continued)

Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan Perusahaan/ <i>Nature of relationship</i>	Sifat transaksi/ <i>Transactions</i>
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau <i>fund placement</i> proyek komersil/ <i>Sale and purchase of classification services and/or commercial projects</i>
PT Pertamina EP	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau <i>fund placement</i> proyek komersil/ <i>Sale and purchase of classification services and/or commercial projects</i>
PT Antam (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau <i>fund placement</i> proyek komersil/ <i>Sale and purchase of classification services and/or commercial projects</i>
PT Pertamina Gas	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau <i>fund placement</i> proyek komersil/ <i>Sale and purchase of classification services and/or commercial projects</i>
Kementerian Kelautan & Perikanan	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau <i>fund placement</i> proyek komersil/ <i>Sale and purchase of classification services and/or commercial projects</i>
PT Pertamina Hulu Energi	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau <i>fund placement</i> proyek komersil/ <i>Sale and purchase of classification services and/or commercial projects</i>
PT Pertamina Drilling Services Indonesia	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau <i>fund placement</i> proyek komersil/ <i>Sale and purchase of classification services and/or commercial projects</i>
PT Pertamina UBEP Limau	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau <i>fund placement</i> proyek komersil/ <i>Sale and purchase of classification services and/or commercial projects</i>
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau <i>fund placement</i> proyek komersil/ <i>Sale and purchase of classification services and/or commercial projects</i>
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Jasa asuransi/ <i>Insurance services</i>
PT Brantas Abipraya (Persero)	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Jasa konstruksi/ <i>Construction services</i>
PT Rekayasa Industri	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Proyek komersial/ <i>Sale and purchase of classification services and/or commercial projects</i>
PT Angkasa Pura I (Persero)	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Proyek komersial/ <i>Sale and purchase of classification services and/or commercial projects</i>
PT Angkasa Pura II (Persero)	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Proyek komersial/ <i>Sale and purchase of classification services and/or commercial projects</i>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

24. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) **24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION** (continued)

Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan Perusahaan/ <i>Nature of relationship</i>	Sifat transaksi/ <i>Transactions</i>
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Proyek komersial/Sale and purchase of classification services and/or commercial projects
PT Timah Tbk	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Proyek komersial/Sale and purchase of classification services and/or commercial projects
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Proyek komersial/Sale and purchase of classification services and/or commercial projects
PT Yodya Karya (Persero)	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Proyek komersial/Sale and purchase of classification services and/or commercial projects
Kementerian Kelautan & Perikanan	Entitas sepengendali/ <i>Entities under common control</i>	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau proyek komersial/Sale and purchase of classification services and/or commercial project

b. Saldo signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

b. Significant balance with related parties are as follows:

			Percentase terhadap jumlah aset/ <i>Percentage of total assets</i>		Cash and cash equivalents
	2020	2019	2020	2019	
Kas dan setara kas					Banks
Bank					Rupiah
Rupiah					PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.795.388.574	38.545.387.622	2,74%	4,07%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	23.811.664.070	38.210.268.682	2,34%	4,03%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	249.373.156	247.381.370	0,02%	0,03%	USD
USD					PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.395.301.224	477.710.645	0,43%	0,05%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	373.776.999	321.387.825	0,04%	0,03%	SGD
SGD					PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.655.839.087	3.126.648.074	0,46%	0,33%	Total
Jumlah	61.281.343.110	80.928.784.218	6,03%	8,54%	
Deposito					Deposits
Rupiah					Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	90.000.000.000	70.000.000.000	8,85%	7,39%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	65.000.000.000	-	6,39%	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Syariah	45.000.000.000	-	4,43%	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Syariah
PT Bank Syariah Mandiri	30.000.000.000	-	2,95%	-	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BRI Syariah Tbk	15.000.000.000	-	1,48%	-	PT Bank BRI Syariah Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	50.000.000.000	0,0%	5,28%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	245.000.000.000	120.000.000.000	24,01%	12,66%	
Plutang usaha					Total
PT Pertamina (Persero)	31.853.711.070	40.567.738.824	3,13%	4,28%	
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	10.613.902.411	9.980.593.460	1,04%	1,05%	PT Pertamina (Persero)
Konsorsium PT BKI & Sucofindo & Surveyor Indonesia	8.762.957.266	-	0,86%	-	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Rekayasa Industri	4.906.839.320	2.327.778.620	0,48%	0,25%	Konsorsium PT BKI & Sucofindo & Surveyor Indonesia
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	4.073.383.952	1.456.160.253	0,40%	0,15%	PT Rekayasa Industri
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	3.470.174.843	3.161.620.871	0,34%	0,33%	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1.996.212.089	8.464.733.481	0,20%	0,89%	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
PT Yodya Karya (Persero)	1.810.700.000	1.810.700.000	0,18%	0,19%	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Timah Tbk	1.054.590.900	987.892.920	0,10%	0,10%	PT Yodya Karya (Persero)
Jumlah	68.542.471.851	68.757.218.429	6,74%	7,26%	Total

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

24. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

	Percentase terhadap jumlah aset/ Percentage of total assets				Accrued revenue PT Pertamina EP Cepu Saka Energy PHE OSES Ltd PT Pertamina (Persero) PT Sucofindo (Persero) PT Rekayasa Industri PT Petro Andalan Nusantara PT Terminal Petikemas Surabaya PT Patra Drilling Contractor	
	2020		2019			
	2020	2019	2020	2019		
Pendapatan yang akan diterima						
PT Pertamina EP Cepu	1.237.000.000	-	0,12%	-	PT Pertamina EP Cepu	
Saka energy	436.528.000	-	0,04%	-	Saka Energy	
PHE OSES Ltd	332.000.000	-	0,03%	-	PHE OSES Ltd	
PT Pertamina (Persero)	115.000.000	1.240.450.000	-	0,13%	PT Pertamina (Persero)	
PT Sucofindo (Persero)	-	10.609.233.881	-	1,12%	PT Sucofindo (Persero)	
PT Rekayasa Industri	-	3.095.712.100	-	0,33%	PT Rekayasa Industri	
PT Petro Andalan Nusantara	--	134.750.000	-	0,01%	PT Petro Andalan Nusantara	
PT Terminal Petikemas Surabaya	--	108.900.000	-	0,01%	PT Terminal Petikemas Surabaya	
PT Patra Drilling Contractor	--	66.000.000	-	0,01%	PT Patra Drilling Contractor	
Jumlah	2.120.528.000	15.255.045.981	0,19%	1,61%	Total	
Utang usaha						
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	4.136.577.780	2.020.127.593	1,82%	0,84%	Account payables PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	
PT Industri Sandang Nusantara	-	188.108.251	-	0,08%	PT Industri Sandang Nusantara	
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	-	163.100.000	-	0,07%	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	
Jumlah	4.136.577.780	2.371.335.844	1,82%	0,99%	Total	
Utang bruto						
PT Pertamina Trans Kontinental	217.824.415	176.005.965	0,10%	0,07%	Gross payables PT Pertamina Trans Kontinental	
PT Pertamina (Persero)	73.206.000	124.471.110	0,03%	0,05%	PT Pertamina (Persero)	
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	5.500.000	--	-	-	PT Pembangunan Perumahan (Persero)	
PT Pelayaran Nasional Indonesia	5.400.000	--	-	-	PT Pelayaran Nasional Indonesia	
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3.400.000	--	-	-	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.640.000	--	-	-	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2.497.100	191.082.000	-	0,08%	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	
KSO Wika- Jaya Konstruksi	2.200.000	--	-	-	KSO Wika- Jaya Konstruksi	
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	600.000	--	-	-	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	347.105.500	-	0,14%	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	-	188.830.897	-	0,08%	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	
PT Timah Tbk	-	127.687.630	-	0,05%	PT Timah Tbk	
Jumlah	313.467.515	1.155.183.102	0,13%	0,42%	Total	

c. Transaksi signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

c. Significant transactions with related parties are as follow:

	Percentase terhadap jumlah pendapatan/ Percentage of total revenue				Revenue PT Pertamina (Persero) Kementerian Sosial Republik Indonesia PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Konsorsium PT BKI & PT Sucofindo & Surveyor Indonesia PT Sucofindo (Persero) PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Timah Tbk PT Pupuk Indonesia Logistik	
	2020		2019			
	2020	2019	2020	2019		
Pendapatan						
PT Pertamina (Persero)	51.585.169.468	61.215.640.393	6,51%	6,74%	PT Pertamina (Persero)	
Kementerian Sosial Republik Indonesia	19.701.707.579	--	2,49%	0,00%	Kementerian Sosial Republik Indonesia	
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	10.084.636.431	10.278.253.863	1,27%	1,13%	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	9.982.919.375	11.379.518.456	1,26%	1,25%	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	7.287.054.822	6.630.688.010	0,92%	0,73%	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	
Konsorsium PT BKI & PT Sucofindo & Surveyor Indonesia	4.797.838.497	-	0,61%	-	Konsorsium PT BKI & PT Sucofindo & Surveyor Indonesia	
PT Sucofindo (Persero)	2.400.525.000	14.378.252.232	0,30%	1,58%	PT Sucofindo (Persero)	
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1.652.075.000	165.550.000	0,21%	0,02%	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1.233.013.850	9.189.117.751	0,16%	1,01%	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	
PT Timah Tbk	870.045.000	784.947.110	0,11%	0,09%	PT Timah Tbk	
PT Pupuk Indonesia Logistik	676.611.750	660.452.500	0,09%	0,07%	PT Pupuk Indonesia Logistik	
	110.244.596.772	114.682.420.315	13,93%	12,62%		

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PERIKATAN DAN KONTINJENSI

a. Perikatan

1. Perusahaan telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lingkup pekerjaan atas proyek tersebut adalah Kegiatan Monitoring Kualitas DTKS tahun 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp18.288.610.000 sejak tanggal 18 Agustus 2020 - 15 November 2020.
2. Perusahaan menandatangi kontrak atas pekerjaan untuk PT Sorik Merapi Geothermal Power dengan periode pelaksanaan tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 15 Desember 2020. Lingkup pekerjaan berupa Pekerjaan SLO Inspection Service For PLTP PT Sorik Merapi. Nilai kontrak setelah adendum I adalah sebesar Rp13.416.000.000.
3. Perusahaan menandatangi kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk PT New Priok Container One yang berlangsung dengan tanggal periode 20 April 2020 sampai dengan 19 April 2022. Lingkup pekerjaan berupa Penerbitan Sertifikat VGM oleh PT BKI di lingkungan New Priok Container Terminal One. Nilai kontrak dihitung berdasarkan sertifikat yang terbit. Sertifikat terbit dihargai sebesar Rp15.000/sertifikat.
4. Perusahaan menandatangi kontrak pelaksanaan pekerjaan inspeksi untuk Pertamina Kilang Balikpapan dengan periode sejak 1 Juni 2020 sampai dengan 1 Juni 2023. Lingkup pekerjaan berupa Pemeriksaan Peralatan & Instalasi PLO ISBL, Kilang RDMP Pertamina Balikpapan dengan nilai kontrak sebesar Rp5.000.000.000.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

25. COMMITMENT AND CONTINGENCIES

a. Commitment

1. *The Company has been signed in the collaboration project with Government belongs to Social Ministry of Republic Indonesia. The scope of working project is activity Quality Monitoring of DTKS for the year 2020 which amounting Rp18,288,610,000 for the period 18 August 2020 until 15 November 2020.*
2. *The Company has signed the contract of to PT Sorik Merapi Geothermal Power for the period 15 July 2020 to 15 December 2020. The scope of work is SLO Inspection Service for PLTP PT Sorik Merapi. The contract amount after addendum I amounting to Rp13,416,000,000.*
3. *The company signed a work implementation contract for PT New Priok Container One, which runs from 20 April 2020 to 19 April 2022. The scope of work is the VGM Certificate Issuance by PT BKI in the New environment Priok Container Terminal One. The contract value is calculated based on the issued certificate. Issued certificates are valued at Rp15,000/certificate.*
4. *The Company has signed the contract of Inspection & Instalation Project to Pertamina Kilang Balikpapan for the period 1 June 2020 to 1 June 2023. The scope of work is Tools Inspection & Instalation of PLO, ISBL, Kilang RDMP Pertamina Balikpapan with amount of contract is Rp5,000,000,000.*

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PERIKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. **Perikatan** (lanjutan)

5. Perusahaan menandatangi kontrak pelaksanaan pekerjaan inspeksi milik PT Transportasi Gas Indonesia untuk periode yang berlangsung mulai 2 Juni 2020 sampai dengan 29 Desember 2020. Lingkup pekerjaan berupa inspeksi yang bernilai kontrak sebesar Rp4.024.900.000.
6. Perusahaan menandatangi kontrak pelaksanaan pekerjaan Survey untuk PT Pelindo Marine Services dengan periode tanggal 10 November 2018 sampai 1 Desember 2023. Lingkup pekerjaan berupa Survey AS, LLAS, IS, DS, PS (P/S), SS, LLSS dalam 1 periode klas. Pekerjaan ini bernilai kontrak sebesar Rp3.219.356.000.
7. Perusahaan menandatangi kontrak pelaksanaan pekerjaan kepada PHE OSES dengan periode tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan 16 Agustus 2022. Lingkup pekerjaan berupa Pekerjaan Bunker Marine Survey Services dan nilai kontrak sebesar Rp3.101.736.000.
8. Perusahaan menandatangi kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk PT Vale Indonesia Tbk dengan periode tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan 10 Oktober 2020. Lingkup pekerjaan berupa Asesmen Jalur Logistik dan nilai kontrak sebesar Rp2.671.612.288.
9. Perusahaan menandatangi kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk PT Pertamina (Persero) Refinery UN dengan periode tanggal 2 November 2020 sampai 31 Oktober 2022. Lingkup pekerjaan berupa NDT Periode Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pekerjaan ini bernilai kontrak sebesar Rp2.580.000.000.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

25. COMMITMENT AND CONTINGENCIES
(continued)

a. **Commitment** (continued)

5. *The Company has signed the contract of inspection to PT Transportasi Gas Indonesia for the period 2 June 2020 to 29 December 2020. The scope of work is inspection and amount of contract is Rp4,024,900,000.*
6. *The Company has signed the contract of Survey to PT Pelindo Marine Services for the period 10 November 2018 to 1 December 2023. The scope of work is Survey AS, LLAS, IS, DS, PS (P/S), SS, LLSS in one classification period and the amount of contract is Rp3,219,356,000.*
7. *The Company has signed the to PHE OSES for the period 16 August 2019 to 16 August 2022. The scope of work is Bunker Marine Survey Services and the amount of contract is Rp3,101,736,000.*
8. *The Company has signed the contract to PT Vale Indonesia Tbk for the period 10 October 2019 to 10 October 2020. The scope of work is Assessment of Logistics Road and the amount of contract is Rp2,671,612,288.*
9. *The Company has signed the contract to PT Pertamina (Persero) Refinery UN for the period 2 November 2020 to 31 October 2022. The scope of work is periodic NDT for the year 2020 until 2022. The amount of contract is Rp2,580,000,000.*

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PERIKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Kontinjensi

1. Perkara Perdata perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) cabang Pekanbaru.

Perusahaan sedang menempuh proses hukum atas sengketa lahan dengan nomor perkara 72/Pdt.G/2018/PN.PBR. Penggugat atas nama Harianto mengajukan permasalahan dikarenakan bahwa pada saat ini tanah senilai Rp2.199.185.000 dan bangunan senilai Rp3.312.738.800 dikuasai oleh Perusahaan dan tergugat lainnya secara tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mengolah atau mengusahakan atau menjual dan/atau menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar terhadap penggugat. Perusahaan berstatus sebagai tergugat 3.

Pada tanggal 31 Desember 2019 rencana pengajuan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.194/PDT/2019/PT PBR oleh pihak Penggugat (Terbanding), apabila permohonan kasasi tersebut benar akan diajukan, maka Perusahaan sebagai Termohon (sebelumnya adalah Tergugat/ Turut Pembanding) akan mengirimkan kontra memori kasasi sebagai jawaban atas memori kasasi yang diberikan pihak Pemohon (sebelumnya adalah Penggugat/ Terbanding).

Berdasarkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 194/PDT/2019/PT PBR oleh pihak Penggugat (Terbanding), Pihak Terbanding (Penggugat) mengajukan kasasi untuk keputusan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2020, proses pengajuan kasasi dari pihak Terbanding (Penggugat) masih dalam pengiriman berkas kasasi oleh pihak terbanding.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

25. COMMITMENT AND CONTINGENCIES
(continued)

b. Contingencies

1. Civil Cases against the law over the control of the land of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Pekanbaru branch.

The Company is undergoing a legal process for land disputes with case number 72/Pdt.G/2018/PN.PBR. The prosecutor is Harianto who submitted claim due to the land amounted Rp2,199,185,000 and building amounted Rp3,312,738,800 was controlled by the Company and other defendants without rights and against the law by processing or trading or selling and/or renting the land to other parties resulting in substantial losses to the prosecutor. The Company status as defendant 3.

On 31 December 2019 the submission of an appeal against the Supreme Court of the Mahkamah Agung Republik Indonesia atas appeal verdict Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 194/PDT/2019/PTPBR (Compared), if the appeal is true it will be submitted, then the Company as the Respondent (previously the Defendant/Co-Comparator) will send an appeal memory counter in response to the appeal memory given by the Applicant (formerly Plaintiff/Comparable).

Based on the Decision of the Appeal of the Pekanbaru High Court No. 194/PDT/2019/PT PBR by the Plaintiff (Appealed), the Appealed Party (Plaintiff) filed an appeal for this decision. As of 31 December 2020, the appeal process for the appealed party (Plaintiff) is still being sent by the appealed party.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PERIKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. **Kontinjensi** (lanjutan)

2. Indikasi penyalahgunaan jabatan oleh oknum PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Perusahaan melaporkan kepada pihak kepolisian untuk menindak lanjuti dugaan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP. Pihak perusahaan melaporkan pegawai cabang Pratama Komersil Cilegon, Direktur Utama PT CTPE, Direktur Utama PT ICE. Pihak Perusahaan melaporkan perkara dengan No. TBL/388/IV/2018/Bareskrim tanggal 16 April 2018 dengan potensi kerugian sebesar Rp4.886.791.463. Pada tanggal 31 Desember 2020, masih dalam proses hukum oleh pihak berwajib.

26. DAMPAK DARURAT BENCANA WABAH VIRUS CORONA

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, telah terjadi pandemik virus COVID-19 yang mengakibatkan kenaikan nilai tukar mata uang asing dan menurunnya kegiatan di sektor ekonomi.

Secara langsung dan tidak langsung, dampak ini tentunya juga akan mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan pada beberapa bulan mendatang. Sehingga beberapa proyek baru mengalami penundaan untuk sementara waktu.

Dampak pandemik virus COVID-19 dari awal tahun 2020 sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan adalah signifikan terhadap kinerja perusahaan dan operasional.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

25. COMMITMENT AND CONTINGENCIES
(continued)

b. **Contingencies** (continued)

2. *Indication of override of control by some parties PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). The Company reported to the police to follow up on the alleged fraudulent act of article 378 KUHP. The Company reported staffs of Cilegon commercial Pratama Branch, President Director of PT CTPE, President Director of PT ICE. The Company reports the case with the number TBL/388/IV/2018/Bareskrim by 16 April 2018 with potential loss amounted Rp4,886,791,463. As of 3 December 2020 the date of report, the case still under investigation.*

26. EFFECT OF EMERGENCY CONDITIONS DUE TO CORONA VIRUS

As of the authorization date of the issuance of the financial statement, the COVID-19 virus pandemic has occurred, which has resulted in an increase in foreign exchange rates and declining economic activity.

Directly and indirectly, this impact will certainly also affect the Company's operations in the coming months. Therefore, several new projects have been temporarily delayed.

The impact of the COVID-19 pandemic virus from the beginning of 2020 until the date of the financial statements is significant for company performance and operations.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. DAMPAK DARURAT BENCANA WABAH VIRUS CORONA (lanjutan)

Dampak signifikan terhadap kinerja operasional Perusahaan, Perusahaan melakukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagai berikut:

- a. Pendapatan klasifikasi mengalami penurunan sebesar 13,3% yang diakibatkan proses penerimaan kapal yang berada di luar negeri tidak bisa dilaksanakan karena negara-negara tersebut mengalami kondisi lockdown;
- b. Pendapatan bidang komersil mengalami penurunan sebesar 36,3% dari RKAP tahun 2020 disebabkan beberapa hal yaitu:
 - i. Wilayah pekerjaan telah menerapkan karantina lokal yang menyebabkan pembatasan pekerjaan dan personil dari luar kota/ pulau;
 - ii. Beberapa tender mengalami keterlambatan dari jadwal awal karena proses adaptasi klien dalam penerapan system penawaran secara *online* dan *video conference*.

27. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi Direksi untuk terbit pada tanggal 15 Februari 2021.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

26. EFFECT OF EMERGENCY CONDITIONS DUE TO CORONA VIRUS (continued)

Significant impact on the Company's operating performance, the Company revised the Work Plan and Budget as follows:

- a. Revenue from Classification segment has decreased for 13.3% which made by process of ship acceptance located overseas can't be implemented because of those countries experiencing a lockdown conditions;
- b. Revenue from Commercial segment has decreased for 36.3% from RKAP for the year 2020 caused by several points are:
 - i. Job area has apply local quarantine which already made job restrictions and personnel from out of the city or island;
 - ii. Some tender has delayed from the beginning schedule since client adaptations process in apply online bidding system and video conference.

27. RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS

Management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the financial statements that are authorized by Directors for issuance on 15 February 2021.

2020
LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

Driving Performance Amidst Challenges

Mendorong Kinerja di Tengah Tantangan



PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero)

Jl. Yos Sudarso 38-39-40 Tanjung Priok, Jakarta - 14320, Indonesia
Telp. (62-21) 4301017, 4301703, 430993 • Fax. (62-21) 43936175
email : ho@bki.co.id

www.bki.co.id